



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Peta Jabatan Pada Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1573);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Untuk melaksanakan penataan sistem manajemen kepegawaian yang menjamin efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dalam setiap satuan organisasi pada Kejaksaan Republik Indonesia maka ditetapkan Peta Jabatan Pada Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Peta Jabatan Pada Kejaksaan Republik Indonesia terdiri atas:
- a. Peta Jabatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
 - b. Peta Jabatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
 - c. Peta Jabatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
 - d. Peta Jabatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
 - e. Peta Jabatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - f. Peta Jabatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;
 - g. Peta Jabatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
 - h. Peta Jabatan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - i. Peta Jabatan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
 - j. Peta Jabatan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
 - k. Peta Jabatan pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
 - l. Peta Jabatan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
 - m. Peta Jabatan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
 - n. Peta Jabatan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
 - o. Peta Jabatan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
 - p. Peta Jabatan pada Kejaksaan Tinggi Maluku;
 - q. Peta Jabatan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
 - r. Peta Jabatan pada Kejaksaan Tinggi Jambi;
 - s. Peta Jabatan pada Kejaksaan Tinggi Banten; dan
 - t. Peta Jabatan pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Jaksa Agung Nomor 243 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan Pada Kejaksaan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

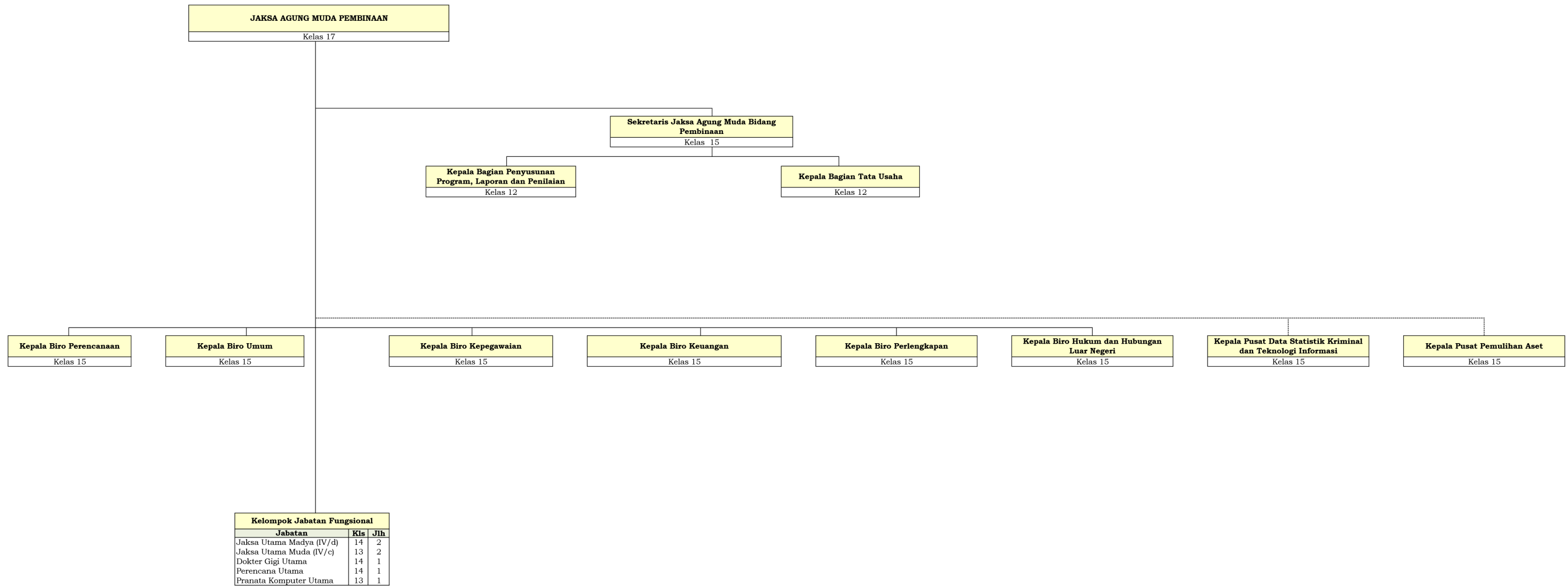
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2022
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

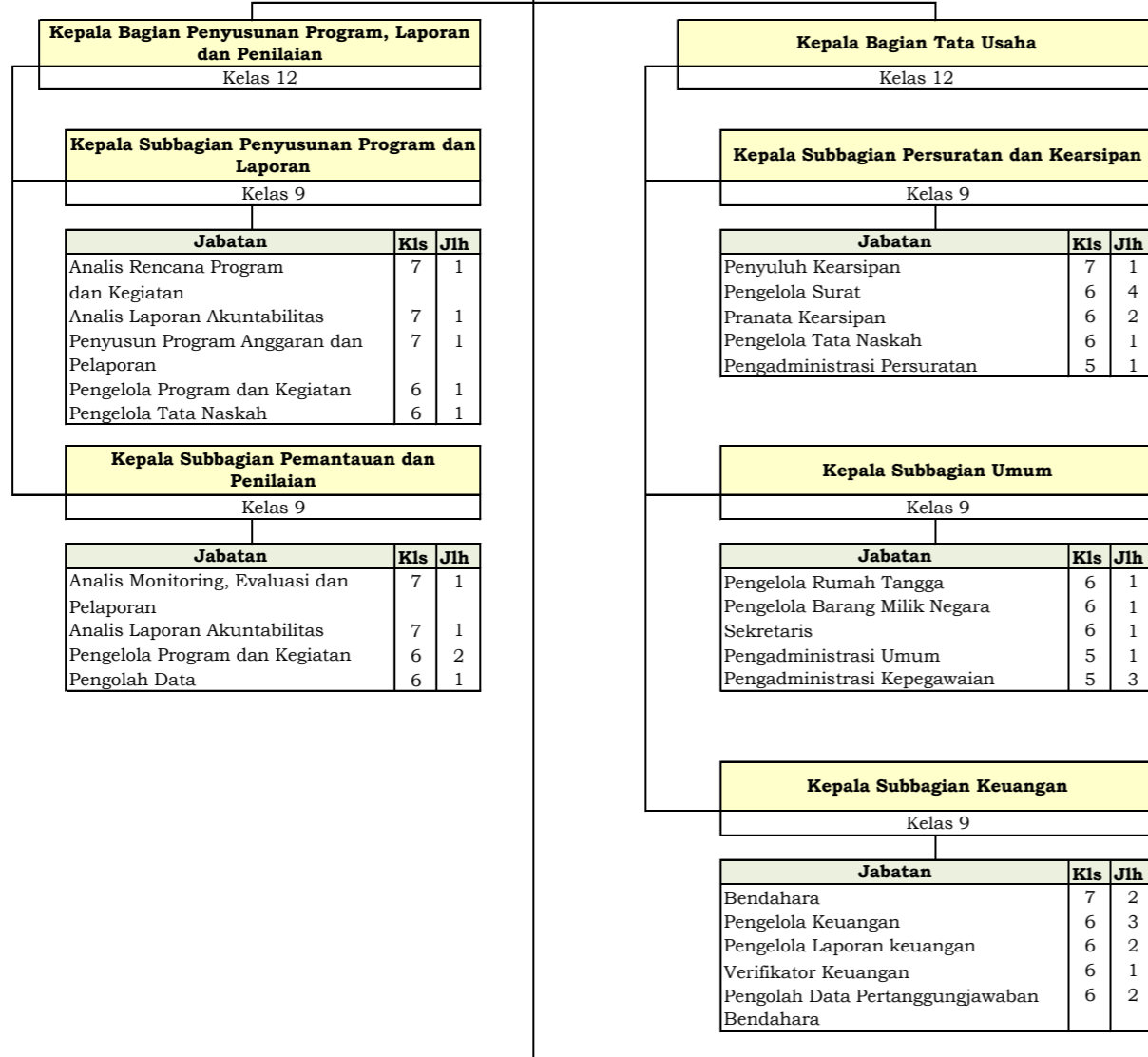
A. PETA JABATAN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN



A1. PETA JABATAN PADA SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
Kelas 15

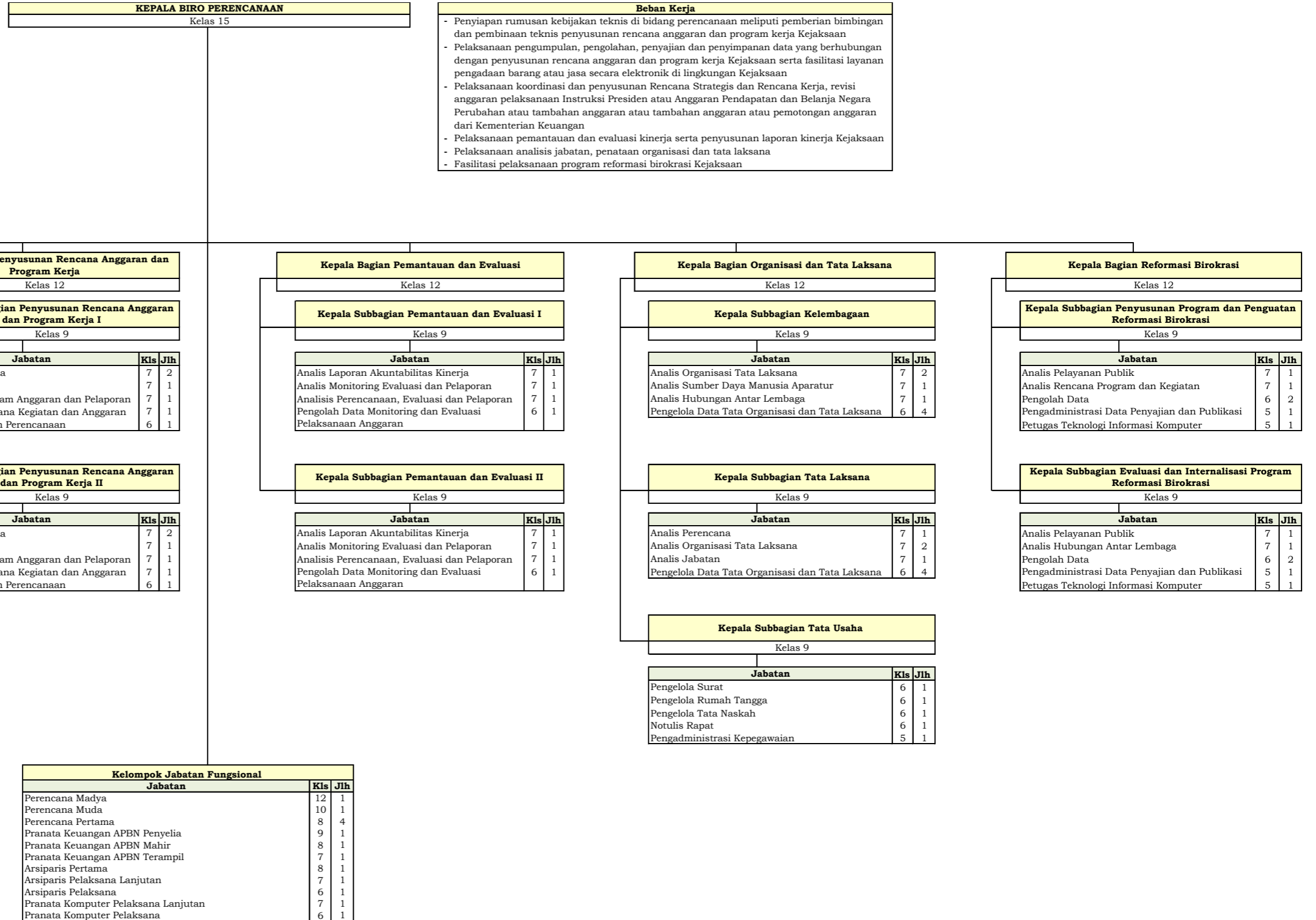
Beban Kerja
- Penyiapan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyiapan dan penyusunan laporan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
- Pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data kegiatan di bidang pembinaan
- Pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan
- Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung Muda Pembinaan



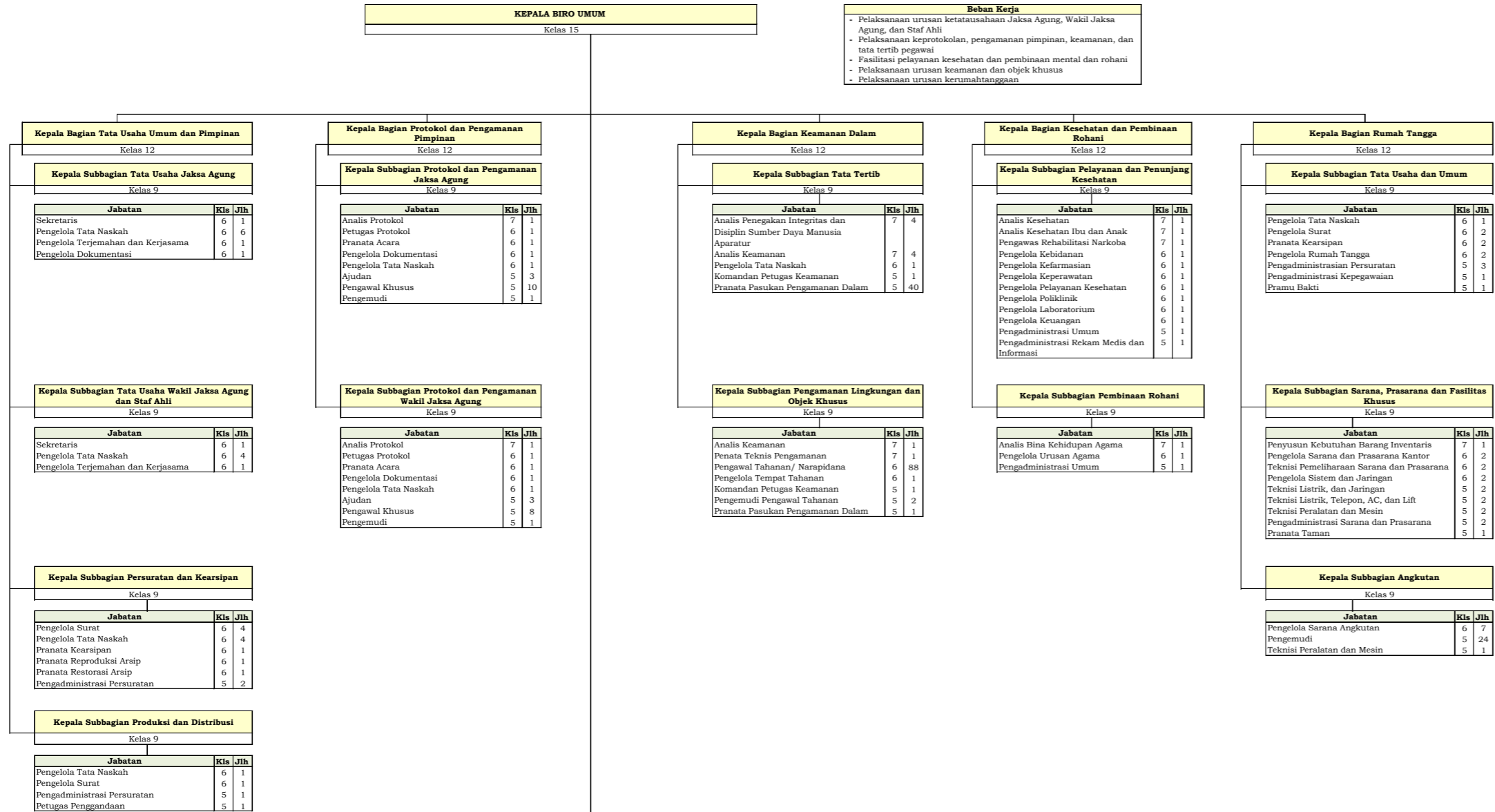
Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	2
Eselon IV	5
Fungsional	4
Pelaksana	38
Total	50

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	1
Analisis Kepegawaian Pelaksana	6	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1
Arsiparis Pelaksana	6	1

A2. PETA JABATAN PADA BIRO PERENCANAAN



A3. PETA JABATAN PADA BIRO UMUM



Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	5
Eselon IV	13
Fungsional	46
Pelaksana	288
Total	353

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Dokter Madya	12	1
Dokter Muda	10	1
Dokter Pertama	9	1
Asisten Apoteker Penyelia	8	1
Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1
Asisten Apoteker Pemula	6	1
Pranata Kesehatan Madya	8	1
Pranata Kesehatan Muda	7	1
Pranata Kesehatan Pertama	6	1
Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	1
Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula	5	1
Apoteker Madya	11	1
Apoteker Muda	9	1
Apoteker Pertama	8	1
Perawat Ahli Madya	11	1
Perawat Ahli Muda	9	1
Perawat Ahli Pertama	8	1
Perawat Penyelia	8	1
Perawat Mahir	7	1
Perawat Terampil	6	1
Perawat Gigi Pelaksana Penyelia	8	1
Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1
Perawat Gigi Pelaksana	6	1
Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	1
Bidan Madya	11	1
Bidan Muda	9	1
Bidan Pertama	8	1
Bidan Penyelia	8	1
Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1
Bidan Pelaksana	6	1
Dokter Gigi Ahli Madya	12	1
Dokter Ahli Pertama	9	1
Apoteker Ahli Pertama	8	1
Pranata Keuangan APBN Penyelia	8	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	7	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	6	1
Arsiparis Madya	11	1
Arsiparis Muda	9	1
Arsiparis Pertama	8	1
Arsiparis Penyelia	8	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1

A4. PETA JABATAN PADA BIRO KEPEGAWAIAN

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Kelas 15

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kepegawaian meliputi pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis - Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian - Penyiapan dan penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis jabatan dan pola karier pegawai - Penyiapan bahan pengembangan pegawai dan fasilitasi administrasi jabatan fungsional - Pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai - Pelaksanaan urusan kepegawaian, mutasi kepegawaian, dan angka kredit jabatan fungsional - Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai

Kepala Bagian Umum		
Kelas 12		
Kepala Subbagian Tata Usaha		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Pengelola Surat	6	1
Pengelola Rumah Tangga	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Notulis Rapat	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Kepala Subbagian Data Kepegawaian		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Jabatan	7	1
Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	7	1
Pengelola Kepegawaian	6	1
Pengelola Database	6	1
Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	4
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Kepala Subbagian Peraturan Kepegawaian		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Kinerja	7	5
Analisis Penganugerahan	7	1
Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Bagian Pengembangan Pegawai		
Kelas 12		
Kepala Subbagian Pengadaan Pegawai		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Perencanaan Sumber Daya Aparatur	7	1
Analisis Jabatan	7	1
Pengelola Data Penyelenggaraan Tes	6	2
Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6	2
Pengelola Kepegawaian	6	2
Pengadministrasi Kepegawaian	5	2
Kepala Subbagian Jenjang Karir		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pengembangan Karir	7	2
Analisis Program Diklat	7	1
Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7	2
Analisis Pengembangan Kompetensi	7	2
Pengelola Pengembangan Karir	6	2
Pranata Penilaian Kompetensi	6	1
Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	1
Pengolah Data Seleksi dan Penempatan Beasiswa	6	1
Pengelola Kepegawaian	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Kepala Subbagian Kekaryaan, Perizinan dan Pengembangan Jabatan Fungsional		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Jabatan	7	1
Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7	1
Analisis Kerjasama Lintas Sektor	7	1
Analisis Pengembangan Karir	7	1
Pengelola Kepegawaian	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1

Kepala Bagian Kepegawaian dan Mutasi		
Kelas 12		
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Mutasi I		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Kompetensi	7	2
Analisis Jabatan	7	2
Penyusun Rencana Promosi	7	2
Penyusun Rencana Mutasi	7	2
Perancang Promosi	7	2
Pranata Promosi	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Mutasi II		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Kompetensi	7	2
Analisis Jabatan	7	2
Penyusun Rencana Promosi	7	2
Penyusun Rencana Mutasi	7	2
Perancang Promosi	7	2
Pranata Promosi	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Mutasi III		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Kompetensi	7	2
Analisis Jabatan	7	2
Penyusun Rencana Promosi	7	2
Penyusun Rencana Mutasi	7	2
Perancang Promosi	7	2
Pranata Promosi	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Kepala Subbagian Angka Kredit Jabatan Fungsional		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7	1
Analisis Jabatan	7	1
Penyusun Rencana Promosi	7	1
Pranata Penilaian Kompetensi	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1

Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun		
Kelas 12		
Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun I		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pembayaran Program Pensiun	7	1
Analisis SDM Aparatur	7	1
Penyusun Bahan Pembinaan Minat dan Bakat	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengelola Data Kepegawaian	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun II		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pembayaran Program Pensiun	7	1
Analisis SDM Aparatur	7	1
Penyusun Bahan Pembinaan Minat dan Bakat	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengelola Data Kepegawaian	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun III		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pembayaran Program Pensiun	7	1
Analisis SDM Aparatur	7	1
Penyusun Bahan Pembinaan Minat dan Bakat	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengelola Data Kepegawaian	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1

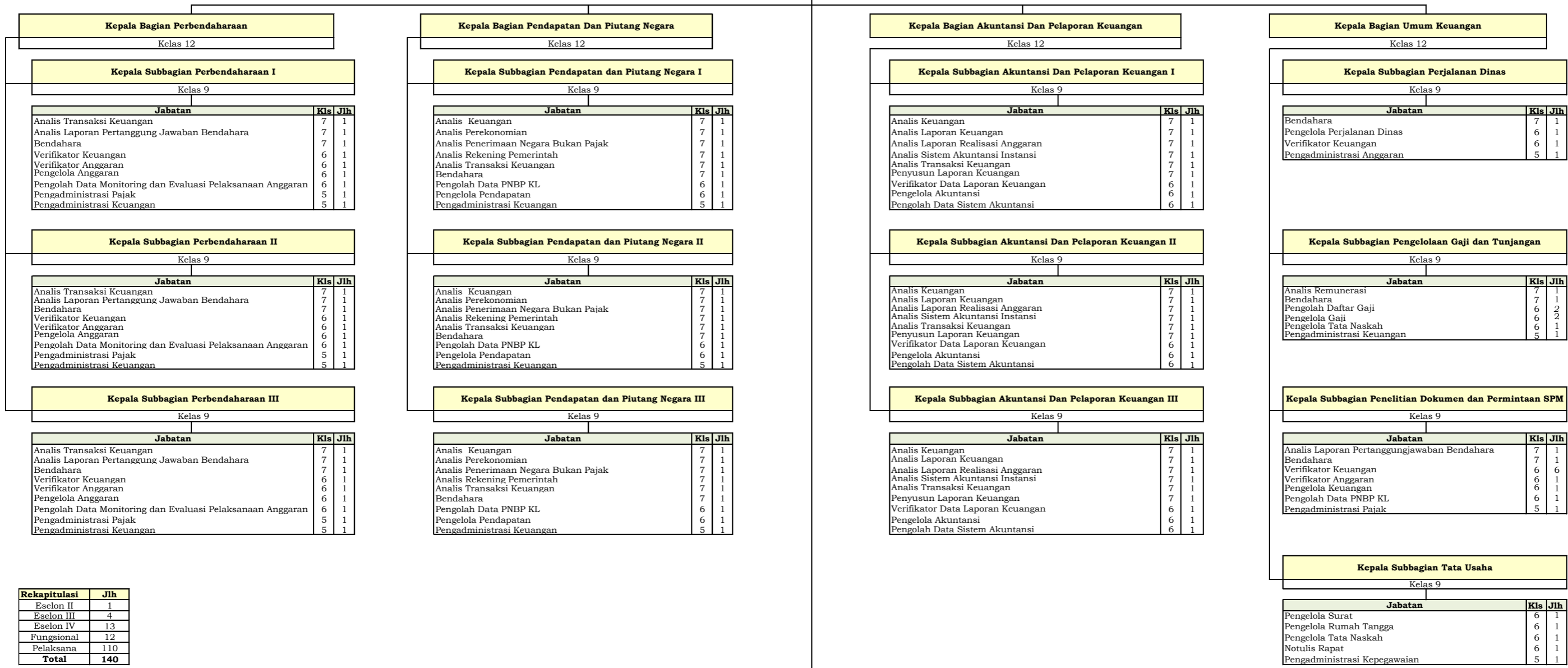
Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	13
Fungsional	33
Pelaksana	112
Total	163

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Kepegawaian Madya	11	2
Analisis Kepegawaian Muda	10	2
Analisis Kepegawaian Pertama	9	2
Analisis Kepegawaian Penyelia	8	2
Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	2
Analisis Kepegawaian Pelaksana	6	2
Pranata Keuangan APBN Penyelia	8	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	7	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	6	1
Arsiparis Pertama	8	2
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	2
Arsiparis Pelaksana	6	2
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	2
Assessor Utama	10	2
Assessor Madya	9	2
Assessor Muda	8	2
Assessor Pertama	7	2

A5. PETA JABATAN PADA BIRO KEUANGAN

KEPALA BIRO KEUANGAN
Kelas 15

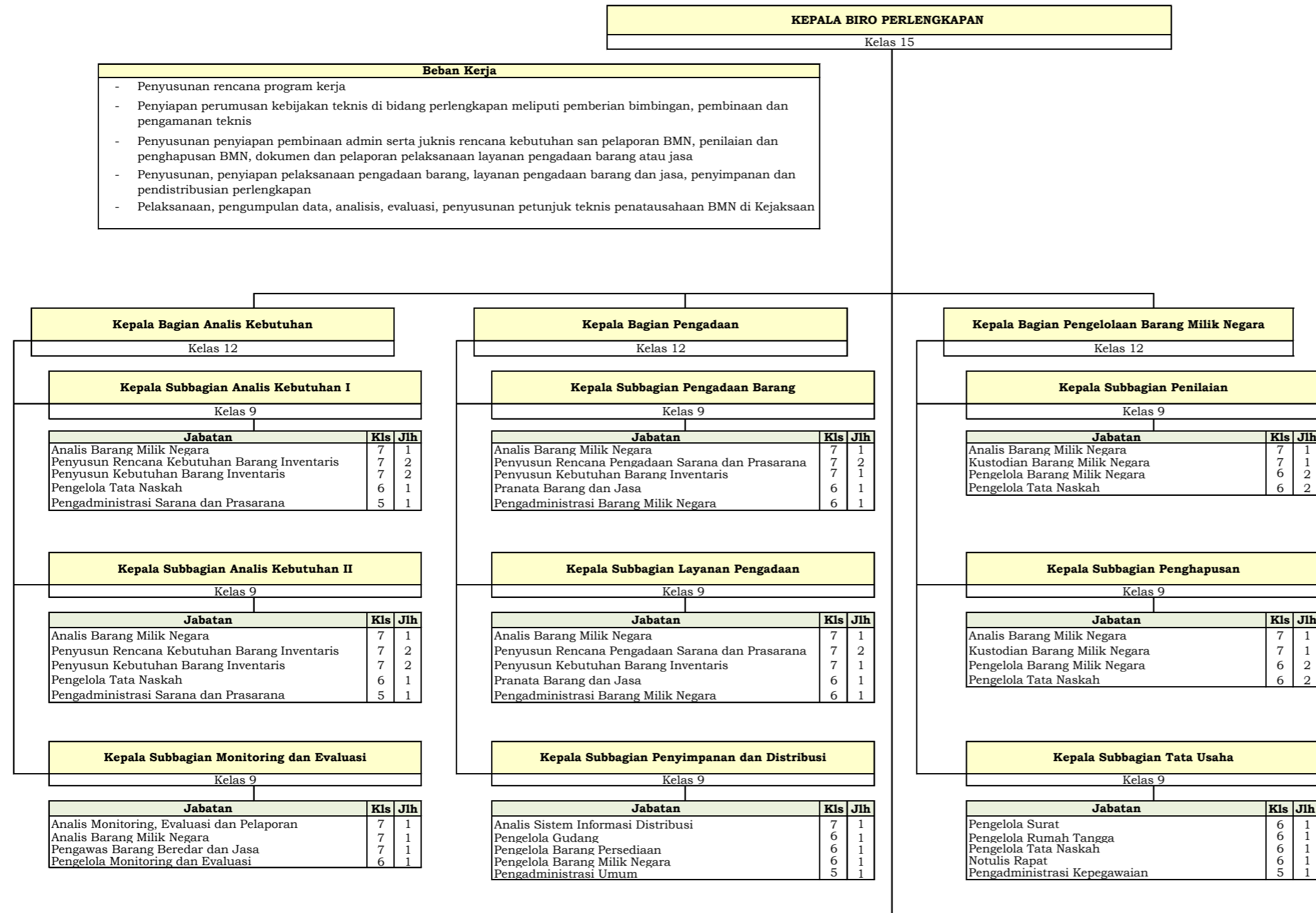
- Beban Kerja**
- Penyusunan pedoman teknis penggunaan dan pertanggungjawaban DIPA
 - Penyusunan pedoman teknis penyusunan dan pelaporan keuangan dengan sistem akuntansi instansi
 - Penyusunan pedoman teknis dan kebijakan pengelolaan pendapatan dan piutang negara
 - Penyusunan pedoman teknis terutama tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian negara
 - Koordinasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kejaksaan
 - Koordinasi bidang keuangan dengan instansi terkait
 - Pembinaan teknis jabatan fungsional bendaharawan dan penerbitan surat keputusan tentang penetapan pejabat perbendaharaan, pejabat pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan
 - Pengelolaan administrasi gaji dan tunjangan serta administrasi biaya perjalanan dinas
 - Pemantauan dan evaluasi bidang keuangan
 - Pelaksana akuntansi dan pelaporan keuangan
 - Pelaksanaan pengelolaan rekening dinas
 - Melakukan tindak lanjut atas temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kejaksaan
 - Pembinaan bimbingan teknis, kebijakan di bidang keuangan
 - Penyelenggaraan koordinasi pertanggungjawaban atas pengelolaan pendapatan dan piutang negara di lingkungan Kejaksaan
 - Melaksanakan penelitian, pemantauan, dan penagihan ganti kerugian negara
 - Penyiapan bahan pertimbangan atas tuntutan ganti kerugian negara
 - Penyiapan bahan pertimbangan penilaian terhadap usulan penghapusan piutang negara



Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	13
Fungsional	12
Pelaksana	110
Total	140

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	1
Arsiparis Pertama	8	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Penilai Pemerintah Muda	9	1
Penilai Pemerintah Pertama	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1

A6. PETA JABATAN PADA BIRO PERLENGKAPAN



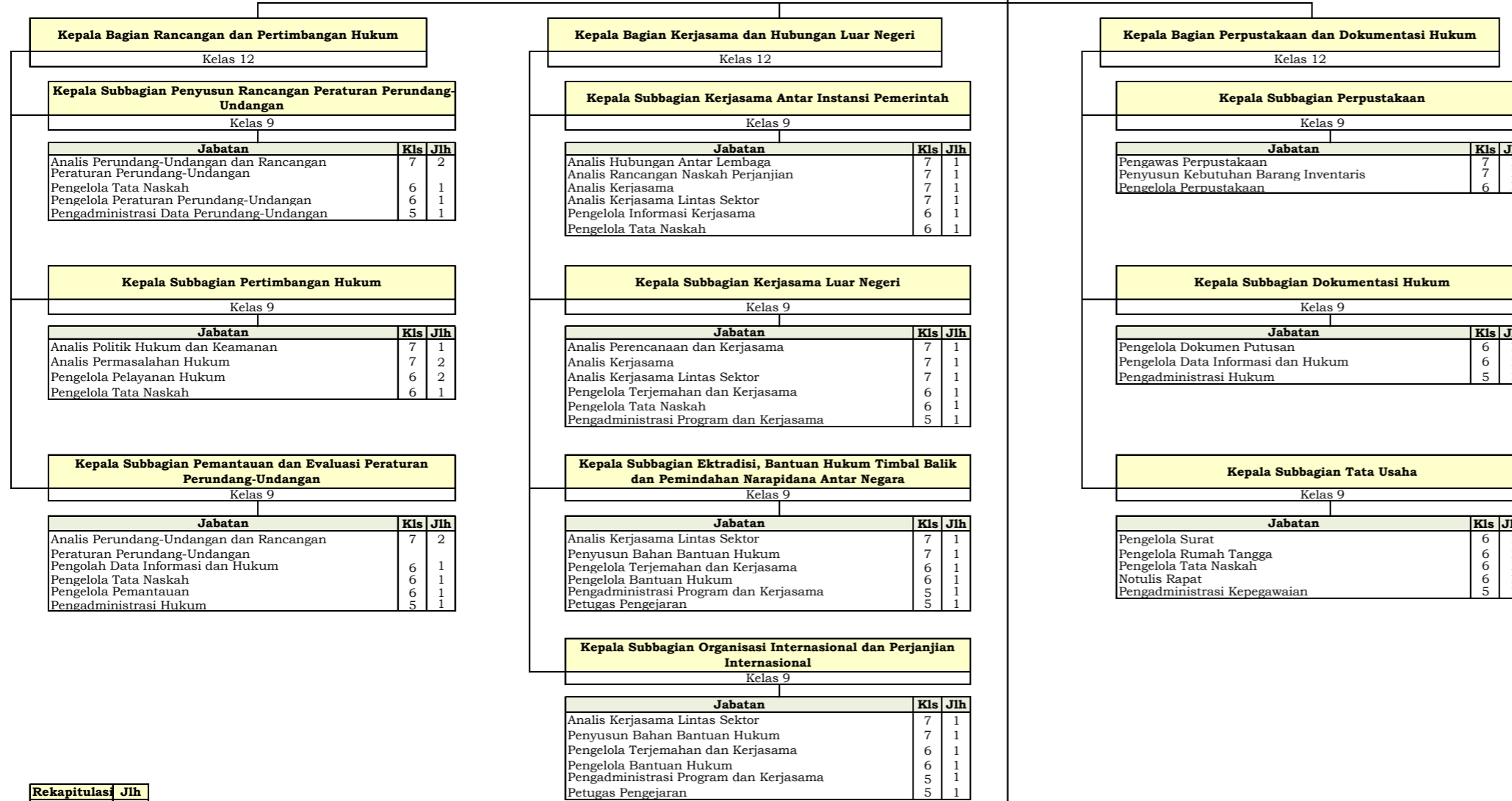
Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	3
Eselon IV	9
Fungsional	11
Pelaksana	52
Total	76

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	12	1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10	1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	1
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	1
Arsiparis Pertama	8	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1

A7. PETA JABATAN PADA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI
Kelas 15

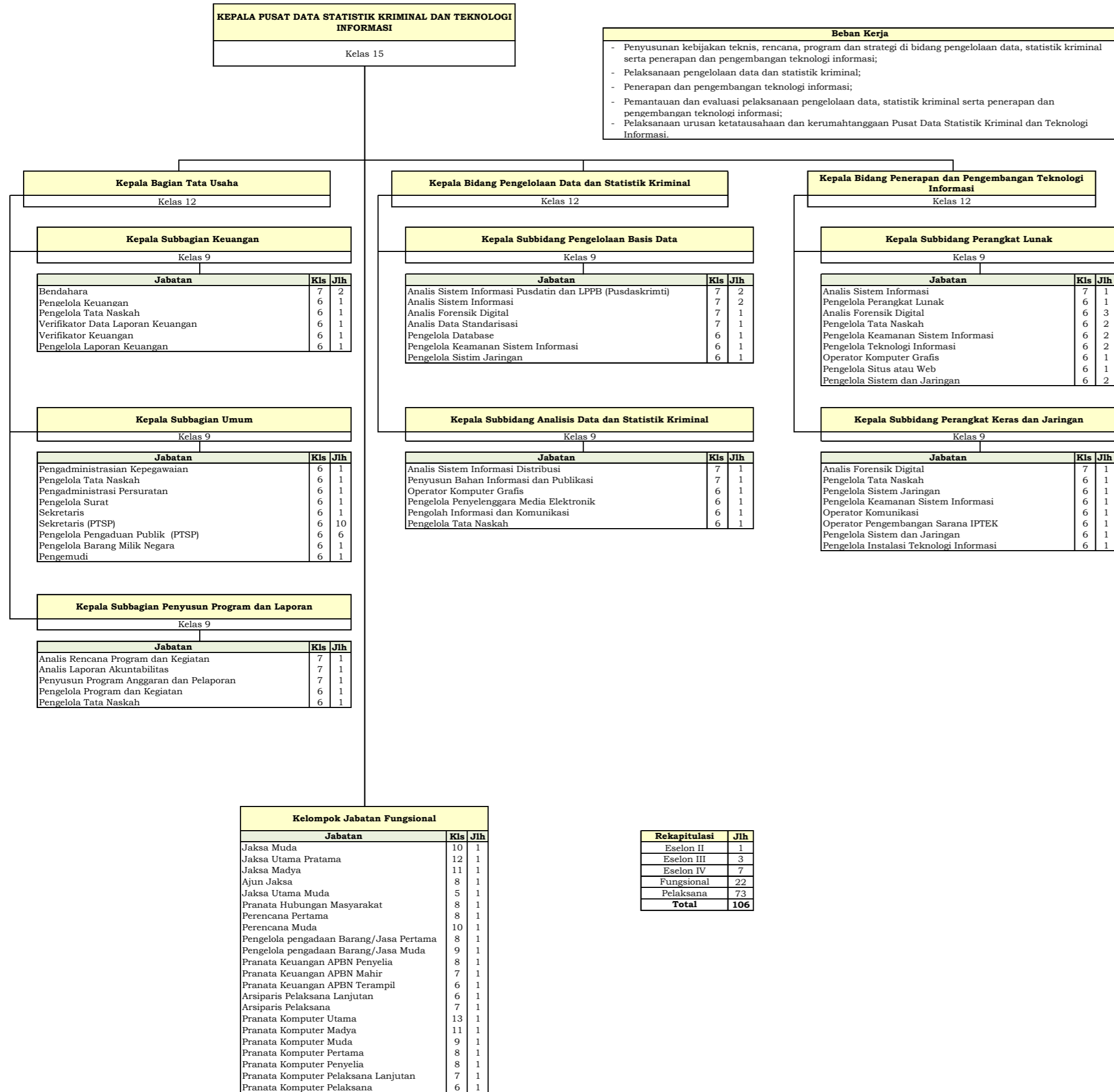
Beban Kerja	
-	Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perancangan hukum dan perundang-undangan berupa pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengamanan teknis
-	Pelaksanaan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, penyusunan, pemantauan dan evaluasi perundang-undangan
-	Penyiapan bahan pertimbangan hukum kepada satker di lingkungan Kejaksaan dan kementerian
-	Pelayanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum
-	Penyusunan bahan pembentukan, pelaksanaan dan pemantauan, inventarisasi perjanjian internasional serta hubungan dengan organisasi internasional dan badan internasional
-	Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah
-	Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi hukum
-	Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya



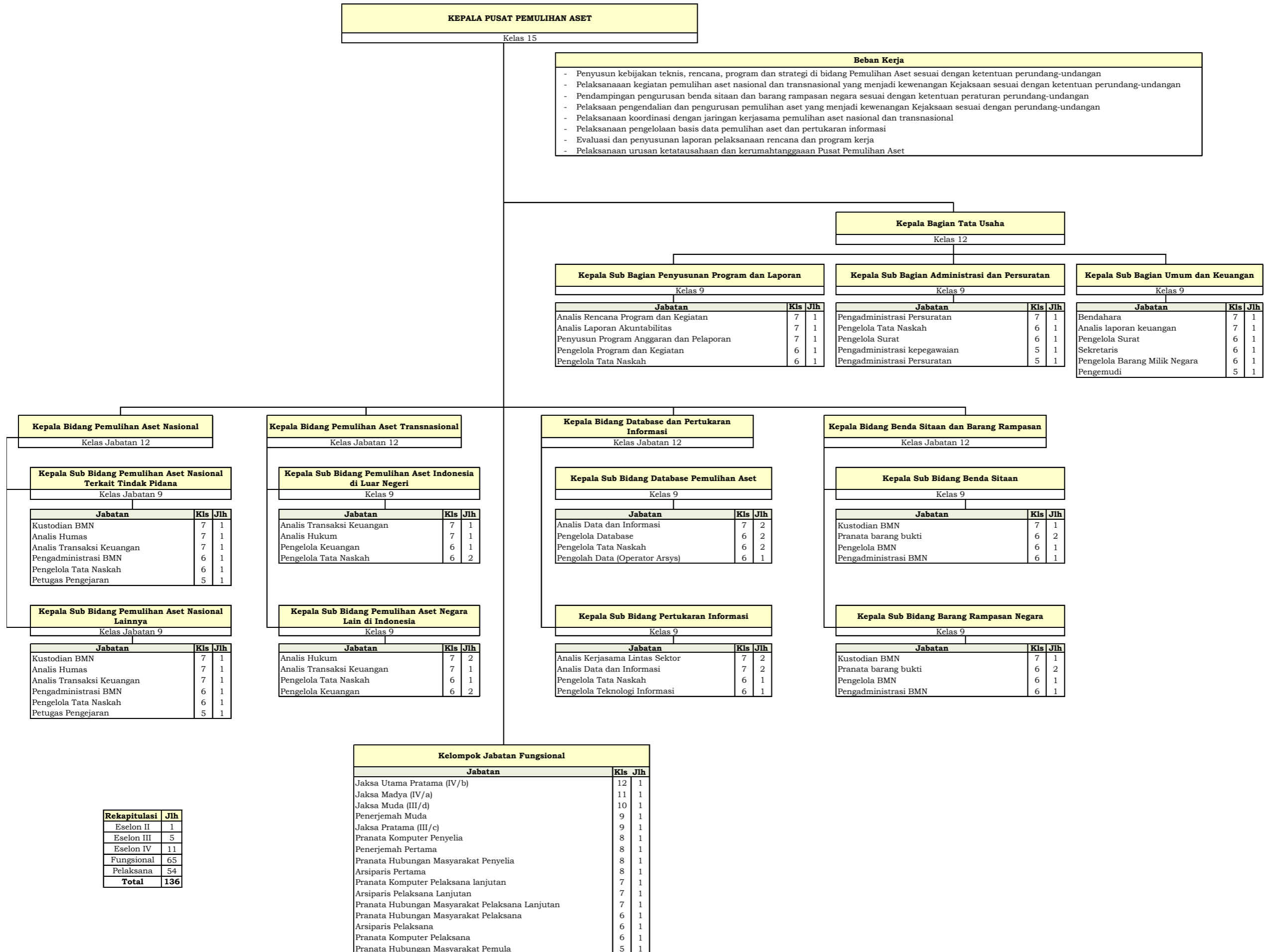
Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	3
Eselon IV	10
Fungsional	35
Pelaksana	54
Total	103

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	11	2
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	9	2
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	8	2
Pranata Keuangan APBN Penyelia	8	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	7	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	6	1
Arsiparis Pertama	8	2
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	2
Arsiparis Pelaksana	6	2
Jaksa Utama Madya (IV/d)	14	2
Jaksa Utama Muda (IV/c)	13	2
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	2
Jaksa Madya (IV/a)	11	2
Jaksa Muda (III/d)	10	2
Jaksa Pratama (III/c)	9	2
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	2
Penerjemah Utama	13	1
Penerjemah Madya	11	1
Penerjemah Muda	9	1
Penerjemah Pertama	8	1

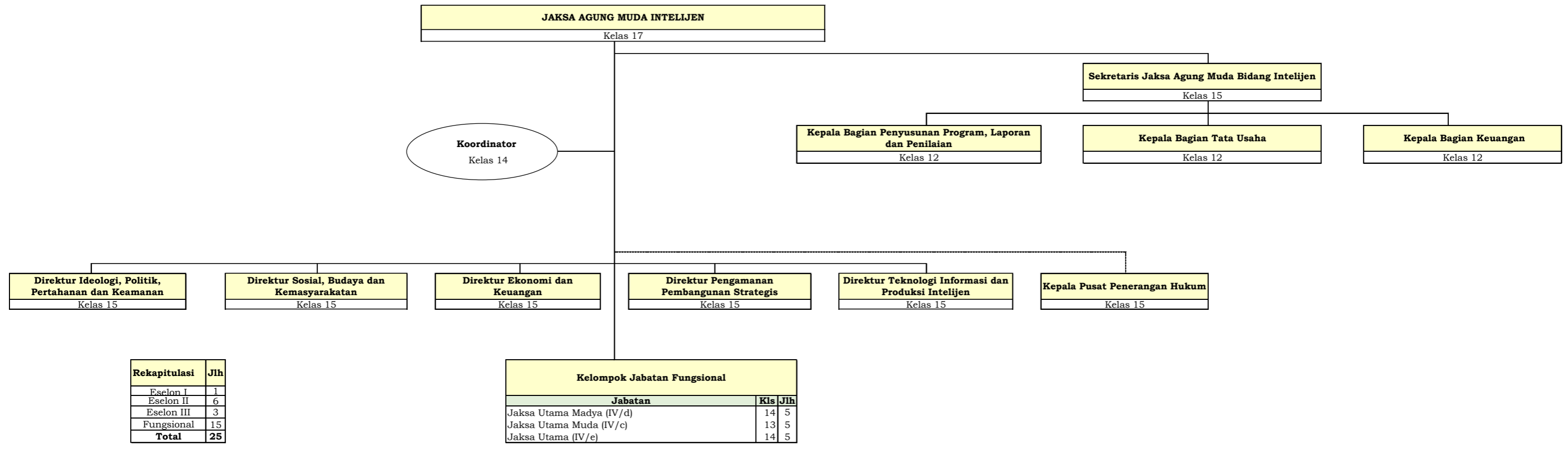
A8. PETA JABATAN PADA PUSAT DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI



A9. PETA JABATAN PADA PUSAT PEMULIHAN ASET



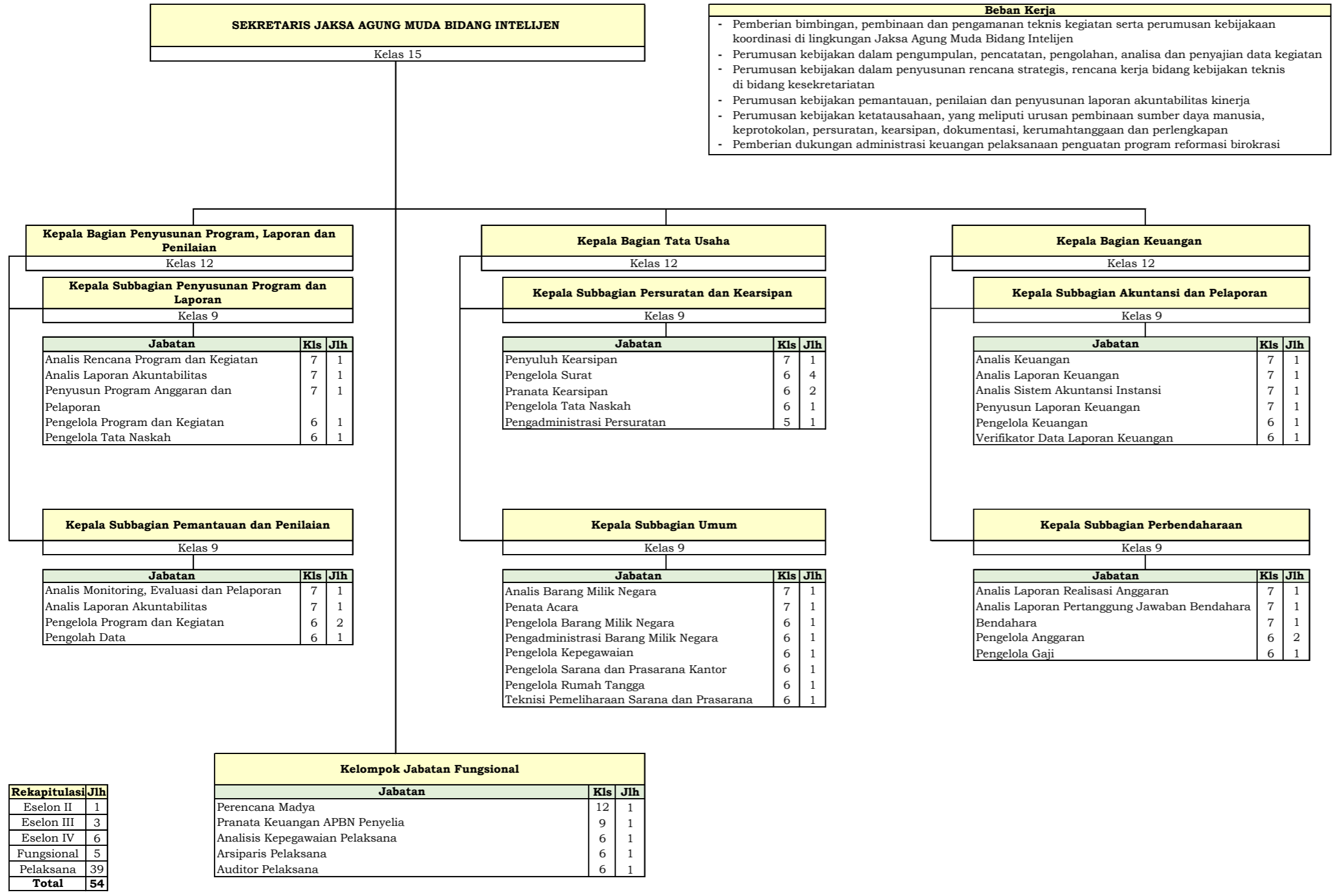
B. PETA JABATAN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN



Rekapitulasi	Jlh
Eselon I	1
Eselon II	6
Eselon III	3
Fungsional	15
Total	25

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Madya (IV/d)	14	5
Jaksa Utama Muda (IV/c)	13	5
Jaksa Utama (IV/e)	14	5

B1. PETA JABATAN PADA SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN



B2. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

DIREKTUR IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Kelas 15

Kepala Subbagian Tata Usaha
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Pengelola Surat	6	1
Pengelola Rumah Tangga	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Notulis Rapat	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Pengemudi	5	1
Teknisi Listrik dan Jaringan	5	1

Beban Kerja
- Pembinaan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan
- Perumusan kebijakan teknis dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan
- Pengarahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan
- Pengarahan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan
- Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan
- Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan
- Pembinaan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan
- Pengendalian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan
- Pengarahan penyusunan perkiraan keadaan intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan
- Pengarahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan
- Pembinaan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
- Pembinaan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Jaksa Agung Muda Intelijen

Kepala Subdirektorat Ideologi
Kelas 12

Kepala Seksi Pengamanan Pancasila, Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Ideologi	7	1
Analisis Wawasan Kebangsaan	7	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Seksi Gerakan Separatis
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Ideologi	7	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Subdirektorat Politik
Kelas 12

Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Politik Hukum dan Keamanan	7	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Seksi Partai Politik, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Politik Hukum dan Keamanan	7	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Subdirektorat Pertahanan dan Keamanan
Kelas 12

Kepala Seksi Gerakan Teroris dan Radikal
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pemetaan Jaringan Kelompok Radikal Teroris	7	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1
Pengelola Data Sasaran Deradikalisasi	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Seksi Pengawasan Wilayah Teritorial dan Kejahatan Siber
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pertahanan dan Keamanan	7	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Subdirektorat Cegah Tangkal, Pengawasan Orang Asing, Pengamanan Sumber Daya Organisasi Kejaksaan, dan Pengamanan Penanganan Perkara
Kelas 12

Kepala Seksi Cegah Tangkal dan Pengawasan Orang Asing
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	7	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1
Pengelola Surat	6	1

Kepala Seksi Pengamanan Sumber Daya Organisasi Kejaksaan dan Pengamanan Penanganan Perkara
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1
Pengelola Surat	6	1

Kelompok Jabatan Fungsional
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Madya	11	1
Jaksa Utama Pratama	12	1
Agen Pelaksana	6	4

Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	8
Fungsional	6
Pelaksana	28
Total	47

B3. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN

DIREKTUR SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN
Kelas 15

Kepala Subbagian Tata Usaha
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Pengelola Surat	6	1
Pengelola Rumah Tangga	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Notulis Rapat	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Pengemudi	5	1
Teknisi Listrik dan Jaringan	5	1

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan - Perumusan kebijakan teknis dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan - Pengarahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan - Pengarahan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan - Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan - Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan - Pembinaan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan bidang ideologi, sosial, budaya dan kemasyarakatan - Pengendalian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan - Pengarahan penyusunan perkiraan keadaan intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan - Pengarahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan - Pembinaan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat - Pembinaan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Jaksa Agung Muda Intelijen

Kepala Subdirektorat Peredaran Barang Cetak dan Media Komunikasi
Kelas 12

Kepala Seksi Pengawasan Peredaran Barang Cetak
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Publikasi	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Seksi Pengawasan Media Komunikasi
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Publikasi	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Subdirektorat Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Keagamaan Serta Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama
Kelas 12

Kepala Seksi Pengawasan Aliran Kepercayaan Keagamaan dalam Masyarakat dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Bina Kehidupan Agama	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Seksi Pengawasan Aliran Kepercayaan dalam Masyarakat
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Bina Kehidupan Agama	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Subdirektorat Budaya dan Kemasyarakatan
Kelas 12

Kepala Seksi Ketahanan Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	1
Analisis Ketahanan Budaya	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Seksi Pengawasan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Hubungan Antar Lembaga	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Analisis Organisasi Masyarakat	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Subdirektorat Sosial, Ketertiban dan Ketentraman Umum, Pembinaan Masyarakat Taat Hukum
Kelas 12

Kepala Seksi Pencegahan Konflik Sosial dan Pembinaan Masyarakat Taat Hukum
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Humas	7	1
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

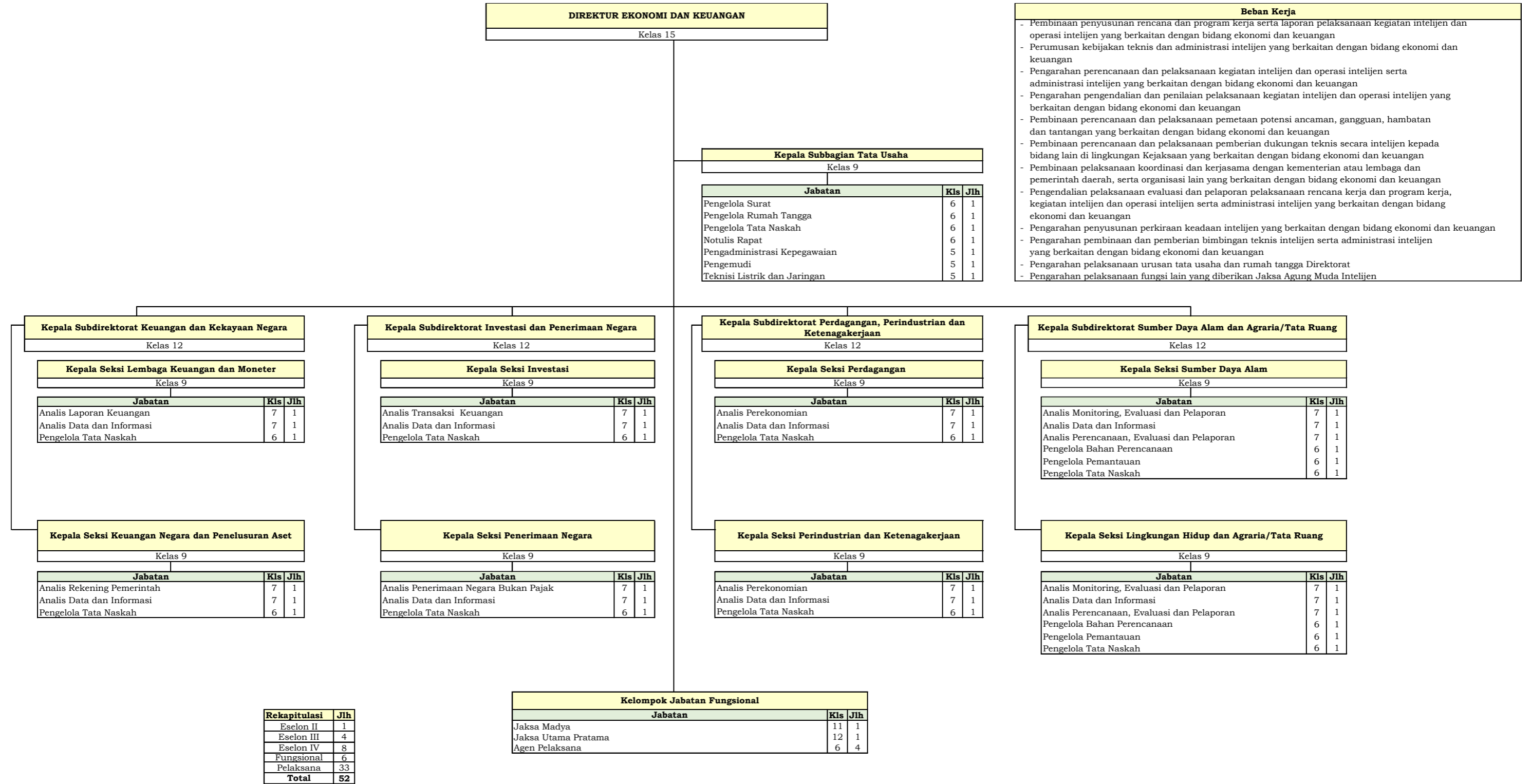
Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Humas	7	1
Analisis Penguatan dan Layanan Informasi	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	8
Fungsional	6
Pelaksana	31
Total	50

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama	12	1
Jaksa Madya	11	1
Agen Pelaksana	6	4

B4. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT EKONOMI DAN KEUANGAN



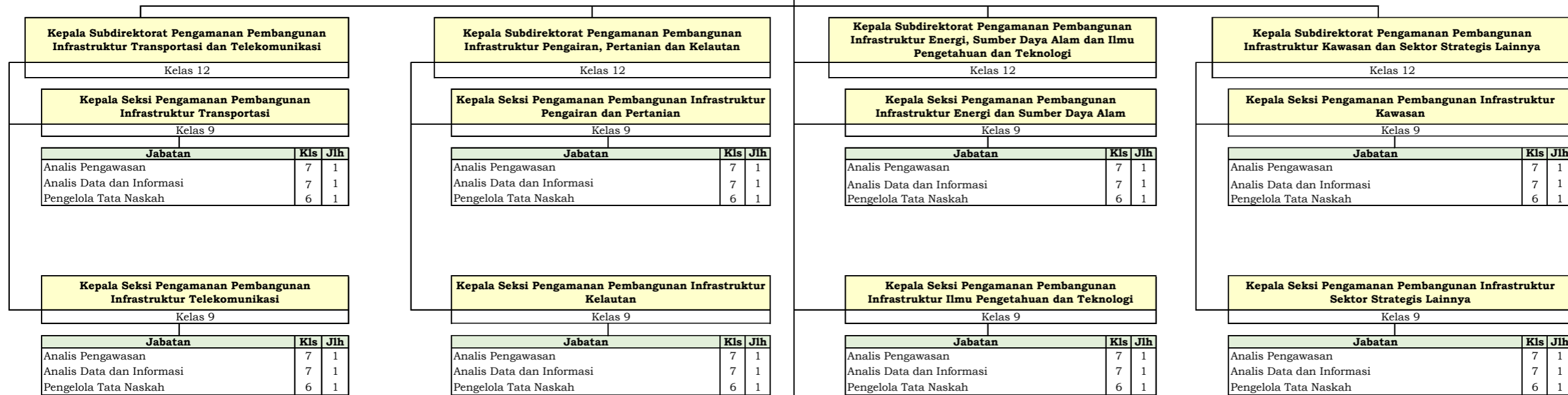
B5. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS

DIREKTUR PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS
Kelas 15

Kepala Subbagian Tata Usaha
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Pengelola Surat	6	1
Pengelola Rumah Tangga	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Notulis Rapat	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Pengemudi	5	1
Teknisi Listrik dan Jaringan	5	1

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis - Perumusan kebijakan teknis dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis - Pengarahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis - Pengarahan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis - Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis - Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis - Pembinaan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis - Pengendalian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis - Pengarahan penyusunan perkiraan keadaan intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis - Pengarahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis - Pembinaan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat - Pembinaan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Jaksa Agung Muda Intelijen



Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	8
Fungsional	6
Pelaksana	26
Total	45

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Madya	11	1
Jaksa Utama Pratama	12	1
Agen Pelaksana	6	4

B6. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT TEKNOLOGI DAN PRODUKSI INTELIJEN

DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PRODUKSI INTELIJEN
Kelas 15

Kepala Subbagian Tata Usaha
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Pengelola Surat	6	1
Pengelola Rumah Tangga	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Notulis Rapat	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Pengemudi	5	1
Teknisi Listrik dan Jaringan	5	1

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan produksi intelijen - Perumusan kebijakan teknis dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan produksi intelijen, budaya dan kemasyarakatan - Pengarahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan produksi intelijen - Pengarahan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan produksi intelijen - Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan produksi intelijen - Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan produksi intelijen - Pembinaan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan produksi intelijen - Pengendalian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan produksi intelijen - Pengarahan penyusunan perkiraan keadaan intelijen yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan produksi intelijen - Pengarahan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan produksi intelijen - Pembinaan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat - Pembinaan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Jaksa Agung Muda Intelijen

Kepala Subdirektorat Produksi Intelijen
Kelas 12

Kepala Seksi Produksi Intelijen Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Ideologi	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Seksi Produksi Intelijen Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Perekonomian	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Subdirektorat Pemantauan
Kelas 12

Kepala Seksi Lawful Interception, Intelijen Sinyal dan Klandestin
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Sistem Informasi	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Seksi Intelijen Siber dan Digital Forensik
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Sistem Informasi	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Subdirektorat Pengamanan Informasi
Kelas 12

Kepala Seksi Transmisi Berita Sandi
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Sistem Informasi Distribusi	7	1
Pengelola Data Persandian	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Seksi Kontra Penginderaan, Kontra Intelijen, Audit dan Pengujian Sistem Keamanan Informasi
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Sistem Informasi Distribusi	7	1
Pengelola Data Persandian	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi
Kelas 12

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi dan Sumber Daya Manusia Lainnya
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Sumber Daya IPTEK	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

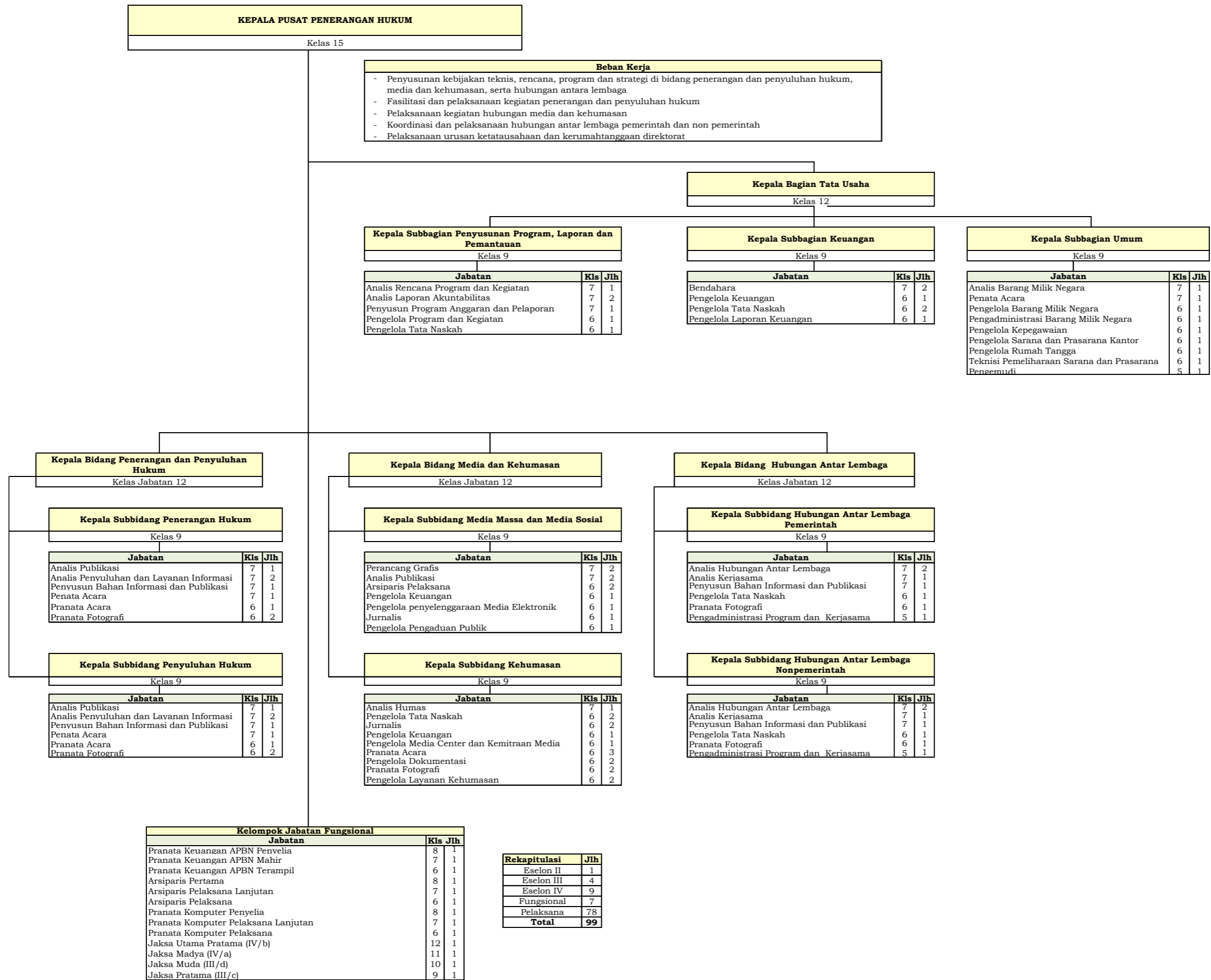
Kepala Seksi Teknologi, Prosedur dan Aplikasi
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Sistem Informasi Distribusi	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

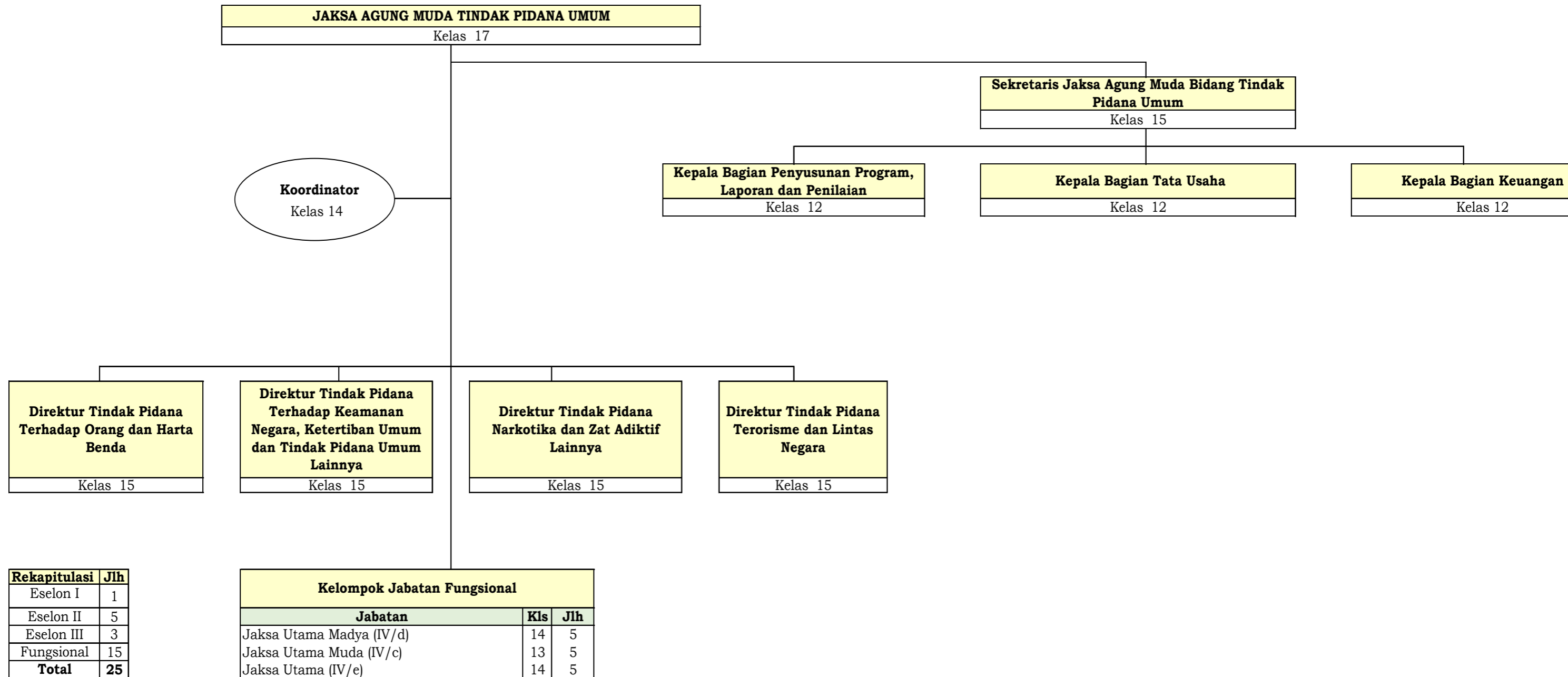
Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	8
Fungsional	13
Pelaksana	29
Total	55

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Madya	11	1
Jaksa Utama Pratama	12	1
Agen Pelaksana	6	4
Sandiman Madya	12	1
Sandiman Muda	10	1
Sandiman Penyelia	9	1
Sandiman Pertama	8	2
Sandiman Pelaksana Lanjutan	8	1
Sandiman Pelaksana	7	1

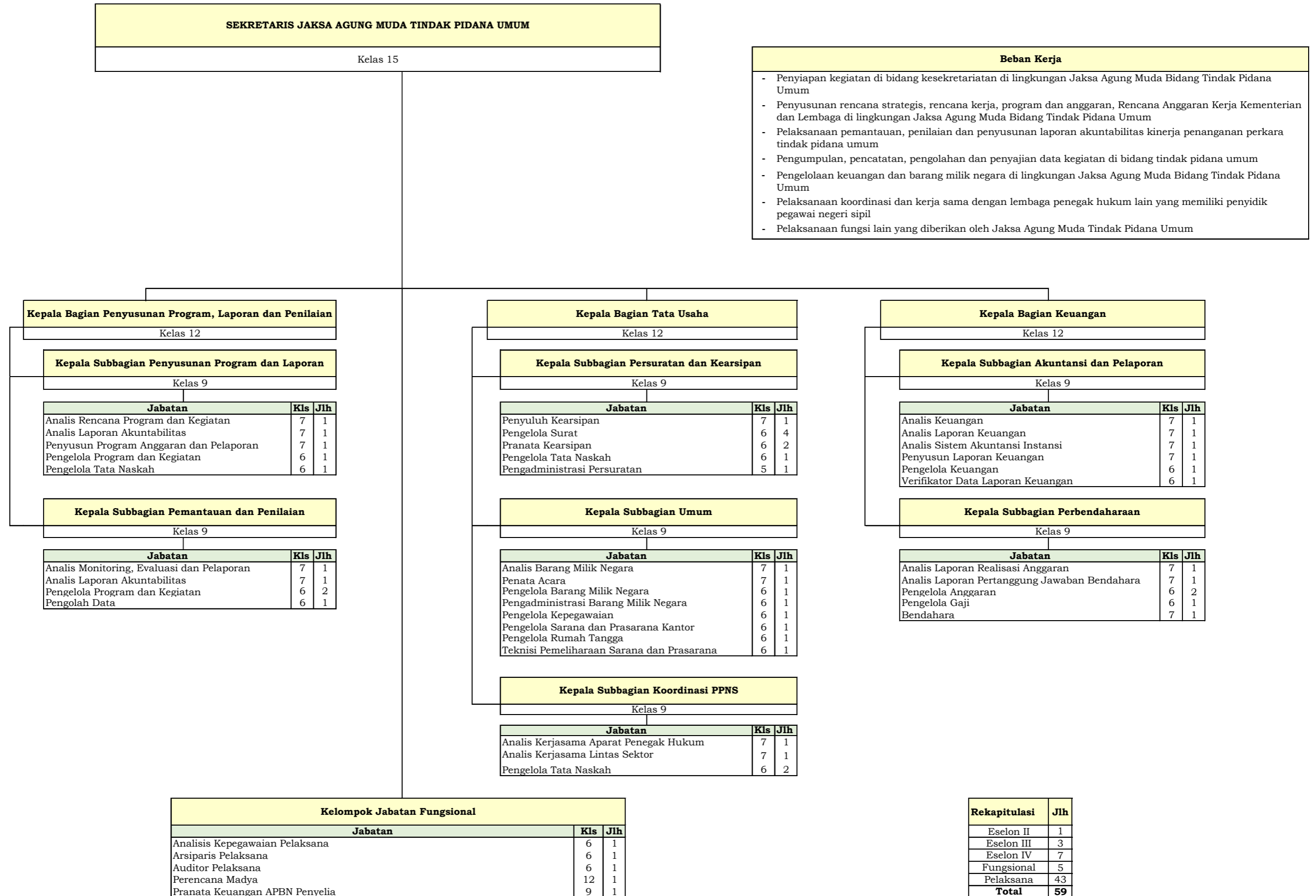
B7. PETA JABATAN PADA PUSAT PENERANGAN HUKUM



C. PETA JABATAN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM



C1. PETA JABATAN PADA SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM



C2. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG DAN HARTA BENDA

DIREKTUR TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG DAN HARTA BENDA
Kelas 15

Kepala Subbagian Tata Usaha
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Pengelola Surat	6	1
Pengelola Rumah Tangga	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Notulis Rapat	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Pengemudi	5	1
Teknisi Listrik dan Jaringan	5	1

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana dan program kerja penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda - Penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda meliputi prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi - Pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda - pelaksanaan pengendalian penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kejaksaan - Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain dalam penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda - Pengelolaan data dan laporan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda - Pemberian bimbingan teknis dalam penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan - Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Kepala Subdirektorat Prapenuntutan
Kelas 12

Kepala Seksi Wilayah I
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Wilayah II
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Subdirektorat Penuntutan
Kelas 12

Kepala Seksi Wilayah I
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Wilayah II
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi
Kelas 12

Kepala Seksi Wilayah I
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengolah Data Perkara dan Putusan	6	1
Pengelola Banding dan Gugatan	6	1
Pengelola Dokumen Putusan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

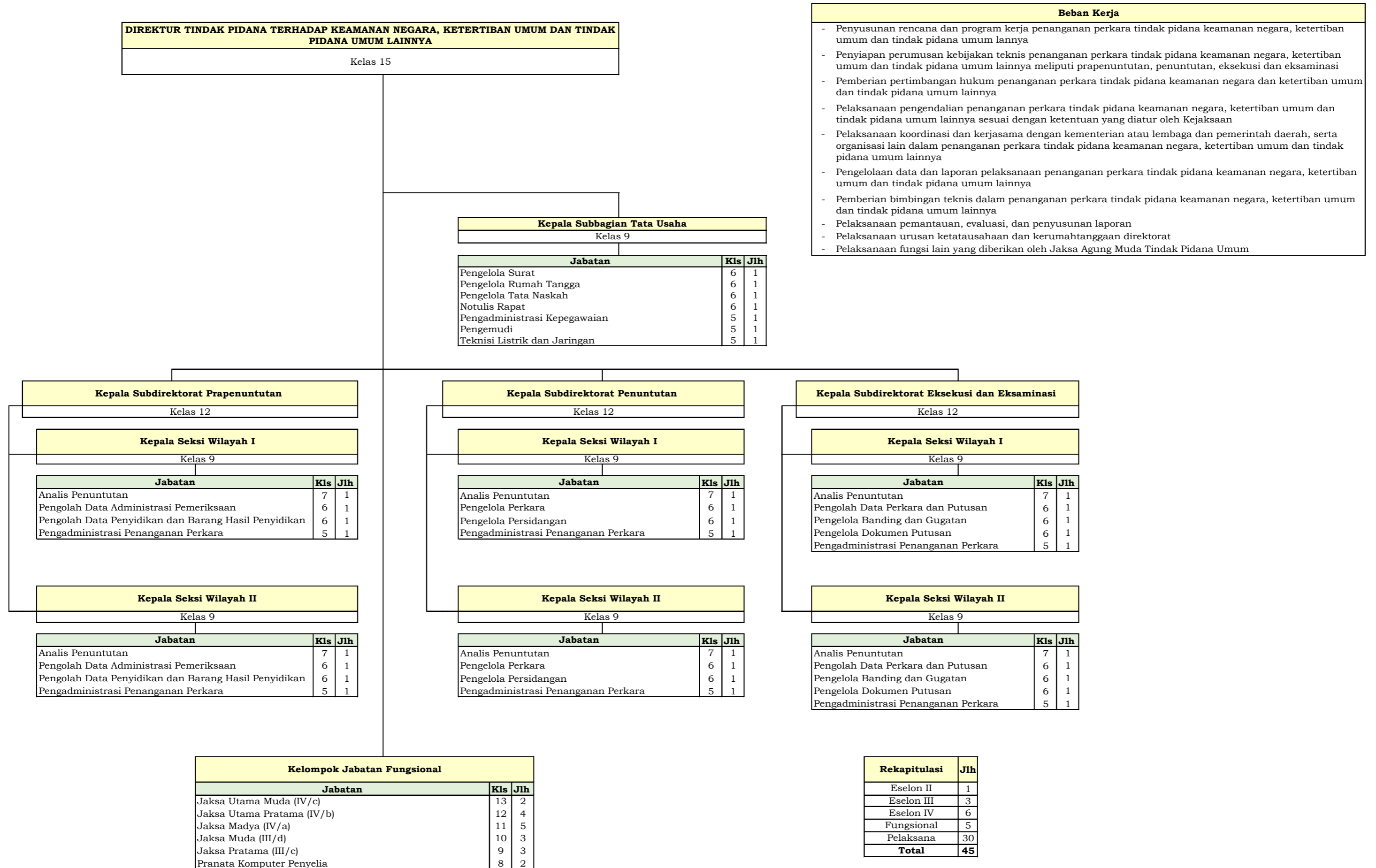
Kepala Seksi Wilayah II
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengolah Data Perkara dan Putusan	6	1
Pengelola Banding dan Gugatan	6	1
Pengelola Dokumen Putusan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

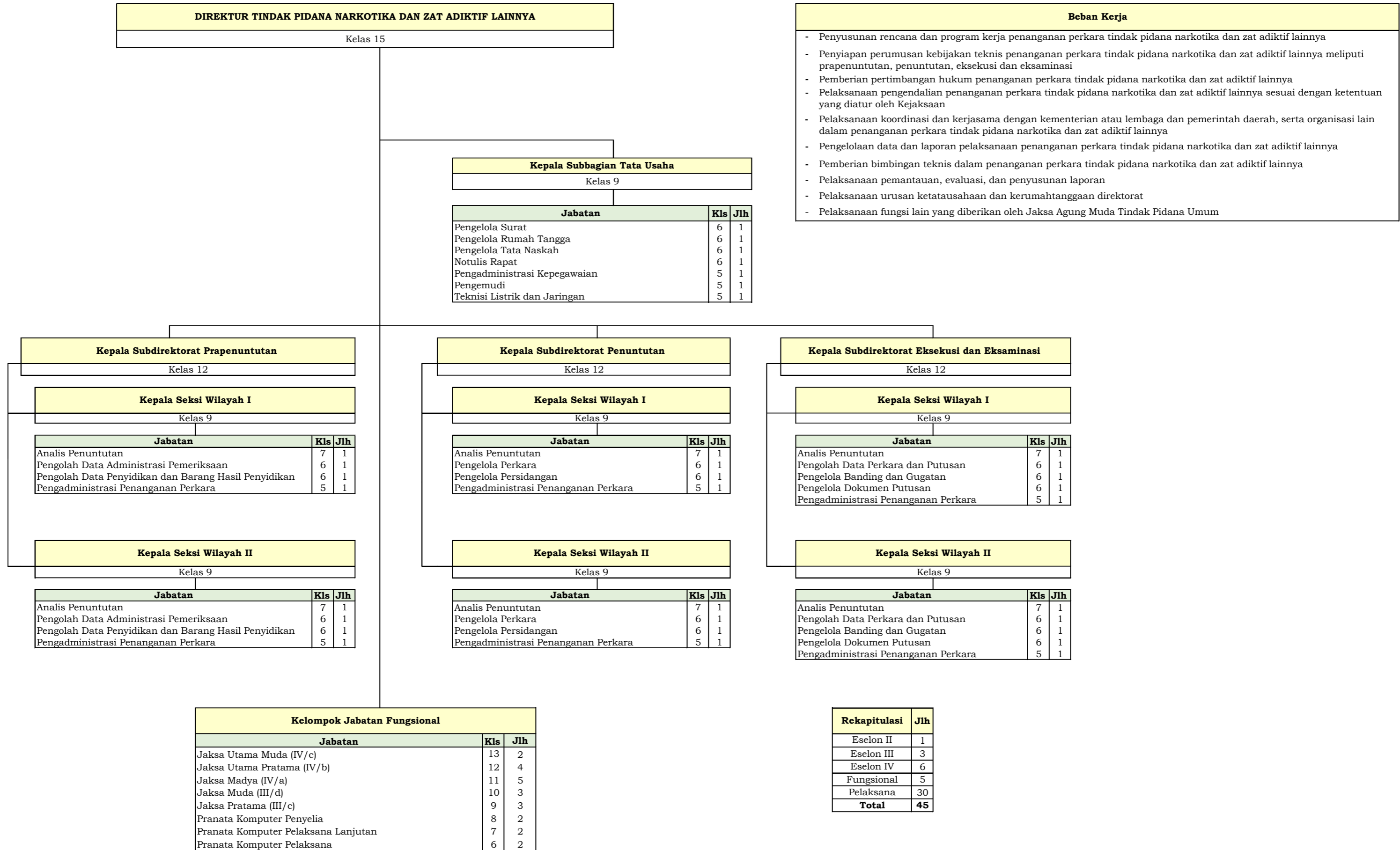
Kelompok Jabatan Fungsional		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Muda (IV/c)	13	2
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	4
Jaksa Madya (IV/a)	11	5
Jaksa Muda (III/d)	10	3
Jaksa Pratama (III/c)	9	3
Pranata Komputer Penyelia	8	2
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	2

Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	3
Eselon IV	6
Fungsional	5
Pelaksana	30
Total	45

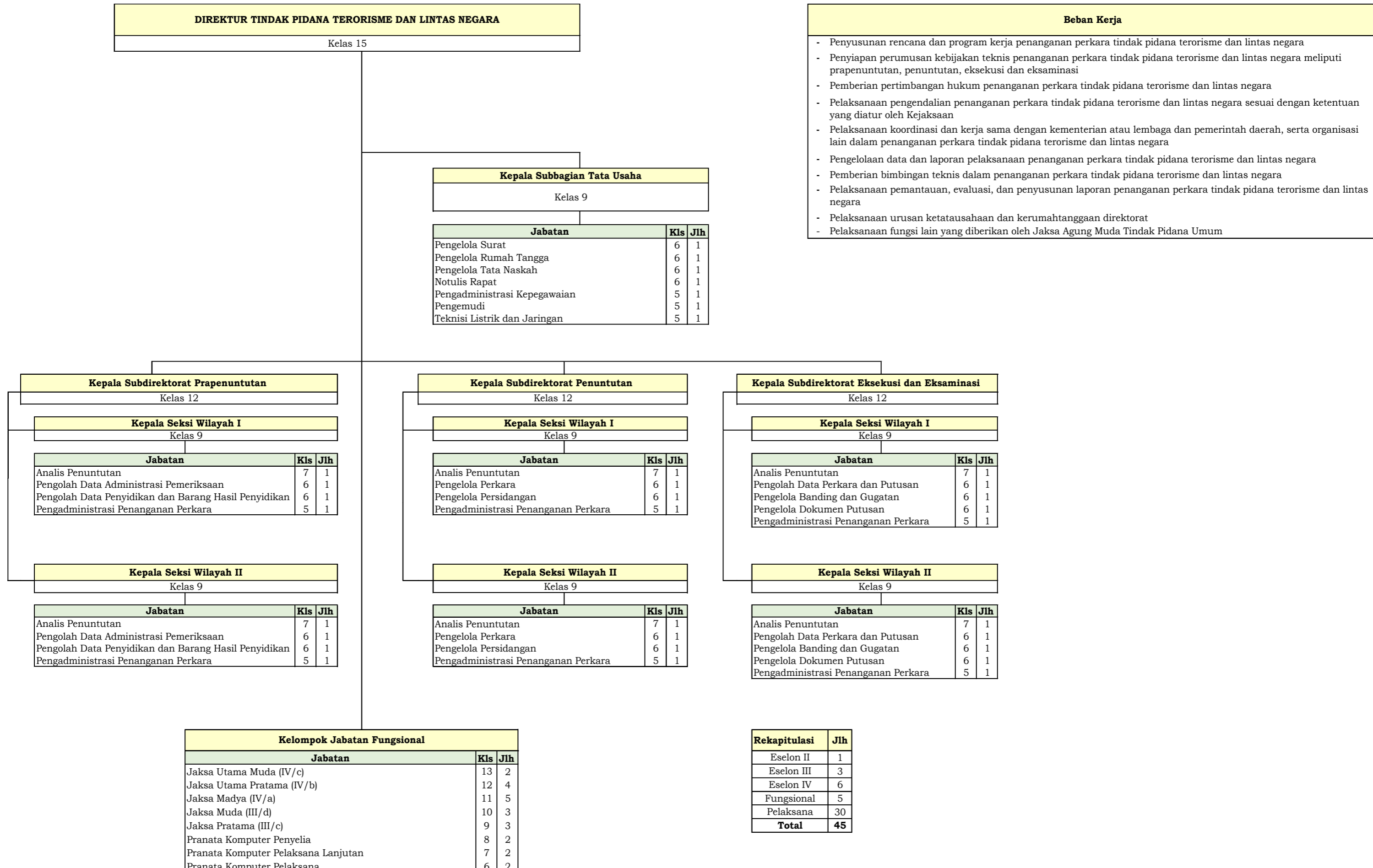
C3. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA, KETERTIBAN UMUM DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA



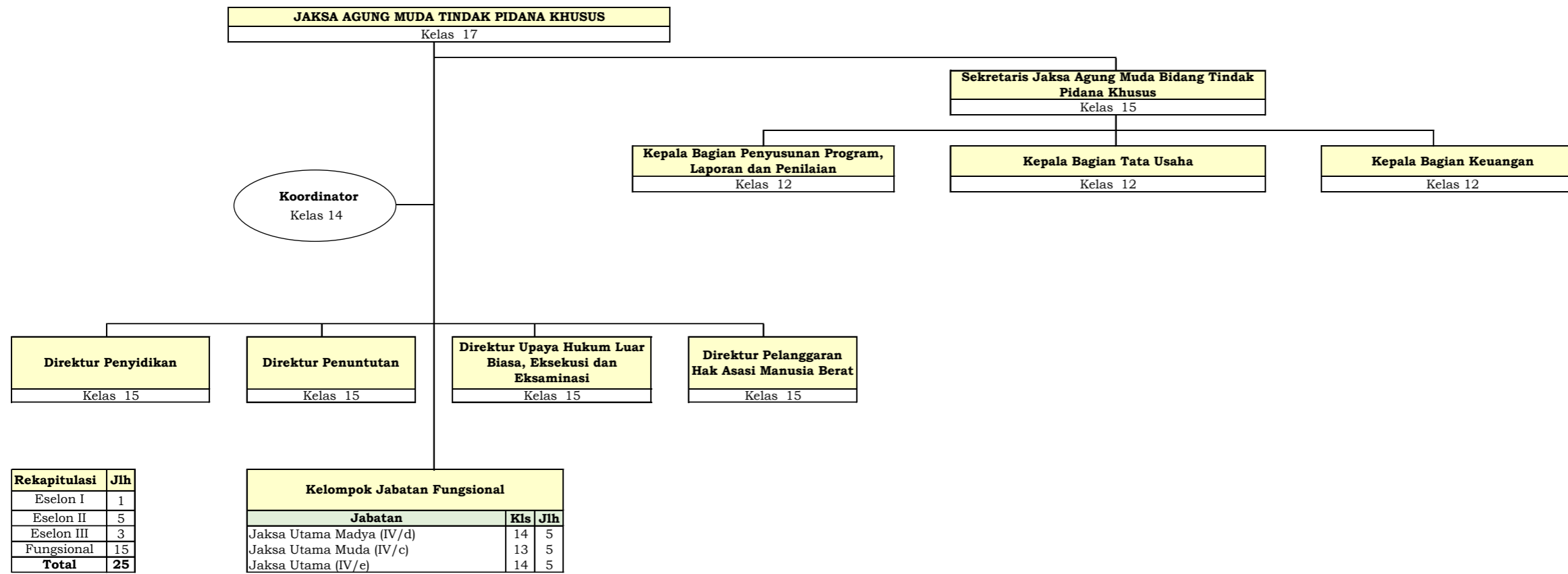
C4. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA



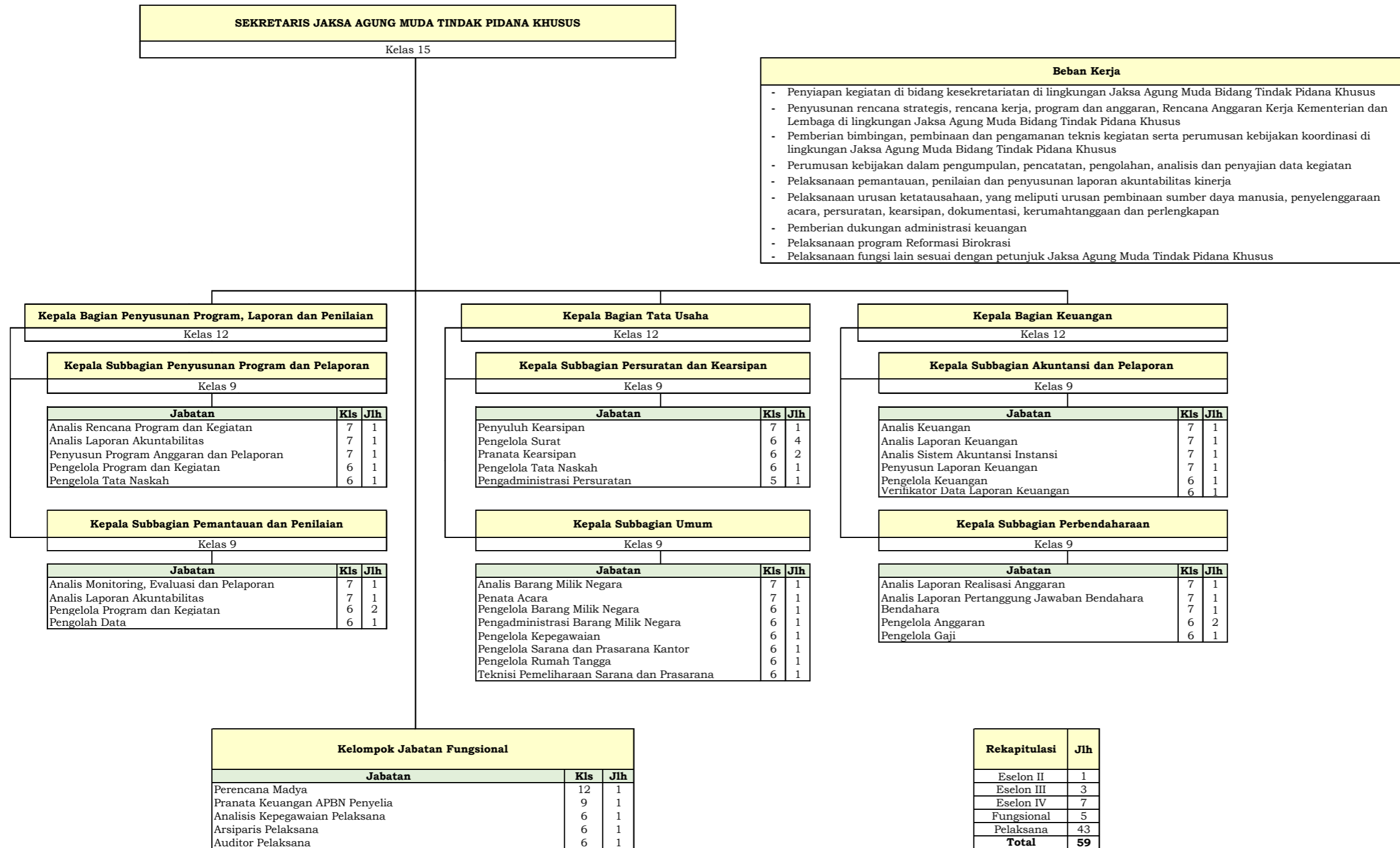
C5. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERORISME DAN LINTAS NEGARA



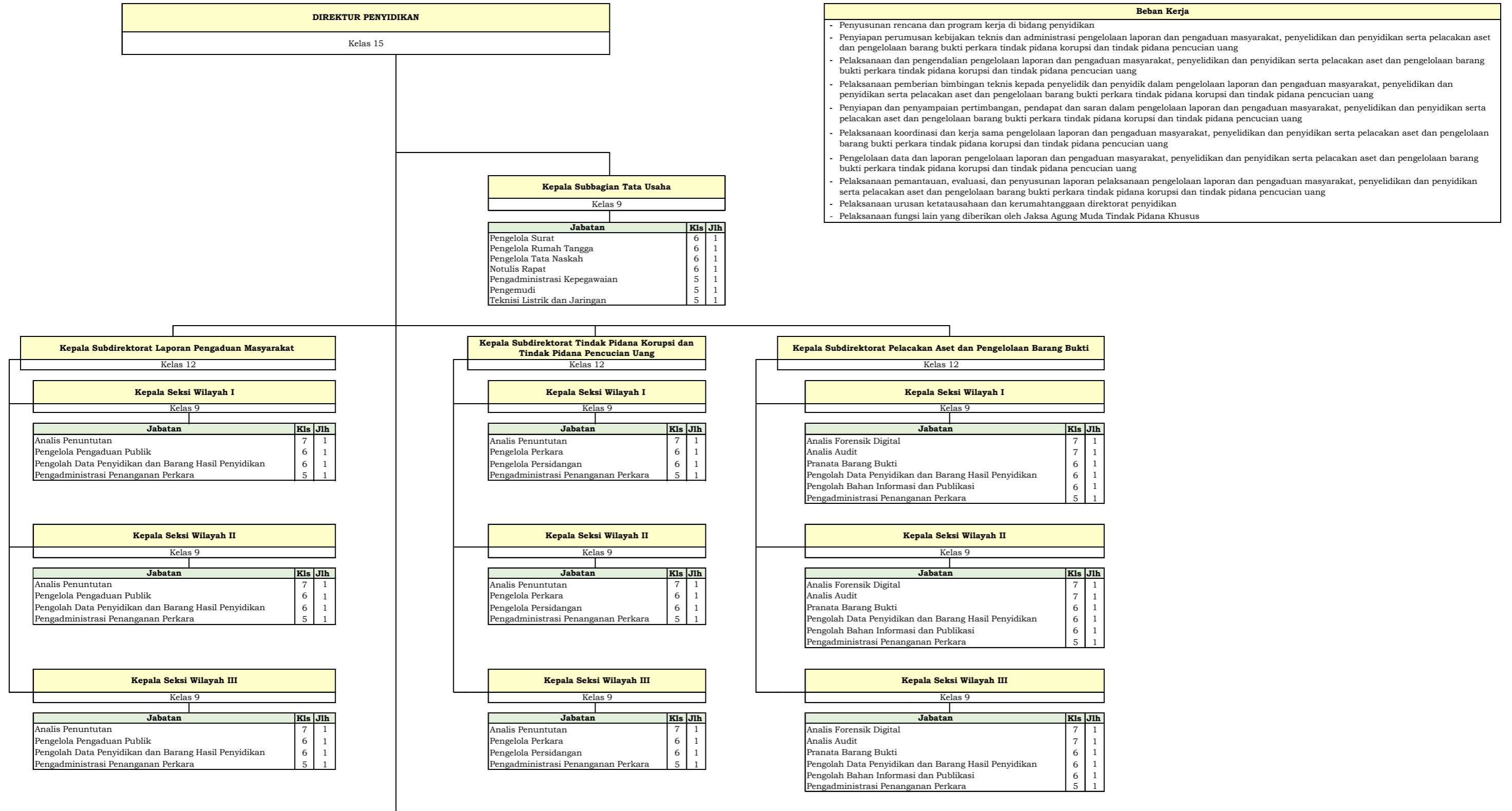
D. PETA JABATAN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS



D1. PETA JABATAN PADA SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS



D2. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT PENYIDIKAN



DIREKTUR PENYIDIKAN		
Kelas 15		

Beban Kerja	
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyidikan - Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang - Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang - Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penyelidik dan penyidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang - Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang - Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang - Pengelolaan data dan laporan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang - Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahahtangaan direktorat penyidikan - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 	

Kepala Subbagian Tata Usaha		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Pengelola Surat	6	1
Pengelola Rumah Tangga	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Notulis Rapat	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Pengemudi	5	1
Teknisi Listrik dan Jaringan	5	1

Kepala Subdirektorat Laporan Pengaduan Masyarakat		
Kelas 12		

Kepala Seksi Wilayah I		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengelola Pengaduan Publik	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Wilayah II		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengelola Pengaduan Publik	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Wilayah III		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengelola Pengaduan Publik	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang		
Kelas 12		

Kepala Seksi Wilayah I		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Wilayah II		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Wilayah III		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti		
Kelas 12		

Kepala Seksi Wilayah I		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Forensik Digital	7	1
Analisis Audit	7	1
Pranata Barang Bukti	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Wilayah II		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Forensik Digital	7	1
Analisis Audit	7	1
Pranata Barang Bukti	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Wilayah III		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Forensik Digital	7	1
Analisis Audit	7	1
Pranata Barang Bukti	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Muda (IV/c)	13	2
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	4
Jaksa Madya (IV/a)	11	5
Jaksa Muda (III/d)	10	3
Jaksa Pratama (III/c)	9	3
Pranata Komputer Penyelia	8	2
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	2
Pranata Keuangan APBN Penyelia	8	2
Pranata Keuangan APBN Mahir	7	2
Pranata Keuangan APBN Terampil	6	2
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	2
Arsiparis Pelaksana	6	2
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	1

Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	3
Eselon IV	6
Fungsional	36
Pelaksana	48
Total	94

D3. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT PENUNTUTAN

DIREKTUR PENUNTUTAN
Kelas 15

Beban Kerja
- Penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanaan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanaan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang
- Pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanaan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang
- Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada penuntut umum dalam pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanaan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang
- Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanaan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanaan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang
- Pengelolaan data dan laporan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanaan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanaan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat Penuntutan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Kepala Subbagian Tata Usaha
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Pengelola Surat	6	1
Pengelola Rumah Tangga	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Notulis Rapat	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Pengemudi	5	1
Teknisi Listrik dan Jaringan	5	1

Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Kelas 12

Kepala Seksi Wilayah I
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Wilayah II
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Wilayah III
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Kelas 12

Kepala Seksi Wilayah I
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Wilayah II
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Wilayah III
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Kepebeanaan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Kelas 12

Kepala Seksi Wilayah I
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Wilayah II
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Wilayah III
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Muda (IV/c)	13	2
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	4
Jaksa Madya (IV/a)	11	5
Jaksa Muda (III/d)	10	3
Jaksa Pratama (III/c)	9	3
Pranata Komputer Penyelia	8	2
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	2
Pranata Keuangan APBN Penyelia	8	2
Pranata Keuangan APBN Mahir	7	2
Pranata Keuangan APBN Terampil	6	2
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	2
Arsiparis Pelaksana	6	2
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	1

Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	3
Eselon IV	6
Fungsional	36
Pelaksana	48
Total	94

D4. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT UPAYA HUKUM LUAR BIASA, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI

DIREKTUR UPAYA HUKUM LUAR BIASA, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
Kelas 15

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana dan program kerja prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, dan upaya hukum biasa perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanaan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang - Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana - Pelaksanaan dan pengendalian tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanaan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang - Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada Jaksa dalam pelaksanaan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanaan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang - Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanaan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang - Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanaan, cukai, dan tindak pidana - Pengelolaan data dan laporan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanaan, cukai, dan tindak pidana - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, upaya hukum luar biasa, permohonan grasi, amnesti dan abolisi, eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepebeanaan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang - Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Kepala Subbagian Tata Usaha		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Pengelola Surat	6	1
Pengelola Rumah Tangga	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Notulis Rapat	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Pengemudi	5	1
Teknisi Listrik dan Jaringan	5	1

Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang		
Kelas 12		
Kepala Seksi Wilayah I		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengolah Data Perkara dan Putusan	6	1
Pengelola Banding dan Gugatan	6	1
Pengelola Dokumen Putusan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1
Kepala Seksi Wilayah II		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengolah Data Perkara dan Putusan	6	1
Pengelola Banding dan Gugatan	6	1
Pengelola Dokumen Putusan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

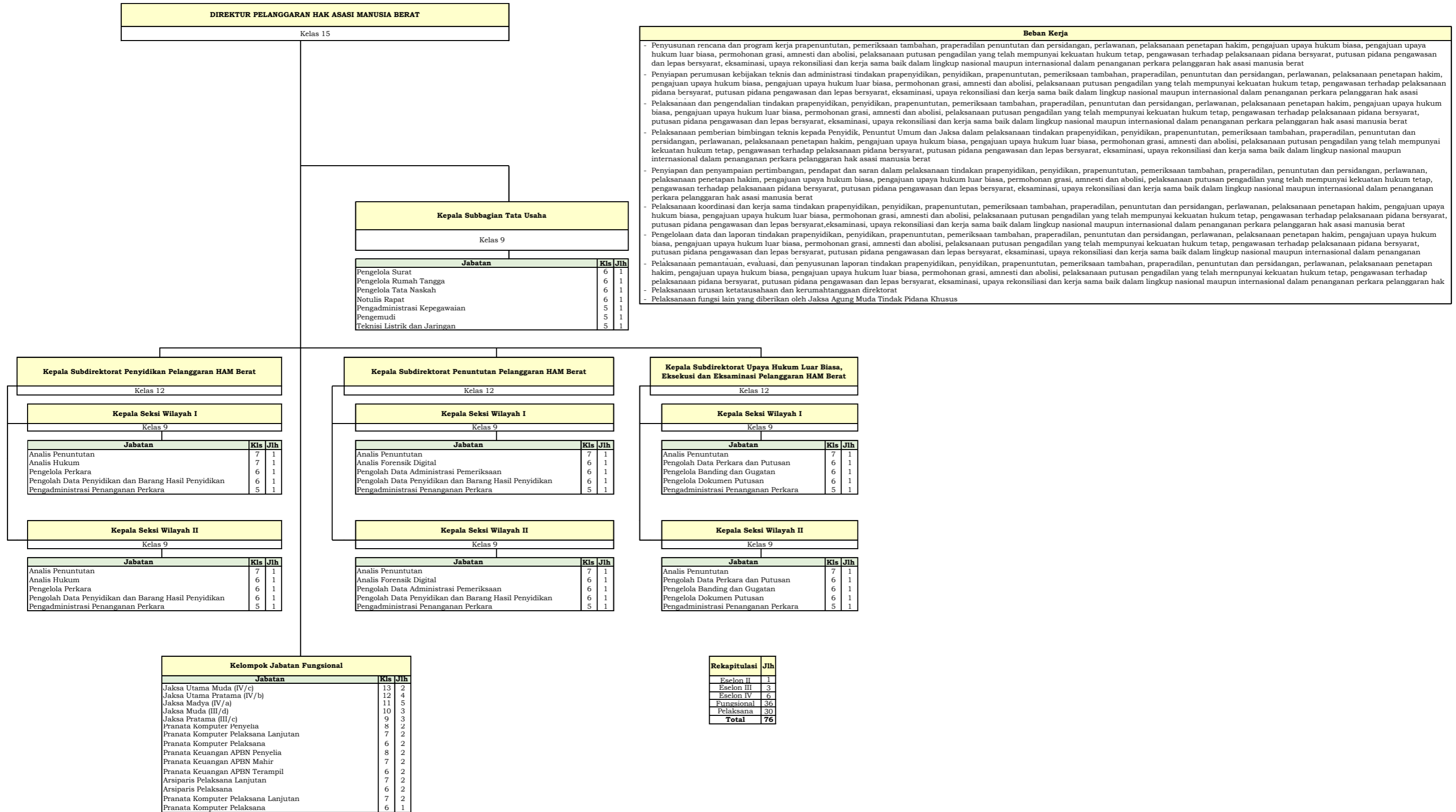
Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang		
Kelas 12		
Kepala Seksi Wilayah I		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengolah Data Perkara dan Putusan	6	1
Pengelola Banding dan Gugatan	6	1
Pengelola Dokumen Putusan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1
Kepala Seksi Wilayah II		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengolah Data Perkara dan Putusan	6	1
Pengelola Banding dan Gugatan	6	1
Pengelola Dokumen Putusan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanaan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang		
Kelas 12		
Kepala Seksi Wilayah I		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengolah Data Perkara dan Putusan	6	1
Pengelola Banding dan Gugatan	6	1
Pengelola Dokumen Putusan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1
Kepala Seksi Wilayah II		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengolah Data Perkara dan Putusan	6	1
Pengelola Banding dan Gugatan	6	1
Pengelola Dokumen Putusan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

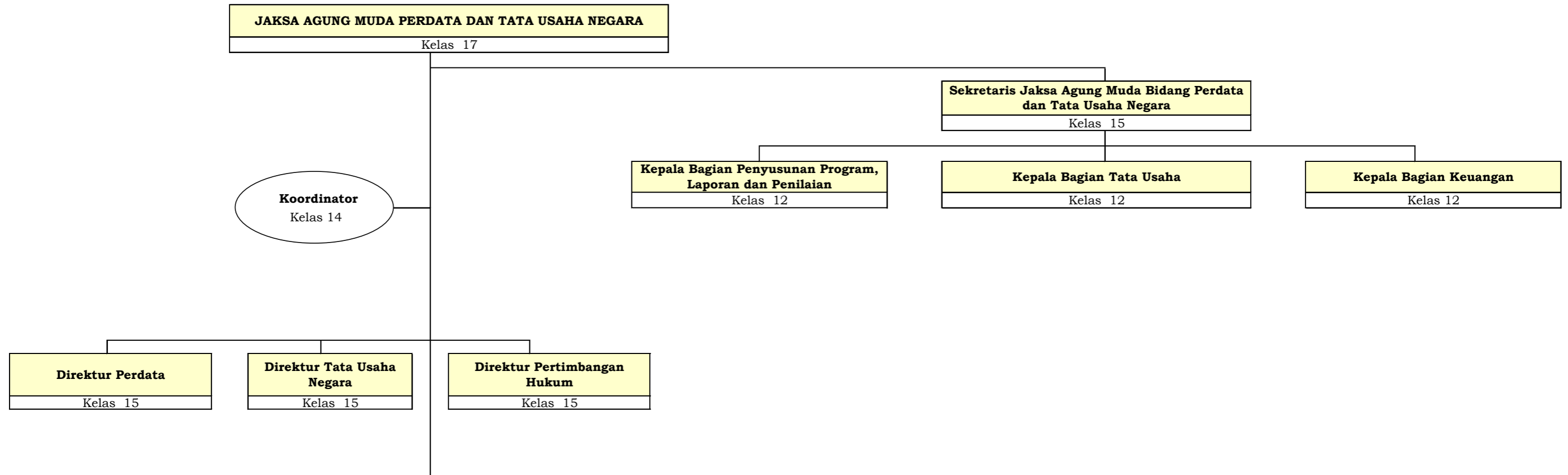
Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Muda (IV/c)	13	2
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	4
Jaksa Madya (IV/a)	11	5
Jaksa Muda (III/d)	10	3
Jaksa Pratama (III/c)	9	3
Pranata Komputer Penyelia	8	2
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2

Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	3
Eselon IV	6
Fungsional	36
Pelaksana	30
Total	76

D5. PETA JABATAN PADA DIREKTUR PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT



E. PETA JABATAN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA



Rekapitulasi	Jlh
Eselon I	1
Eselon II	4
Eselon III	3
Fungsional	15
Total	25

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Madya (IV/d)	14	5
Jaksa Utama (IV/e)	14	5
Jaksa Utama Muda (IV/c)	13	5

E1. PETA JABATAN PADA SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
Kelas 15

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program dan anggaran, Rencana Anggaran Kerja Kementerian dan Lembaga di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - Pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis kegiatan, serta perumusan kebijakan koordinasi di lingkungan Kejaksaan - Perumusan kebijakan dalam pengumpulan, pencatatan, pengolahan analisis dan penyajian data kegiatan - Pelaksanaan pemantauan, penilaian, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja - Pelaksanaan urusan ketatausahaan, yang meliputi urusan pembinaan sumber daya manusia, keprotokolanan, persuratan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan perlengkapan - Pemberian dukungan administrasi keuangan - Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi - Pelaksanaan koordinasi hubungan antar kementerian atau lembaga di pusat dan daerah maupun Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan hukum lainnya yang di dalamnya negara atau pemerintah mempunyai kepentingan keperdataan di bidang perdata dan tata usaha negara - Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian		
Kelas 12		
Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	1
Analisis Laporan Akuntabilitas	7	1
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1
Pengelola Program dan Kegiatan	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	1
Analisis Laporan Akuntabilitas	7	1
Pengelola Program dan Kegiatan	6	2
Pengolah Data	6	1

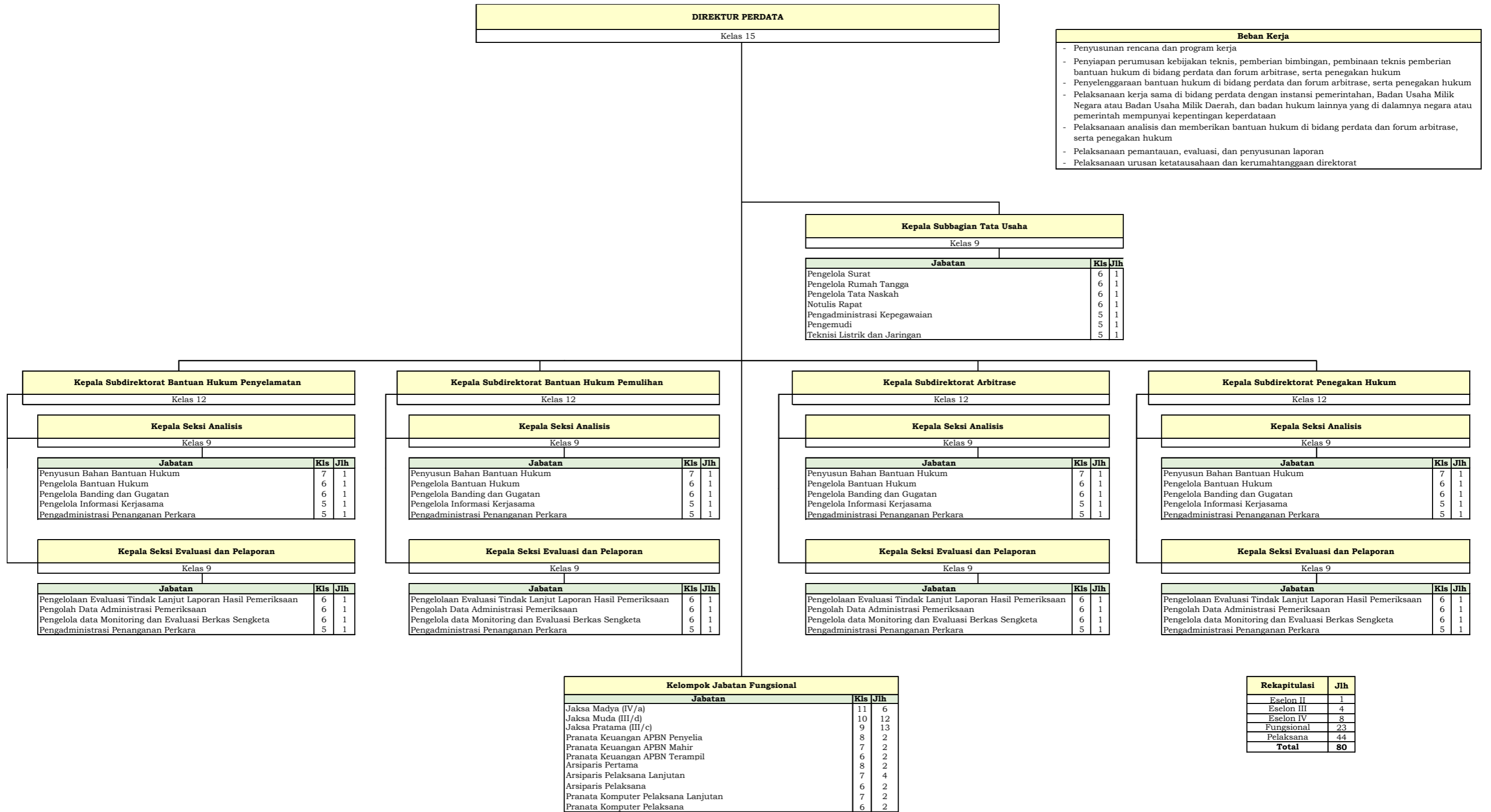
Kepala Bagian Tata Usaha		
Kelas 12		
Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Penyuluh Kearsipan	7	1
Pengelola Surat	6	4
Pranata Kearsipan	6	2
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengadministrasian Persuratan	5	1
Kepala Subbagian Umum		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Barang Milik Negara	7	1
Penata Acara	7	1
Pengelola Barang Milik Negara	6	1
Pengadministrasian Barang Milik Negara	6	1
Pengelola Kepegawaian	6	1
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	1
Pengelola Rumah Tangga	6	1
Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6	1

Kepala Bagian Keuangan		
Kelas 12		
Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Keuangan	7	1
Analisis Laporan Keuangan	7	1
Analisis Sistem Akuntansi Instansi	7	1
Penyusun Laporan Keuangan	7	1
Pengelola Keuangan	6	1
Verifikator Data Laporan Keuangan	6	1
Kepala Subbagian Perbendaharaan		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Laporan Realisasi Anggaran	7	1
Analisis Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara	7	1
Bendahara	7	1
Pengelola Anggaran	6	2
Pengelola Gaji	6	1

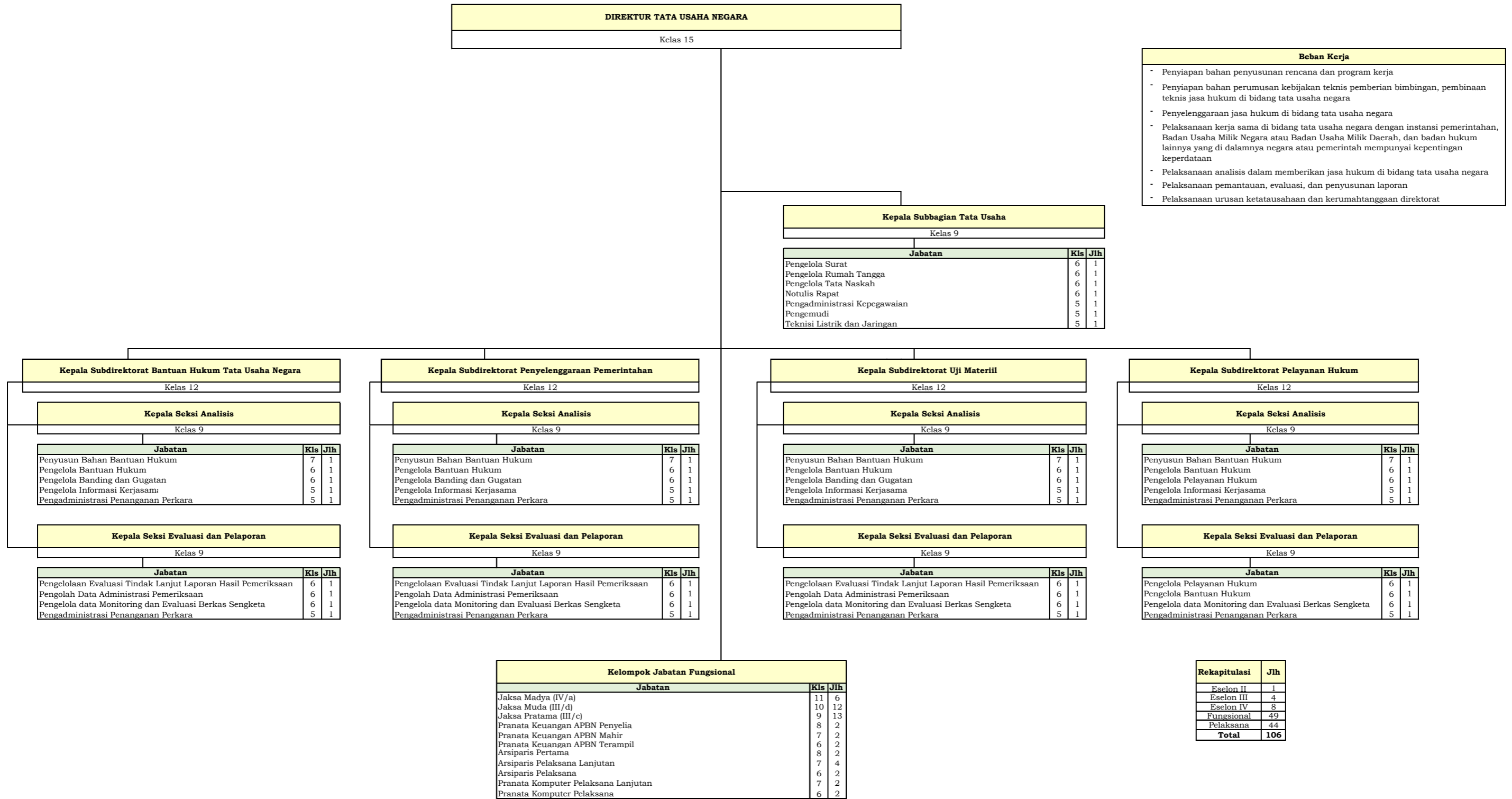
Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Kepegawaian Pelaksana	6	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Perencana Madya	12	1
Auditor Pelaksana	6	1
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	1

Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	3
Eselon IV	7
Fungsional	5
Pelaksana	43
Total	59

E2. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT PERDATA



E3. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT TATA USAHA NEGARA



E4. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT PERTIMBANGAN HUKUM

DIREKTUR PERTIMBANGAN HUKUM
Kelas 15

Kepala Subbagian Tata Usaha
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Pengelola Surat	6	1
Pengelola Rumah Tangga	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Notulis Rapat	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Pengemudi	5	1
Teknisi Listrik dan Jaringan	5	1

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan teknis pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata - Penyelenggaraan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata - Pelaksanaan kerja sama di bidang perdata dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya yang di dalamnya negara atau pemerintah mempunyai kepentingan keperdataan - Pelaksanaan analisis dalam memberikan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan - Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat

Kepala Subdirektorat Pendapat Hukum
Kelas 12

Kepala Seksi Analisis
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Penyusun Abstraksi Hukum	7	1
Penyusun Bahan Bantuan Hukum	6	1
Pengelola Bantuan Hukum	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Pengelolaan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	6	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Subdirektorat Pendampingan dan Audit Hukum
Kelas 12

Kepala Seksi Analisis
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Penyusun Abstraksi Hukum	7	1
Penyusun Bahan Bantuan Hukum	6	1
Pengelola Bantuan Hukum	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Pengelolaan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	6	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum
Kelas 12

Kepala Seksi Analisis
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Penyusun Abstraksi Hukum	7	1
Penyusun Bahan Bantuan Hukum	6	1
Pengelola Bantuan Hukum	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

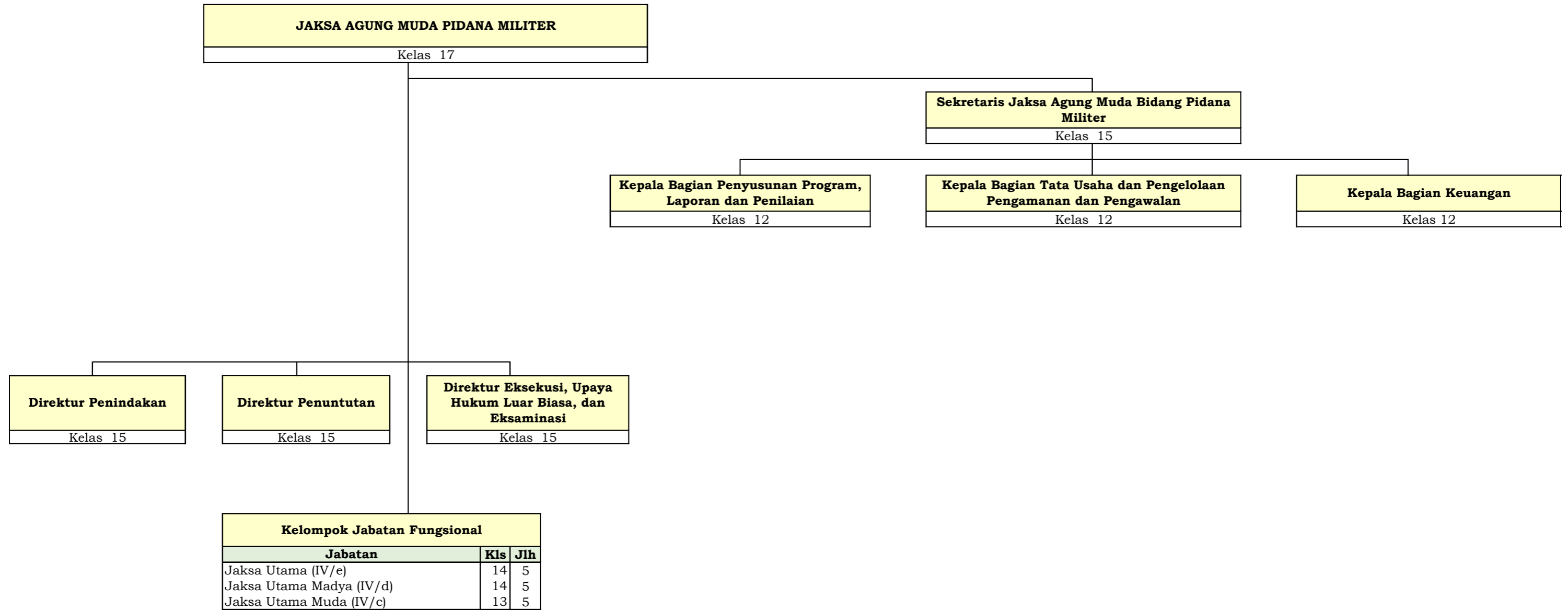
Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Pengelolaan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	6	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

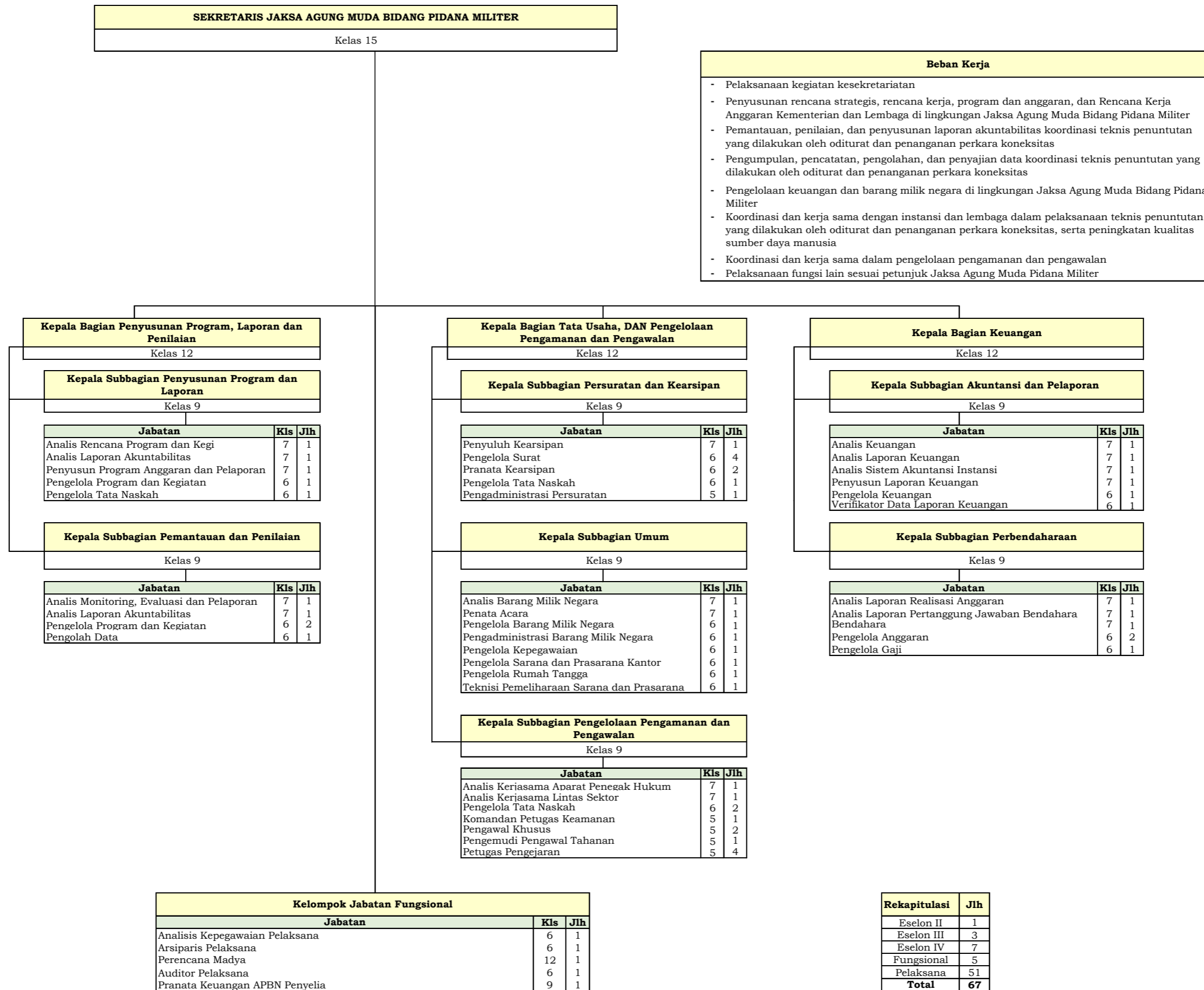
Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Muda (IV/c)	13	2
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	4
Jaksa Madya (IV/a)	11	5
Jaksa Muda (III/d)	10	3
Jaksa Pratama (III/c)	9	3
Pranata Komputer Penyelia	8	2
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	2

Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	3
Eselon IV	6
Fungsional	23
Pelaksana	30
Total	63

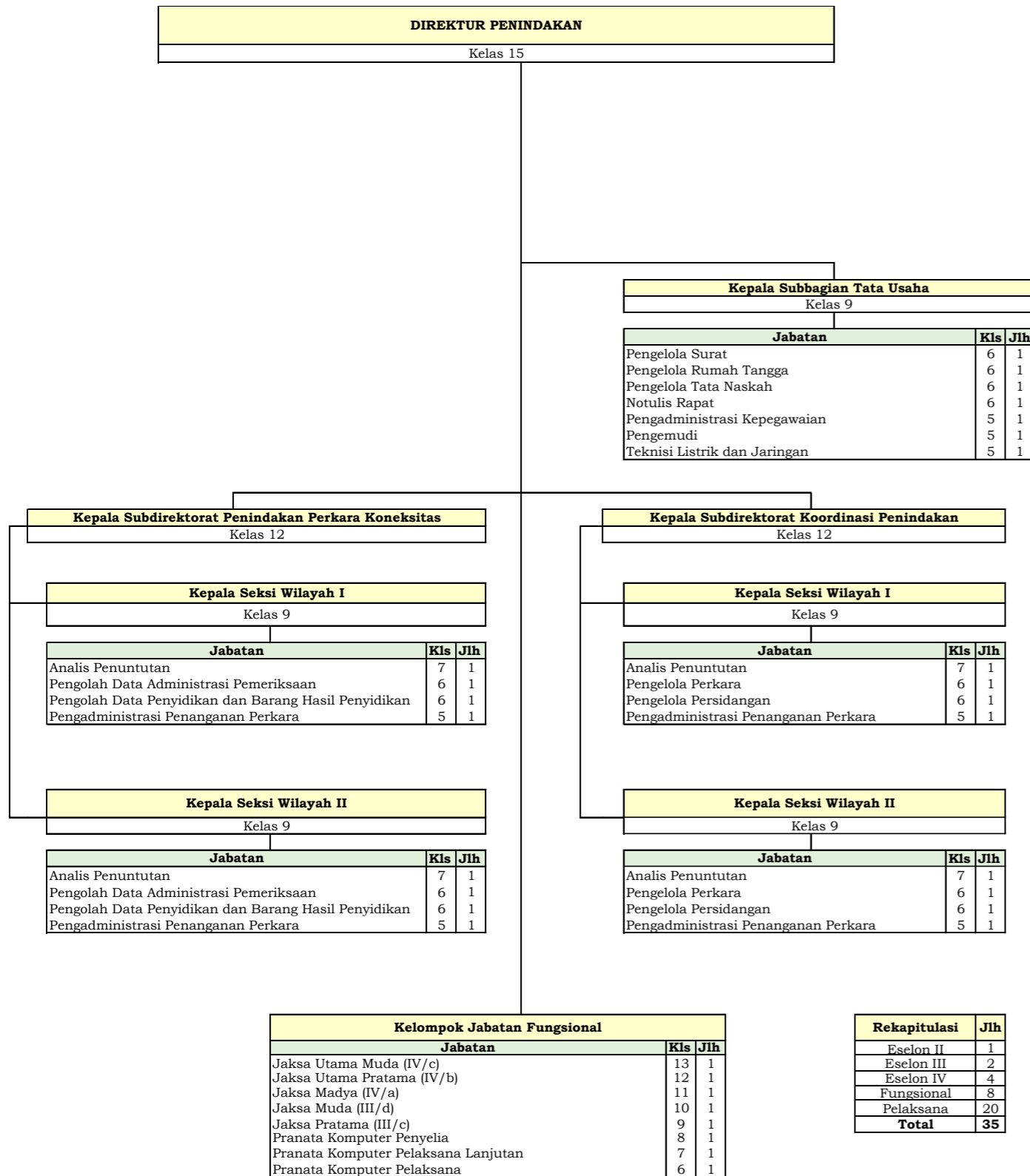
F. PETA JABATAN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER



F1. PETA JABATAN PADA SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER

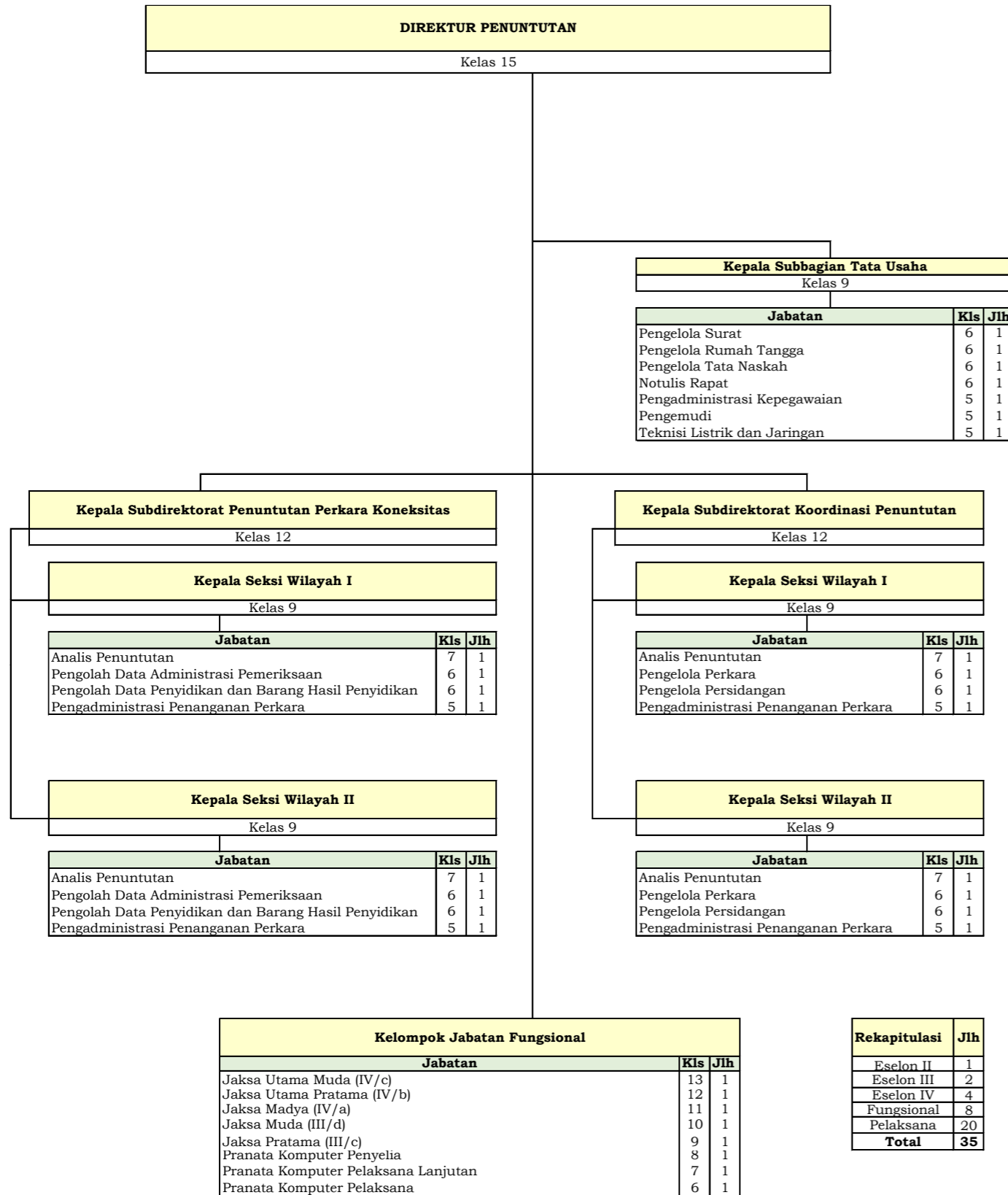


F2. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT PENINDAKAN



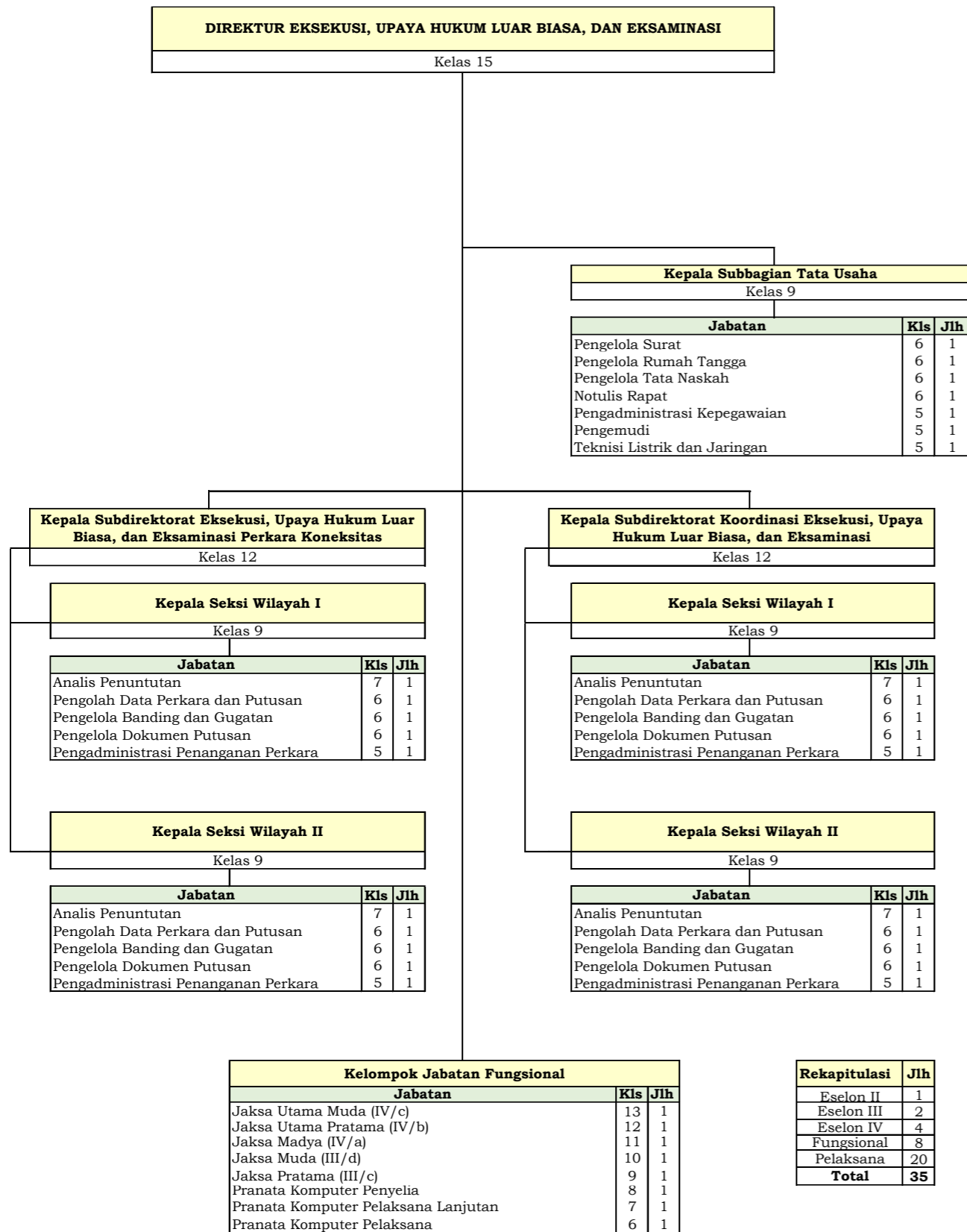
Beban Kerja
- Penyiapan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda
- Penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi atas pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti
- Pelaksanaan dan pengendalian atas pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti
- Pemberian bimbingan teknis kepada penyidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti
- Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran dalam pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti
- Pengelolaan data dan pelaporan atas pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti
- Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Penindakan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer

F3. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT PENUNTUTAN



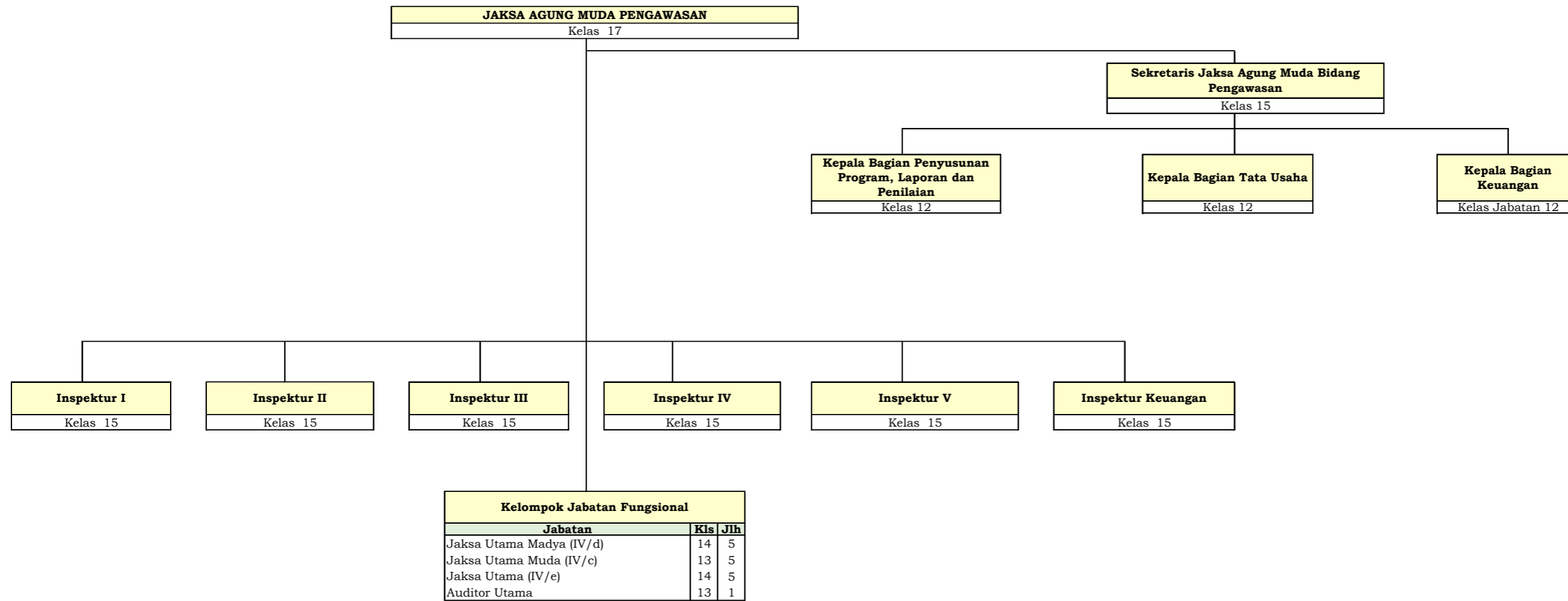
Beban Kerja	
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda - Penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyidikan perkara koneksi tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelola barang bukti - Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi atas pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksi tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti - Pelaksanaan dan pengendalian atas pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksi tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti - Pemberian bimbingan teknis kepada penyidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksi tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti - Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran dalam pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksi tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti - Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksi tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti - Pengelolaan data dan pelaporan atas pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksi tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti - Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksi tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti - Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Penuntutan - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer 	

F4. PETA JABATAN PADA DIREKTORAT EKSEKUSI, UPAYA HUKUM LUAR BIASA, DAN EKSAMINASI

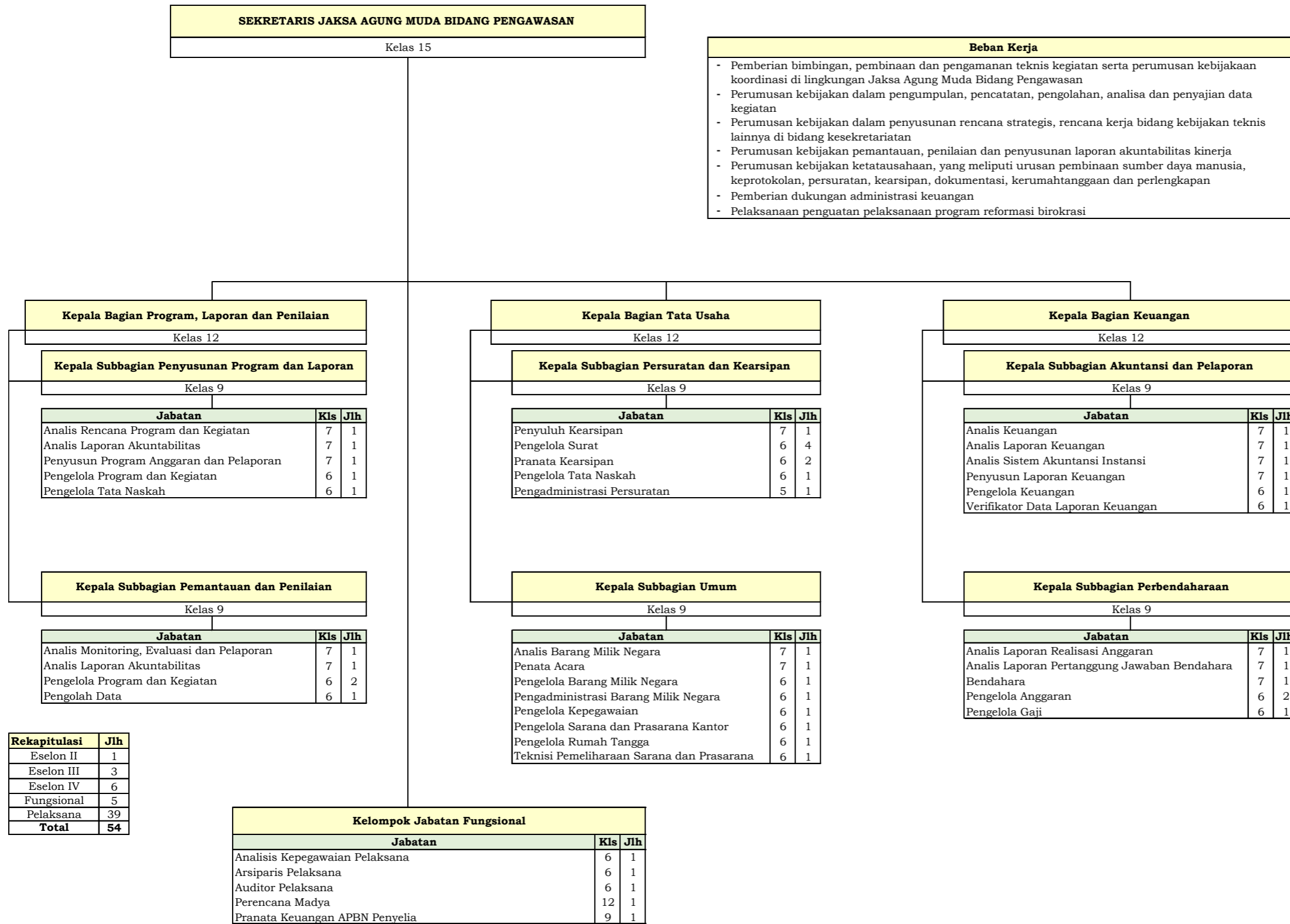


Beban Kerja
- Penyiapan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda
- Penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelola barang bukti
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administrasi atas pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti
- Pelaksanaan dan pengendalian atas pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti
- Pemberian bimbingan teknis kepada penyidik dalam pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti
- Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran dalam pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti
- Pengelolaan data dan pelaporan atas pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti
- Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan laporan dan pengaduan, penyidikan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan penyidik lainnya dan pengelolaan barang bukti
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer

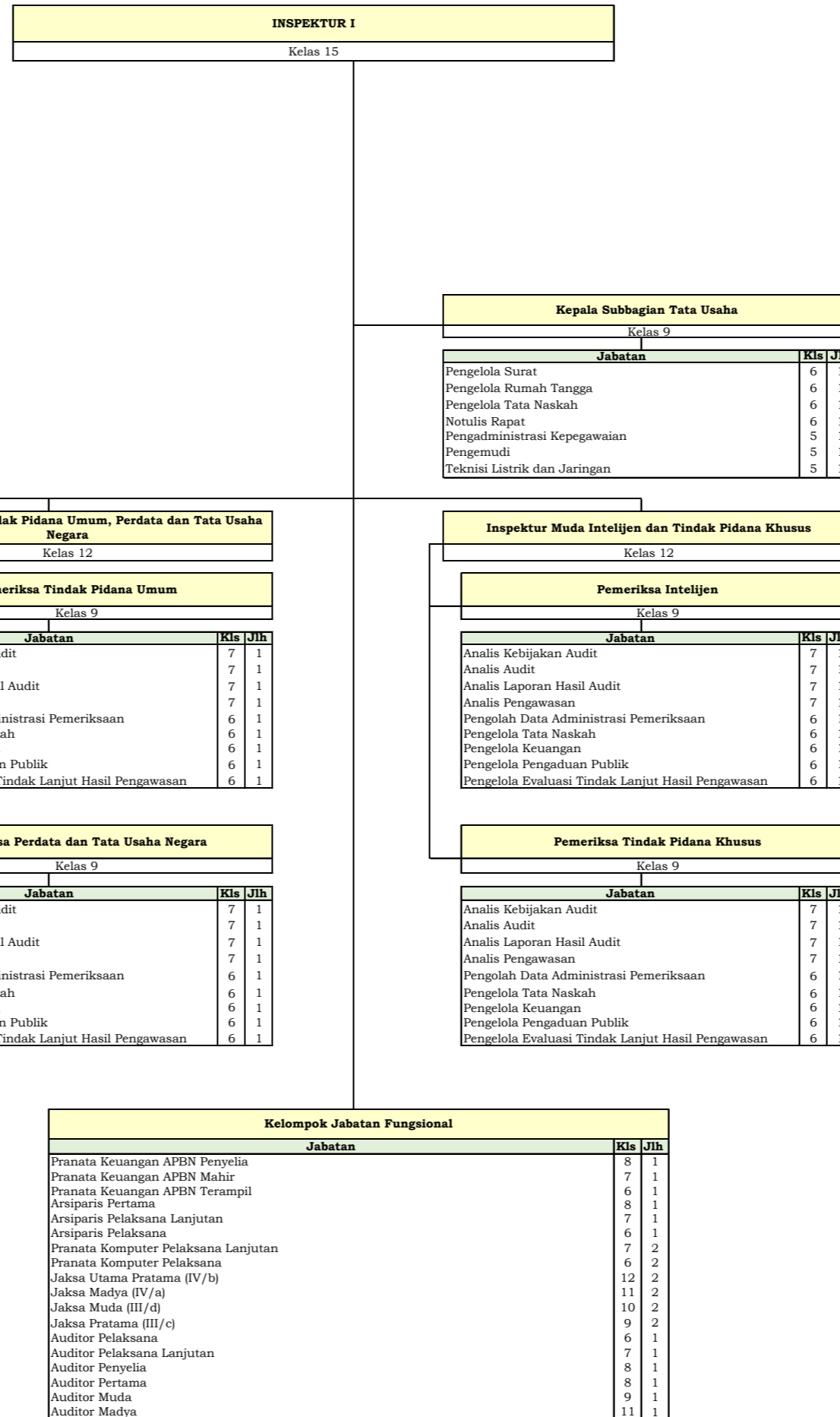
G. PETA JABATAN PADA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN



G1. PETA JABATAN PADA SEKRETARIAT JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN



G2. PETA JABATAN PADA INSPEKTORAT I



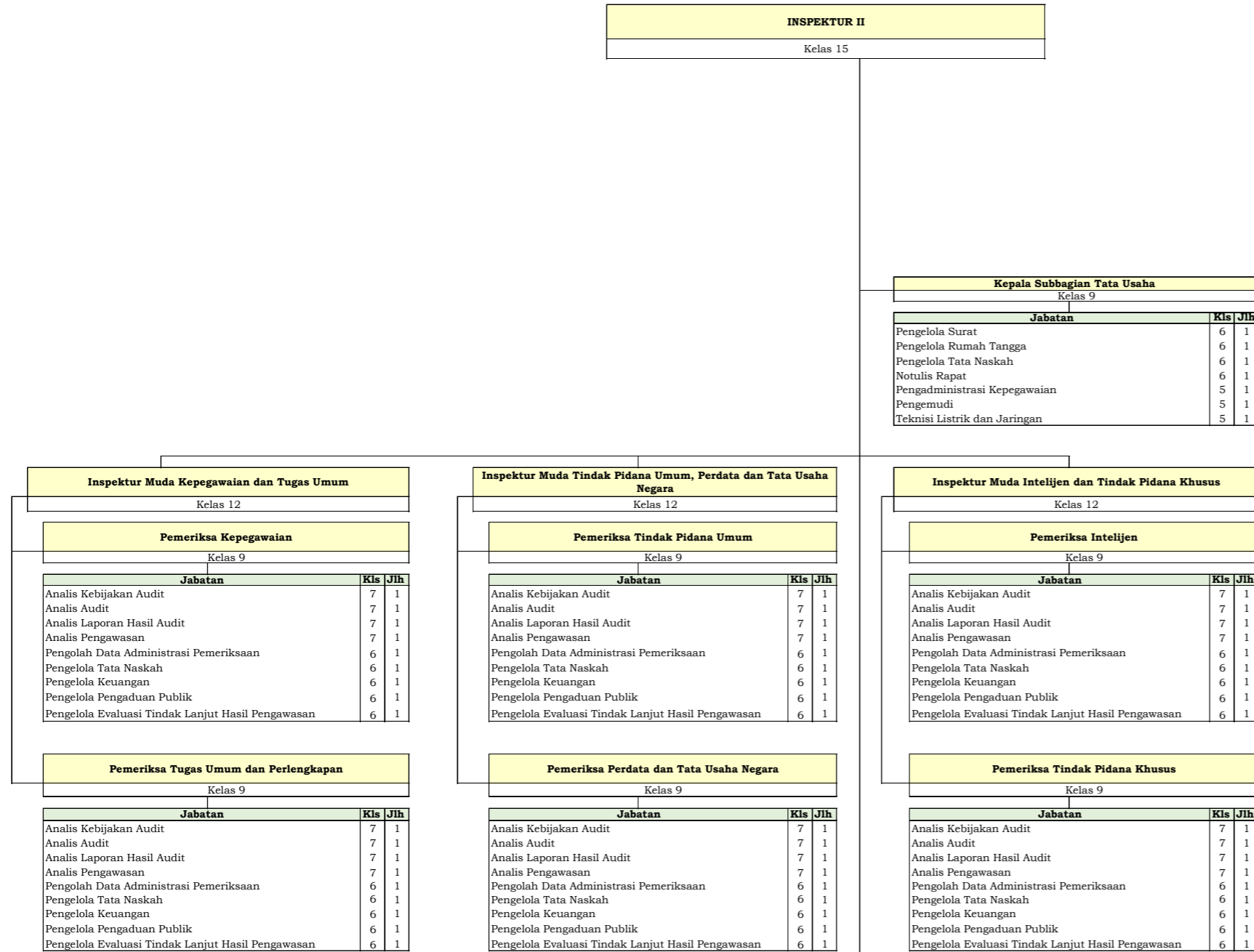
Beban Kerja

- Penyusunan rencana, program kerja pengawasan wilayah I
- Penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan intern Kejaksaan wilayah I
- Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan kinerja serta kegiatan pengawasan lainnya di wilayah I
- Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin di wilayah I
- Pelaksanaan eksaminasi khusus berdasarkan adanya laporan pengaduan dan indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara di wilayah I
- Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung.
- Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah I
- Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan wilayah I
- Pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat I

Rekapitulasi Jlh

Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	8
Fungsional	24
Pelaksana	54
Total	91

G3. PETA JABATAN PADA INSPEKTORAT II



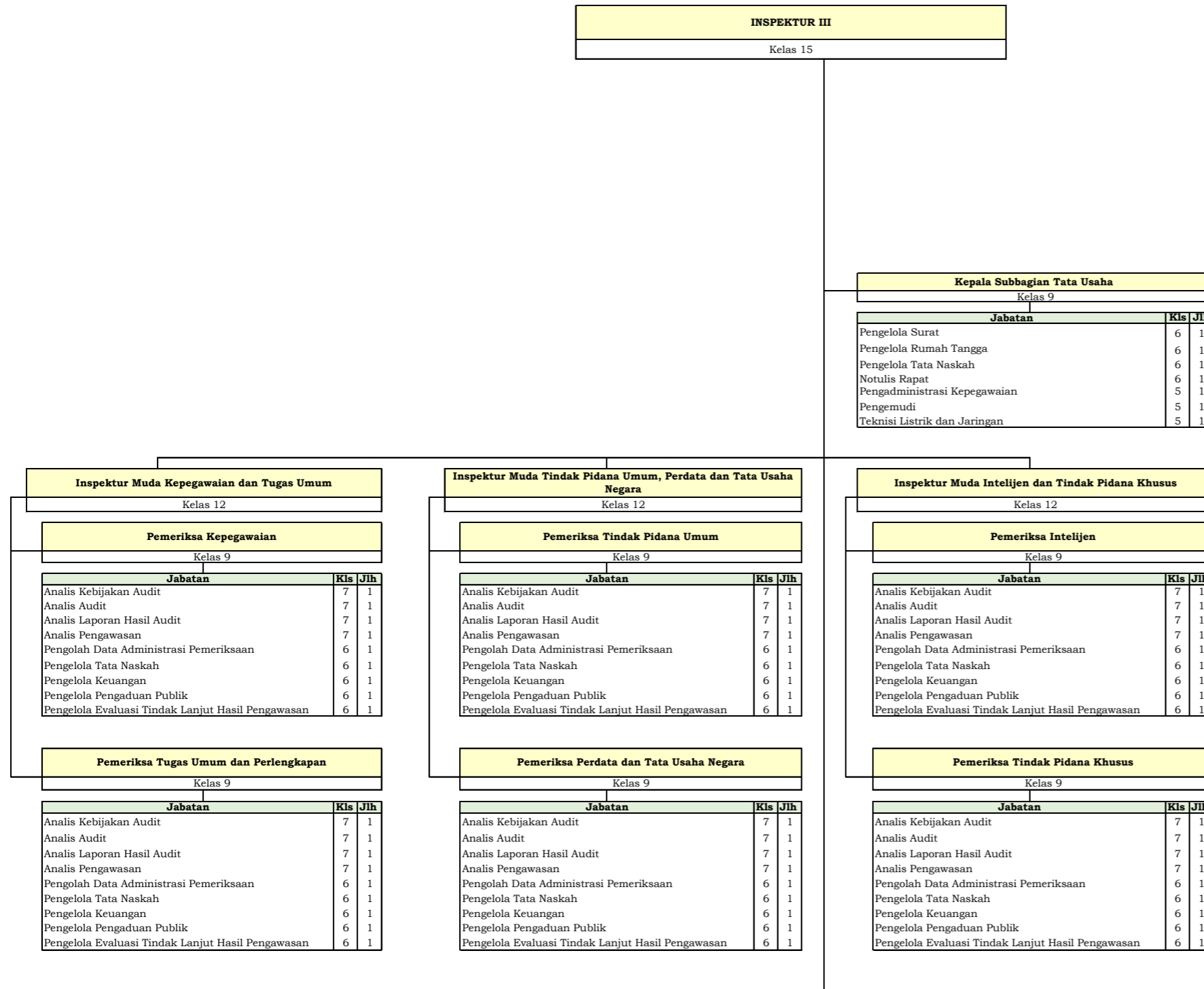
Beban Kerja

- Penyusunan rencana, program kerja pengawasan wilayah II
- Penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan intern Kejaksaan wilayah II
- Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui audit, reuvi, evaluasi, pemantauan kinerja serta kegiatan pengawasan lainnya di wilayah II
- Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin di wilayah II
- Pelaksanaan eksaminasi khusus berdasarkan adanya laporan pengaduan dan indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara di wilayah II
- Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung.
- Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah II
- Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan wilayah II
- Pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat II

Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	8
Fungsional	24
Pelaksana	54
Total	91

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Pranata Keuangan APBN Penyelia	8	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	7	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	6	1
Arsiparis Pertama	8	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	2
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	2
Jaksa Madya (IV/a)	11	2
Jaksa Muda (III/d)	10	2
Jaksa Pratama (III/c)	9	2
Auditor Pelaksana	6	1
Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1
Auditor Penyelia	8	1
Auditor Pertama	8	1
Auditor Muda	9	1
Auditor Madya	11	1

G4. PETA JABATAN PADA INSPEKTORAT III

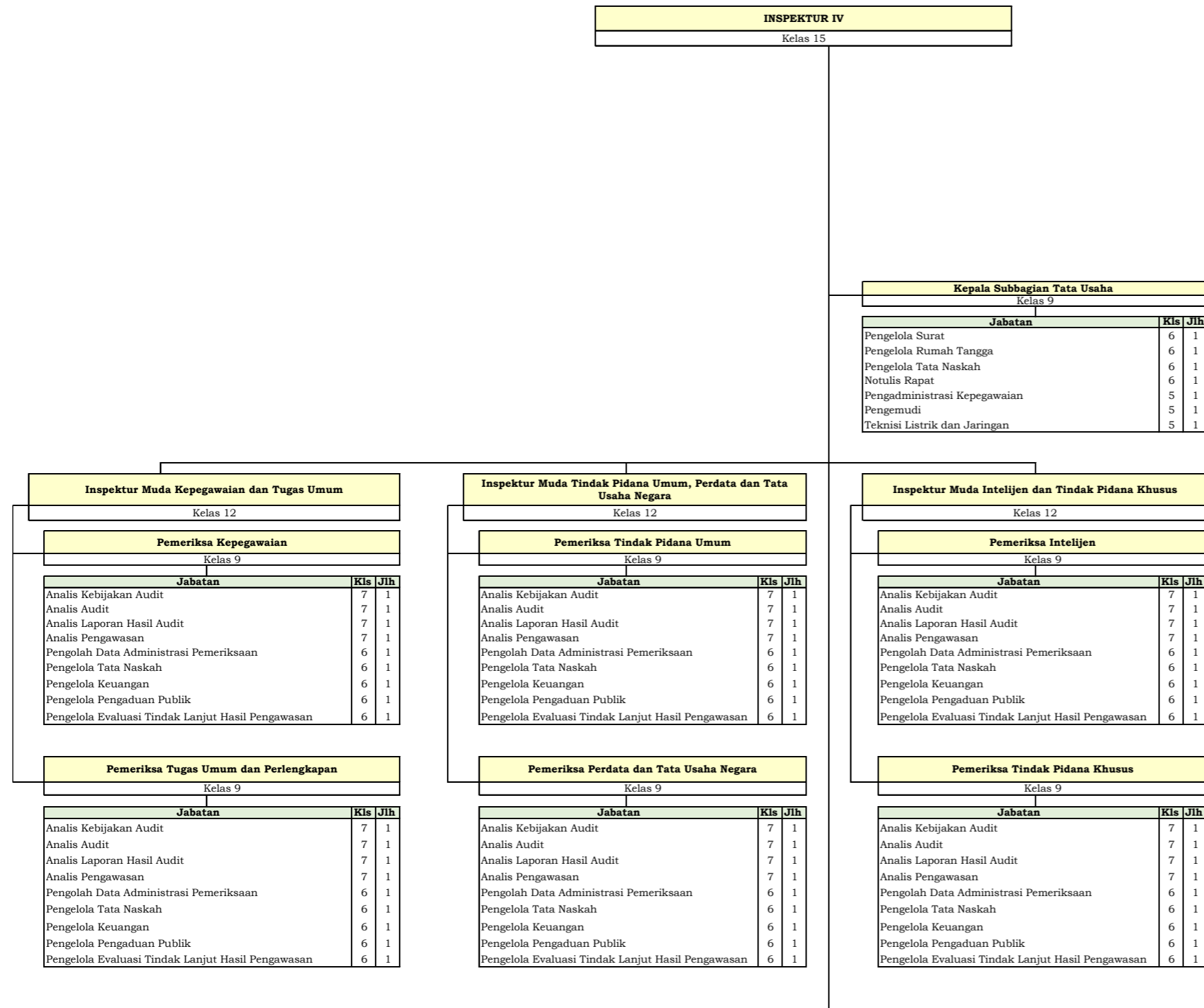


Beban Kerja	
-	Penyusunan rencana, program kerja pengawasan wilayah III
-	Penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan intern Kejaksaan wilayah III
-	Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan kinerja serta kegiatan pengawasan lainnya di wilayah III
-	Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin di wilayah III
-	Pelaksanaan eksaminasi khusus berdasarkan adanya laporan pengaduan dan indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara di wilayah III
-	Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung.
-	Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah III
-	Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan wilayah III
-	Pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya
-	Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahaan Inspectorat III

Rekapitula	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	8
Fungsional	24
Pelaksana	54
Total	91

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Pranata Keuangan APBN Penyelia	8	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	7	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	6	1
Arsiparis Pertama	8	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	2
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	2
Jaksa Madya (IV/a)	11	2
Jaksa Muda (III/d)	10	2
Jaksa Pratama (III/c)	9	2
Auditor Pelaksana	6	1
Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1
Auditor Penyelia	8	1
Auditor Pertama	8	1
Auditor Muda	9	1
Auditor Madya	11	1

G5. PETA JABATAN PADA INSPEKTORAT IV

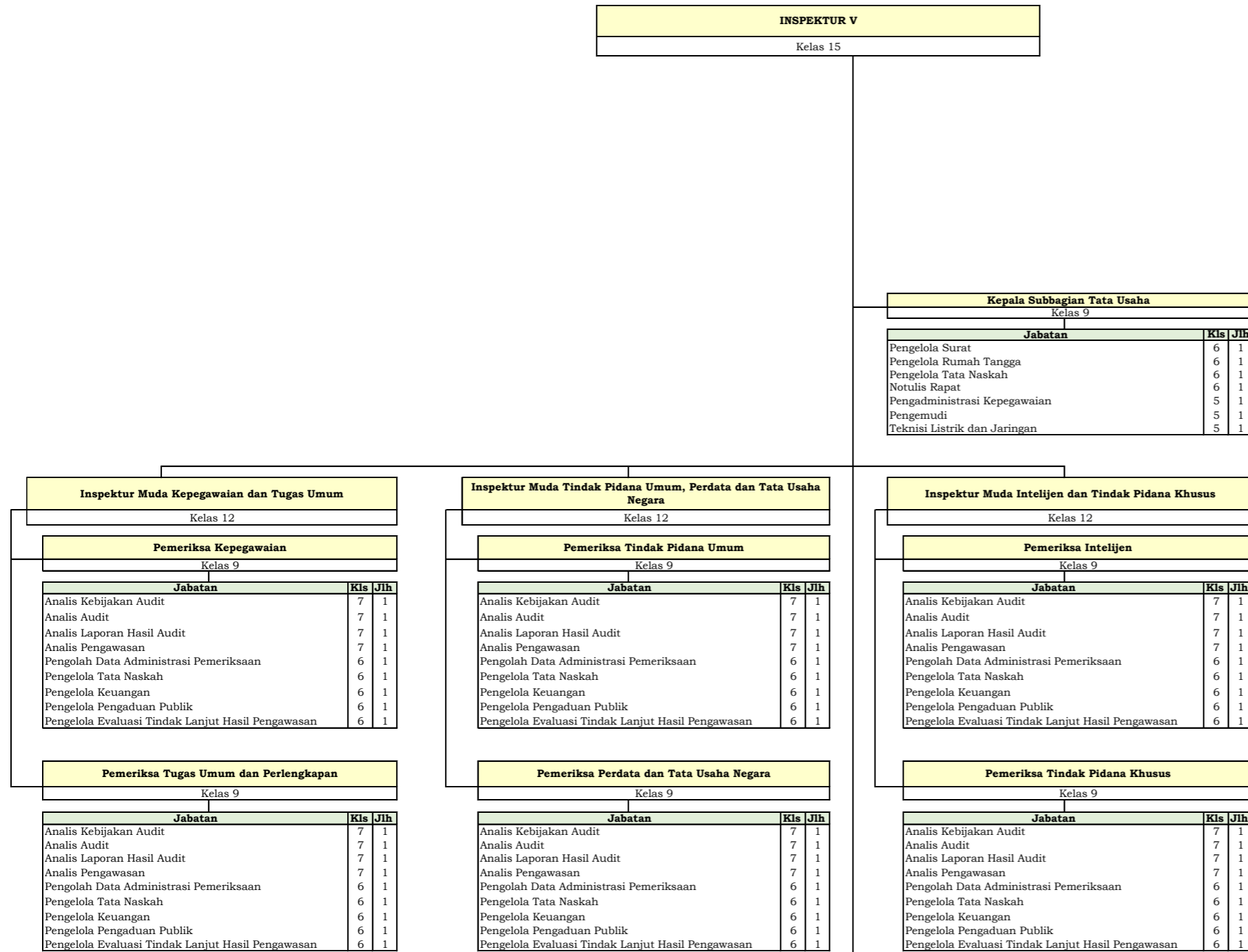


Beban Kerja	
-	Penyusunan rencana, program kerja pengawasan wilayah IV
-	Penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan intern Kejaksaan wilayah IV
-	Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan kinerja serta kegiatan pengawasan lainnya di wilayah IV
-	Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin di wilayah IV
-	Pelaksanaan eksaminasi khusus berdasarkan adanya laporan pengaduan dan indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara di wilayah IV
-	Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung.
-	Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah IV
-	Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan wilayah IV
-	Pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya
-	Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat IV

Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	8
Fungsional	24
Pelaksana	54
Total	91

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Pranata Keuangan APBN Penyelia	8	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	7	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	6	1
Arsiparis Pertama	8	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	2
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	2
Jaksa Madya (IV/a)	11	2
Jaksa Muda (III/d)	10	2
Jaksa Pratama (III/c)	9	2
Auditor Pelaksana	6	1
Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1
Auditor Penyelia	8	1
Auditor Pertama	8	1
Auditor Muda	9	1
Auditor Madya	11	1

G6. PETA JABATAN PADA INSPEKTORAT V



Beban Kerja

- Penyusunan rencana, program kerja pengawasan wilayah V
- Penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan intern Kejaksaan wilayah V
- Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan kinerja serta kegiatan pengawasan lainnya di wilayah V
- Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin di wilayah V
- Pelaksanaan eksaminasi khusus berdasarkan adanya laporan pengaduan dan indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara di wilayah V
- Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung.
- Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah V
- Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan wilayah V
- Pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat V

Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	8
Fungsional	24
Pelaksana	54
Total	91

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Pranata Keuangan APBN Penyelia	8	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	7	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	6	1
Arsiparis Pertama	8	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	2
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	2
Jaksa Madya (IV/a)	11	2
Jaksa Muda (III/d)	10	2
Jaksa Pratama (III/c)	9	2
Auditor Pelaksana	6	1
Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1
Auditor Penyelia	8	1
Auditor Pertama	8	1
Auditor Muda	9	1
Auditor Madya	11	1

G7. PETA JABATAN PADA INSPEKTORAT KEUANGAN

INSPEKTUR KEUANGAN
Kelas 15

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan pada Inspektorat Keuangan - Penyusunan kebijakan pengawasan keuangan Kejaksaan - Pelaksanaan internal audit atas pengelolaan keuangan di satuan kerja Kejaksaan, baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. - Pelaksanaan revidi Laporan Keuangan Kejaksaan - Pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada seluruh satuan kerja Kejaksaan baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri - Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan keuangan di satuan kerja Kejaksaan, baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. - Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Inspektorat Keuangan - Pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya - Pelaksanaan pengendalian pengawasan keuangan di satuan kerja Kejaksaan, baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. - Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat Keuangan

Kepala Subbagian Tata Usaha		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Pengelola Surat	6	1
Pengelola Rumah Tangga	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Notulis Rapat	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Pengemudi	5	1
Teknisi Listrik dan Jaringan	5	1

Inspektur Muda I		
Kelas 12		
Pemeriksa Belanja Negara dan PNBPN		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Kebijakan Audit	7	1
Analisis Audit	7	1
Analisis Laporan Hasil Audit	7	1
Analisis Pengawasan	7	1
Pemeriksa Teknologi Informasi	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengelola Keuangan	6	1
Pengelola Pengaduan Publik	6	1
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6	1

Inspektur Muda II		
Kelas 12		
Pemeriksa Belanja Negara dan PNBPN		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Kebijakan Audit	7	1
Analisis Audit	7	1
Analisis Laporan Hasil Audit	7	1
Analisis Pengawasan	7	1
Pemeriksa Teknologi Informasi	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengelola Keuangan	6	1
Pengelola Pengaduan Publik	6	1
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6	1

Inspektur Muda III		
Kelas 12		
Pemeriksa Belanja Negara dan PNBPN		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Kebijakan Audit	7	1
Analisis Audit	7	1
Analisis Laporan Hasil Audit	7	1
Analisis Pengawasan	7	1
Pemeriksa Teknologi Informasi	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengelola Keuangan	6	1
Pengelola Pengaduan Publik	6	1
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6	1

Inspektur Muda IV		
Kelas 12		
Pemeriksa Belanja Negara dan PNBPN		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Kebijakan Audit	7	1
Analisis Audit	7	1
Analisis Laporan Hasil Audit	7	1
Analisis Pengawasan	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengelola Keuangan	6	1
Pengelola Pengaduan Publik	6	1
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6	1

Pemeriksa Keuangan Teknis		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Kebijakan Audit	7	1
Analisis Audit	7	1
Analisis Laporan Hasil Audit	7	1
Analisis Pengawasan	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengelola Keuangan	6	1
Pengelola Pengaduan Publik	6	1
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6	1

Pemeriksa Keuangan Teknis		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Kebijakan Audit	7	1
Analisis Audit	7	1
Analisis Laporan Hasil Audit	7	1
Analisis Pengawasan	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengelola Keuangan	6	1
Pengelola Pengaduan Publik	6	1
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6	1

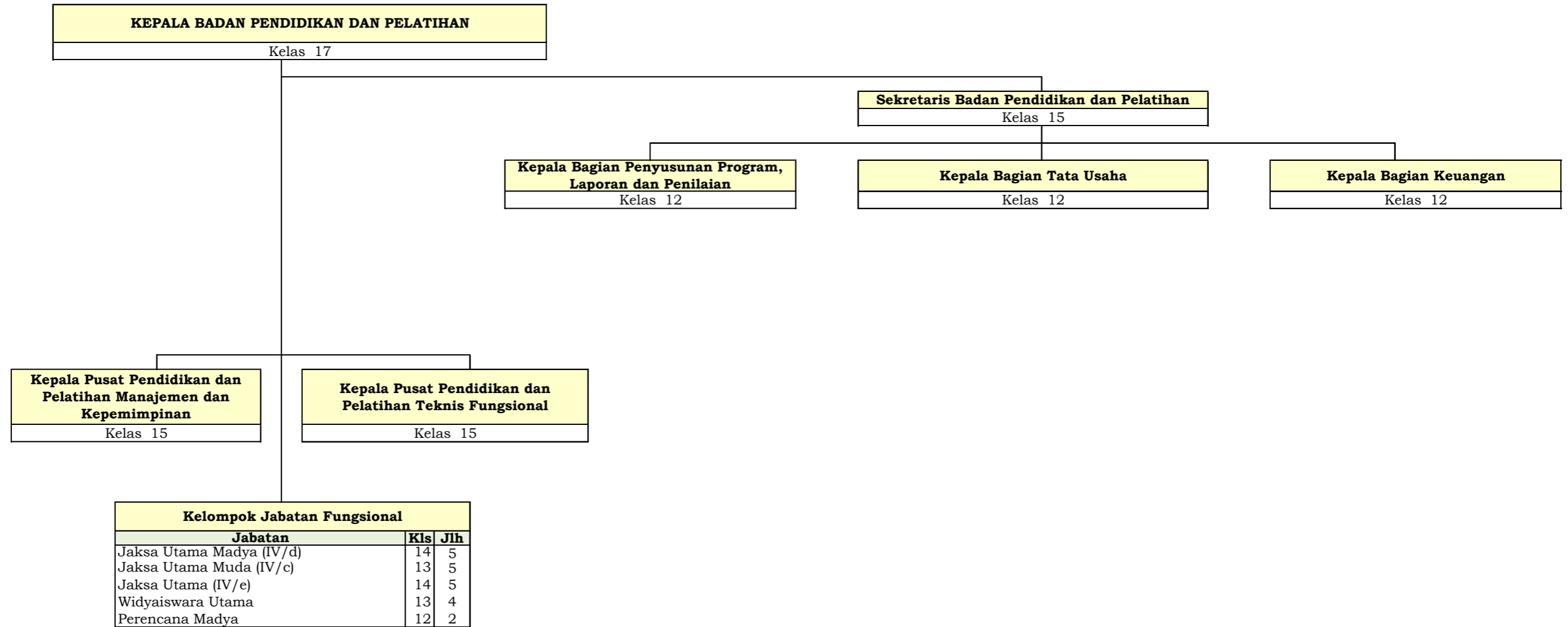
Pemeriksa Keuangan Teknis		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Kebijakan Audit	7	1
Analisis Audit	7	1
Analisis Laporan Hasil Audit	7	1
Analisis Pengawasan	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengelola Keuangan	6	1
Pengelola Pengaduan Publik	6	1
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6	1

Pemeriksa Keuangan Teknis		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Kebijakan Audit	7	1
Analisis Audit	7	1
Analisis Laporan Hasil Audit	7	1
Analisis Pengawasan	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengelola Keuangan	6	1
Pengelola Pengaduan Publik	6	1
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6	1

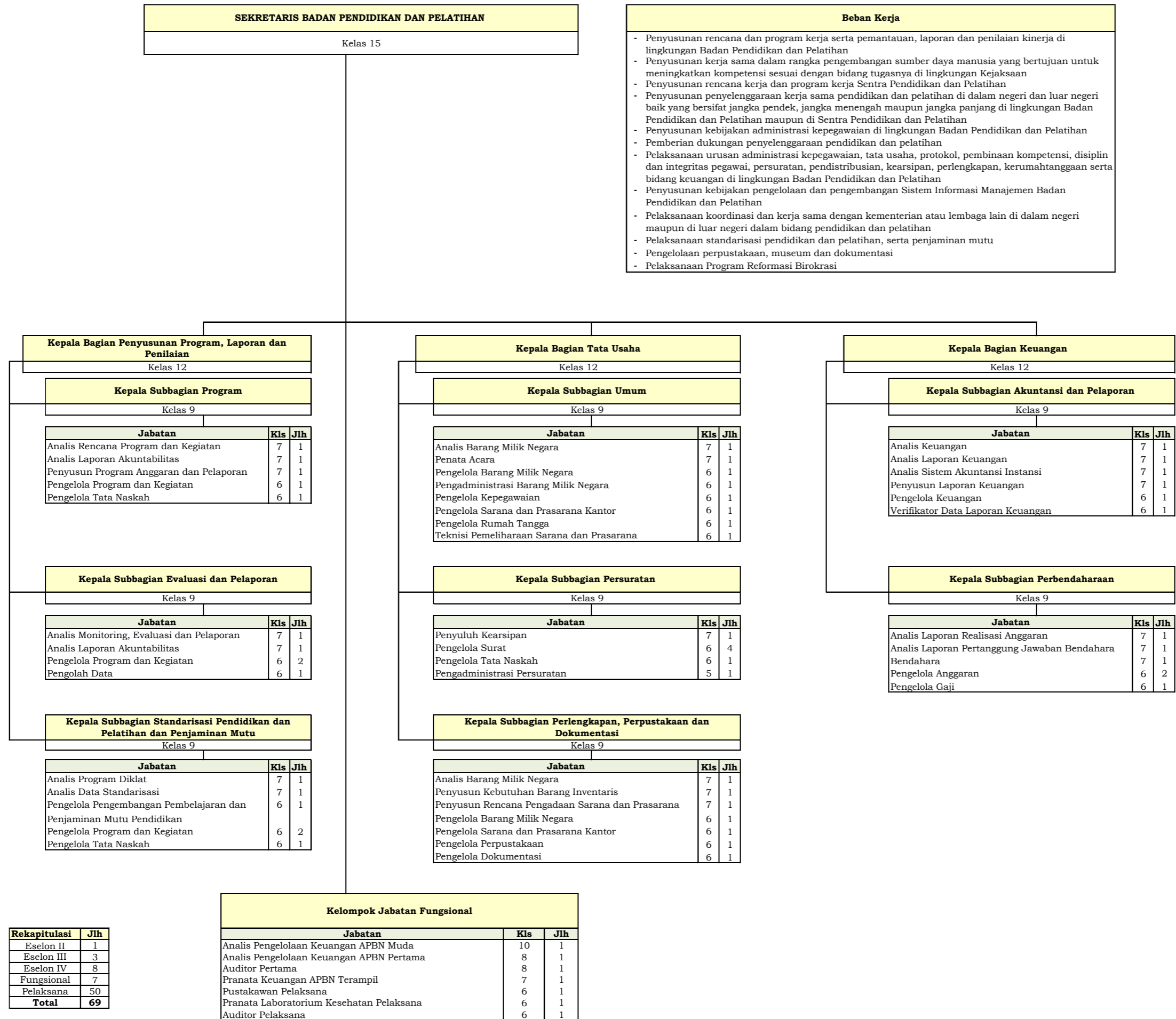
Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	8
Fungsional	24
Pelaksana	62
Total	99

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Pranata Keuangan APBN Penyelia	8	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	7	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	6	1
Arsiparis Pertama	8	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	2
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	2
Jaksa Madya (IV/a)	11	2
Jaksa Muda (III/d)	10	2
Jaksa Pratama (III/c)	9	2
Auditor Pelaksana	6	1
Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1
Auditor Penyelia	8	1
Auditor Pertama	8	1
Auditor Muda	9	1
Auditor Madya	11	1

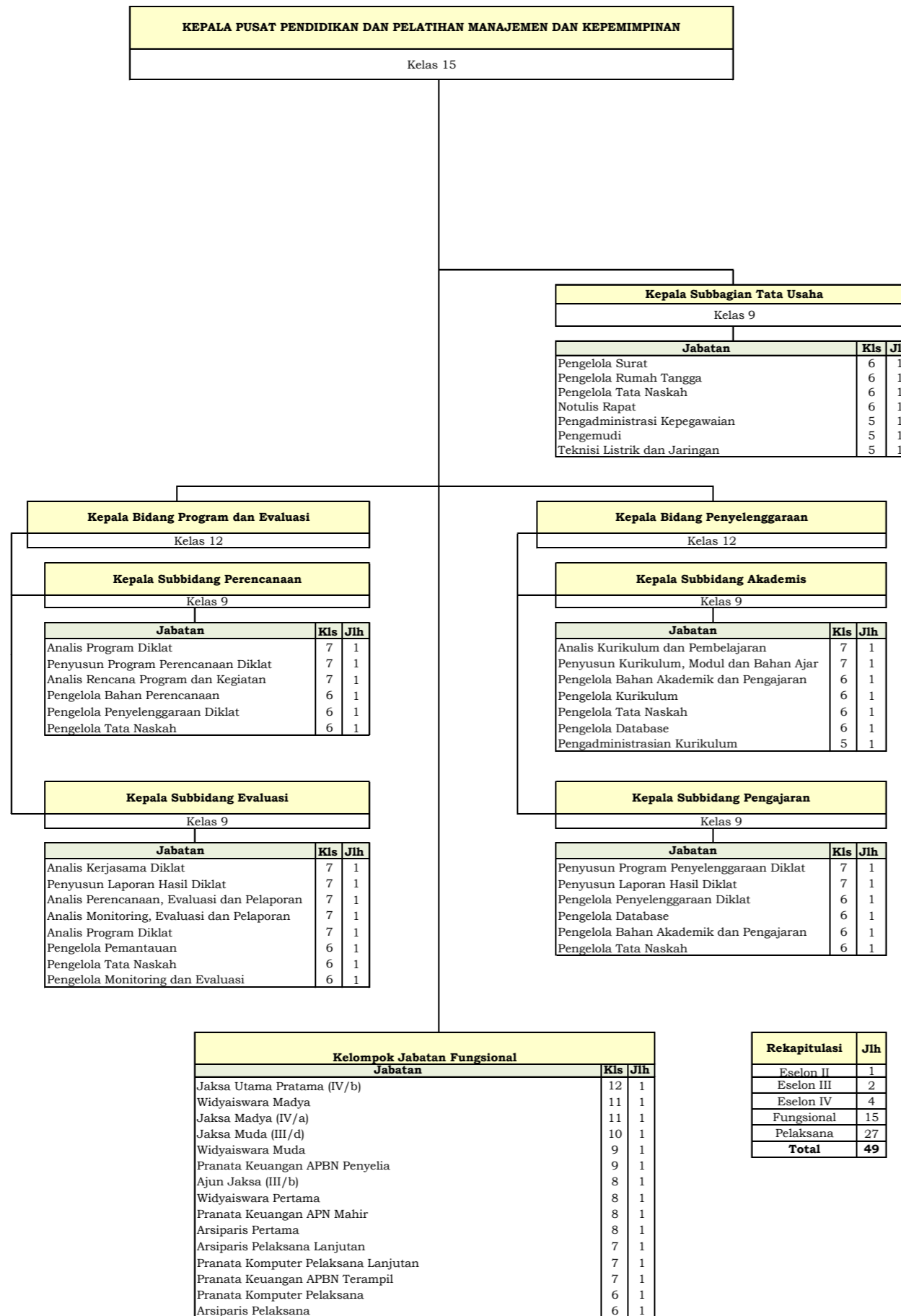
H. PETA JABATAN PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



H1. PETA JABATAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



H2. PETA JABATAN PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN



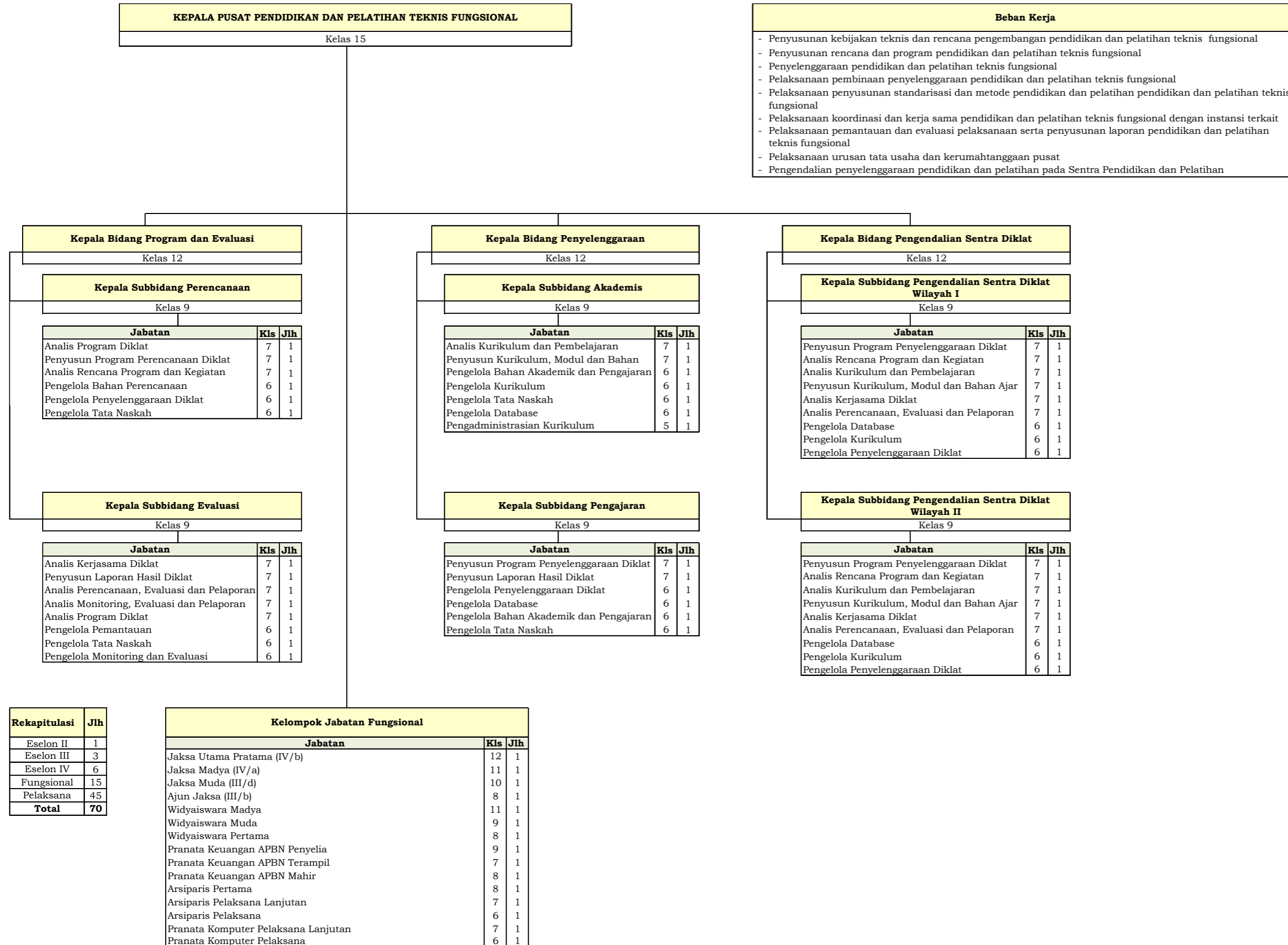
Beban Kerja

- Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen
- Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen
- Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen
- Pelaksanaan penyusunan standarisasi dan metode pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen dengan instansi terkait
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat

Rekapitulasi

Eselon	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	2
Eselon IV	4
Fungsional	15
Pelaksana	27
Total	49

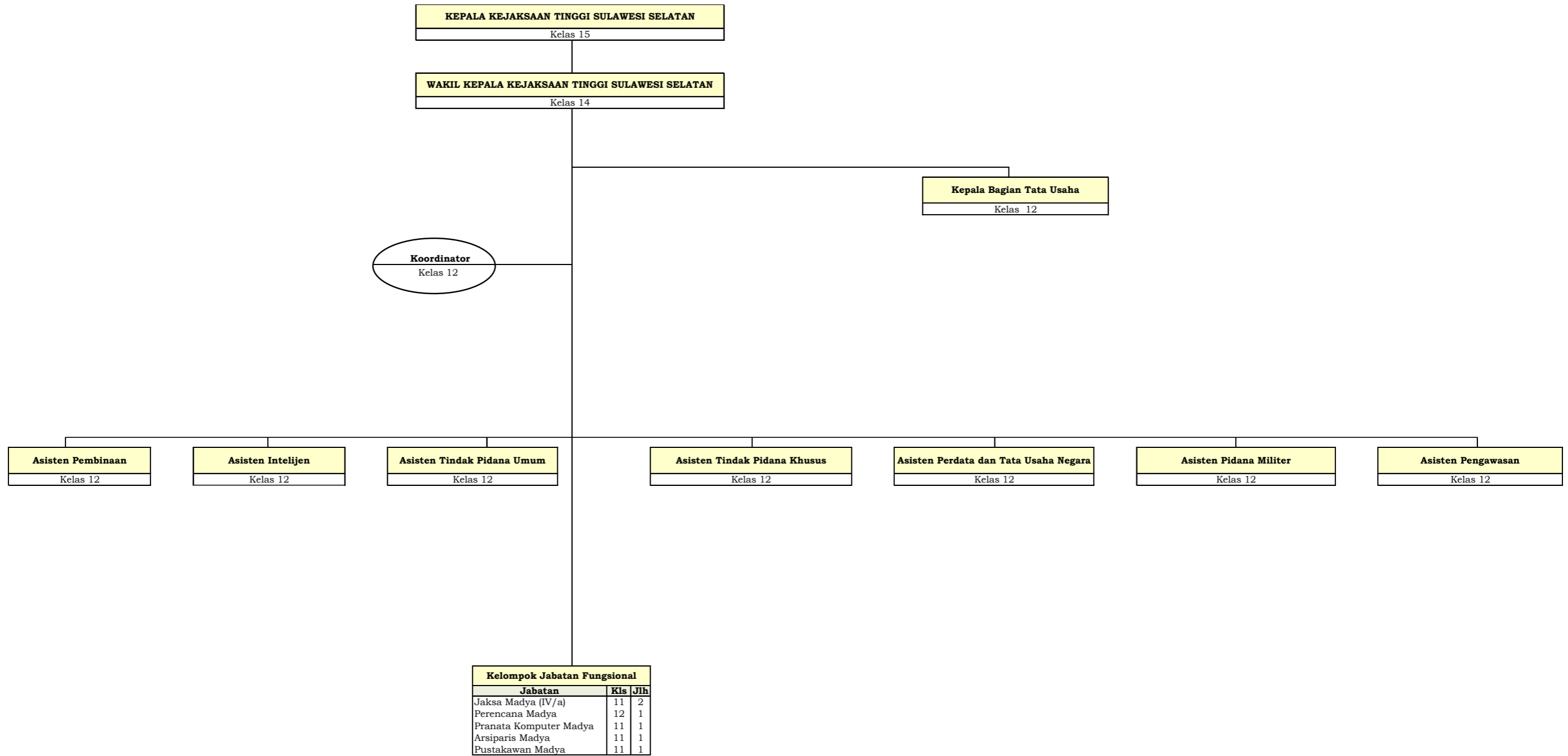
H3. PETA JABATAN PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL



- | Beban Kerja | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional - Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan teknis fungsional - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional - Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional - Pelaksanaan penyusunan standarisasi dan metode pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional - Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dengan instansi terkait - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional - Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat - Pengendalian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Sentra Pendidikan dan Pelatihan | |

Rekapitulasi	Jlh
Eselon II	1
Eselon III	3
Eselon IV	6
Fungsional	15
Pelaksana	45
Total	70

I. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN



II. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN

ASISTEN PEMBINAAN	
Kelas 12	

Beban Kerja	
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis - Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerja sama seluruh satuan kerja di bidang administrasi - Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya - Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya - Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya - Pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pendapatan dan piutang negara - Pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, barang sitaan dan barang rampasan negara - Pelaksanaan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi - Pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi 	

Kepala Subbagian Kepegawaian			
Kelas 9			
Kepala Urusan Kepangkatan dan Mutasi Pegawai			
Kelas 8			
Jabatan	Kls	Jlh	
Penyusun Rencana Mutasi	7	1	
Pengelola Kepegawaian	6	1	
Pranata Promosi	6	1	
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	

Kepala Subbagian Keuangan			
Kelas 9			
Kepala Urusan Akuntansi dan Pelaporan			
Kelas 8			
Jabatan	Kls	Jlh	
Penyusun Laporan Keuangan	7	1	
Verifikator Data Laporan Keuangan	6	1	
Pengelola Akuntansi	6	1	
Pengolah Data Sistem Akuntansi	6	1	

Kepala Subbagian Umum			
Kelas 9			
Kepala Urusan Rumah Tangga, Sarana Prasarana, dan Kearsipan			
Kelas 8			
Jabatan	Kls	Jlh	
Sekretaris (PTSP)	6	2	
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	1	
Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6	1	
Pengelola Sistem dan Jaringan	6	1	
Pengelola Rumah Tangga	6	1	
Teknisi Listrik, dan Jaringan	5	1	
Teknisi Listrik, Telepon, AC, dan Lift	5	1	
Teknisi Peralatan dan Mesin	5	1	
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	1	
Pranata Taman	5	1	
Pramu Bakti	5	1	

Kepala Subbagian Daskrimti dan Perpustakaan			
Kelas 9			
Kepala Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi			
Kelas 8			
Jabatan	Kls	Jlh	
Analisis Data Standarisasi	7	2	
Pengelola Database	6	1	
Pengelola Keamanan Sistem Informasi	6	1	
Pengelola Sistem Jaringan	6	4	
Petugas Teknologi Informasi Komputer	5	1	

Kepala Subbagian Perencanaan		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	1
Pengelola Bahan Perencanaan	6	1
Pengolah Data	6	2
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Urusan Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai			
Kelas 8			
Jabatan	Kls	Jlh	
Pengelola Pengembangan Karir	6	1	
Pengelola Kepegawaian	6	1	
Pranata Promosi	6	1	
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	

Kepala Urusan Anggaran, Perjalanan, Perbendaharaan, dan Pendapatan dan Piutang Negara			
Kelas 8			
Jabatan	Kls	Jlh	
Bendahara	7	1	
Pengelola Perjalanan Dinas	6	1	
Verifikator Keuangan	6	1	
Pengelola Pendapatan	6	1	
Pengadministrasi Anggaran	5	1	

Kepala Urusan Perlengkapan dan Barang Milik Negara			
Kelas 8			
Jabatan	Kls	Jlh	
Analisis Barang Milik Negara	7	1	
Pengelola Barang Milik Negara	6	2	
Pengelola Tata Naskah	6	2	

Kepala Urusan Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum			
Kelas 8			
Jabatan	Kls	Jlh	
Pengelola Perpustakaan	6	1	
Pengelola Dokumentasi	6	1	
Pengadministrasi Umum	5	1	
Pengadministrasi Hukum	5	1	

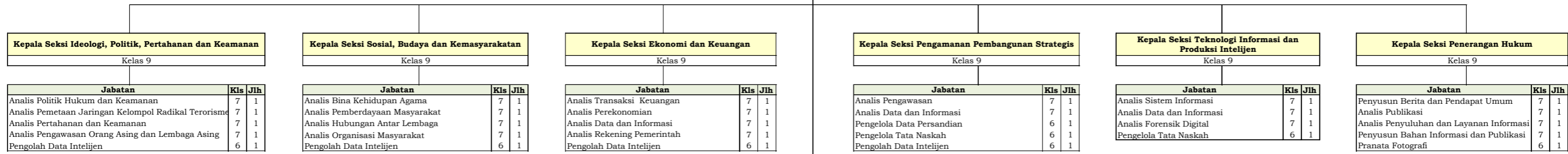
Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	5
Eselon V	8
Fungsional	13
Pelaksana	52
Total	79

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Perencana Muda	10	1
Perencana Pertama	8	4
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	1
Arsiparis Pertama	8	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1

12. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN

ASISTEN INTELIJEN		
Kelas 12		

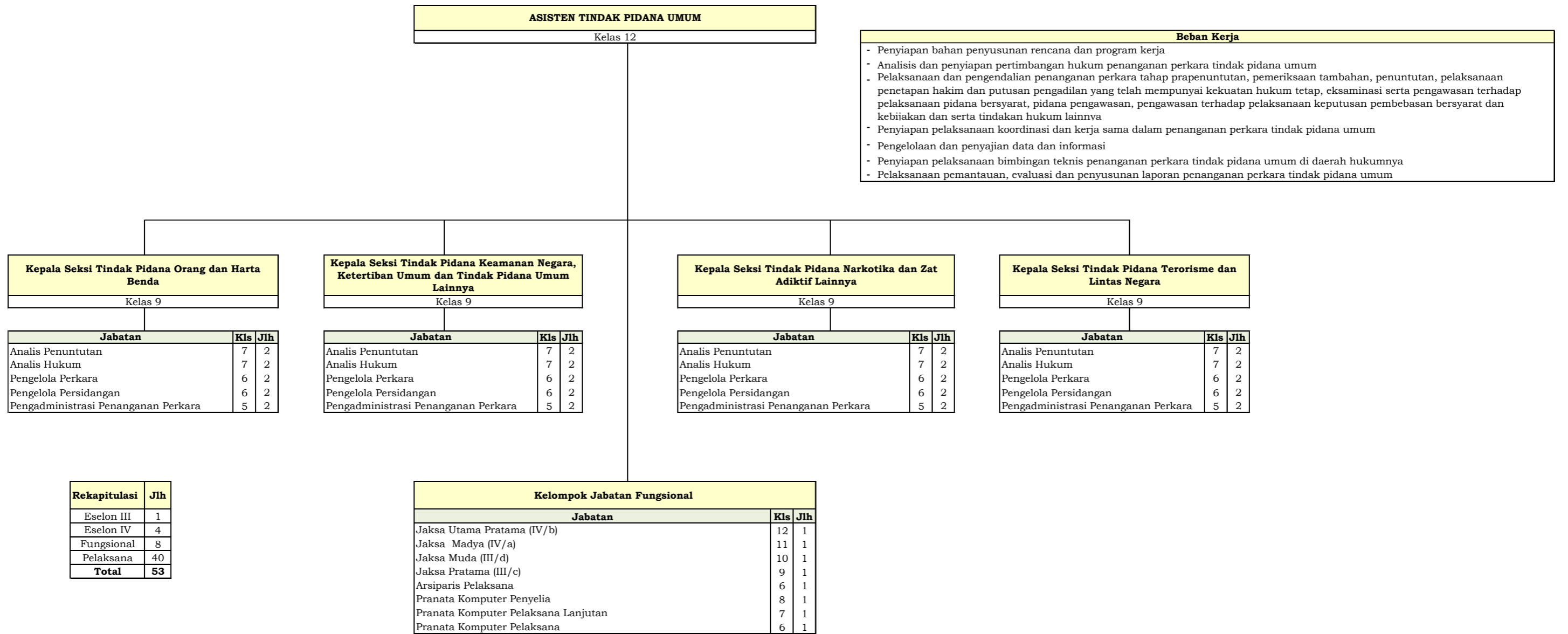
Beban Kerja
- Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya
- Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan
- Pelaksanaan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya
- Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya
- Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi
- Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen
- Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidental
- Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis
- Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya
- Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya
- Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen
- Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/ atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya
- Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya
- Pemeliharaan peralatan intelijen
- Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi



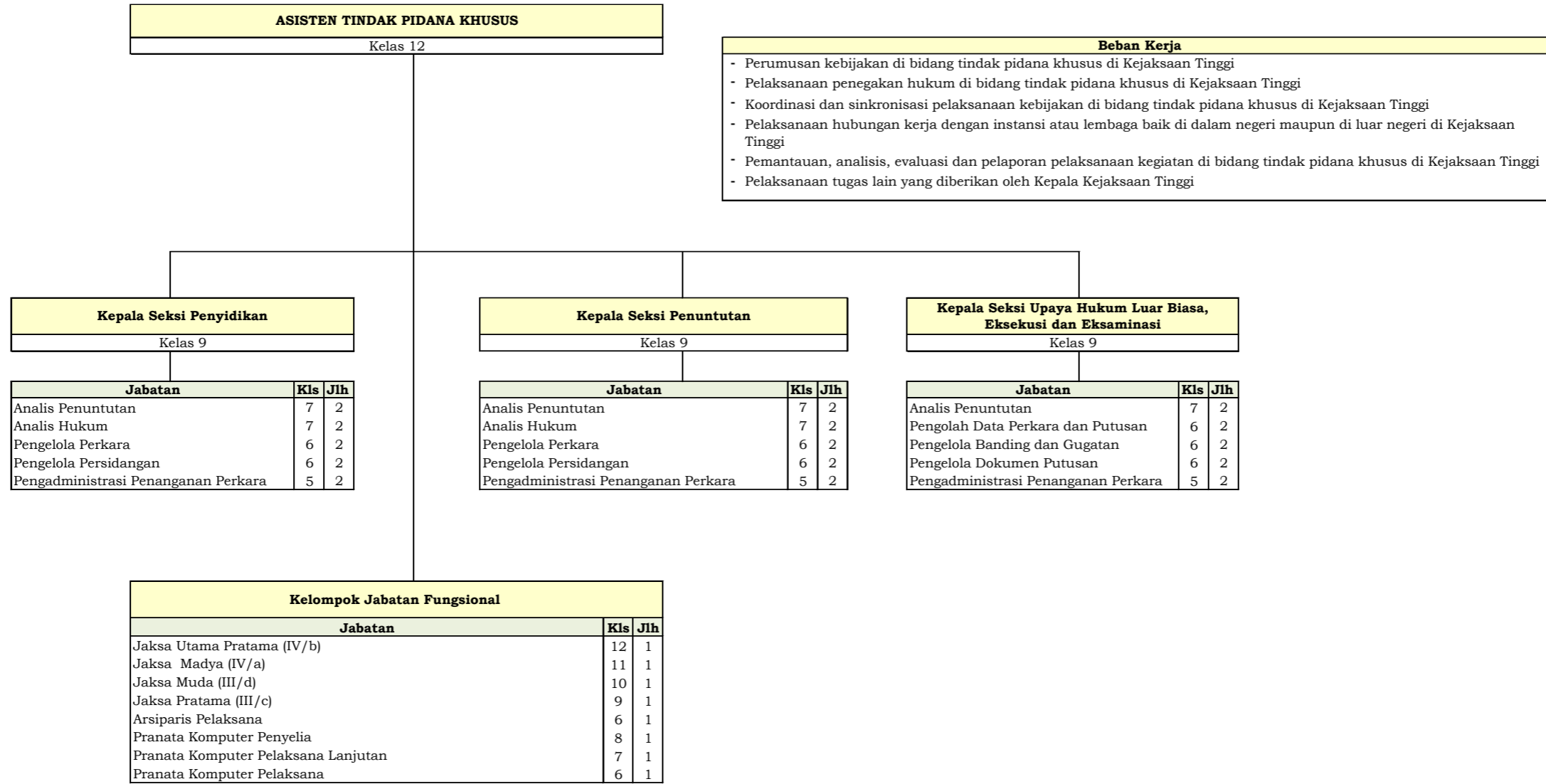
Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Fungsional	12
Pelaksana	29
Total	48

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	1
Jaksa Muda (III/d)	10	1
Jaksa Pratama (III/c)	9	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1
Sandiman Pertama	8	1
Sandiman Penyelia	8	1
Sandiman Pelaksana Lanjutan	7	1
Sandiman Pelaksana	6	1

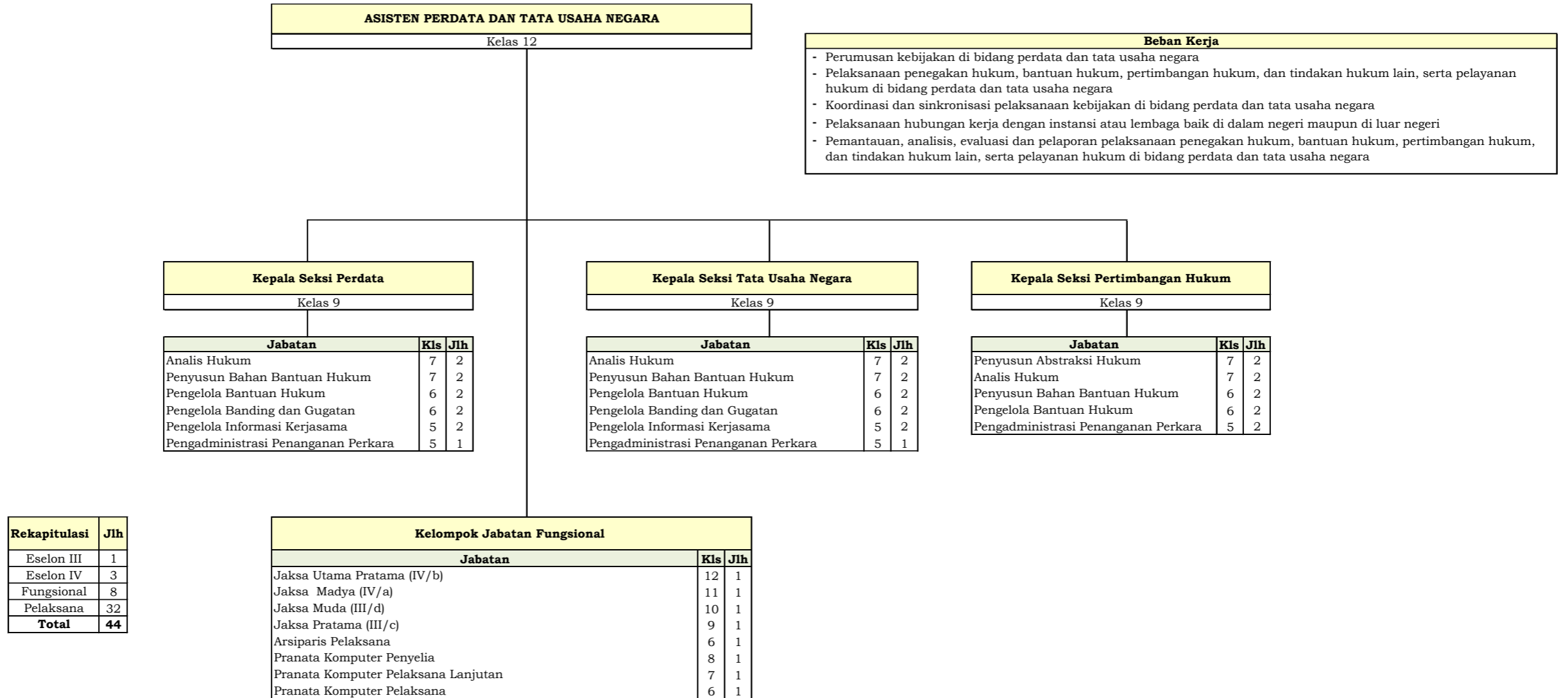
13. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN



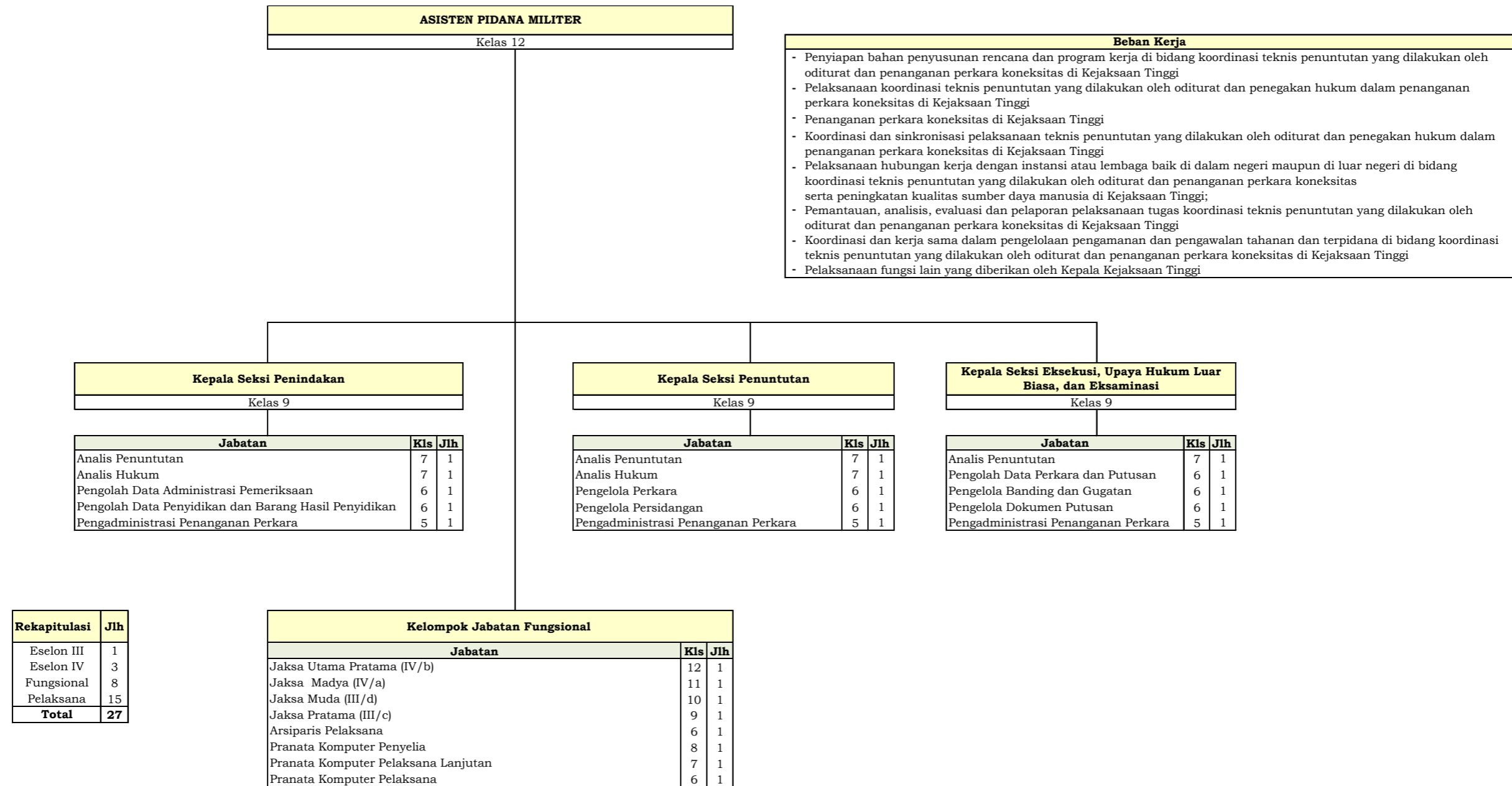
14. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN



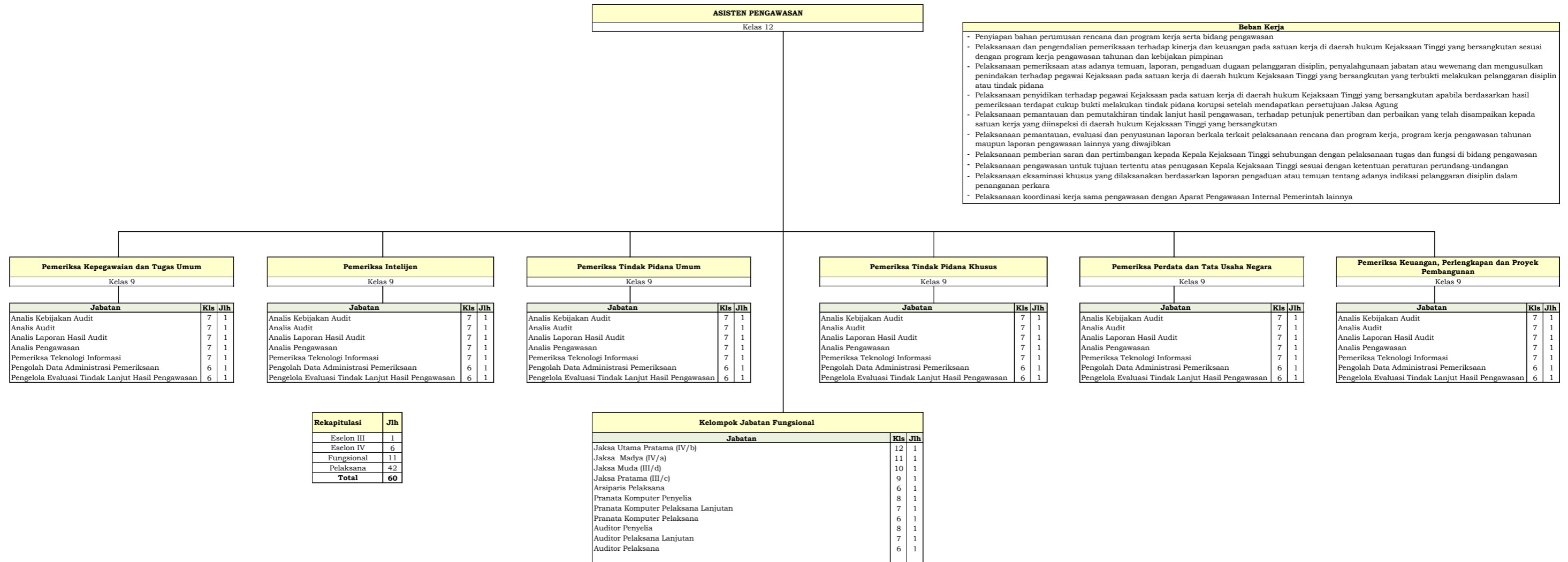
15. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN



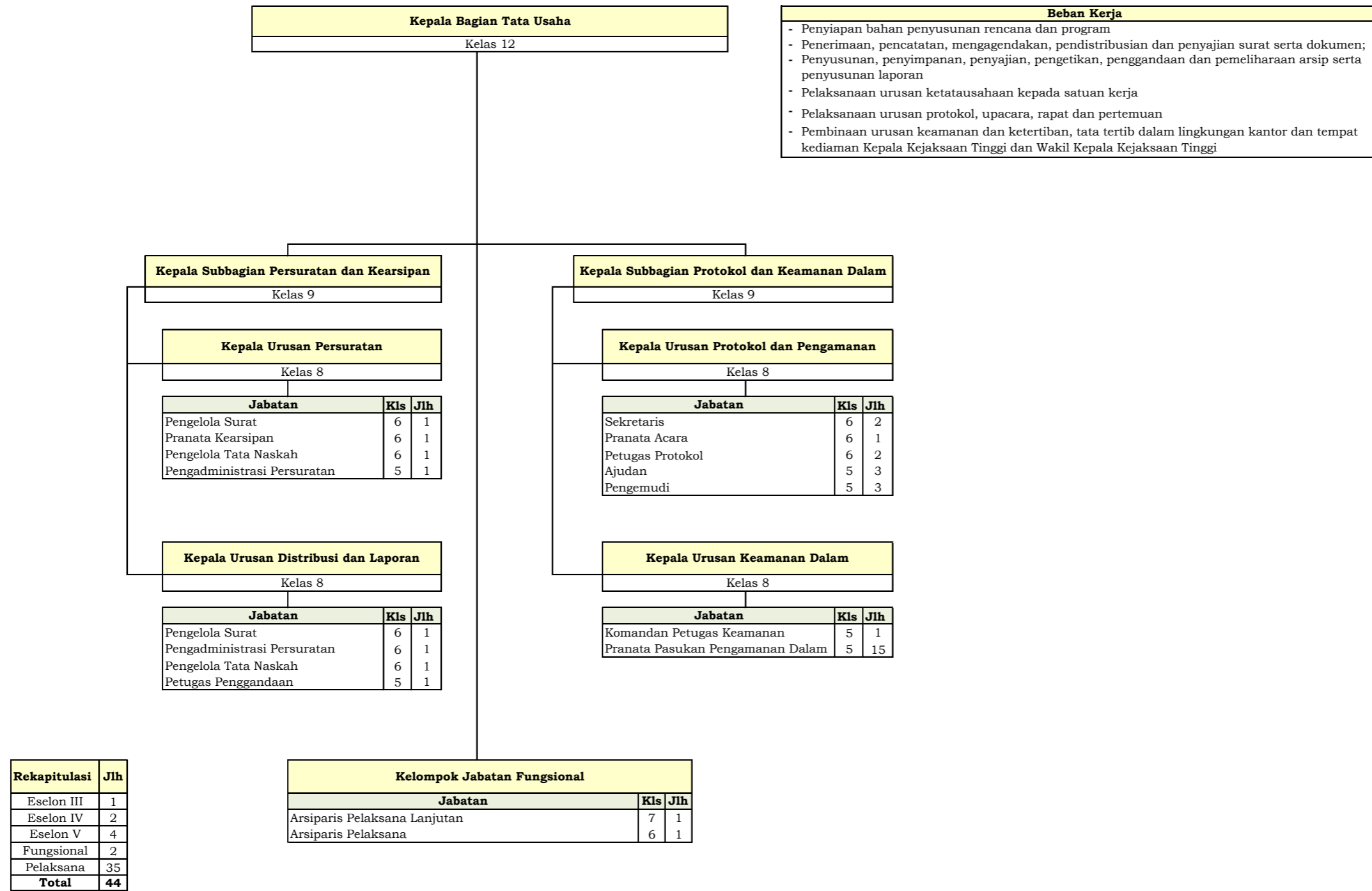
16. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN



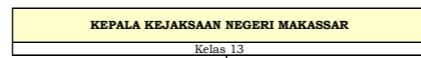
17. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN



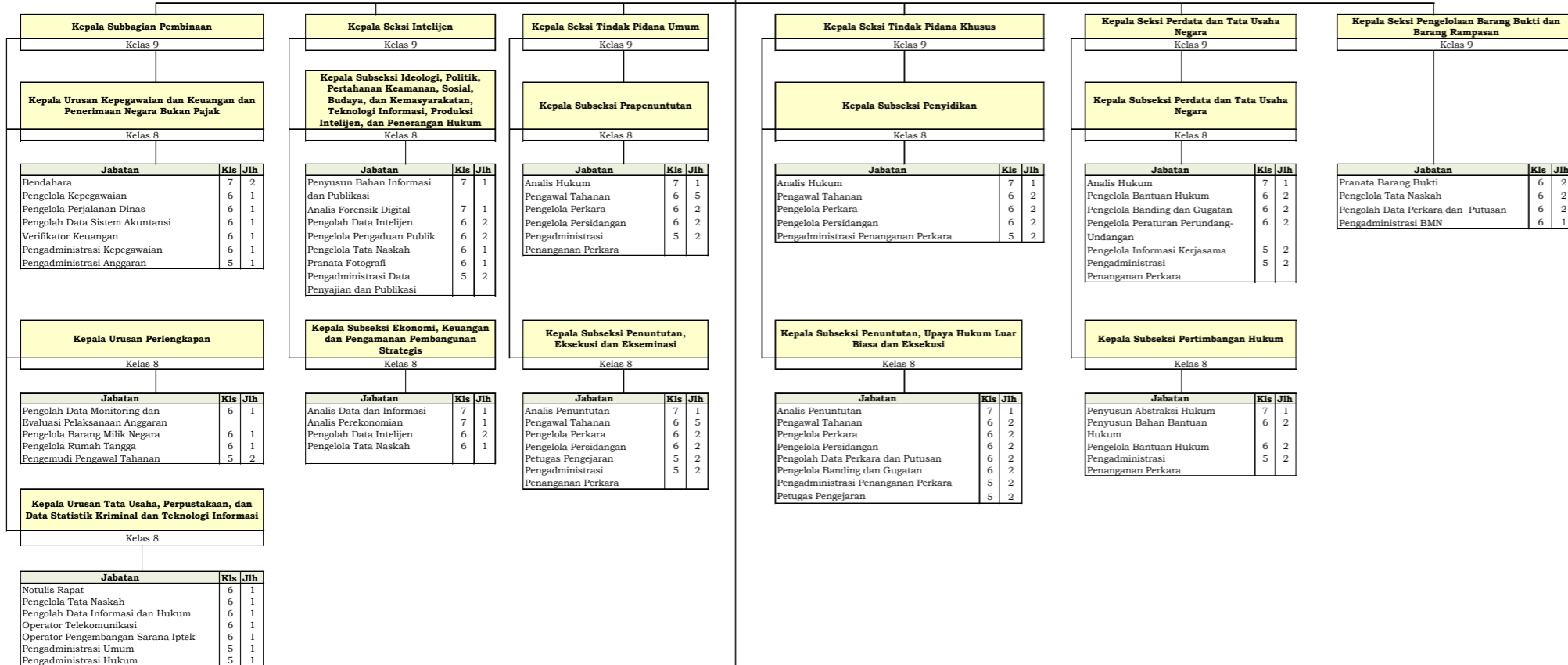
18. PETA JABATAN PADA BAGIAN TATA USAHA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN



19. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR



- Beban Kerja**
- Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna
 - Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya
 - Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi
 - Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
 - Melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

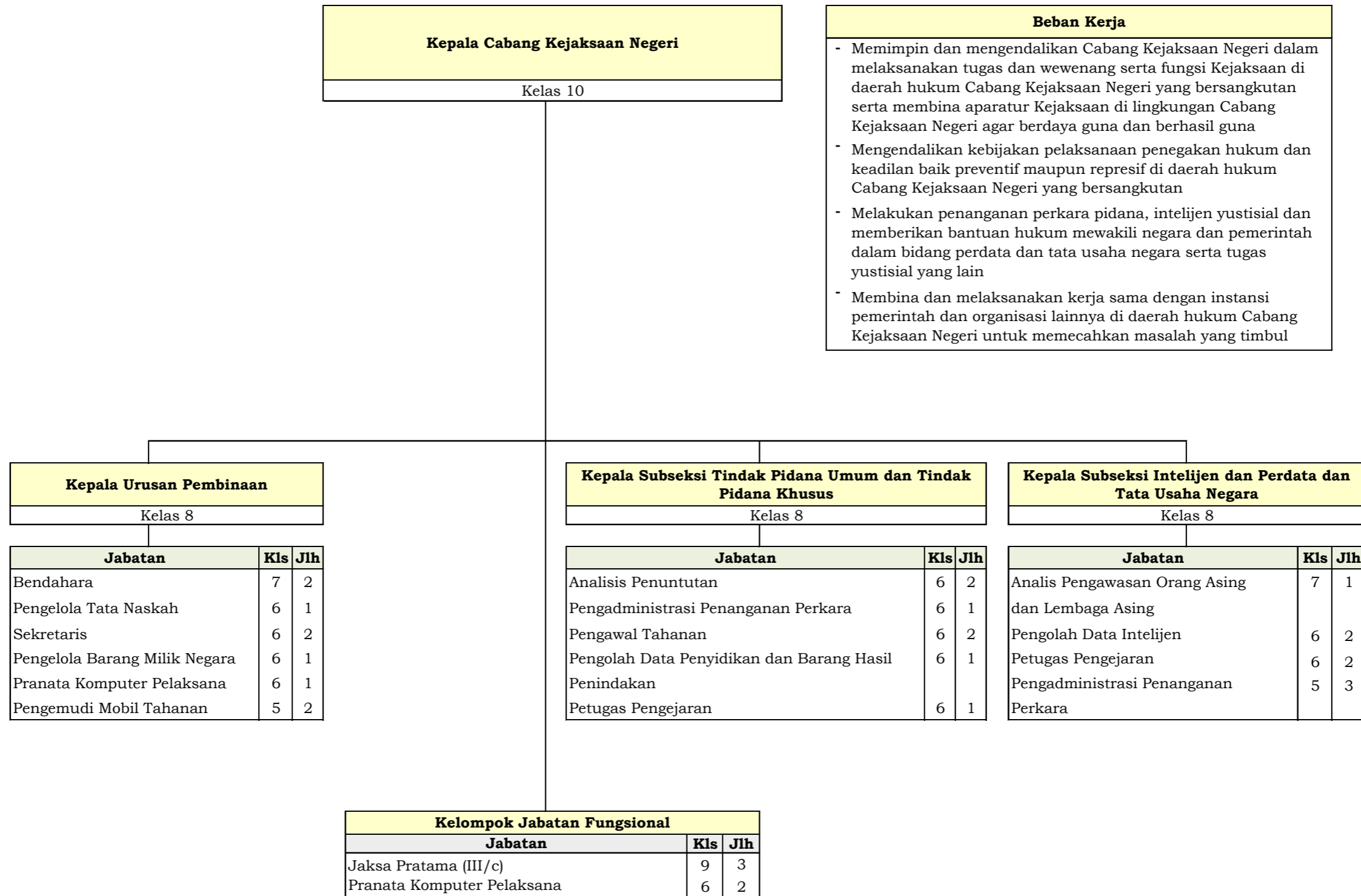


Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Muda (III/d)	10	2
Jaksa Pratama (III/c)	9	15
Ajun Jaksa (III/b)	8	3
Pranata Keuangan APBN Terampil	6	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	10
Sandiman Pelaksana Lanjutan	7	1
Sandiman Pelaksana	6	2
Agen Pelaksana Lanjutan	7	1
Agen Pelaksana	6	2

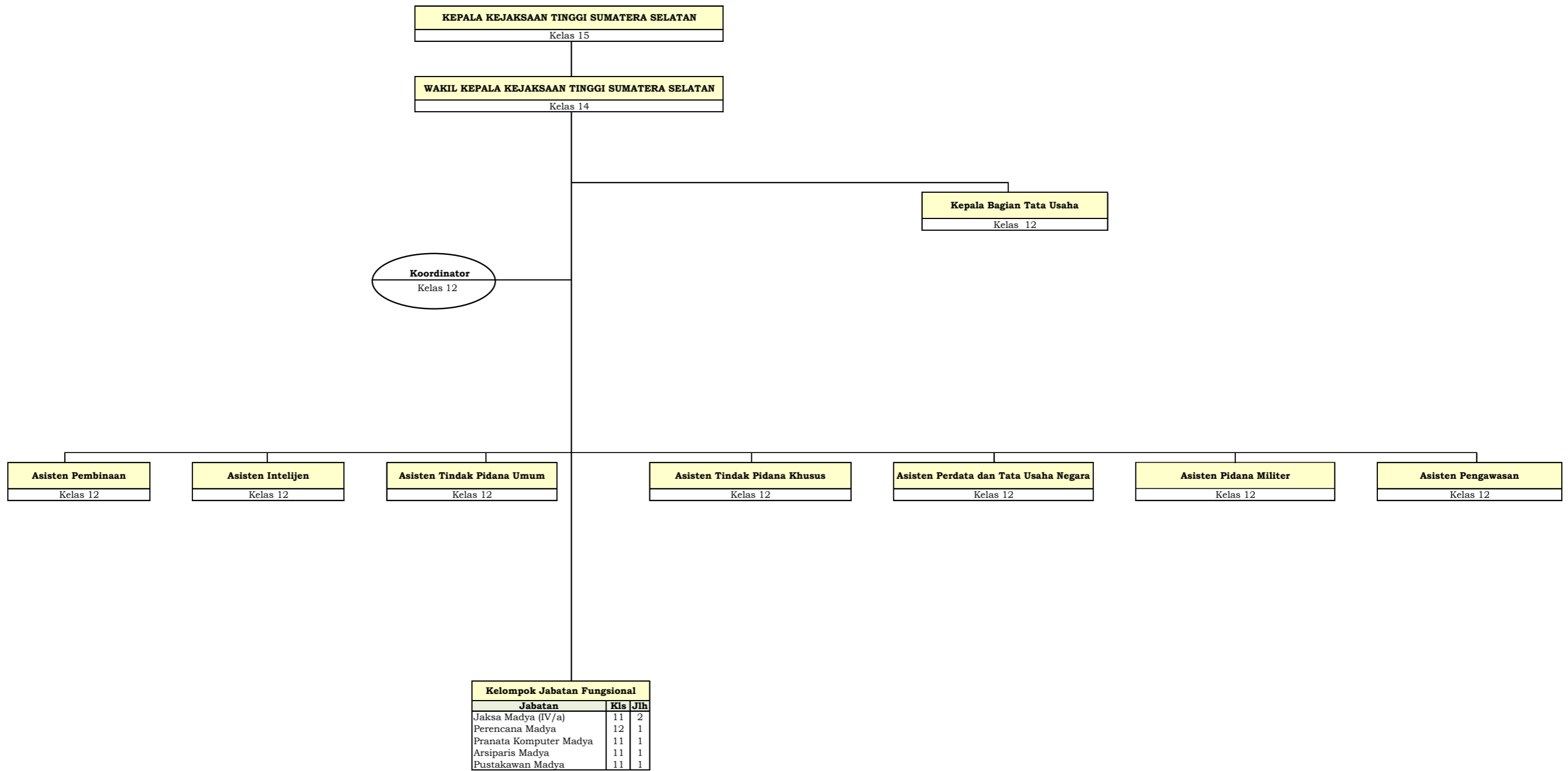
Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Eselon V	11
Fungsional	40
Pelaksana	110
Total	168

I10. PETA JABATAN PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

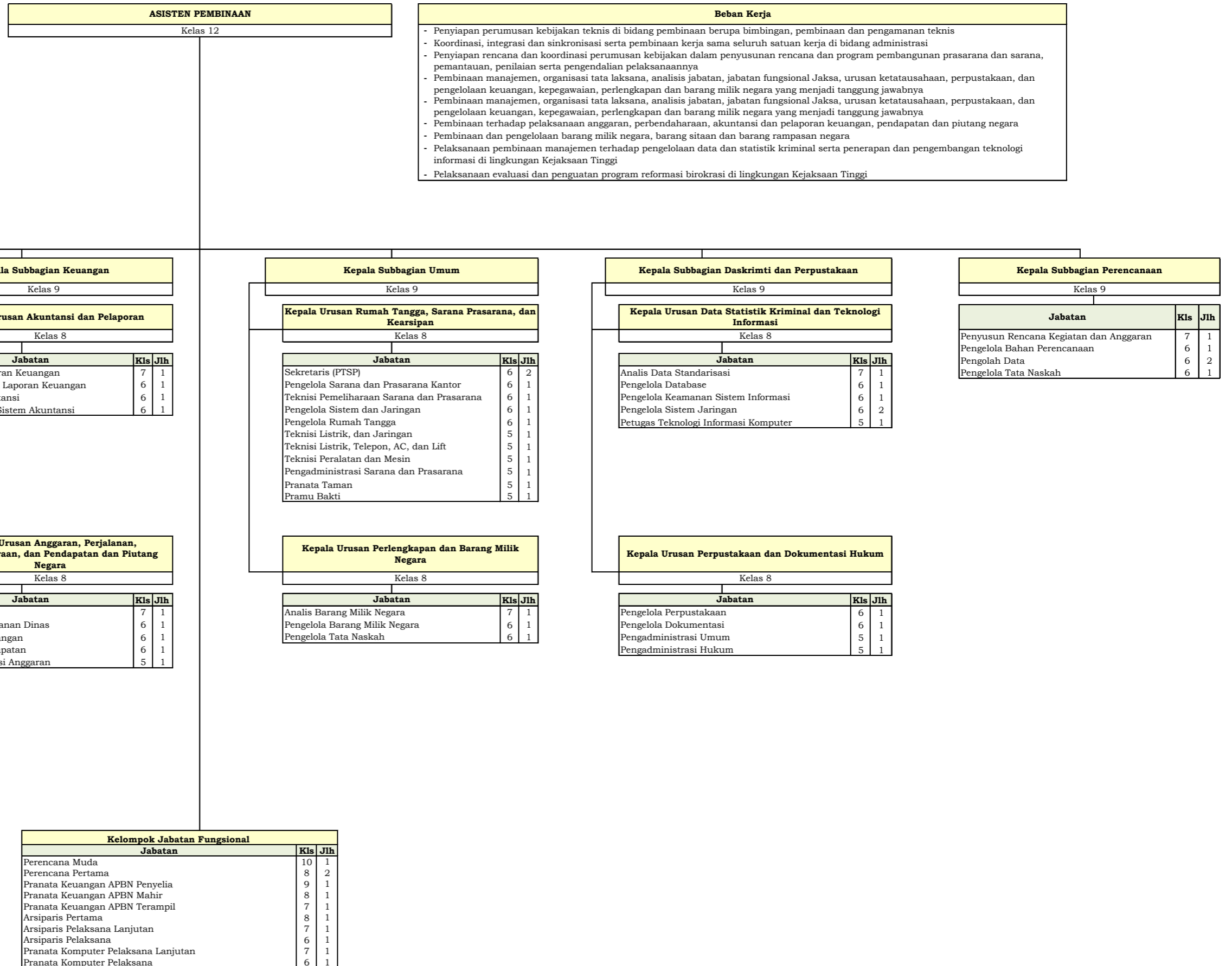


Rekapitulasi	Jlh
Eselon IV	1
Eselon V	3
Fungsional	5
Pelaksana	24
Total	33

J. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN



J1. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN



J2. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

ASISTEN INTELIJEN
Kelas 12

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan pertemuan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya - Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan - Pelaksanaan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi - Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen - Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidental - Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis - Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen - Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/ atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya - Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Pemeliharaan peralatan intelijen - Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi

Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Politik Hukum dan Keamanan	7	1
Analisis Pemetaan Jaringan Kelompok Radikal Terorisme	7	1
Analisis Pertahanan dan Keamanan	7	1
Analisis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Sosial, Budaya dan Masyarakat
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Bina Kehidupan Agama	7	1
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	1
Analisis Hubungan Antar Lembaga	7	1
Analisis Organisasi Masyarakat	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Transaksi Keuangan	7	1
Analisis Perencanaan	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Analisis Rekening Pemerintah	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pengawasan	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengelola Data Persandian	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Sistem Informasi	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

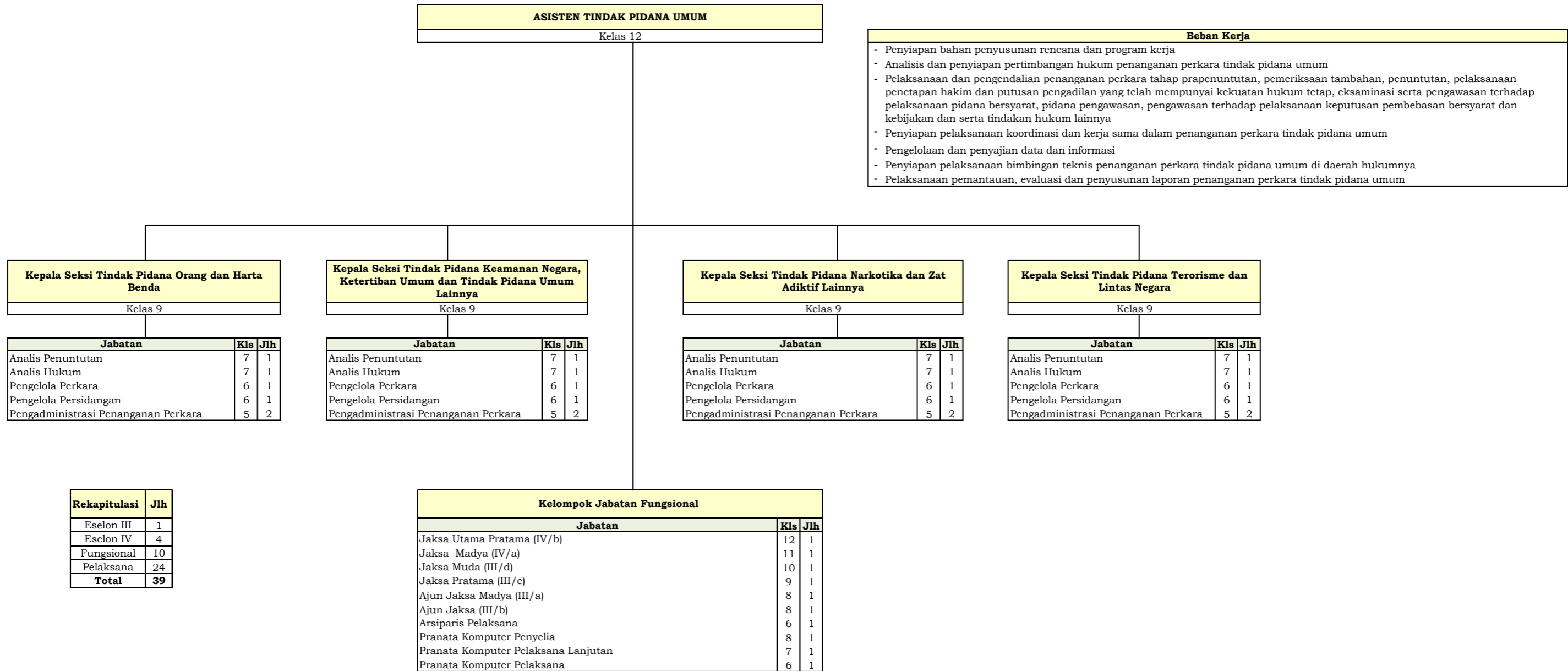
Kepala Seksi Penerangan Hukum
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7	1
Analisis Publikasi	7	1
Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7	1
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1
Pranata Fotografi	6	1

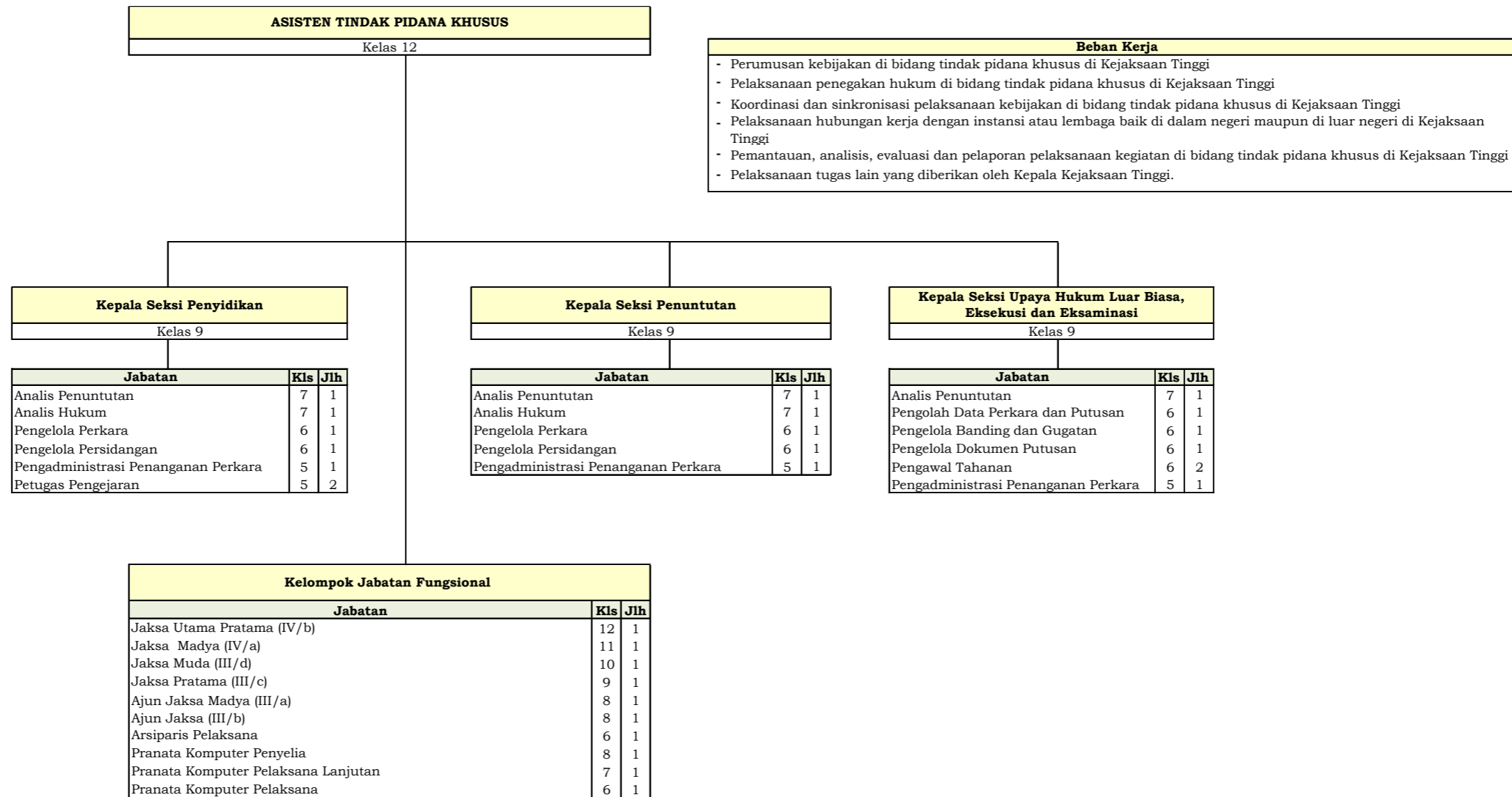
Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Fungsional	12
Pelaksana	29
Total	48

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	1
Jaksa Muda (III/d)	10	1
Jaksa Pratama (III/c)	9	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1
Sandiman Pertama	8	1
Sandiman Penyelia	8	1
Sandiman Pelaksana Lanjutan	7	1
Sandiman Pelaksana	6	1

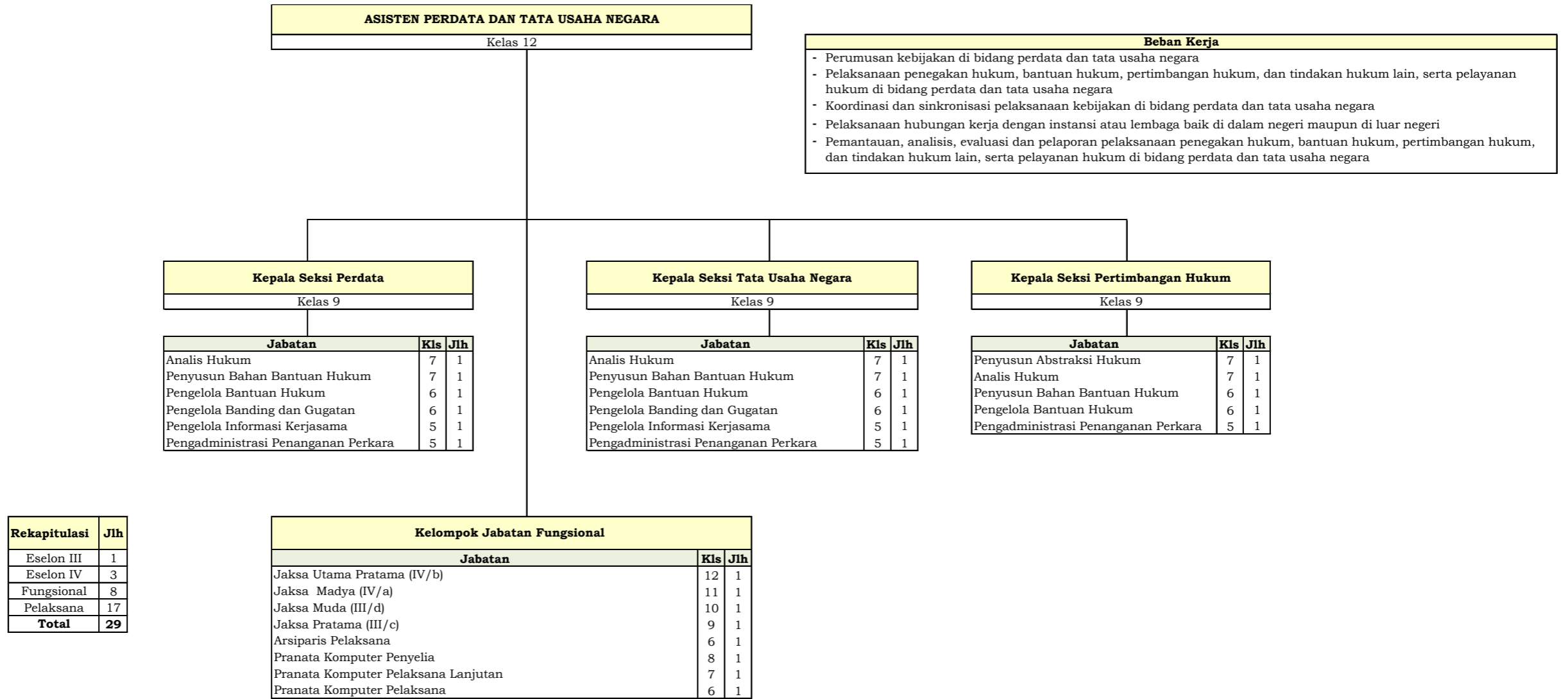
J3. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN



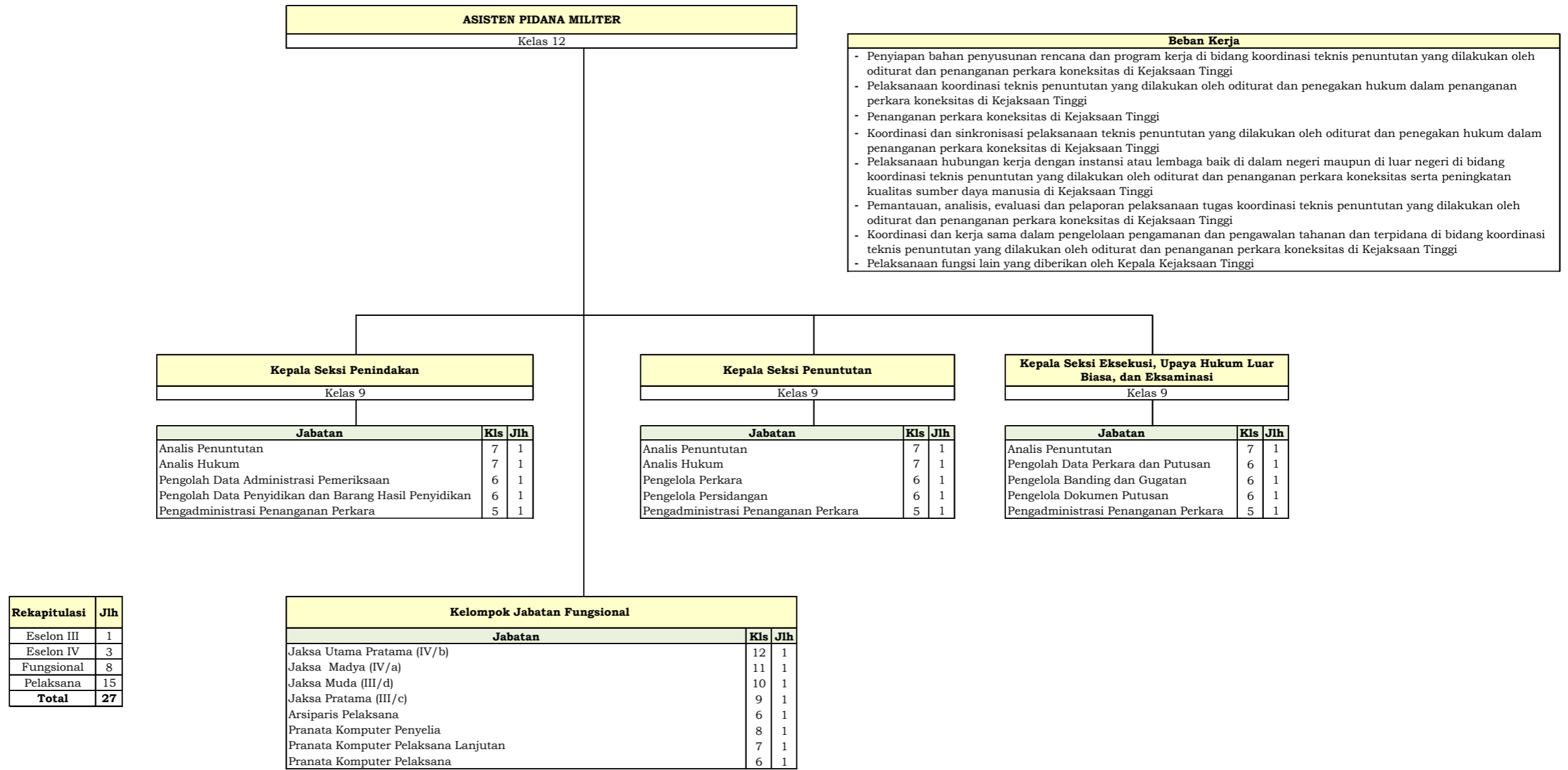
J4. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN



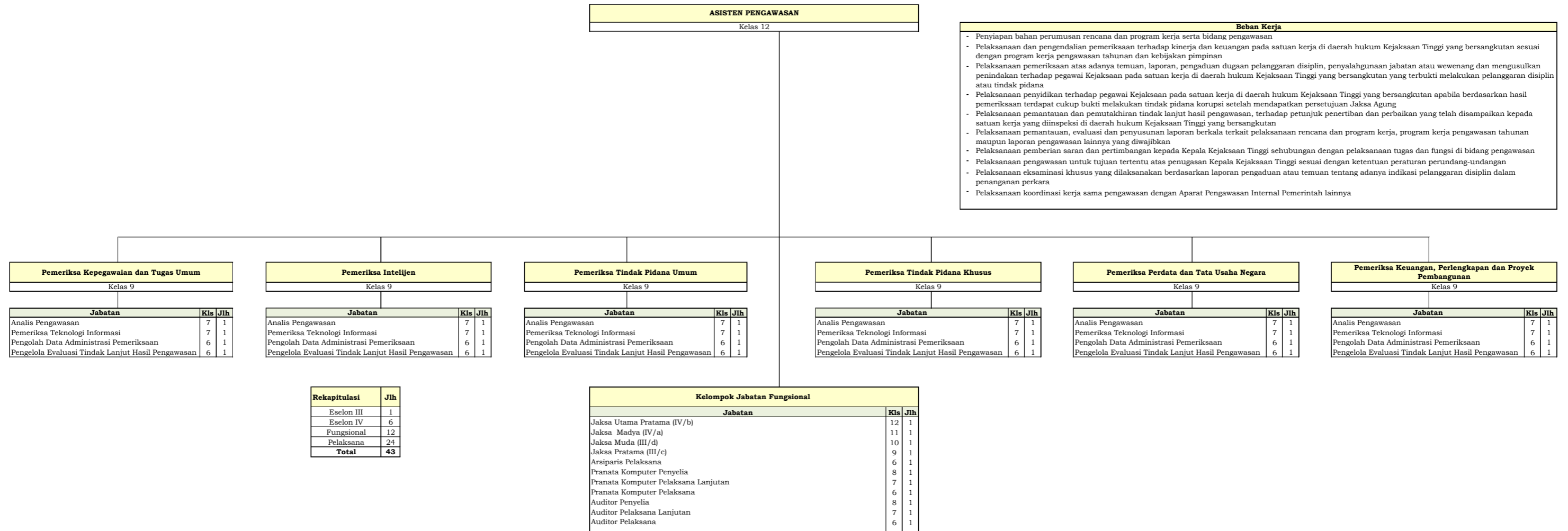
J5. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN



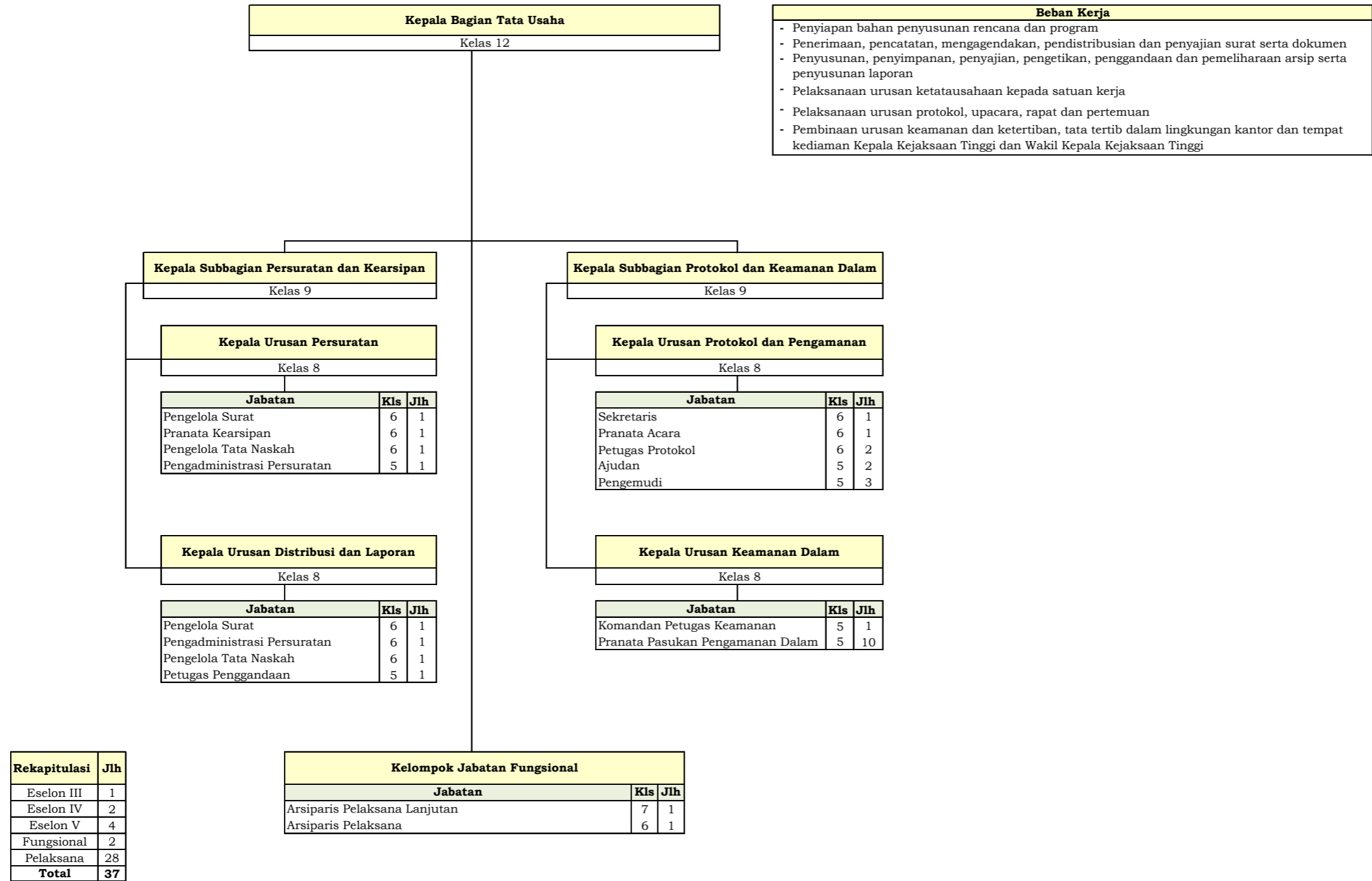
J6. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN



J7. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN



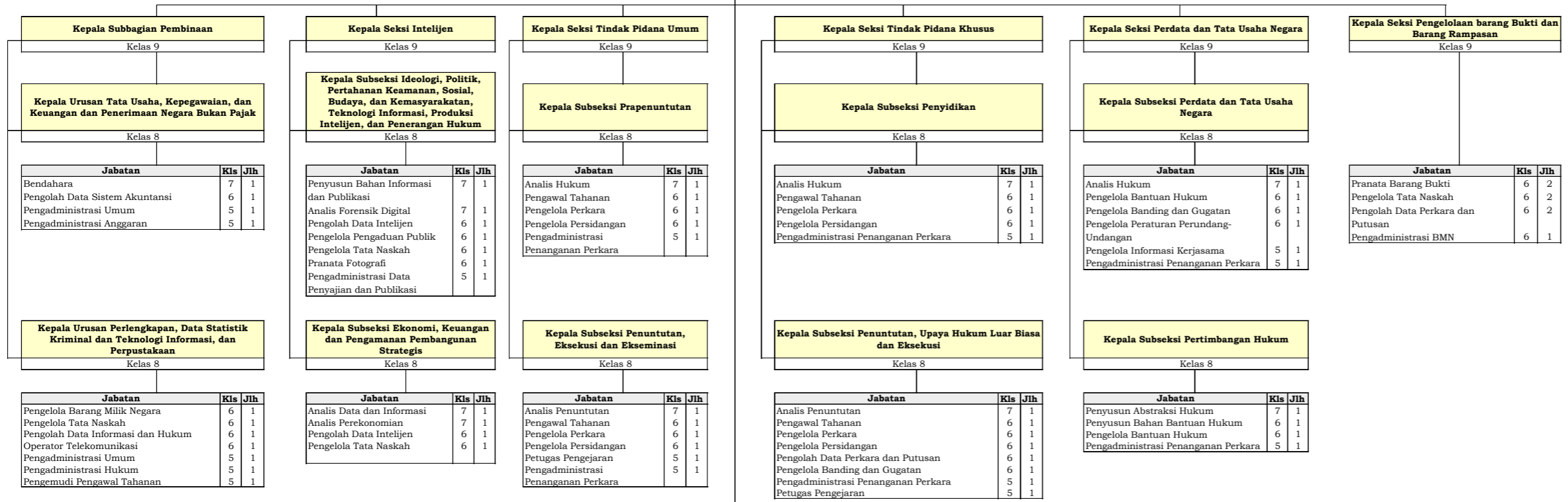
J8. PETA JABATAN PADA BAGIAN TATA USAHA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN



J9. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH
Kelas 12

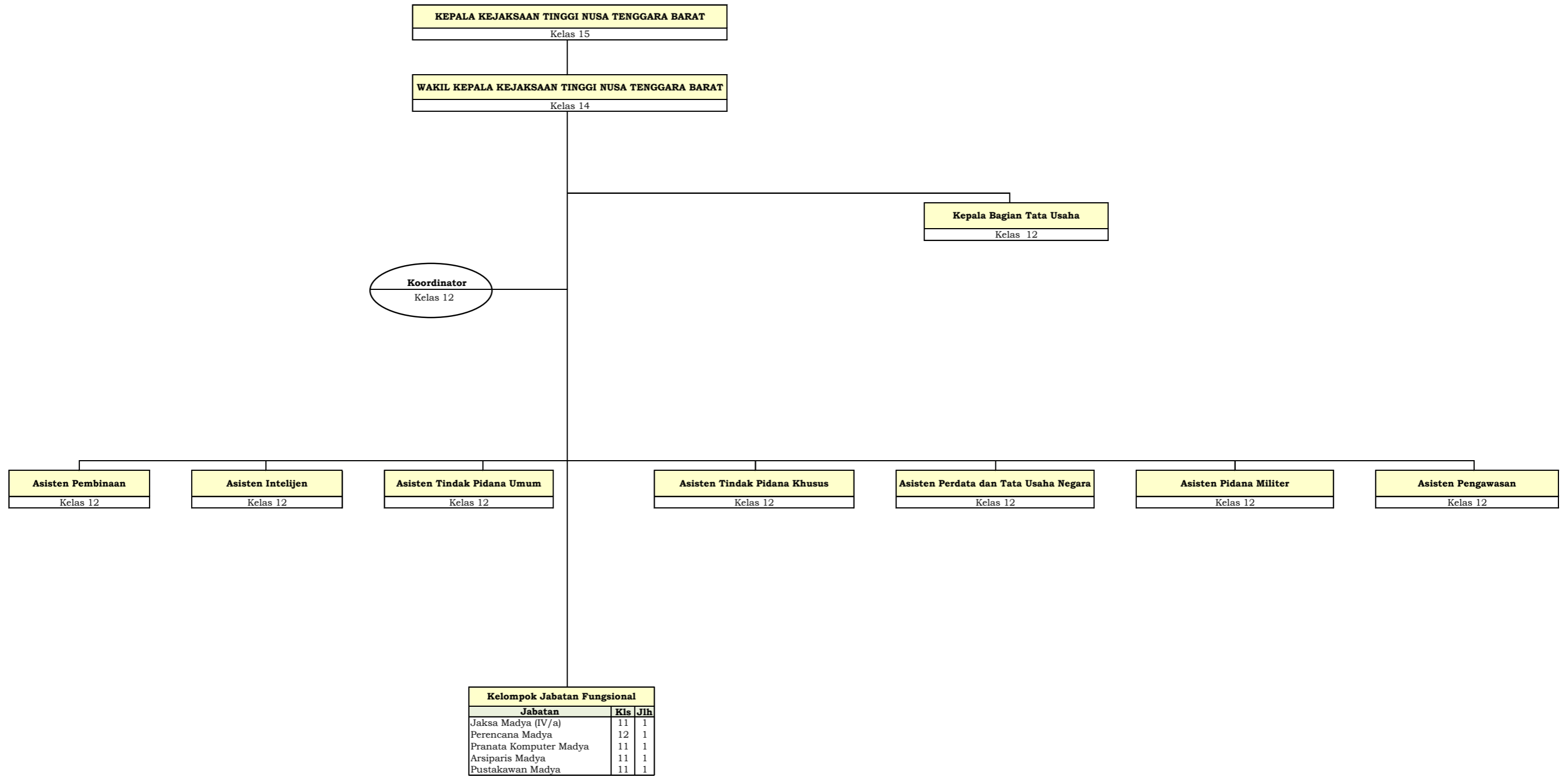
- Beban Kerja**
- Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna
 - Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya
 - Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi
 - Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
 - Melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Eselon V	10
Fungsional	40
Pelaksana	63
Total	120

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Muda (III/d)	10	2
Jaksa Pratama (III/c)	9	15
Ajun Jaksa (III/b)	8	3
Pranata Keuangan APBN Terampil	6	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	10
Sandiman Pelaksana Lanjutan	7	1
Sandiman Pelaksana	6	2
Agen Pelaksana Lanjutan	7	1
Agen Pelaksana	6	2

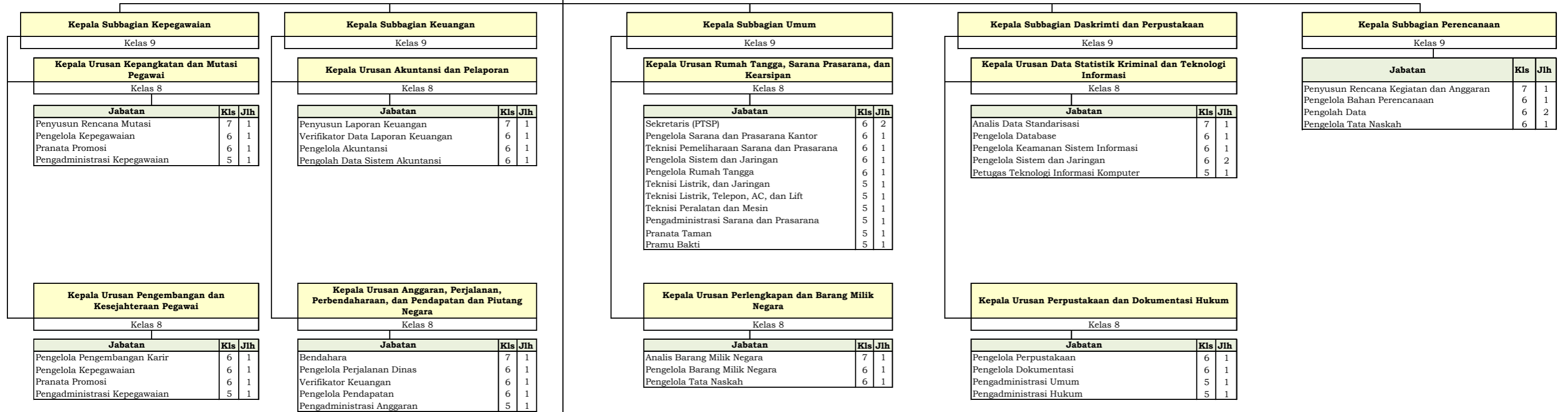
K. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT



K1. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

ASISTEN PEMBINAAN
Kelas 12

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis - Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerja sama seluruh satuan kerja di bidang administrasi - Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya - Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya - Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya - Pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pendapatan dan piutang negara - Pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, barang sitaan dan barang rampasan negara - Pelaksanaan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi - Pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi



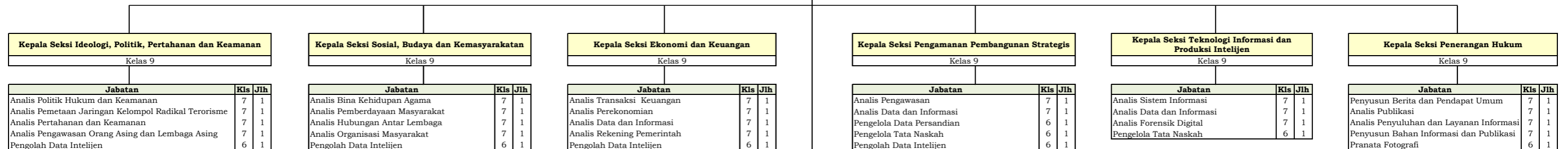
Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	5
Eselon V	8
Fungsional	15
Pelaksana	47
Total	76

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Perencana Muda	10	1
Perencana Pertama	8	2
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	1
Arsiparis Pertama	8	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1
Dokter Muda	10	1
Perawat Mahir	7	1
Penilai Pemerintah Muda	9	1
Penilai Pemerintah Pertama	8	1

K2. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

ASISTEN INTELIJEN
Kelas 12

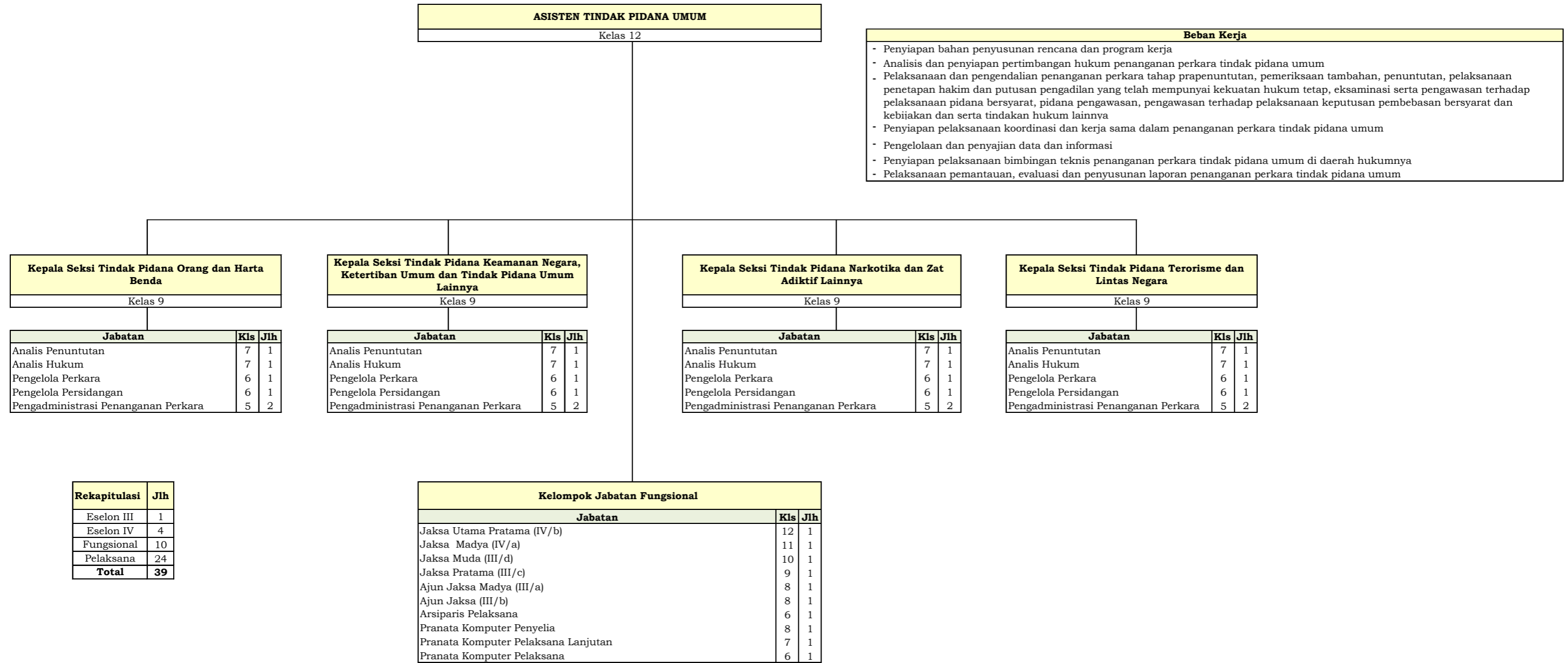
Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya - Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan - Pelaksanaan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi - Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen - Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidentil - Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis - Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen - Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/ atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya - Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Pemeliharaan peralatan intelijen - Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi



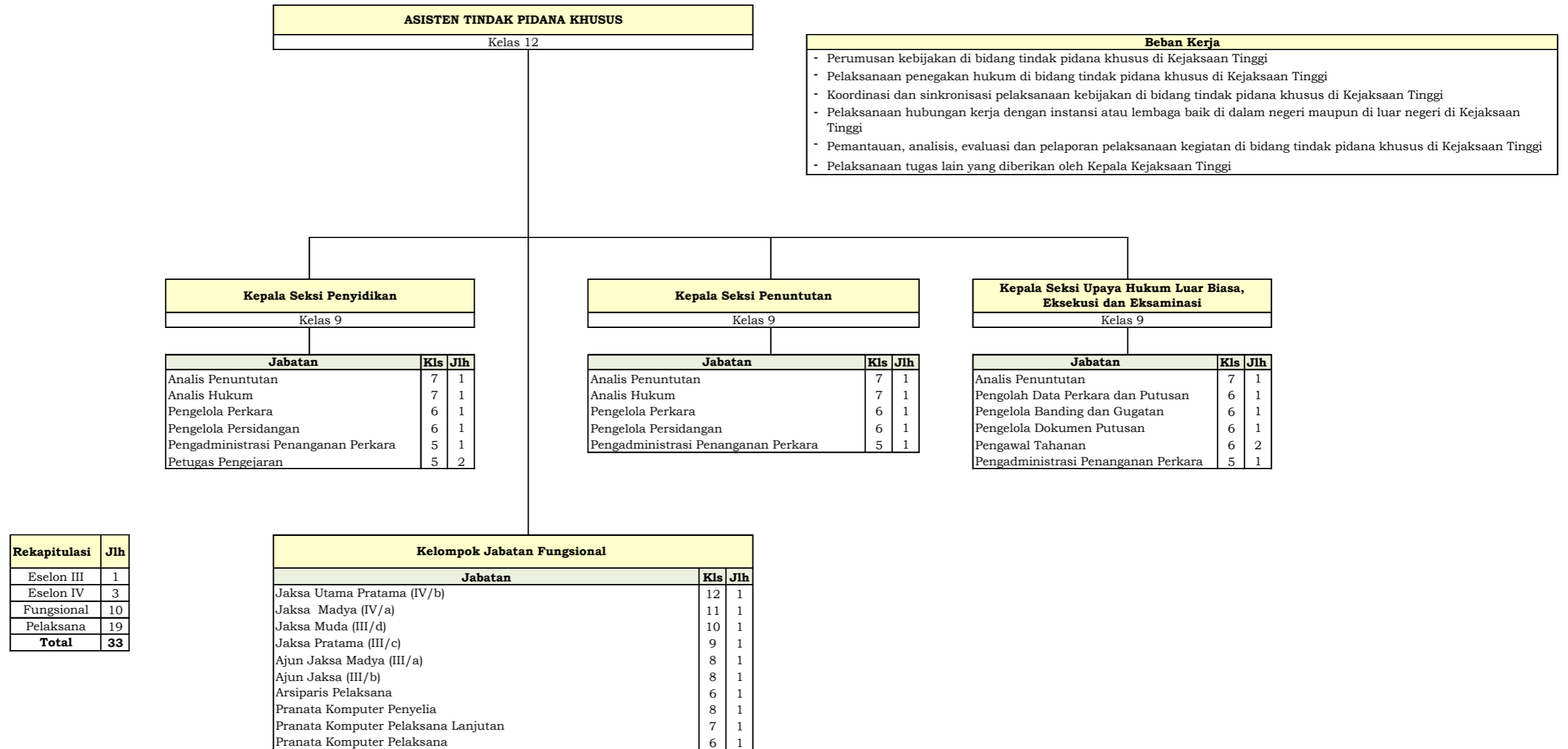
Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Fungsional	12
Pelaksana	29
Total	48

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	1
Jaksa Muda (III/d)	10	1
Jaksa Pratama (III/c)	9	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1
Sandiman Pertama	8	1
Sandiman Penyelia	9	1
Sandiman Pelaksana Lanjutan	8	1
Sandiman Pelaksana	7	1

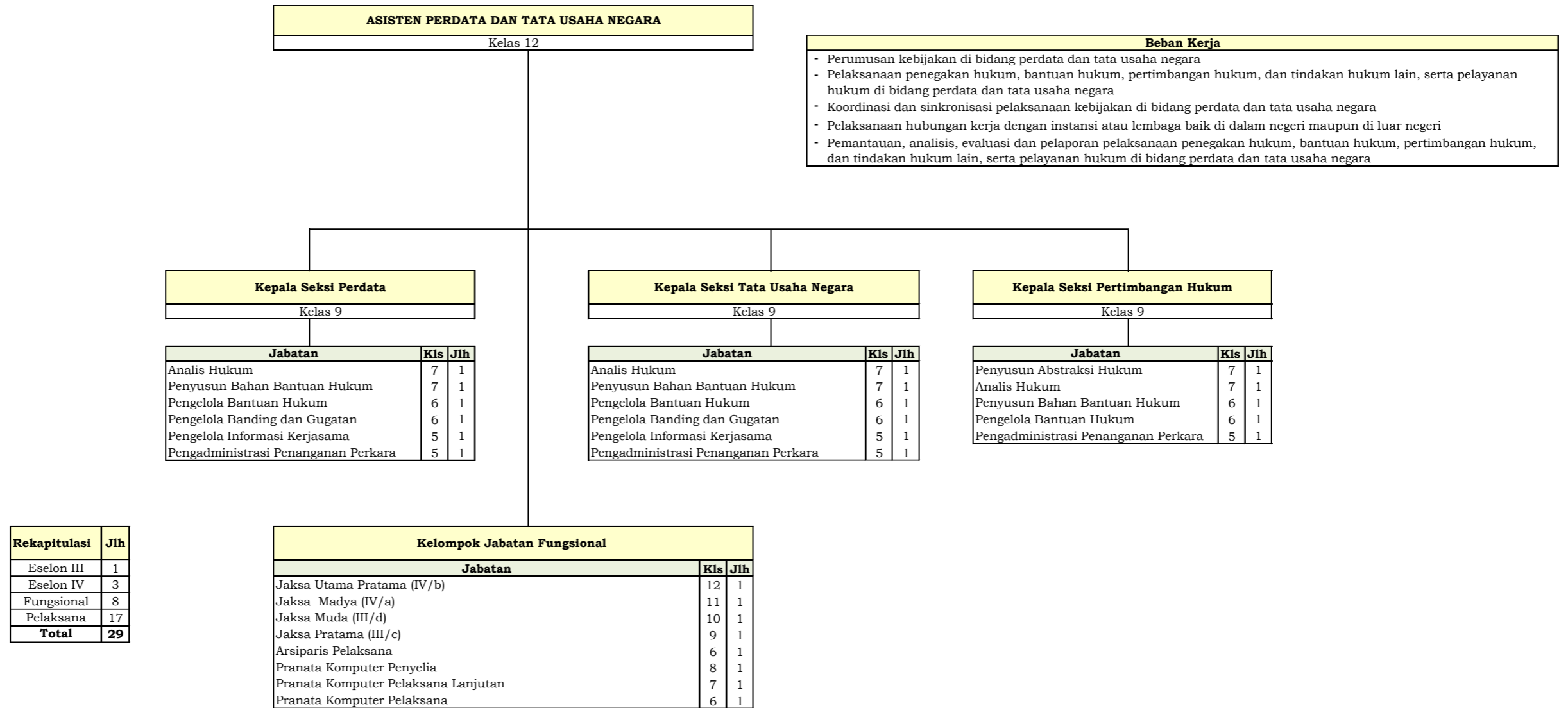
K3. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT



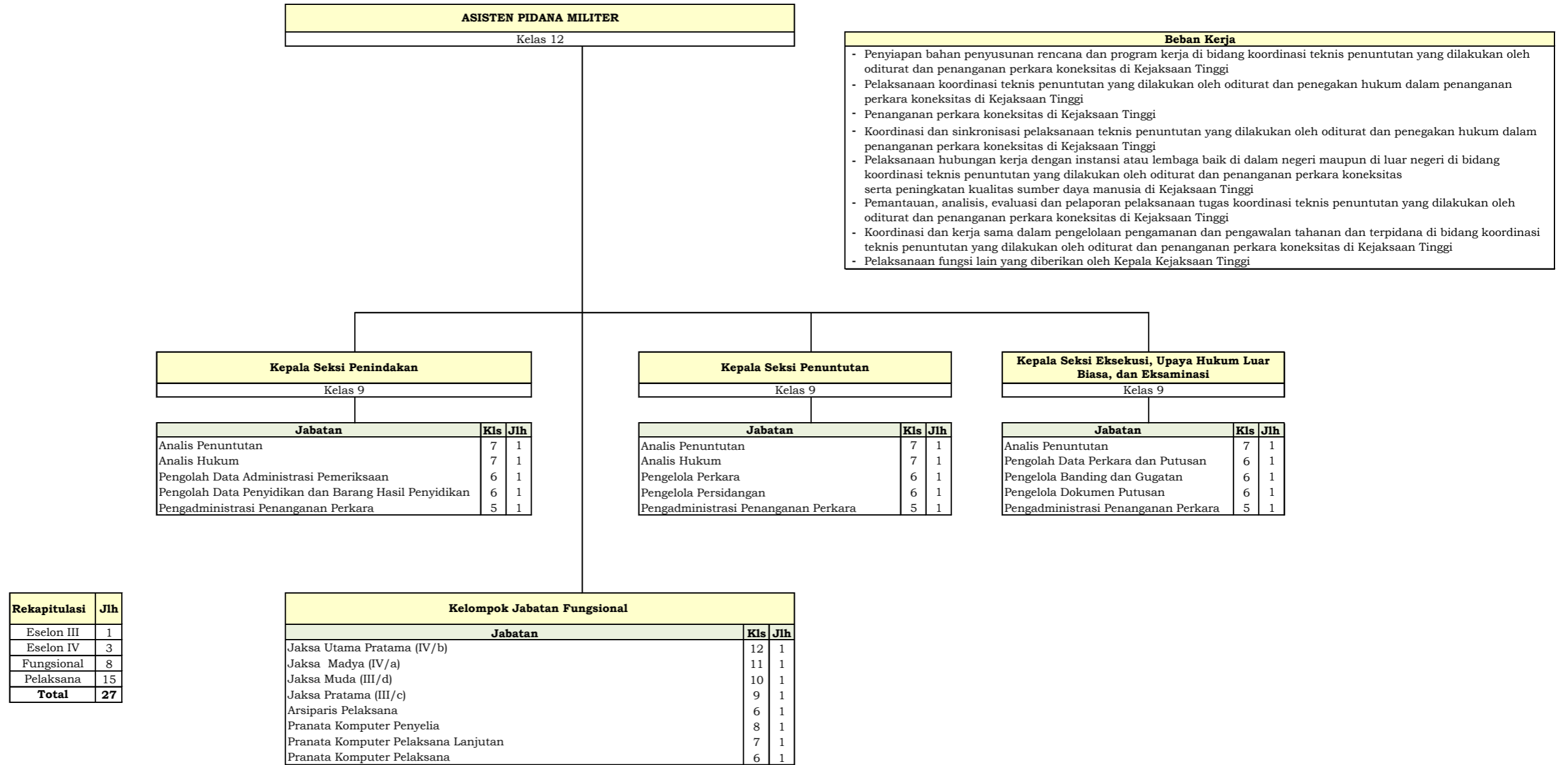
K4. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT



K5. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT



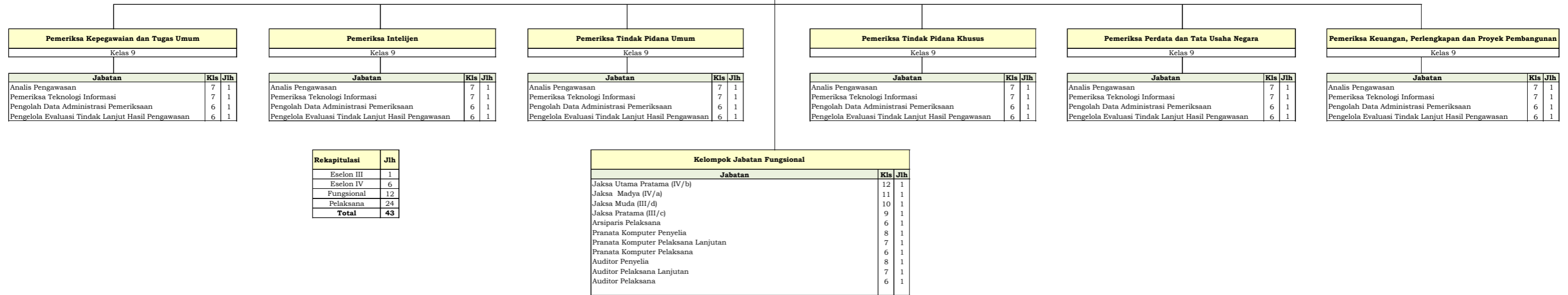
K6. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT



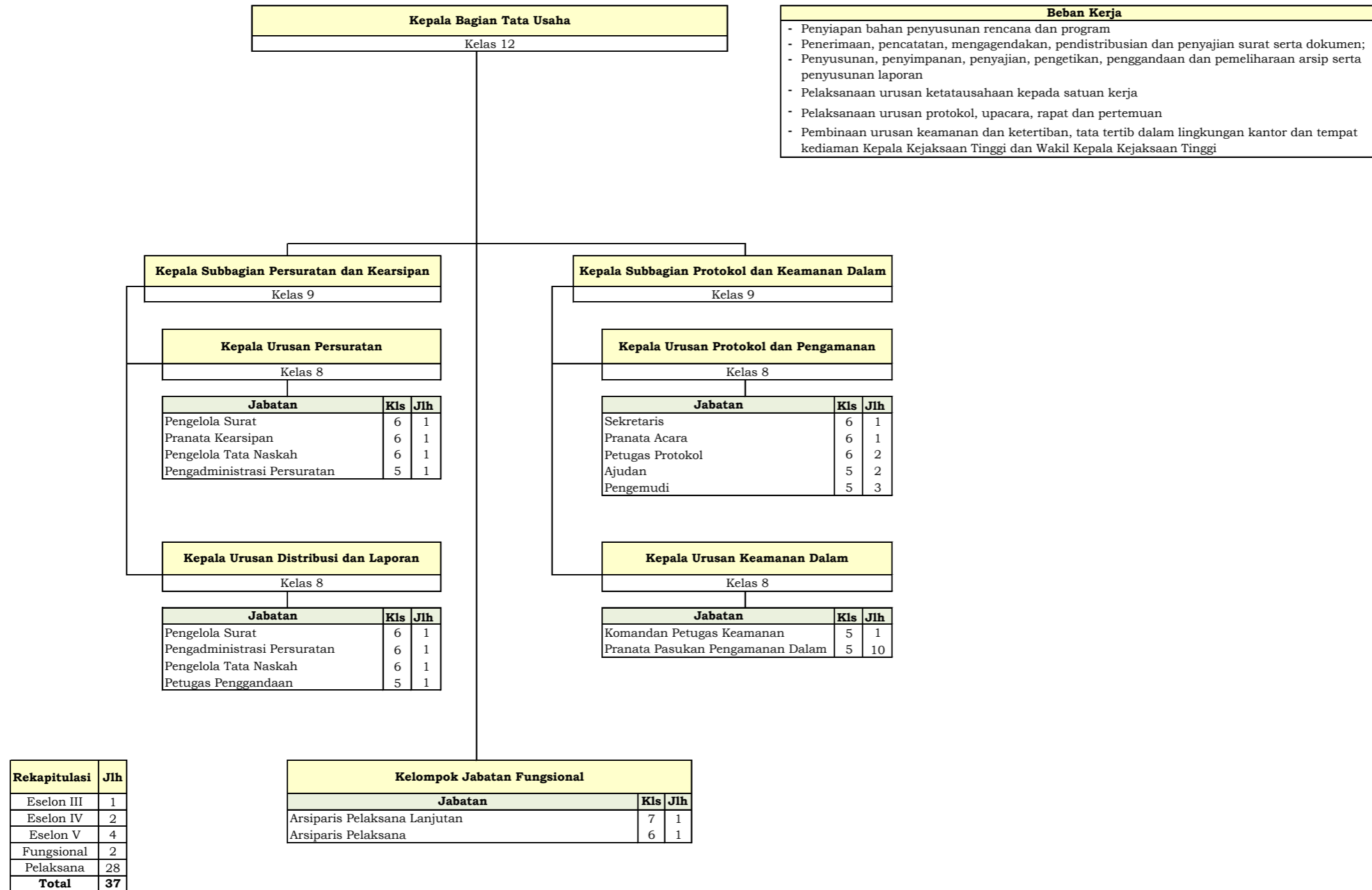
K7. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

ASISTEN PENGAWASAN
Kelas 12

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta bidang pengawasan - Pelaksanaan dan pengendalian pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijakan pimpinan - Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana - Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung - Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang diinspeksi di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala terkait pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan - Pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan - Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara - Pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya

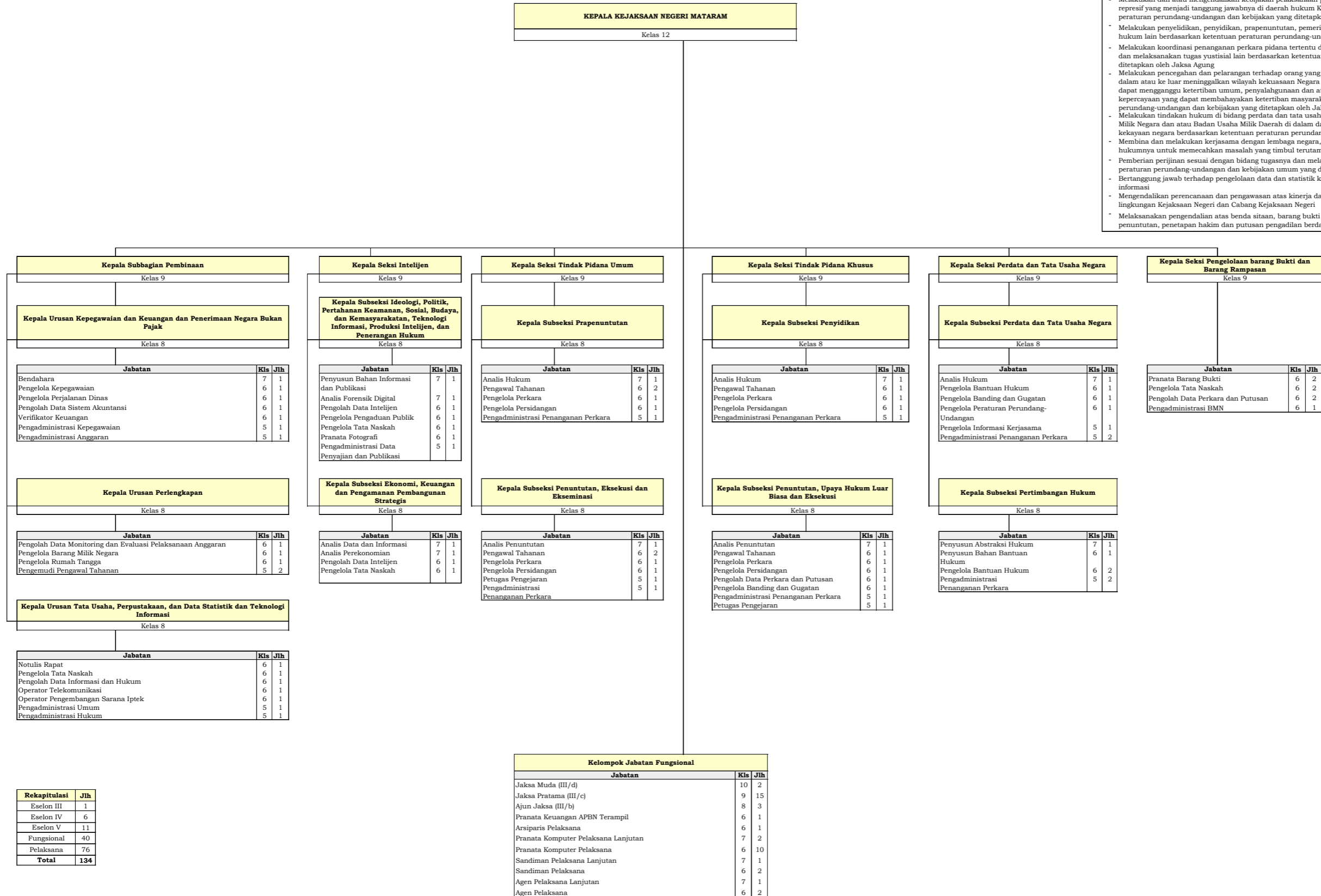


K8. PETA JABATAN PADA BAGIAN TATA USAHA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT



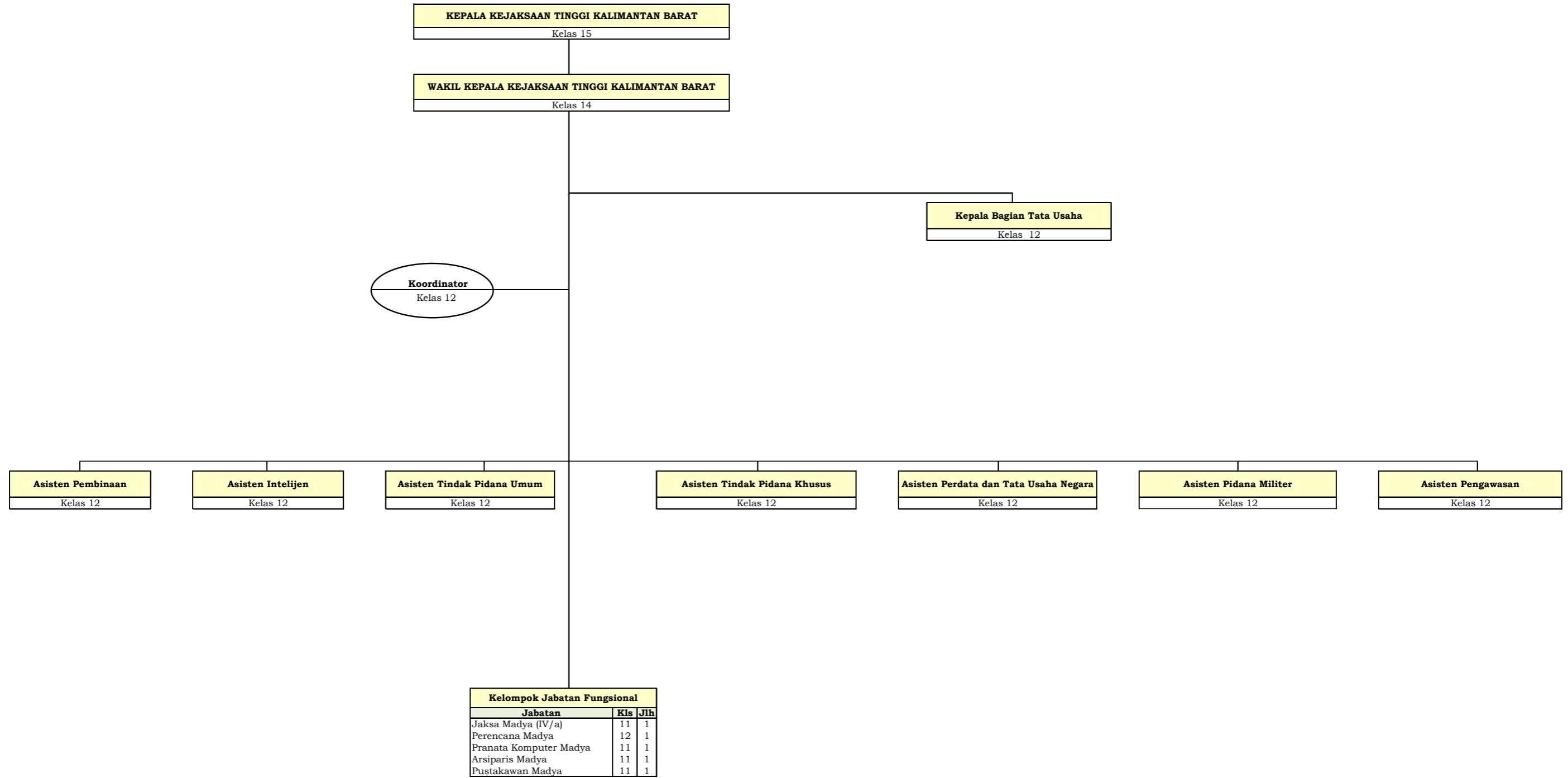
K9. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM

Beban Kerja	
-	Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna
-	Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
-	Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
-	Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
-	Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
-	Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
-	Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya
-	Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
-	Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi
-	Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
-	Melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Eselon V	11
Fungsional	40
Pelaksana	76
Total	134

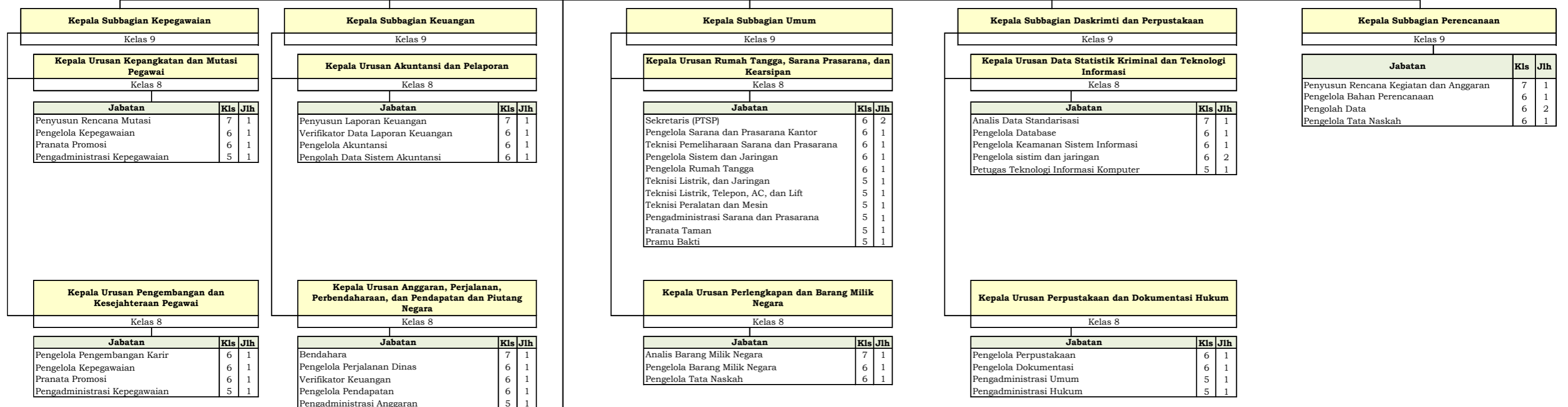
L. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT



L1. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

ASISTEN PEMBINAAN	
Kelas 12	

Beban Kerja	
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis - Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerja sama seluruh satuan kerja di bidang administrasi - Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya - Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya - Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya - Pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pendapatan dan piutang negara - Pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, barang sitaan dan barang rampasan negara - Pelaksanaan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi - Pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi 	



Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	5
Eselon V	8
Fungsional	15
Pelaksana	47
Total	76

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Perencana Muda	10	1
Perencana Pertama	8	2
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	1
Arsiparis Pertama	8	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1
Dokter Muda	10	1
Perawat Mahir	7	1
Penilai Pemerintah Muda	9	1
Penilai Pemerintah Pertama	8	1

L2. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

ASISTEN INTELIJEN
Kelas 12

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya - Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan - Pelaksanaan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi - Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen - Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidentil - Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis - Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen - Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/ atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya - Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Pemeliharaan peralatan intelijen - Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi

Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Politik Hukum dan Keamanan	7	1
Analisis Pemetaan Jaringan Kelompok Radikal Terorisme	7	1
Analisis Pertahanan dan Keamanan	7	1
Analisis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Bina Kehidupan Agama	7	1
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	1
Analisis Hubungan Antar Lembaga	7	1
Analisis Organisasi Masyarakat	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Transaksi Keuangan	7	1
Analisis Perekonomian	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Analisis Rekening Pemerintah	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pengawasan	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengelola Data Persandian	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Sistem Informasi	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Seksi Penerangan Hukum
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7	1
Analisis Publikasi	7	1
Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7	1
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1
Pranata Fotografi	6	1

Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Fungsional	12
Pelaksana	29
Total	48

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	1
Jaksa Muda (III/d)	10	1
Jaksa Pratama (III/c)	9	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1
Sandiman Pertama	8	1
Sandiman Penyelia	9	1
Sandiman Pelaksana Lanjutan	8	1
Sandiman Pelaksana	7	1

L3. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM
Kelas 12

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja - Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum - Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya - Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum - Pengelolaan dan penyajian data dan informasi - Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum



Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda
Kelas 9

Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya
Kelas 9

Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya
Kelas 9

Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Hukum	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	2

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Hukum	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	2

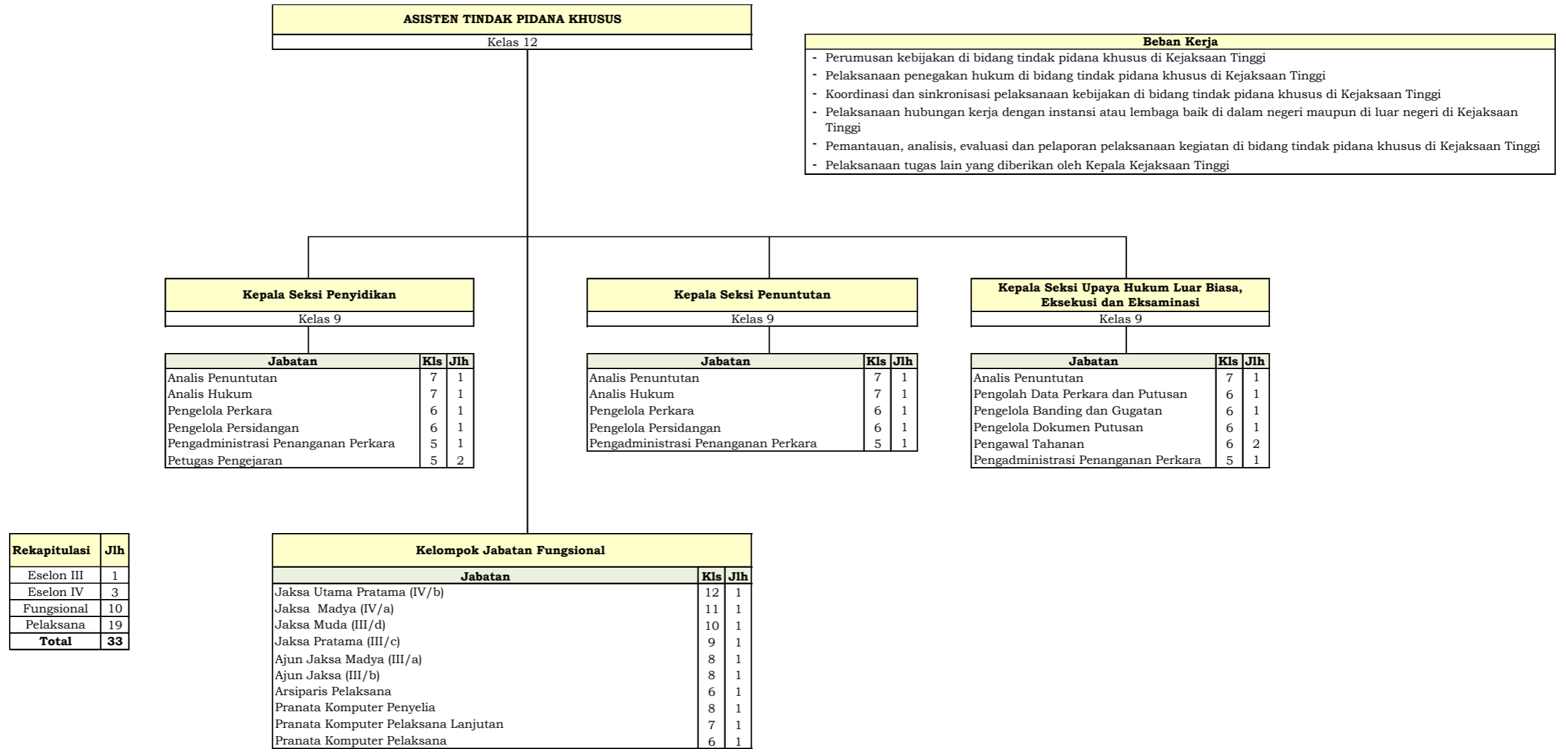
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Hukum	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	2

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Hukum	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	2

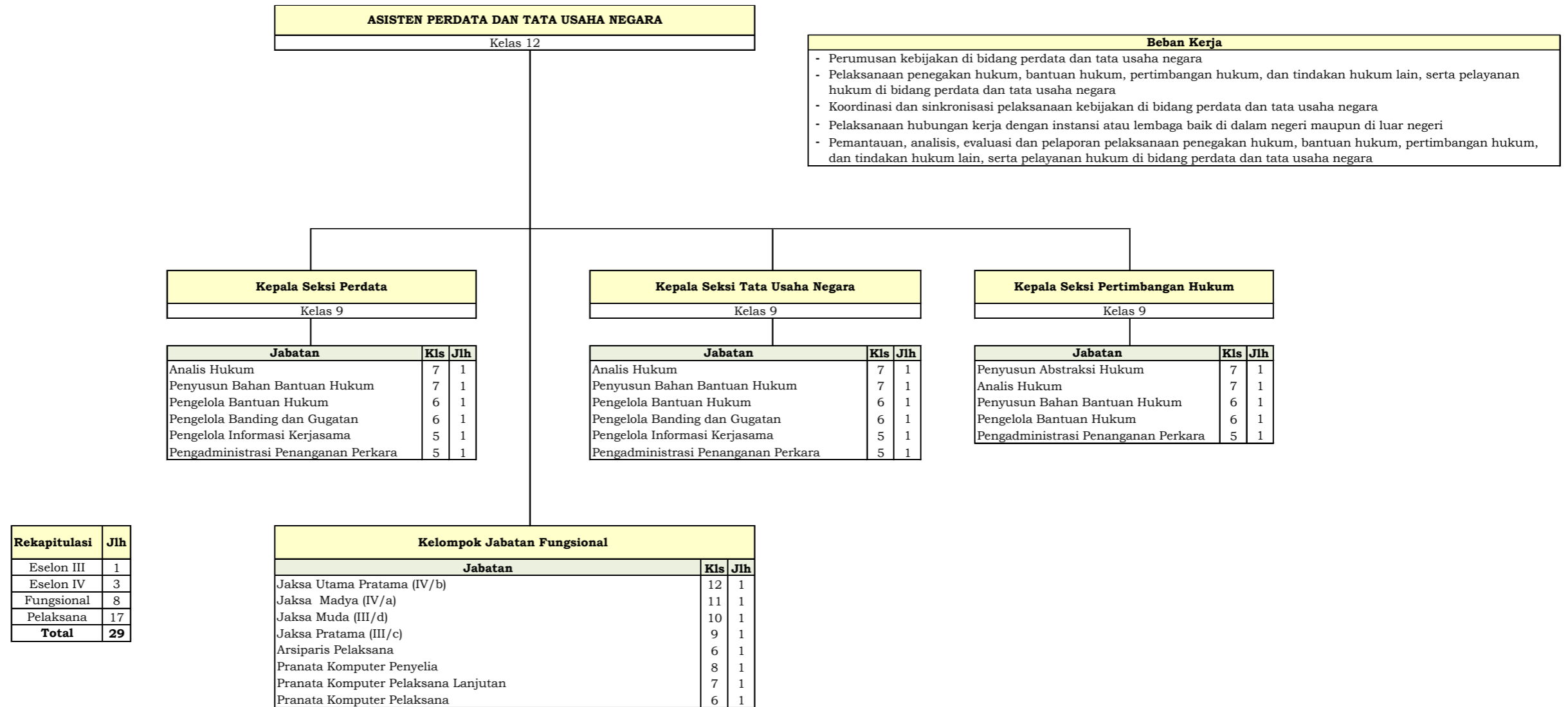
Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	4
Fungsional	10
Pelaksana	24
Total	39

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	1
Jaksa Muda (III/d)	10	1
Jaksa Pratama (III/c)	9	1
Ajun Jaksa Madya (III/a)	8	1
Ajun Jaksa (III/b)	8	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1

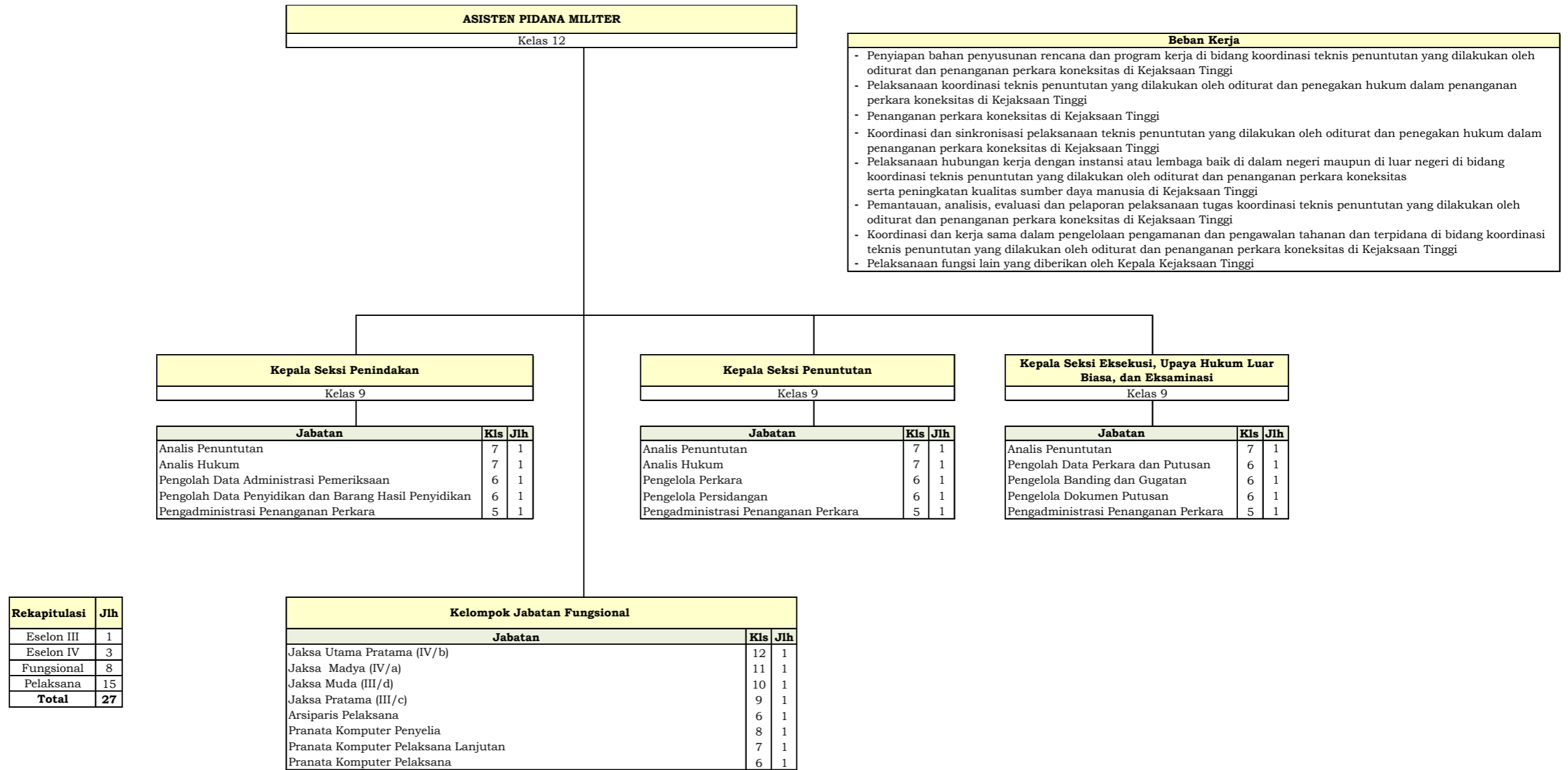
L4. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT



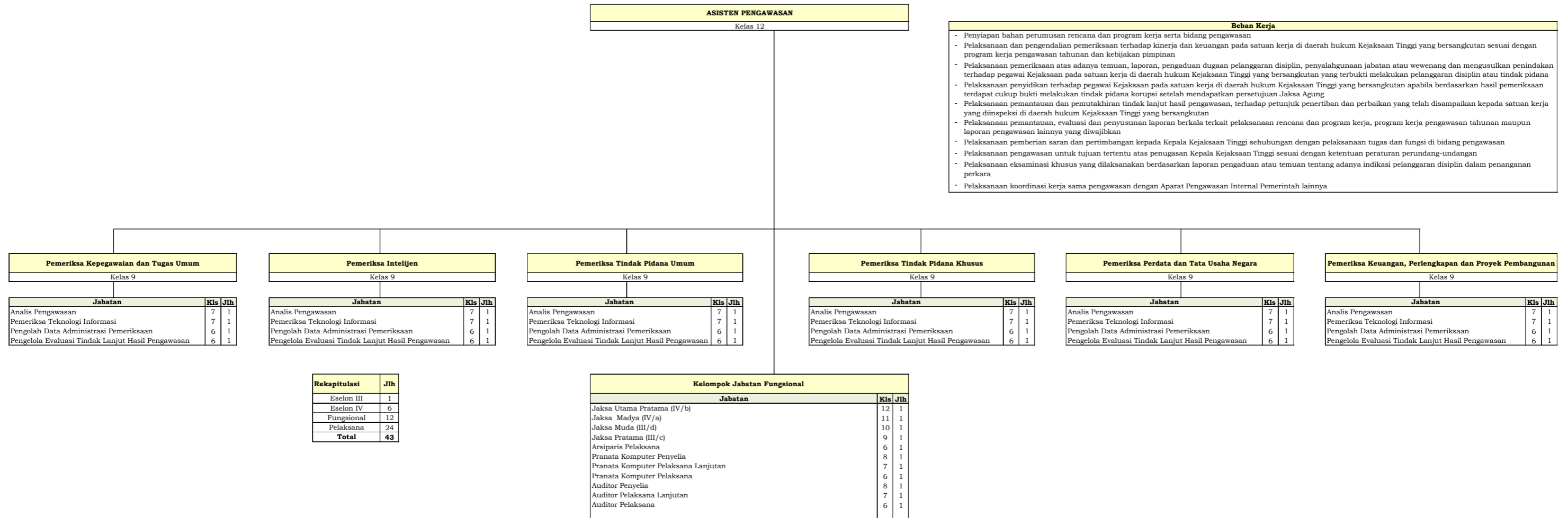
L5. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT



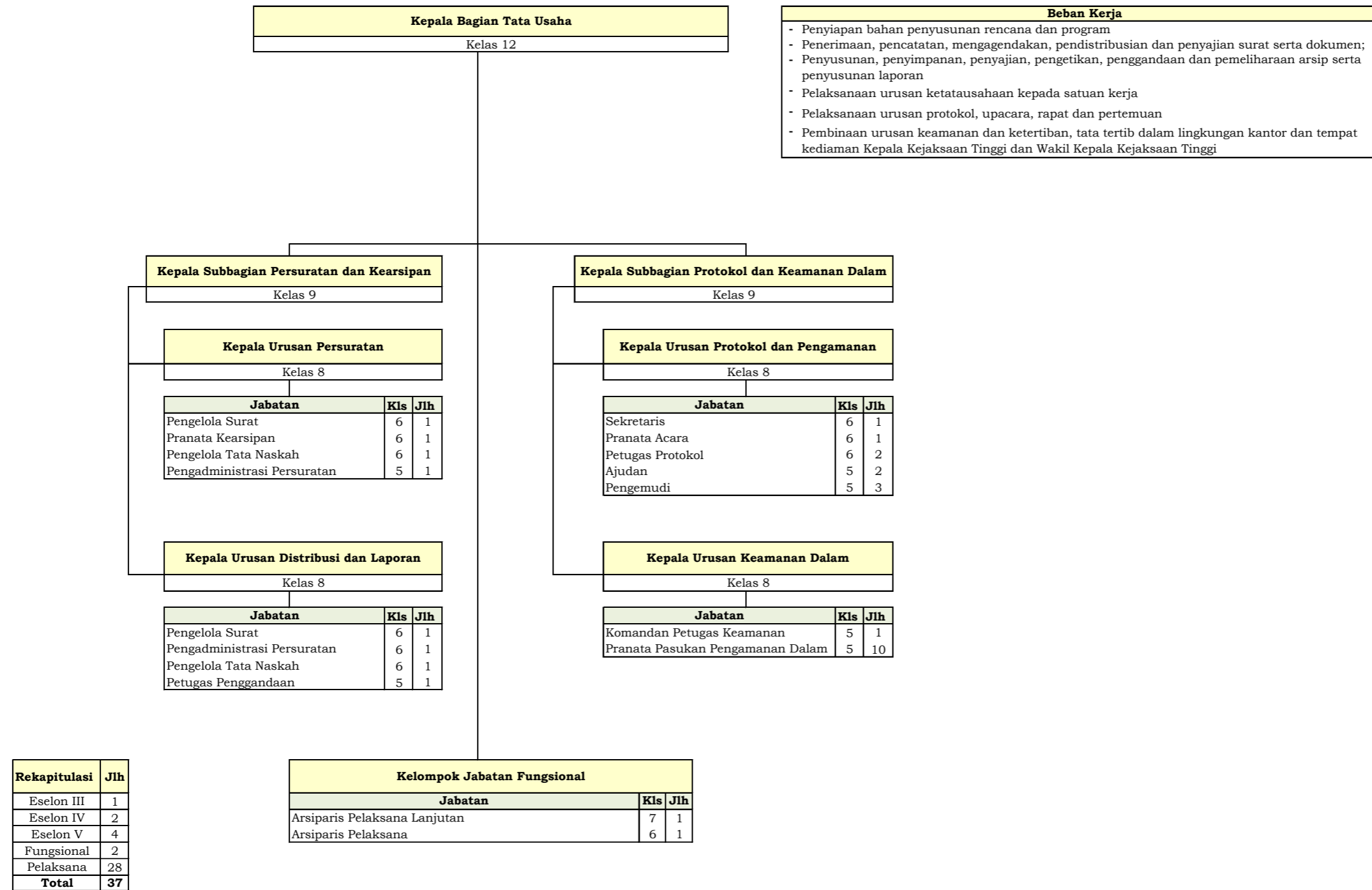
L6. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT



L7. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

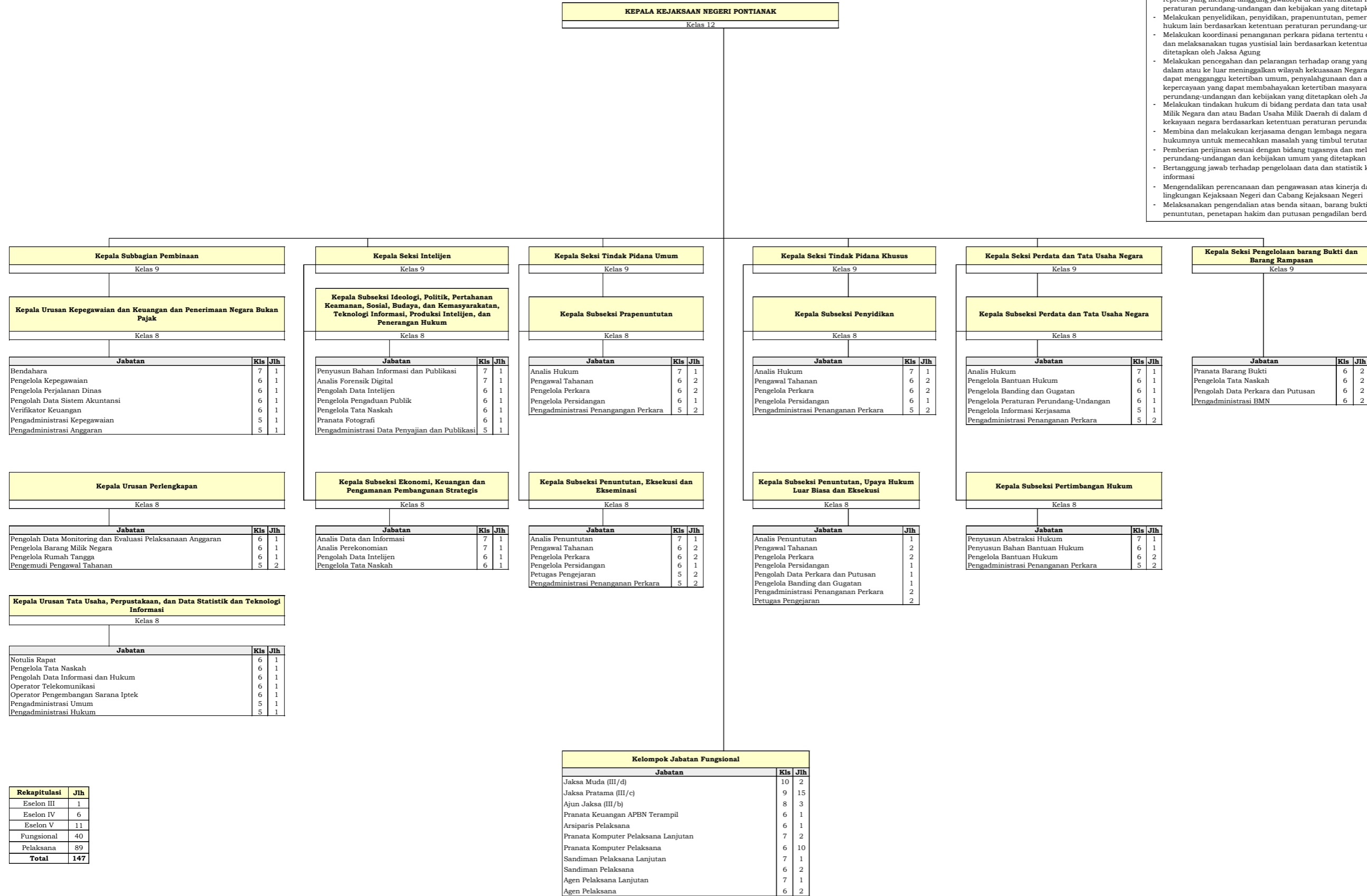


L8. PETA JABATAN PADA BAGIAN TATA USAHA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT



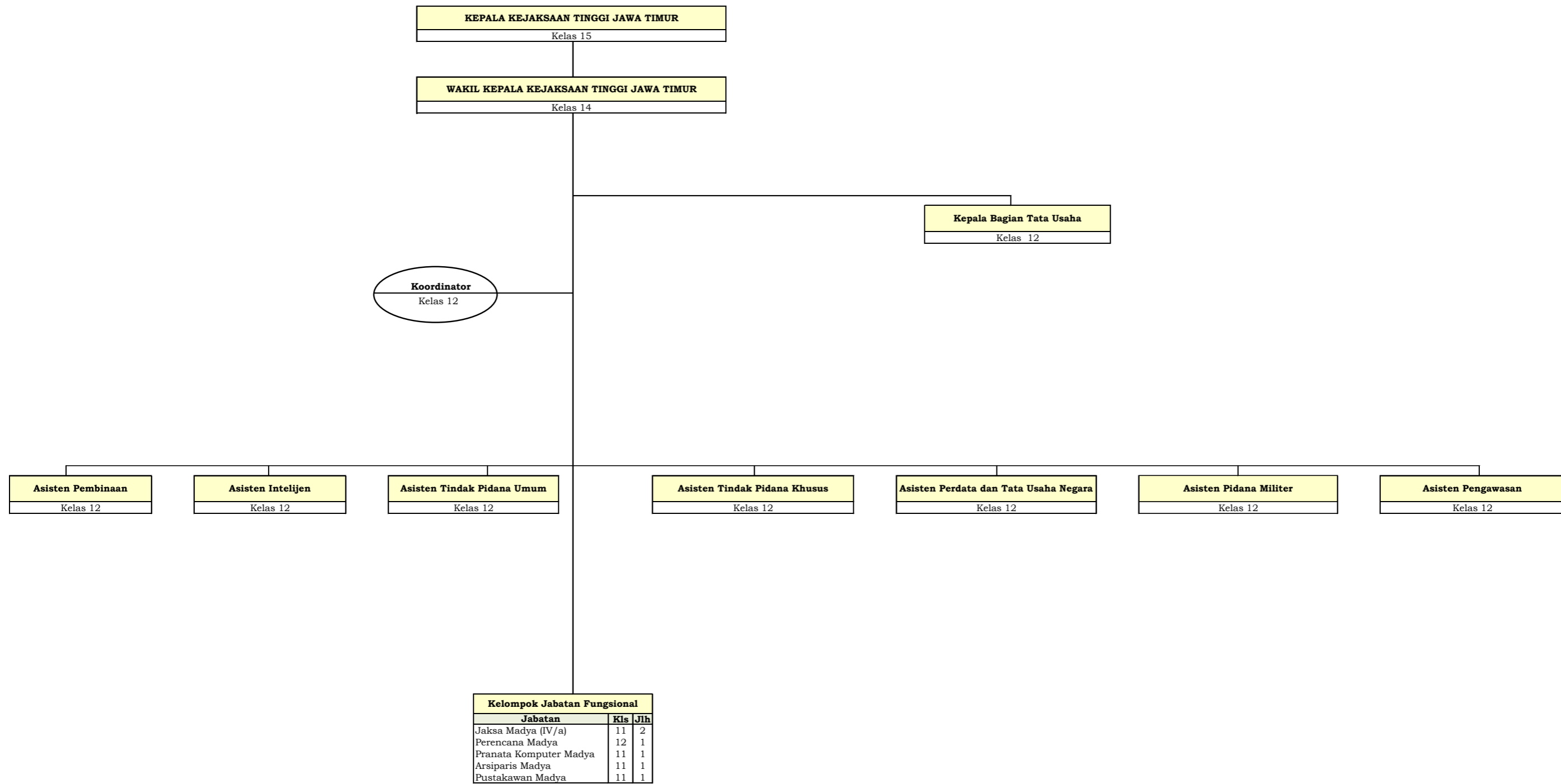
L9. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Eselon V	11
Fungsional	40
Pelaksana	89
Total	147

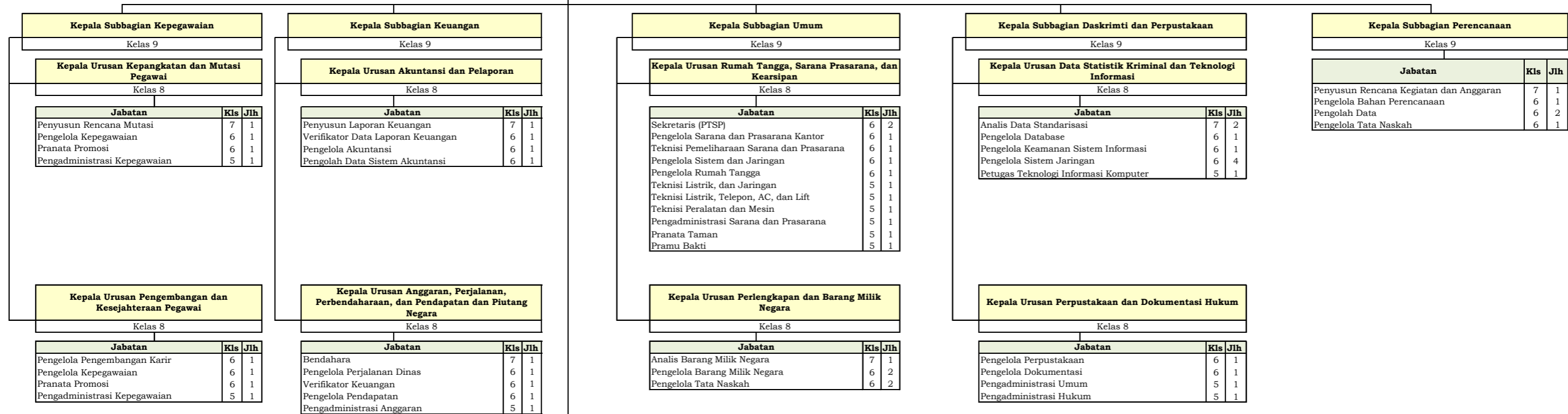
M. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR



M1. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

ASISTEN PEMBINAAN
Kelas 12

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis - Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerja sama seluruh satuan kerja di bidang administrasi - Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya - Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya - Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya - Pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pendapatan dan piutang negara - Pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, barang sitaan dan barang rampasan negara - Pelaksanaan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi - Pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi



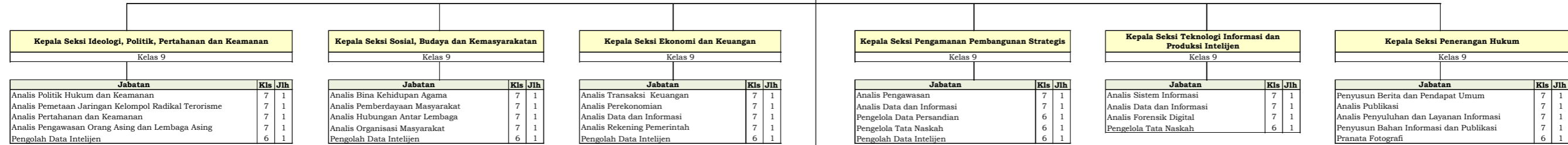
Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	5
Eselon V	8
Fungsional	13
Pelaksana	52
Total	79

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Perencana Muda	10	1
Perencana Pertama	8	4
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	1
Arsiparis Pertama	8	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1

M2. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

ASISTEN INTELIJEN	
Kelas 12	

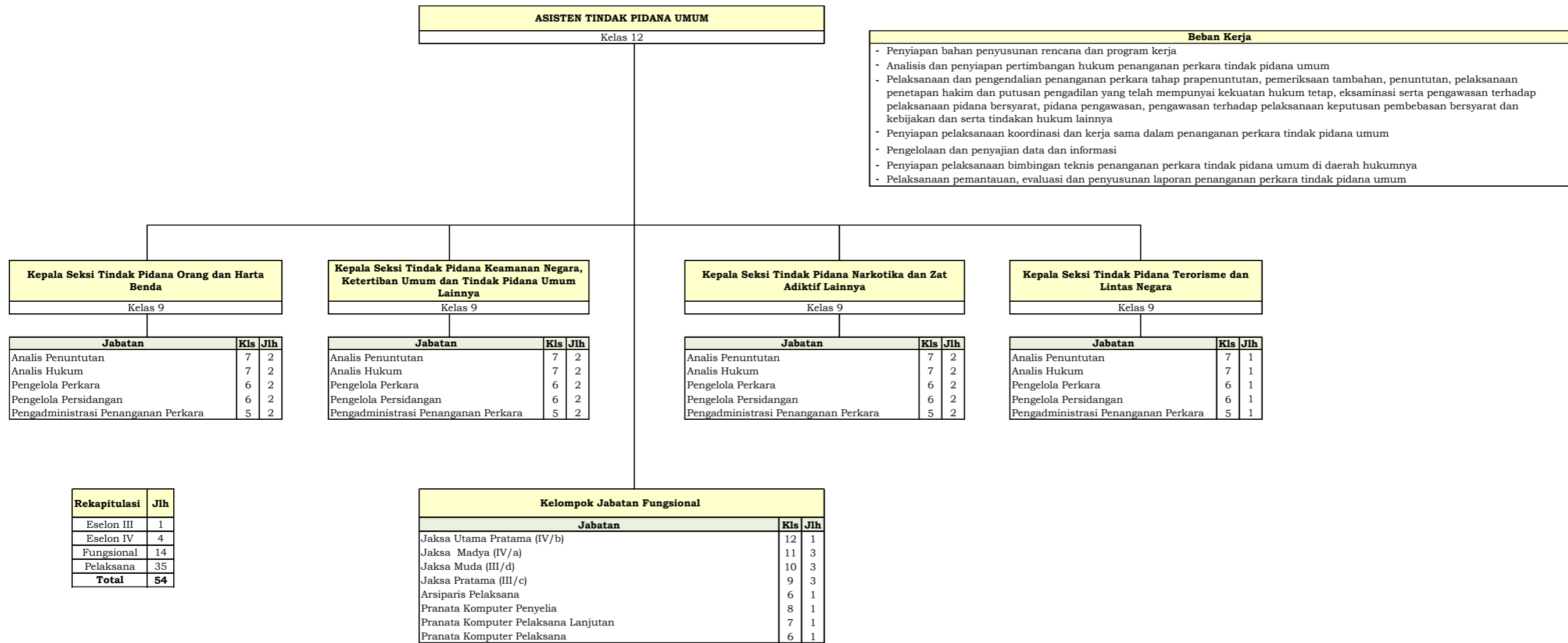
Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya - Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan - Pelaksanaan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi - Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen - Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidentil - Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis - Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen - Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/ atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya - Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Pemeliharaan peralatan intelijen - Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi



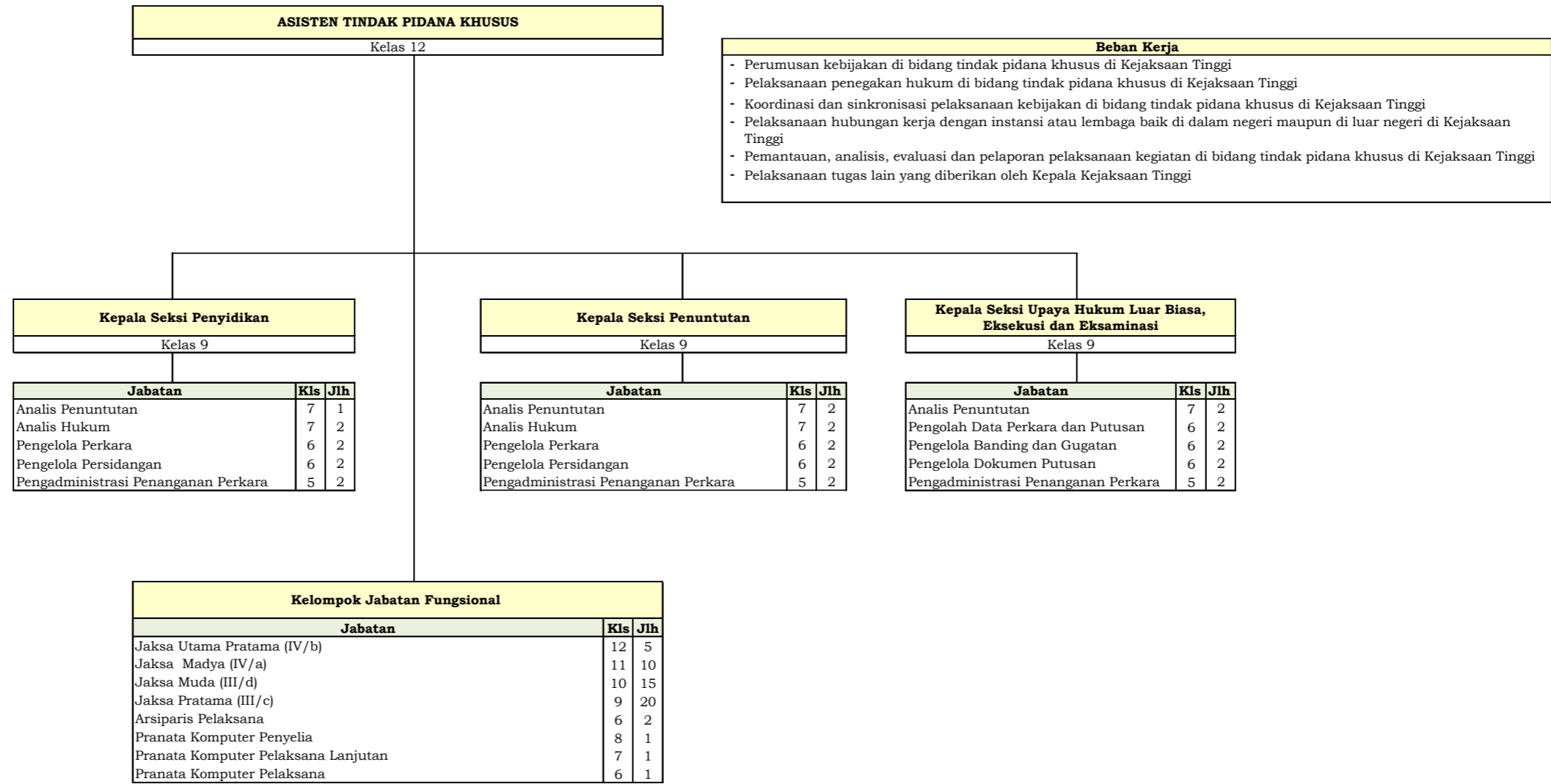
Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Fungsional	12
Pelaksana	29
Total	48

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	1
Jaksa Muda (III/d)	10	1
Jaksa Pratama (III/c)	9	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1
Sandiman Pertama	8	1
Sandiman Penyelia	8	1
Sandiman Pelaksana Lanjutan	7	1
Sandiman Pelaksana	6	1

M3. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

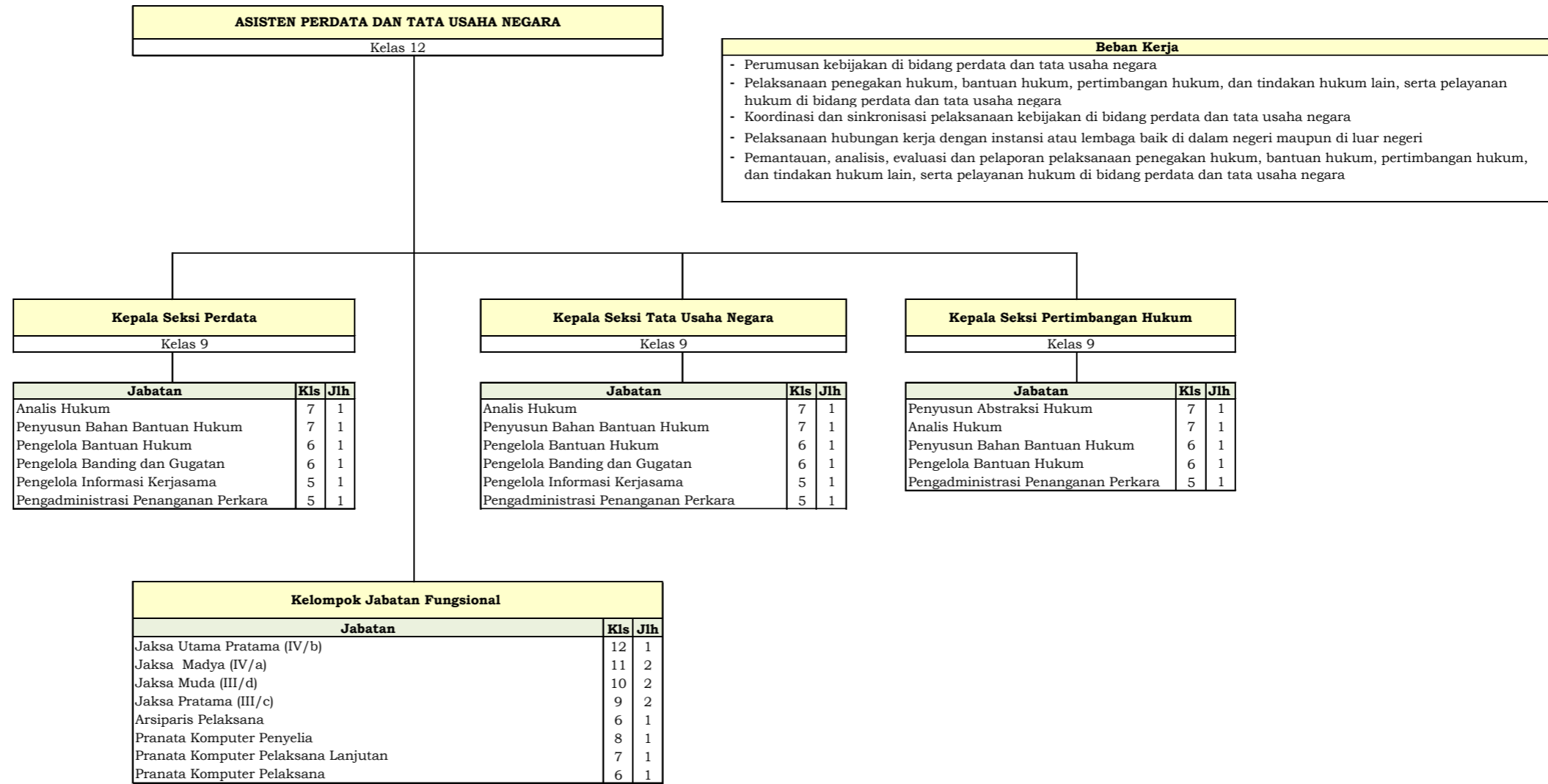


M4. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR



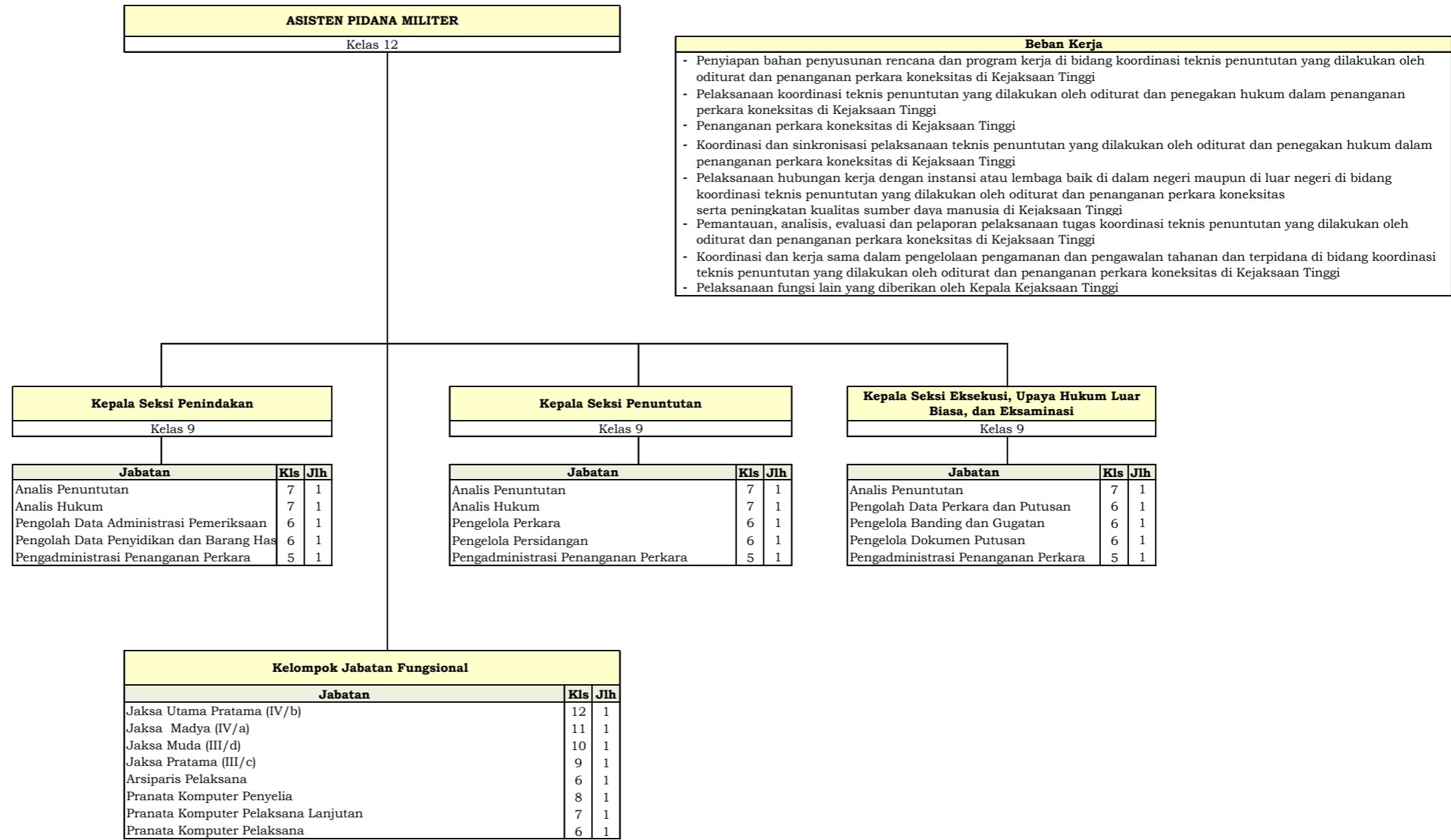
Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	3
Fungsional	55
Pelaksana	30
Total	89

M5. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR



Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	3
Fungsional	11
Pelaksana	17
Total	32

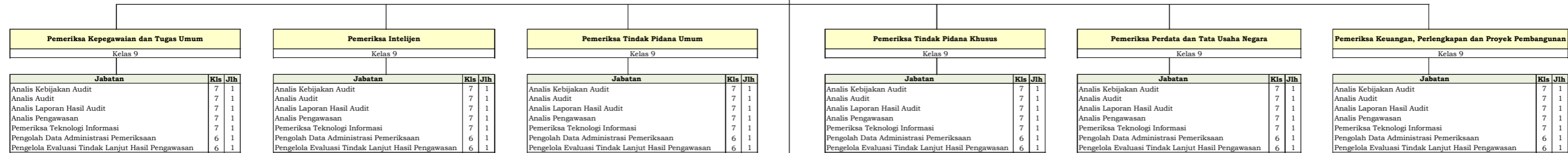
M6. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR



M7. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

ASISTEN PENGAWASAN	
Kelas 12	

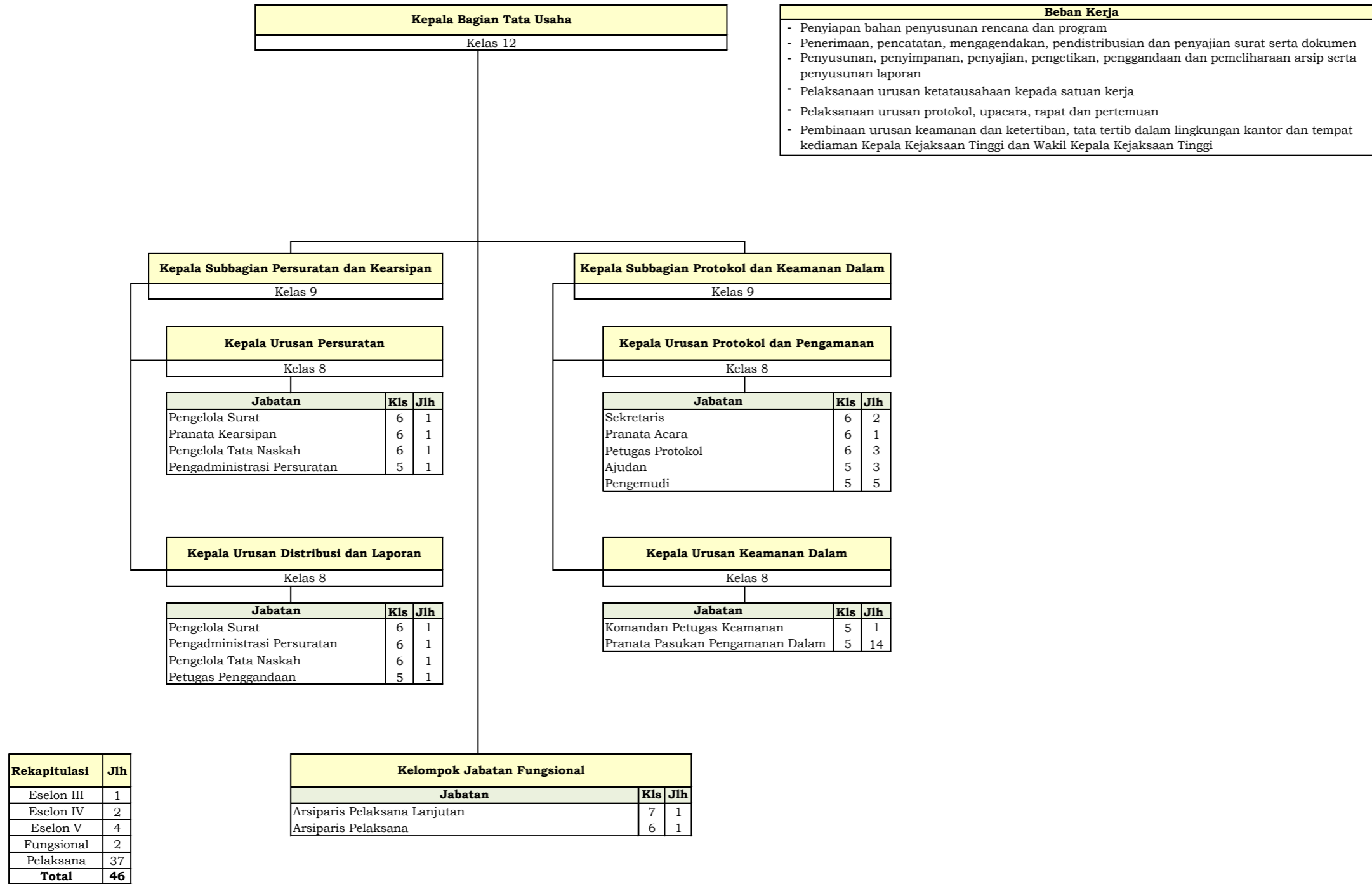
Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta bidang pengawasan Pelaksanaan dan pengendalian pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijakan pimpinan Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang diinspeksi di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala terkait pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan Pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan Pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya



Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Fungsional	12
Pelaksana	42
Total	61

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	1
Jaksa Muda (III/d)	10	1
Jaksa Pratama (III/c)	9	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1
Auditor Penyelia	8	1
Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1
Auditor Pelaksana	6	1

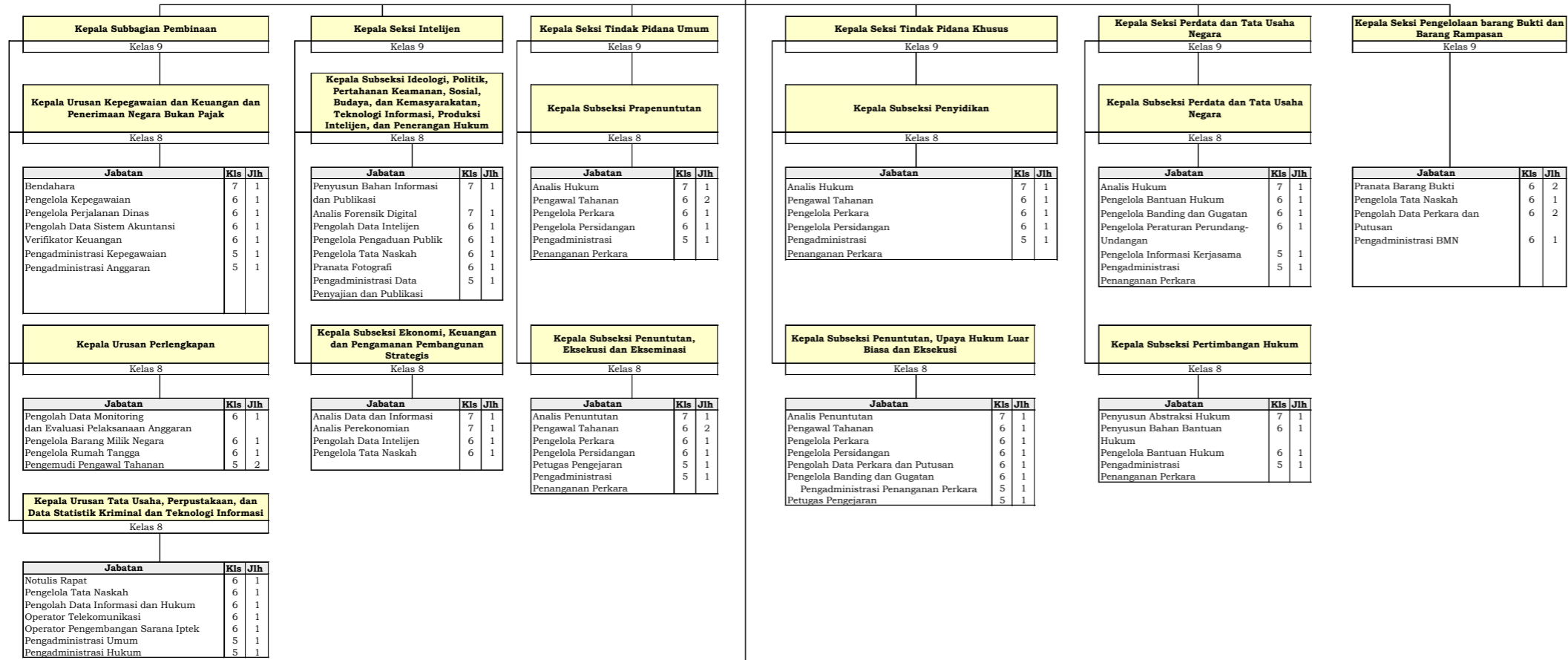
M8. PETA JABATAN PADA BAGIAN TATA USAHA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR



M9. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN NEGERI MALANG

- Beban Kerja**
- Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna
 - Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya
 - Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi
 - Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
 - Melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

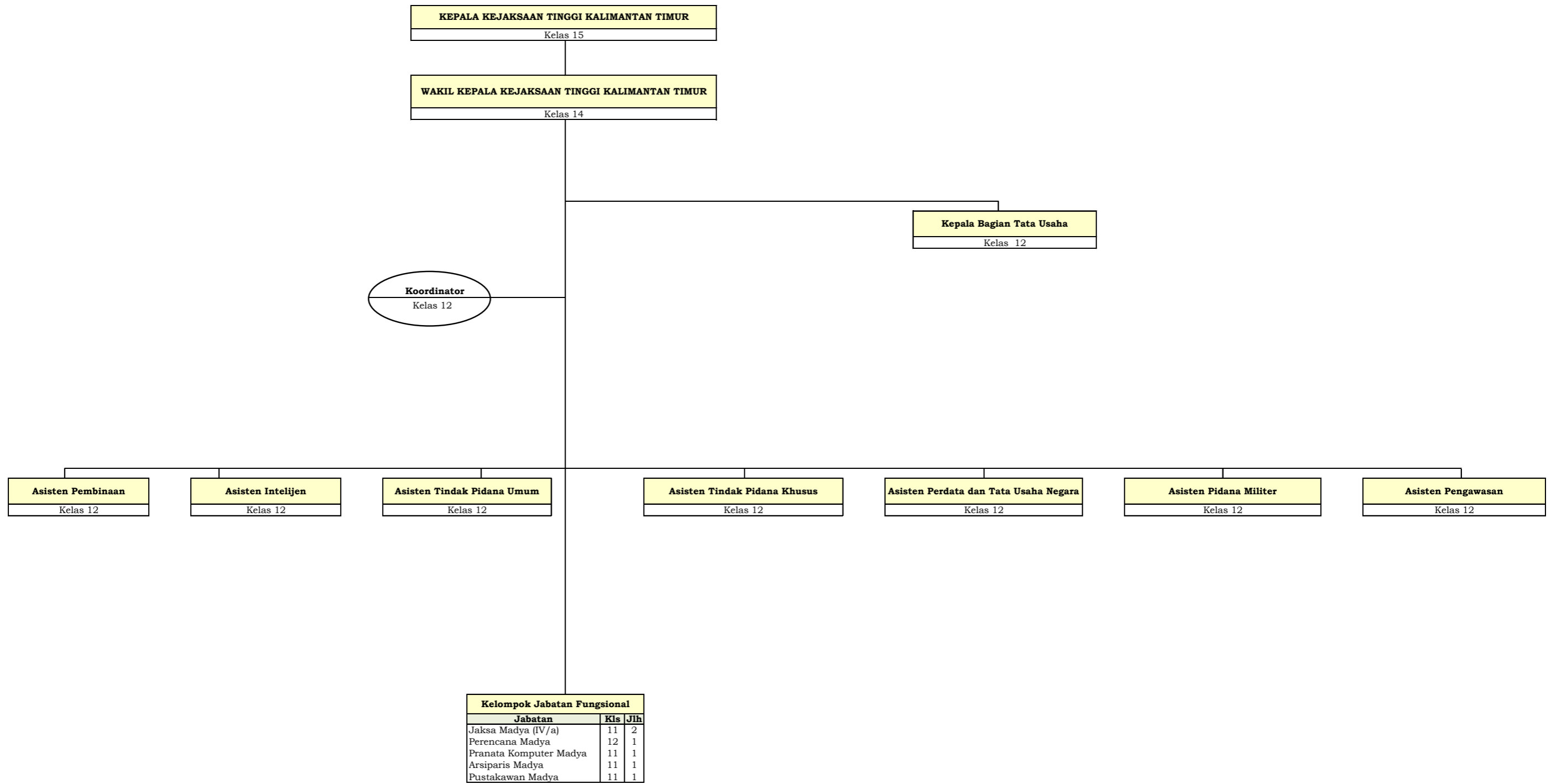
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MALANG
Kelas 13



Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Eselon V	11
Fungsional	30
Pelaksana	71
Total	119

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Muda (III/d)	10	2
Jaksa Pratama (III/c)	9	10
Ajun Jaksa (III/b)	8	3
Pranata Keuangan APBN Terampil	6	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	5
Sandiman Pelaksana Lanjutan	7	1
Sandiman Pelaksana	6	2
Agen Pelaksana Lanjutan	7	1
Agen Pelaksana	6	2

N. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN KALIMANTAN TIMUR



N2. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

ASISTEN INTELIJEN	
Kelas 12	

Beban Kerja
- Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya
- Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan
- Pelaksanaan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya
- Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya
- Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi
- Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen
- Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidental
- Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis
- Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya
- Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya
- Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen
- Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/ atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya
- Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya
- Pemeliharaan peralatan intelijen
- Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi

Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	
Kelas 9	

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Politik Hukum dan Keamanan	7	1
Analisis Pemetaan Jaringan Kelompok Radikal Terorisme	7	1
Analisis Pertahanan dan Keamanan	7	1
Analisis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan	
Kelas 9	

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Bina Kehidupan Agama	7	1
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	1
Analisis Hubungan Antar Lembaga	7	1
Analisis Organisasi Masyarakat	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan	
Kelas 9	

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Transaksi Keuangan	7	1
Analisis Perekonomian	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Analisis Rekening Pemerintah	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis	
Kelas 9	

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pengawasan	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengelola Data Persandian	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen	
Kelas 9	

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Sistem Informasi	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

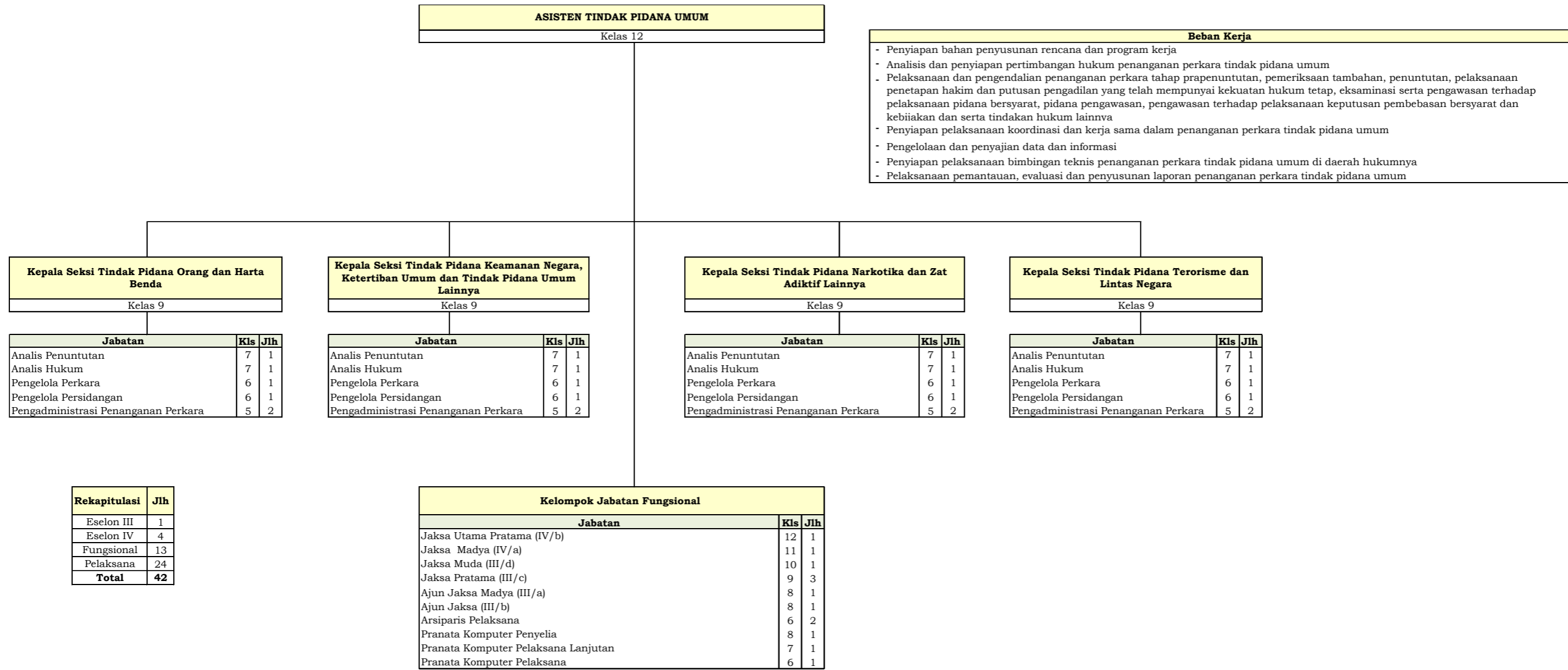
Kepala Seksi Penerangan Hukum	
Kelas 9	

Jabatan	Kls	Jlh
Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7	1
Analisis Publikasi	7	1
Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7	1
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1
Pranata Fotografi	6	1

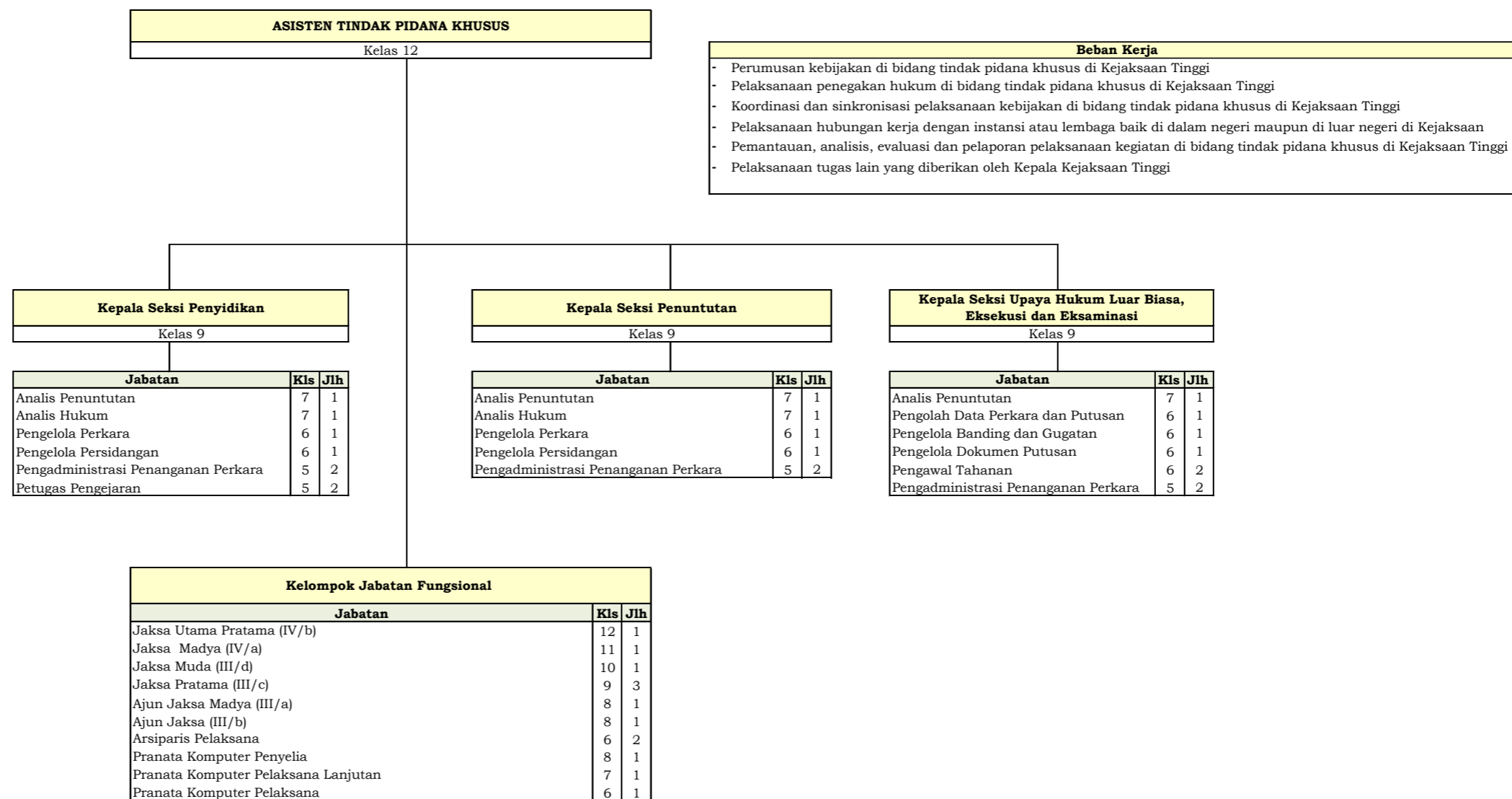
Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Fungsional	18
Pelaksana	29
Total	54

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	1
Jaksa Muda (III/d)	10	1
Jaksa Pratama (III/c)	9	6
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1
Sandiman Pertama	8	1
Sandiman Penyelia	8	1
Sandiman Pelaksana Lanjutan	7	1
Sandiman Pelaksana	6	2

N3. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

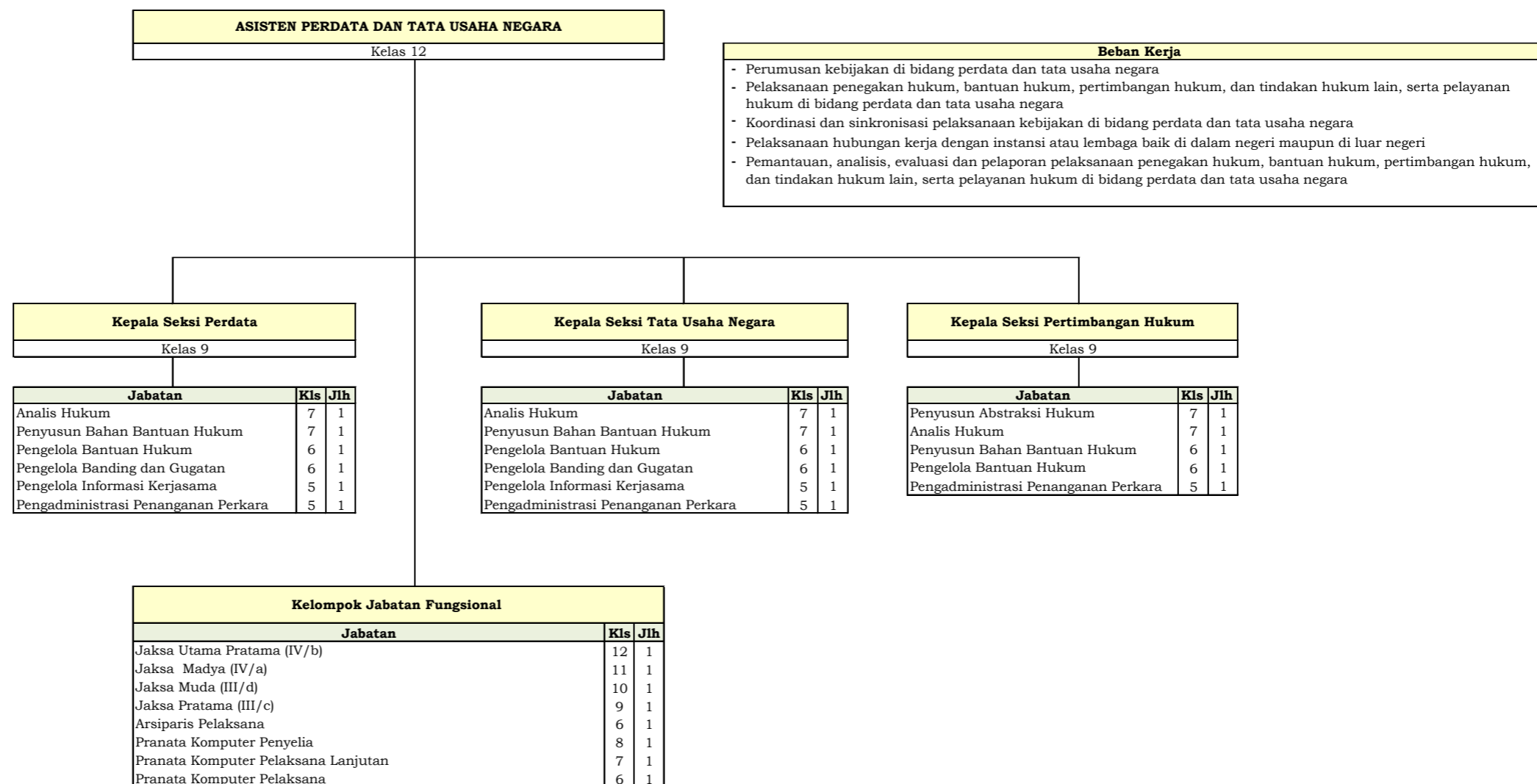


N4. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR



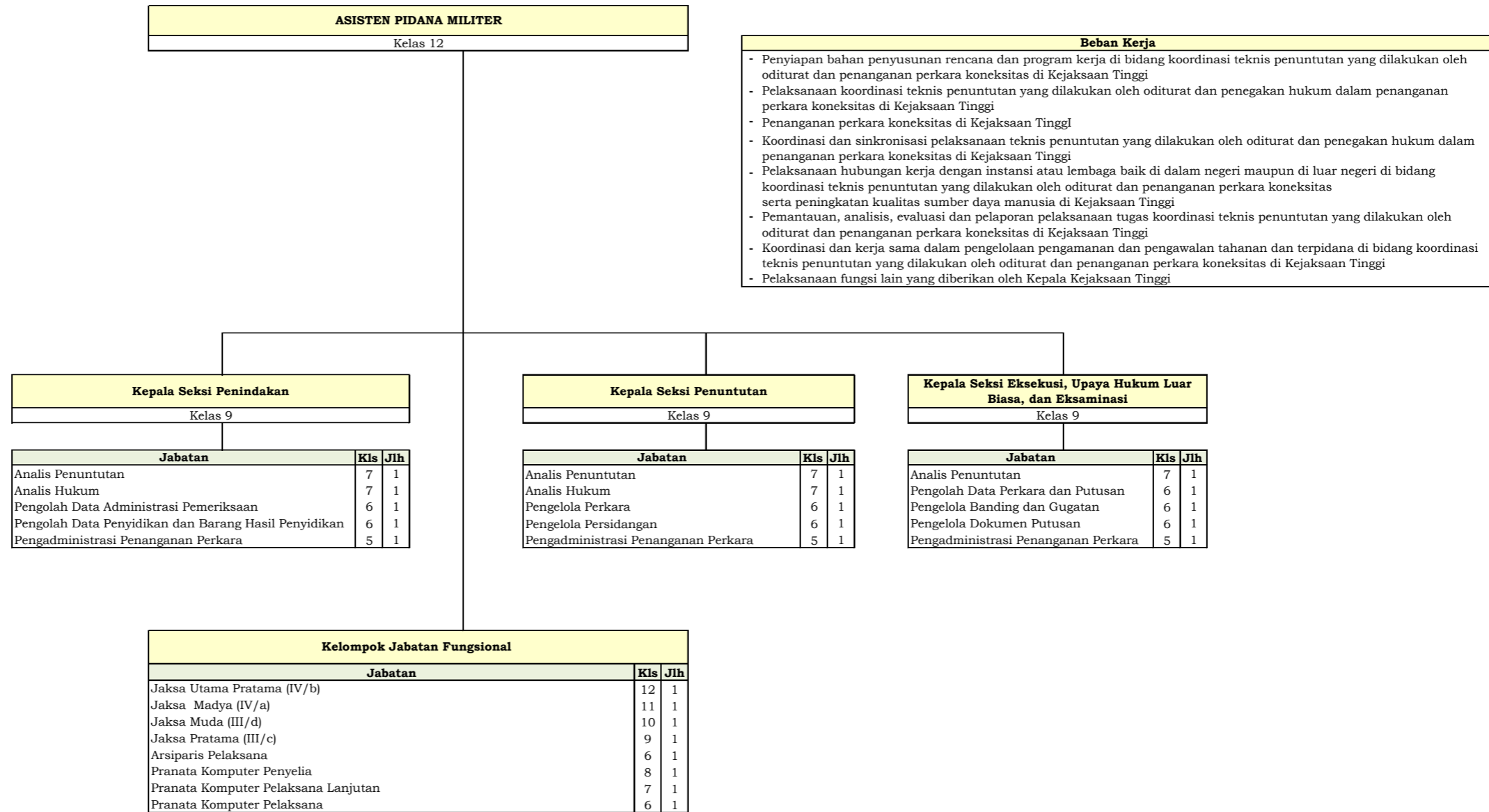
Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	3
Fungsional	13
Pelaksana	22
Total	39

N5. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR



Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	3
Fungsional	8
Pelaksana	17
Total	29

N6. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR



N7. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

ASISTEN PENGAWASAN
Kelas 12

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta bidang pengawasan - Pelaksanaan dan pengendalian pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijakan pimpinan - Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana - Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung - Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang diinspeksi di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala terkait pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan - Pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan - Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara - Pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya

Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pengawasan	7	1
Pemeriksa Teknologi Informasi	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6	2

Pemeriksa Intelijen
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pengawasan	7	1
Pemeriksa Teknologi Informasi	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6	2

Pemeriksa Tindak Pidana Umum
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pengawasan	7	1
Pemeriksa Teknologi Informasi	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6	2

Pemeriksa Tindak Pidana Khusus
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pengawasan	7	1
Pemeriksa Teknologi Informasi	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6	2

Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pengawasan	7	1
Pemeriksa Teknologi Informasi	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6	2

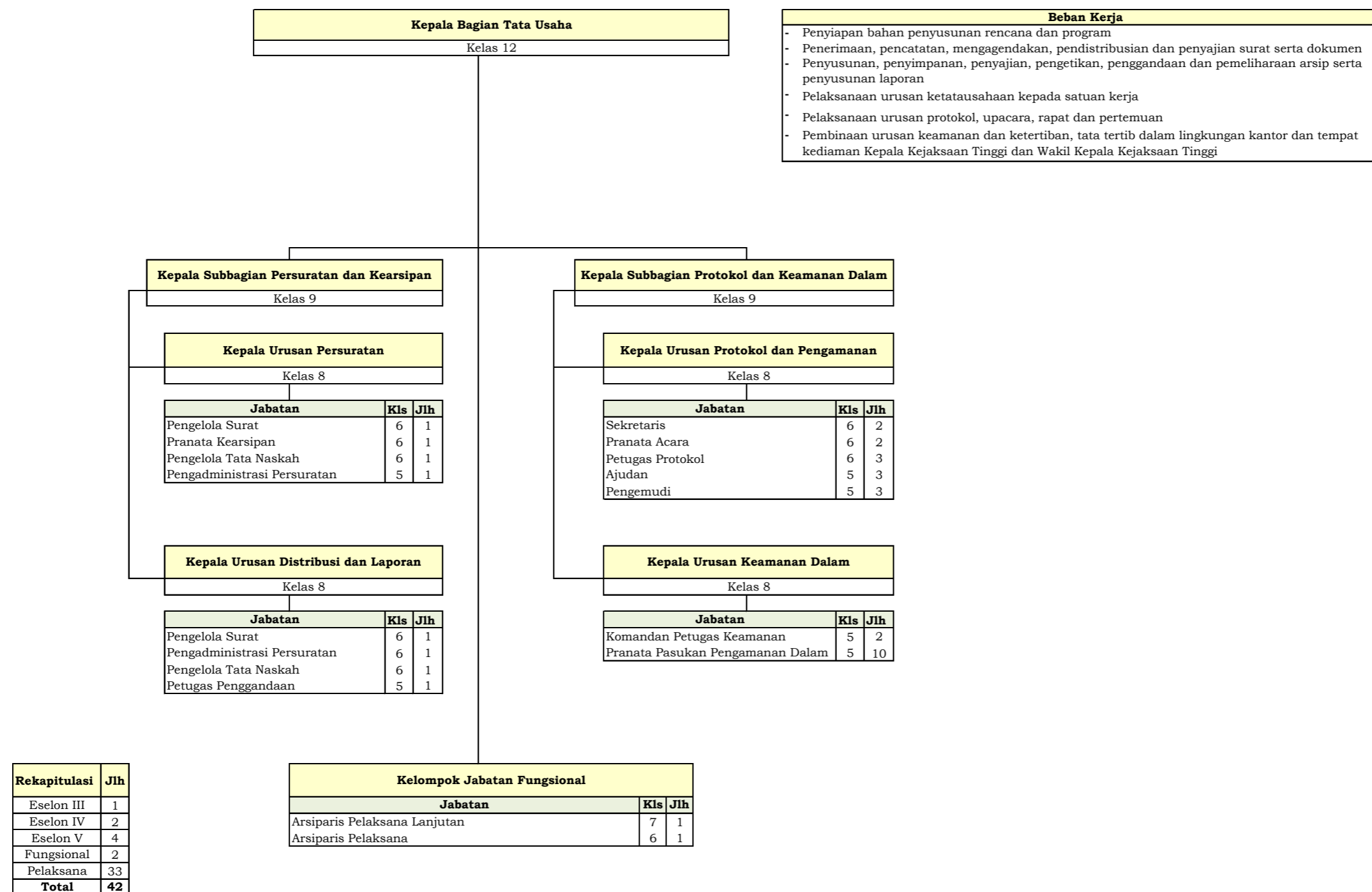
Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pengawasan	7	1
Pemeriksa Teknologi Informasi	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Per	6	2

Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Fungsional	13
Pelaksana	30
Total	50

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	1
Jaksa Muda (III/d)	10	1
Jaksa Pratama (III/c)	9	1
Arsiparis Pelaksana	6	2
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1
Auditor Penyelia	8	1
Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1
Auditor Pelaksana	6	2

N8. PETA JABATAN PADA BAGIAN TATA USAHA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR



N9. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN

Beban Kerja

- Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna
- Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
- Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
- Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
- Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
- Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
- Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya
- Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi
- Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
- Melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN
Kelas 13

Kepala Subbagian Pembinaan
Kelas 9

Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kelas 8

Jabatan	Kls	Jlh
Bendahara	7	1
Pengelola Kepegawaian	6	1
Pengelola Perjalanan Dinas	6	1
Pengolah Data Sistem Akuntansi	6	1
Verifikator Keuangan	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Pengadministrasi Anggaran	5	1

Kepala Urusan Perlengkapan
Kelas 8

Jabatan	Kls	Jlh
Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	6	1
Pengelola Barang Milik Negara	6	1
Pengelola Rumah Tangga	6	1
Pengemudi Pengawal Tahanan	5	2

Kepala Urusan Tata Usaha, Perpustakaan, dan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
Kelas 8

Jabatan	Kls	Jlh
Notulis Rapat	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengolah Data Informasi dan Hukum	6	1
Operator Telekomunikasi	6	1
Operator Pengembangan Sarana Iptek	6	1
Pengadministrasi Umum	5	1
Pengadministrasi Hukum	5	1

Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Eselon V	11
Fungsional	37
Pelaksana	71
Total	126

Kepala Seksi Intelijen
Kelas 9

Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum
Kelas 8

Jabatan	Kls	Jlh
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1
Pengelola Pengaduan Publik	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pranata Fotografi	6	1
Pengadministrasi Data	5	1
Penyajian dan Publikasi	5	1

Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis
Kelas 8

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Data dan Informasi	7	1
Analisis Perekonomian	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Kelas 9

Kepala Subseksi Prapenuntutan
Kelas 8

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Hukum	7	1
Pengawal Tahanan	6	2
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi	5	1
Penanganan Perkara	5	1

Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Ekseminasi
Kelas 8

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengawal Tahanan	6	2
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Petugas Pengejaran	5	1
Pengadministrasi	5	1
Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
Kelas 9

Kepala Subseksi Penyidikan
Kelas 8

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Hukum	7	1
Pengawal Tahanan	6	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi	5	1
Penanganan Perkara	5	1

Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi
Kelas 8

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengawal Tahanan	6	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Petugas Pengejaran dan Putusan	6	1
Pengelola Banding dan Gugatan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1
Petugas Pengejaran	5	1

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Kelas 9

Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Kelas 8

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Hukum	7	1
Pengelola Bantuan Hukum	6	1
Pengelola Banding dan Gugatan	6	1
Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	6	1
Pengelola Informasi Kerjasama	5	1
Pengadministrasi	5	1
Penanganan Perkara	5	1

Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum
Kelas 8

Jabatan	Kls	Jlh
Penyusun Abstraksi Hukum	7	1
Penyusun Bahan Bantuan Hukum	6	1
Hukum	6	1
Pengelola Bantuan Hukum	6	1
Pengadministrasi	5	1
Penanganan Perkara	5	1

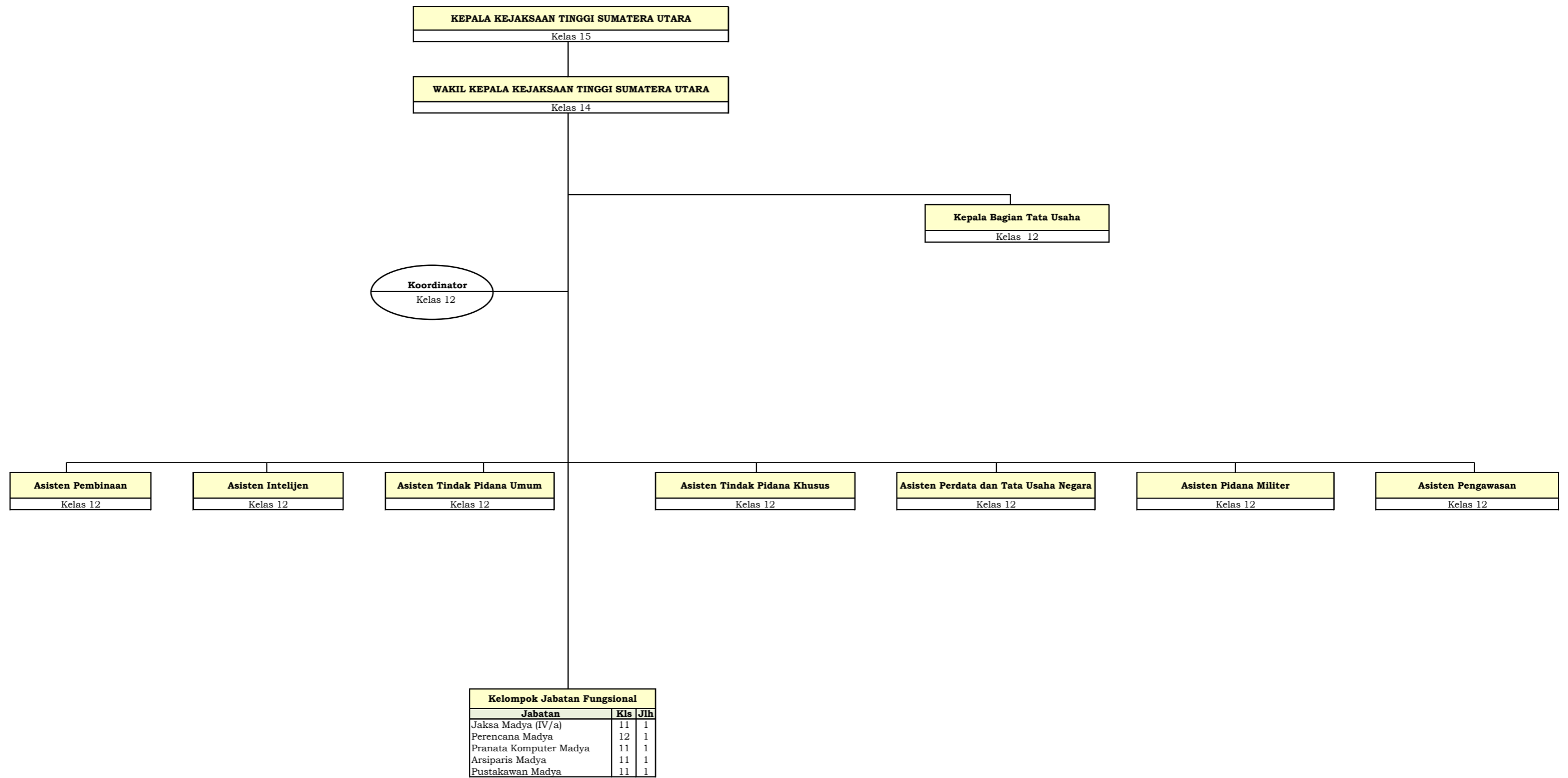
Kepala Seksi Pengelolaan barang Bukti dan Barang Rampasan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Pranata Barang Bukti	6	2
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengolah Data Perkara dan Putusan	6	2
Pengadministrasi BMN	6	1

Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Muda (III/d)	10	2
Jaksa Pratama (III/c)	9	12
Ajun Jaksa (III/b)	8	3
Pranata Keuangan APBN Terampil	6	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	10
Sandiman Pelaksana Lanjutan	7	1
Sandiman Pelaksana	6	2
Agen Pelaksana Lanjutan	7	1
Agen Pelaksana	6	2

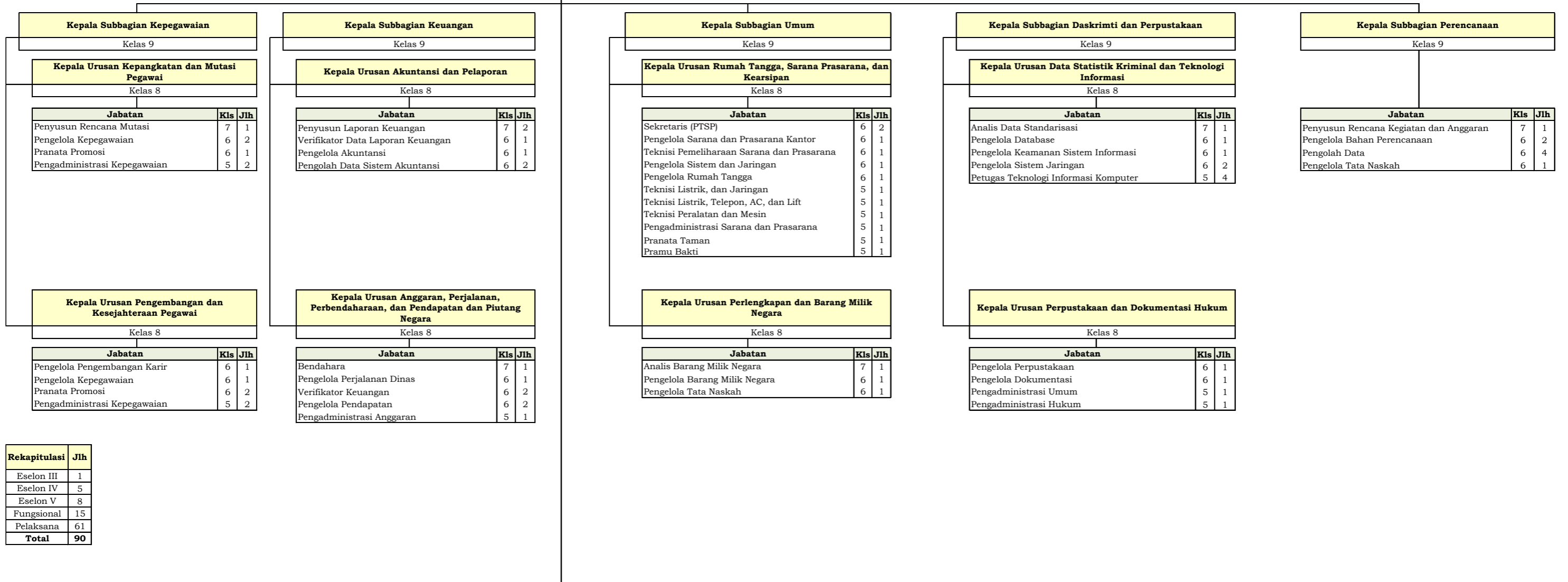
O. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA



01. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

ASISTEN PEMBINAAN		
Kelas 12		

Beban Kerja		
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis - Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerja sama seluruh satuan kerja di bidang administrasi - Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya - Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya - Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya - Pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pendapatan dan piutang negara - Pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, barang sitaan dan barang rampasan negara - Pelaksanaan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi - Pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi 		



Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	5
Eselon V	8
Fungsional	15
Pelaksana	61
Total	90

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Perencana Muda	9	1
Perencana Pertama	8	2
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	1
Arsiparis Pertama	8	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1
Dokter Muda	10	1
Perawat Mahir	7	1
Penilai Pemerintah Muda	9	1
Penilai Pemerintah Pertama	8	1

O2. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

ASISTEN INTELIJEN
Kelas 12

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya - Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan - Pelaksanaan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi - Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen - Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidentil - Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis - Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen - Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan / atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya - Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Pemeliharaan peralatan intelijen - Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi

Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Politik Hukum dan Keamanan	7	1
Analisis Pemetaan Jaringan Kelompok Radikal Terorisme	7	1
Analisis Pertahanan dan Keamanan	7	1
Analisis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Bina Kehidupan Agama	7	1
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	1
Analisis Hubungan Antar Lembaga	7	1
Analisis Organisasi Masyarakat	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Transaksi Keuangan	7	1
Analisis Perekonomian	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Analisis Rekening Pemerintah	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pengawasan	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengelola Data Persandian	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Sistem Informasi	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

Kepala Seksi Penerangan Hukum		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7	1
Analisis Publikasi	7	1
Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7	1
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1
Pranata Fotografi	6	1

Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Fungsional	12
Pelaksana	29
Total	48

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	1
Jaksa Muda (III/d)	10	1
Jaksa Pratama (III/c)	9	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1
Sandiman Pertama	8	1
Sandiman Penyelia	8	1
Sandiman Pelaksana Lanjutan	7	1
Sandiman Pelaksana	6	1

03. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM
Kelas 12

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja - Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum - Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya - Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum - Pengelolaan dan penyajian data dan informasi - Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda
Kelas 9

Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya
Kelas 9

Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya
Kelas 9

Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Hukum	7	2
Pengelola Perkara	6	2
Pengelola Persidangan	6	2
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	2

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	2
Analisis Hukum	7	1
Pengelola Perkara	6	2
Pengelola Persidangan	6	2
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	2

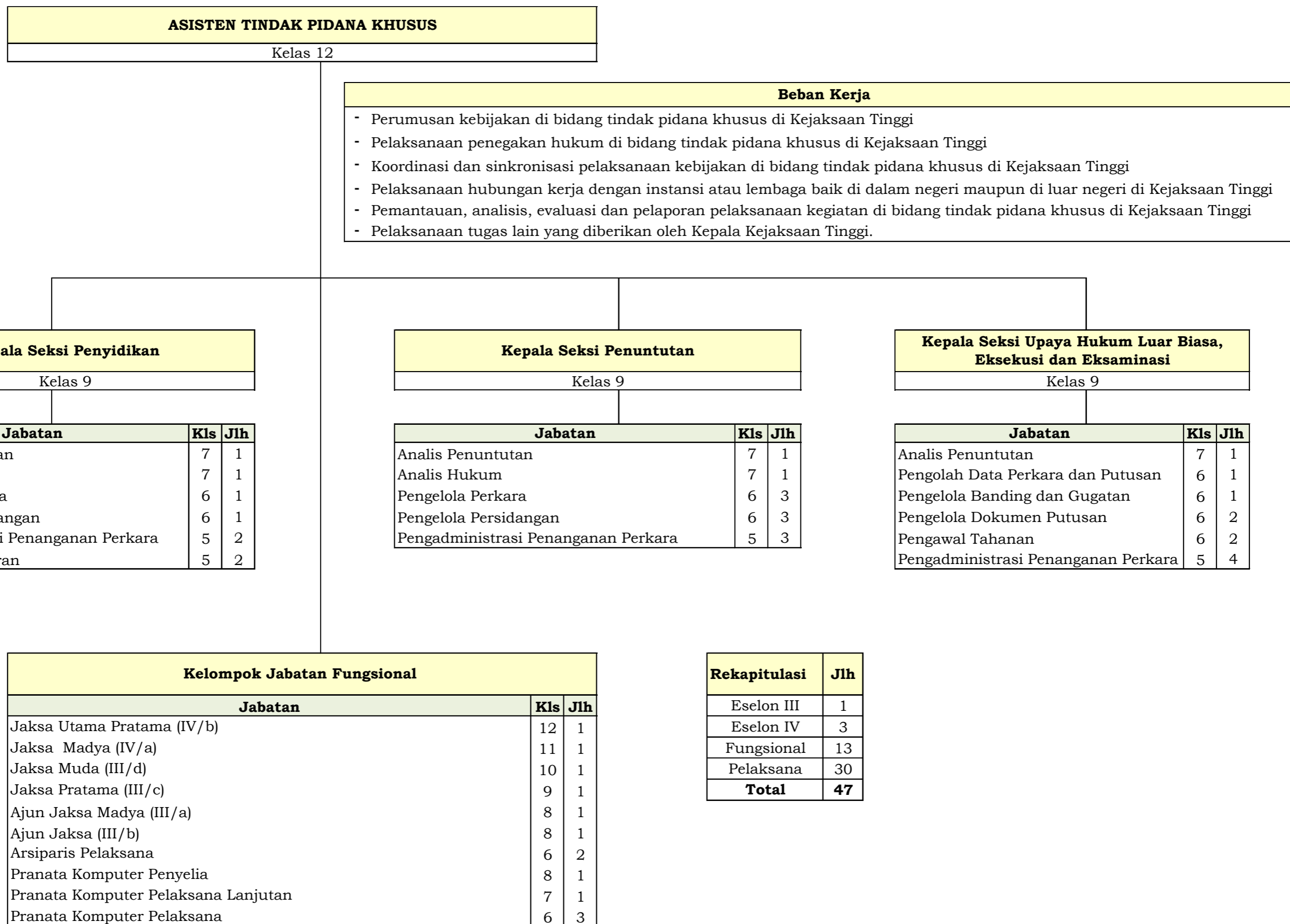
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Hukum	7	2
Pengelola Perkara	6	2
Pengelola Persidangan	6	2
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	2

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	2
Analisis Hukum	7	1
Pengelola Perkara	6	2
Pengelola Persidangan	6	2
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	2

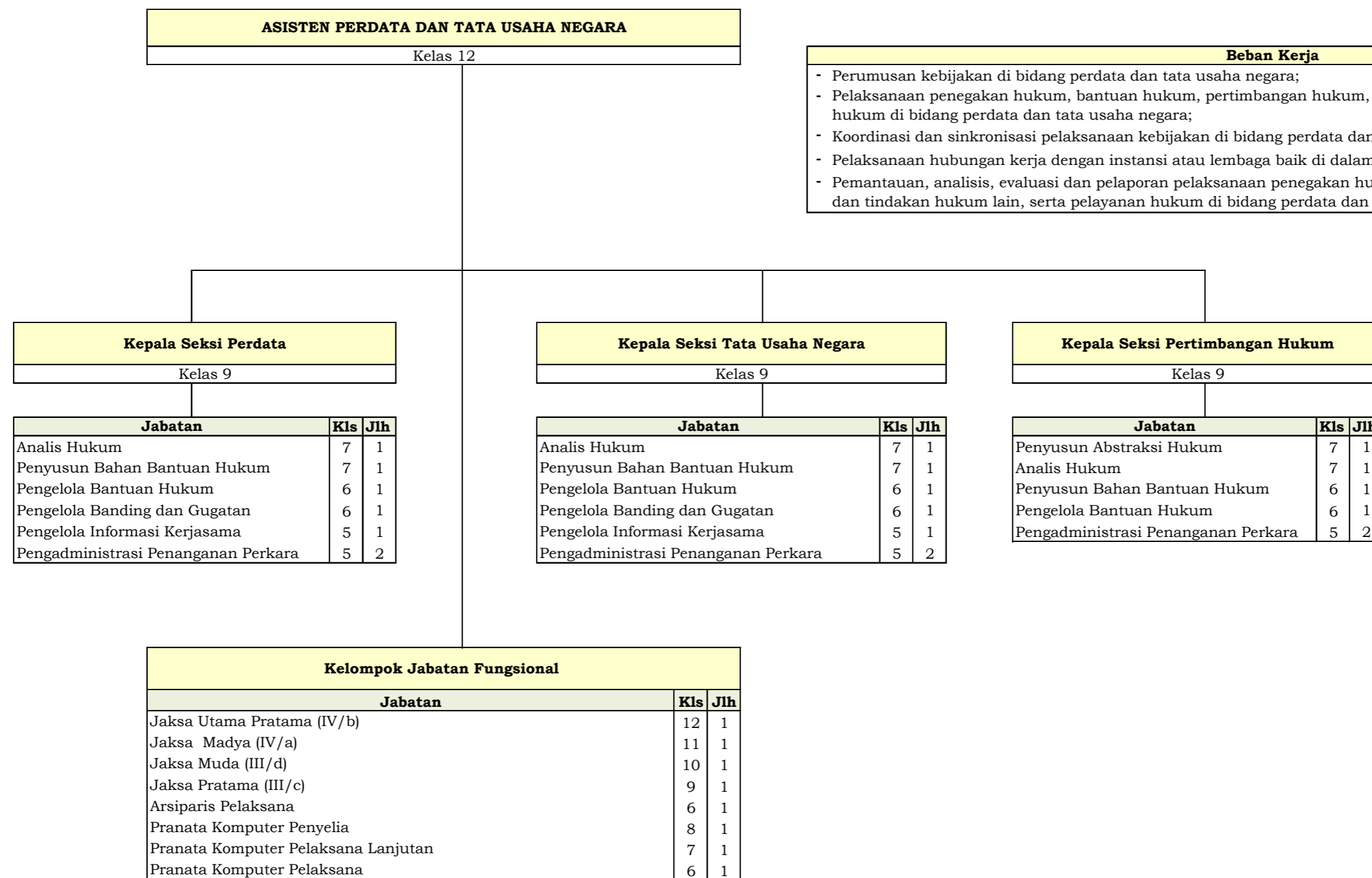
Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	1
Jaksa Muda (III/d)	10	1
Jaksa Pratama (III/c)	9	1
Ajun Jaksa Madya (III/a)	8	1
Ajun Jaksa (III/b)	8	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1

Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	4
Fungsional	10
Pelaksana	36
Total	51

O4. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

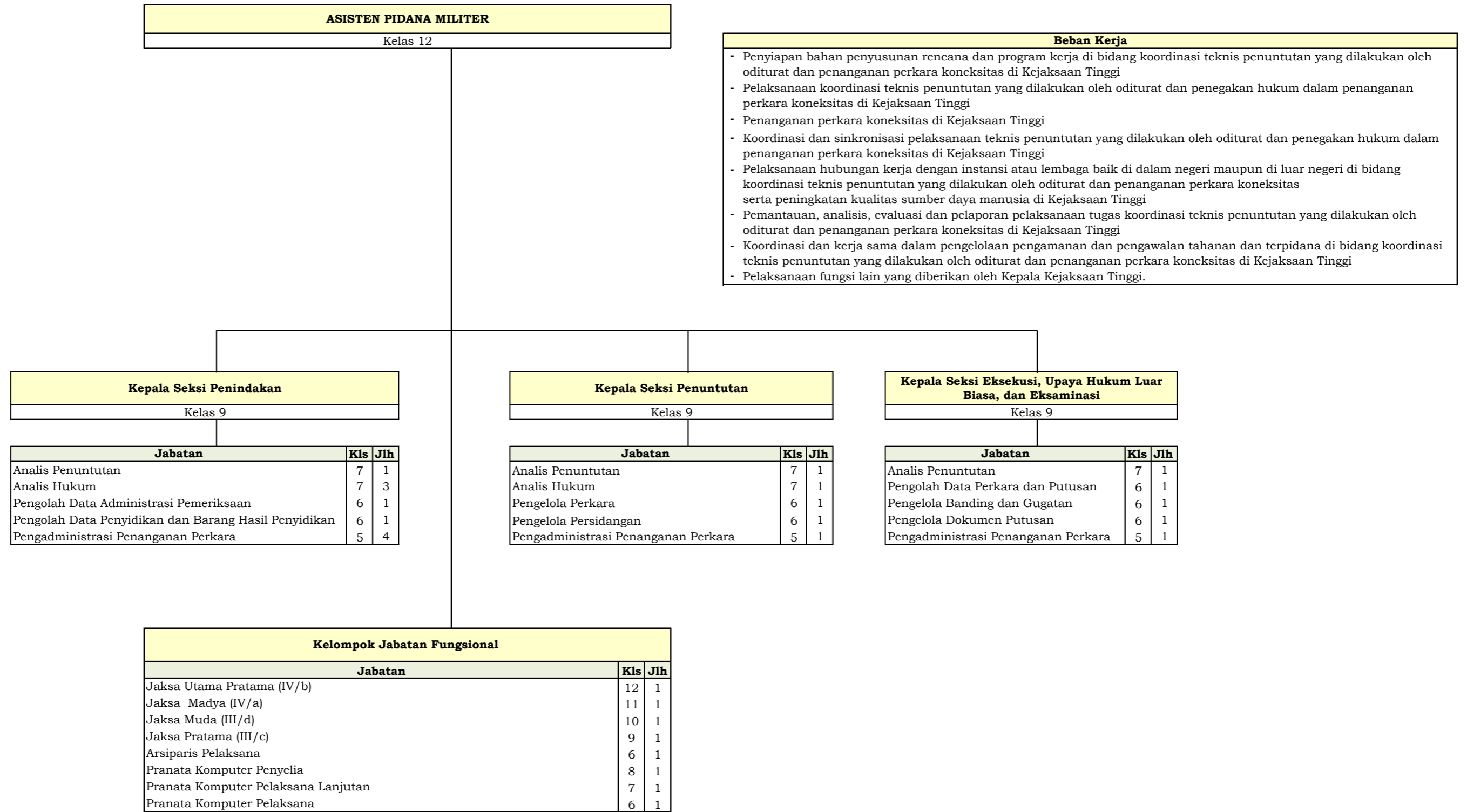


O5. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI



Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	3
Fungsional	8
Pelaksana	20
Total	32

06. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

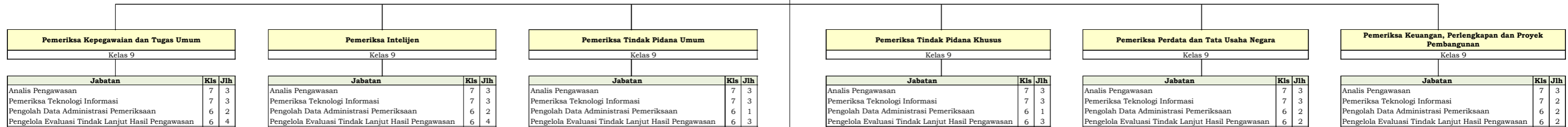


Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	3
Fungsional	8
Pelaksana	20
Total	32

07. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

ASISTEN PENGAWASAN
Kelas 12

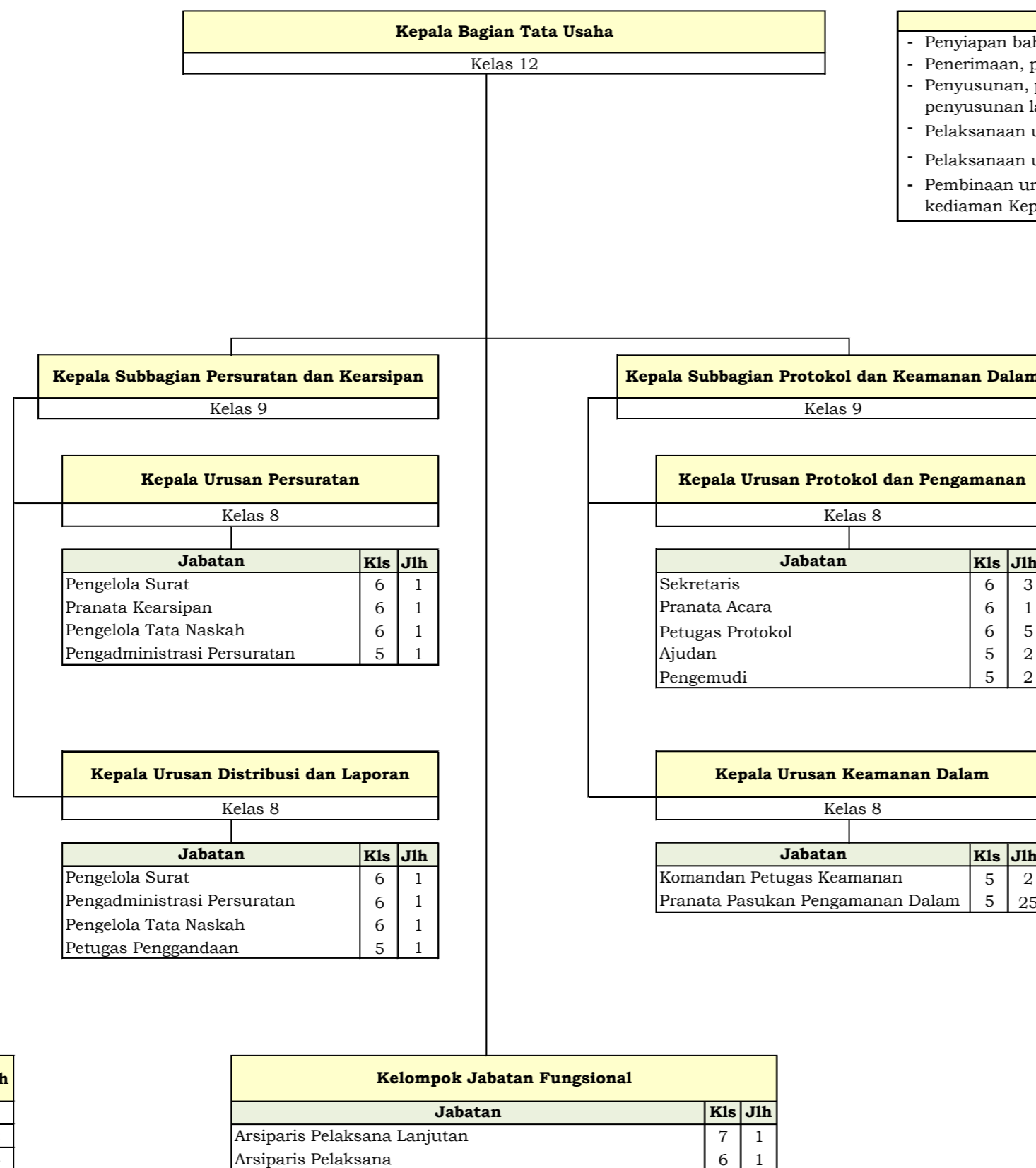
Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta bidang pengawasan - Pelaksanaan dan pengendalian pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijakan pimpinan - Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana - Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung - Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang diinspeksi di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan berkala terkait pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan - Pelaksanaan pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan - Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara - Pelaksanaan koordinasi kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya.



Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Fungsional	12
Pelaksana	65
Total	84

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	1
Jaksa Muda (III/d)	10	1
Jaksa Pratama (III/c)	9	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1
Auditor Penyelia	8	1
Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1
Auditor Pelaksana	6	1

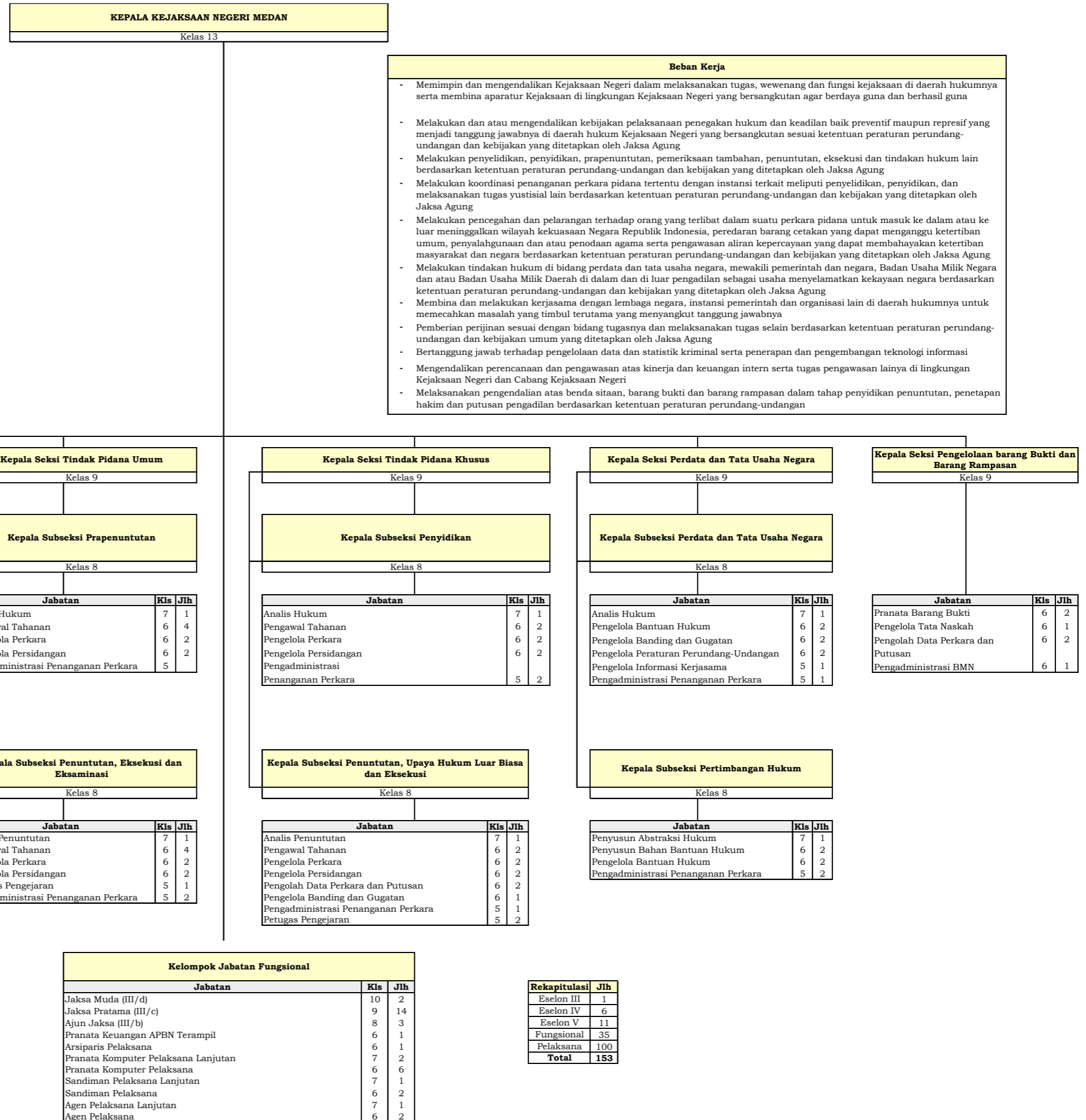
08. PETA JABATAN PADA BAGIAN TATA USAHA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA



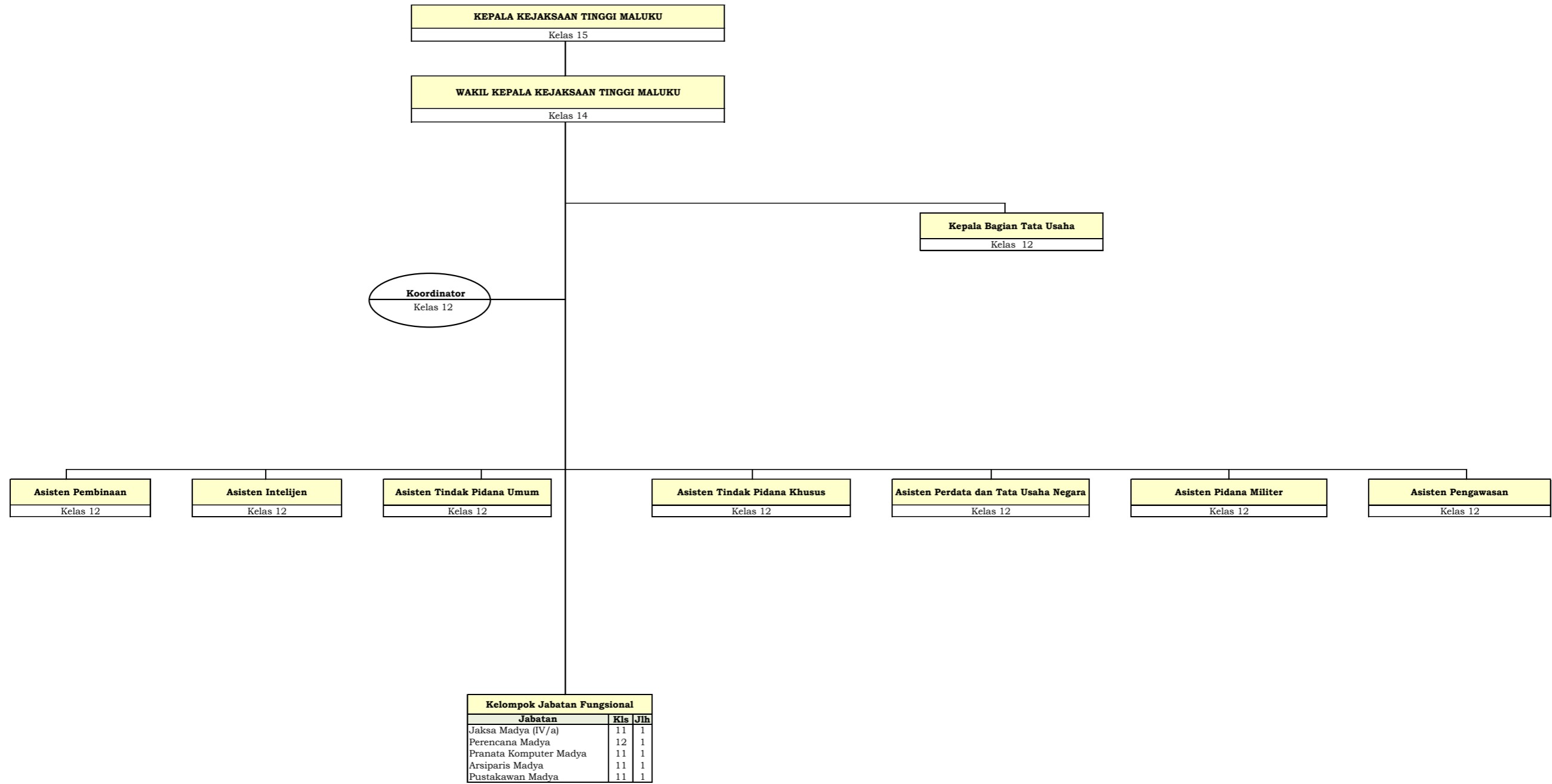
Beban Kerja	
-	Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
-	Penerimaan, pencatatan, mengagendakan, pendistribusian dan penyajian surat serta dokumen
-	Penyusunan, penyimpanan, penyajian, pengetikan, penggandaan dan pemeliharaan arsip serta penyusunan laporan
-	Pelaksanaan urusan ketatausahaan kepada satuan kerja
-	Pelaksanaan urusan protokol, upacara, rapat dan pertemuan
-	Pembinaan urusan keamanan dan ketertiban, tata tertib dalam lingkungan kantor dan tempat kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	2
Eselon V	4
Fungsional	2
Pelaksana	48
Total	57

09. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN



P. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU



P2. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU

ASISTEN INTELIJEN
Kelas 12

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya - Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan - Pelaksanaan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi - Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen - Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidental - Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis - Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen - Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/ atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya - Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Pemeliharaan peralatan intelijen - Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi

Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Politik Hukum dan Keamanan	7	1
Analisis Pemetaan Jaringan Kelompok Radikal Teroris	7	1
Analisis Pertahanan dan Keamanan	7	1
Analisis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Bina Kehidupan Agama	7	1
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	1
Analisis Hubungan Antar Lembaga	7	1
Analisis Organisasi Masyarakat	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Transaksi Keuangan	7	1
Analisis Perencanaan	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Analisis Rekening Pemerintah	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pengawasan	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengelola Data Persandian	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Sistem Informasi	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

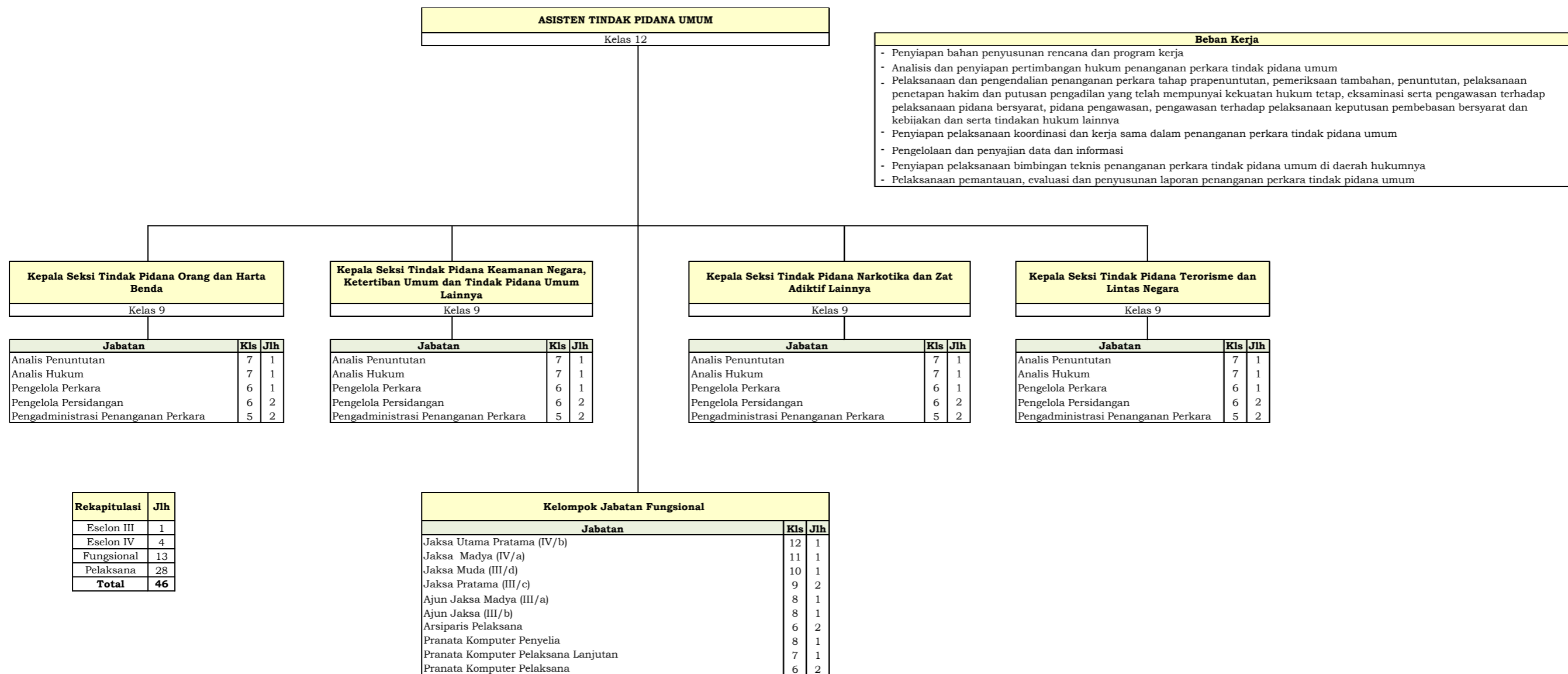
Kepala Seksi Penerangan Hukum		
Kelas 9		

Jabatan	Kls	Jlh
Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7	1
Analisis Publikasi	7	1
Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7	1
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1
Pranata Fotografi	6	1

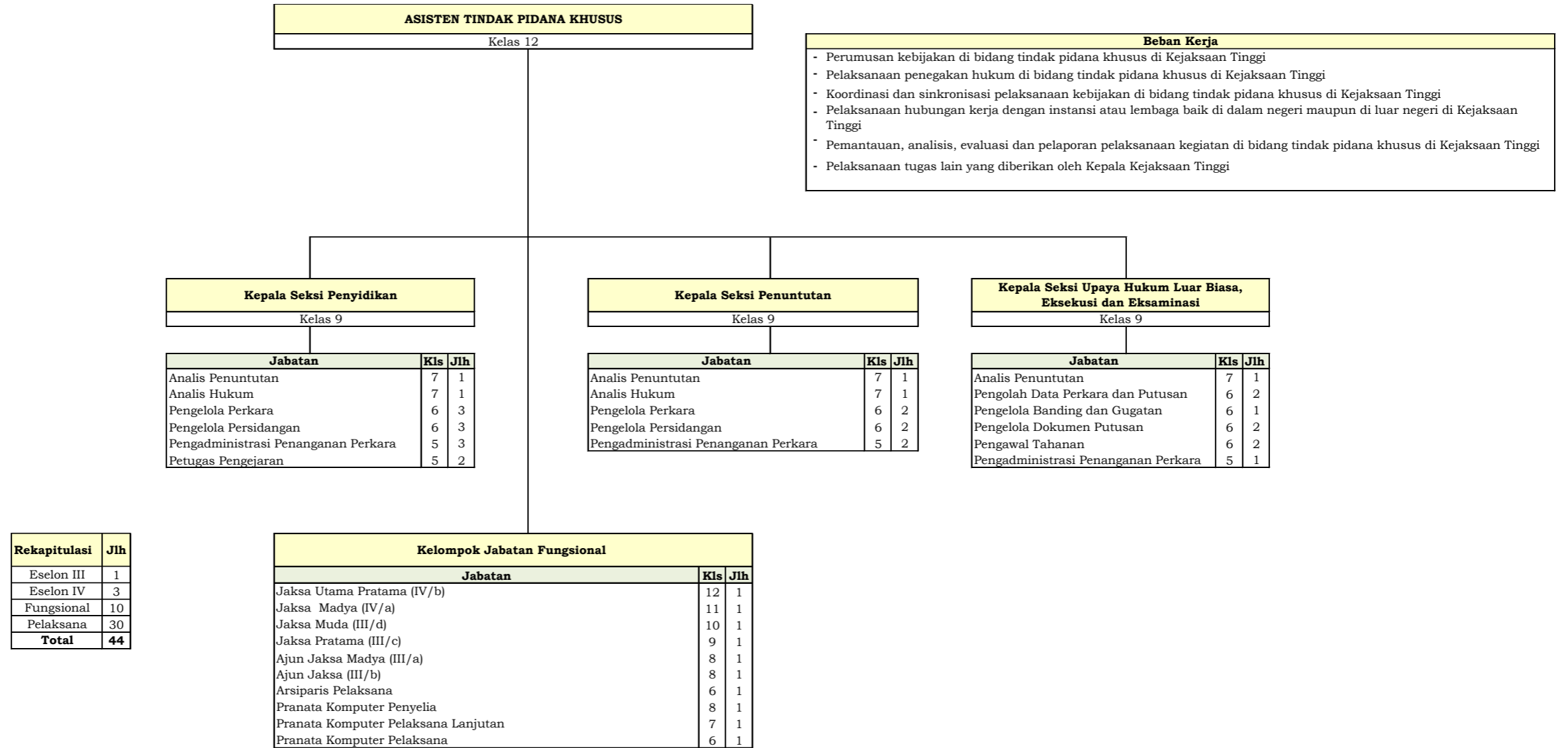
Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Fungsional	18
Pelaksana	29
Total	54

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	2
Jaksa Muda (III/d)	10	2
Jaksa Pratama (III/c)	9	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	2
Sandiman Pertama	8	2
Sandiman Penyelia	8	1
Sandiman Pelaksana Lanjutan	7	1
Sandiman Pelaksana	6	2

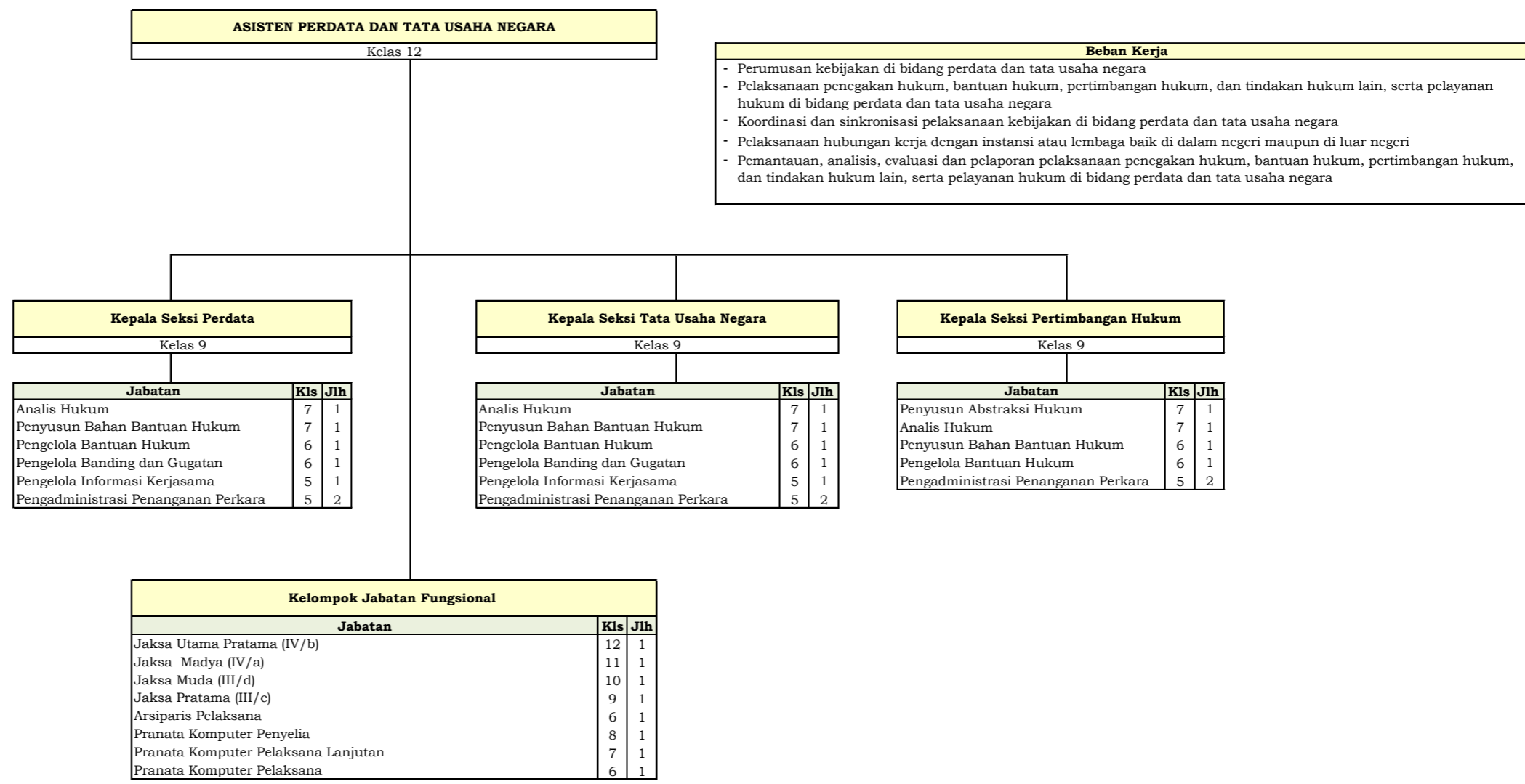
P3. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI MALUKU



P4. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI MALUKU

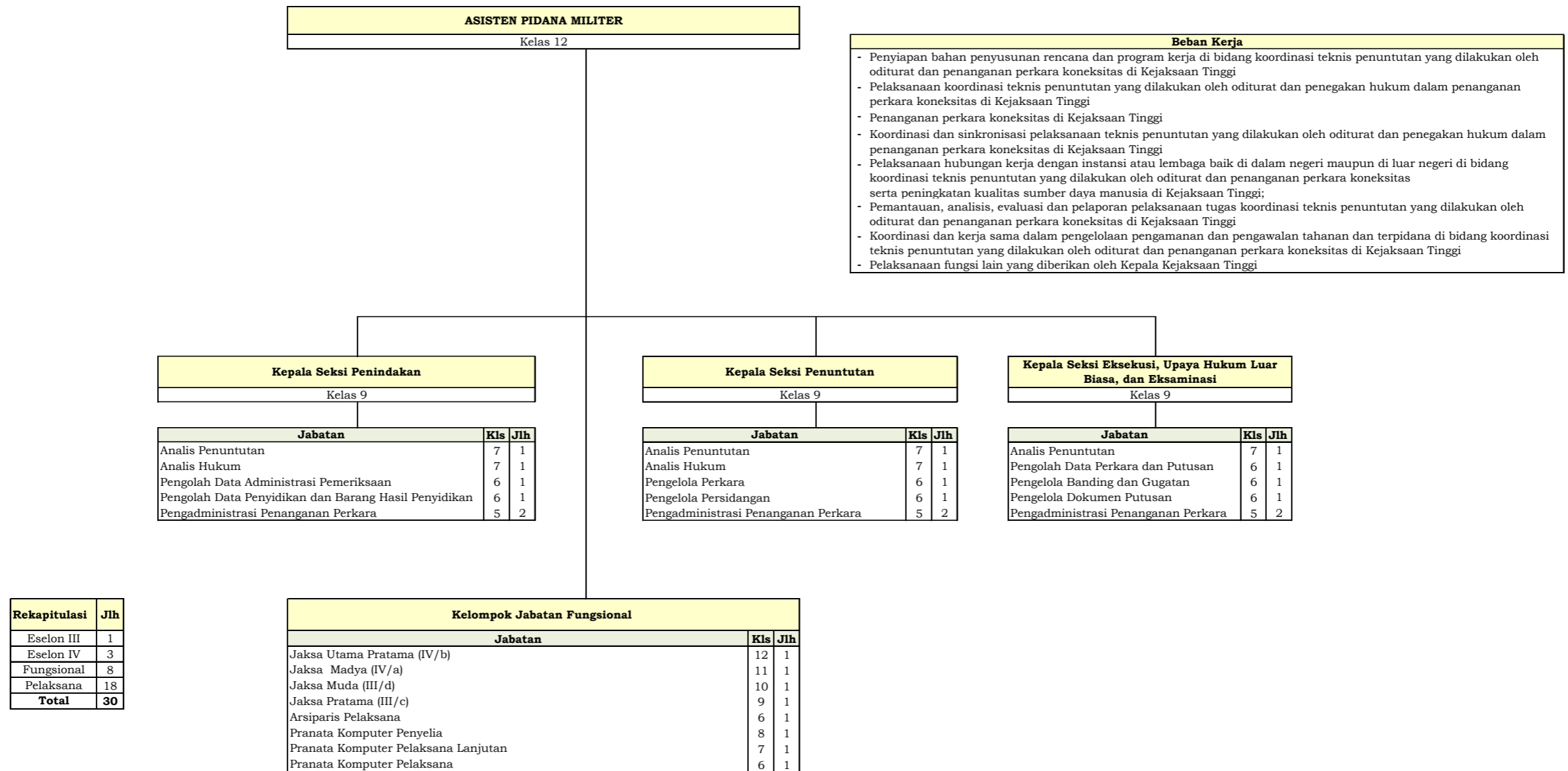


P5. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI

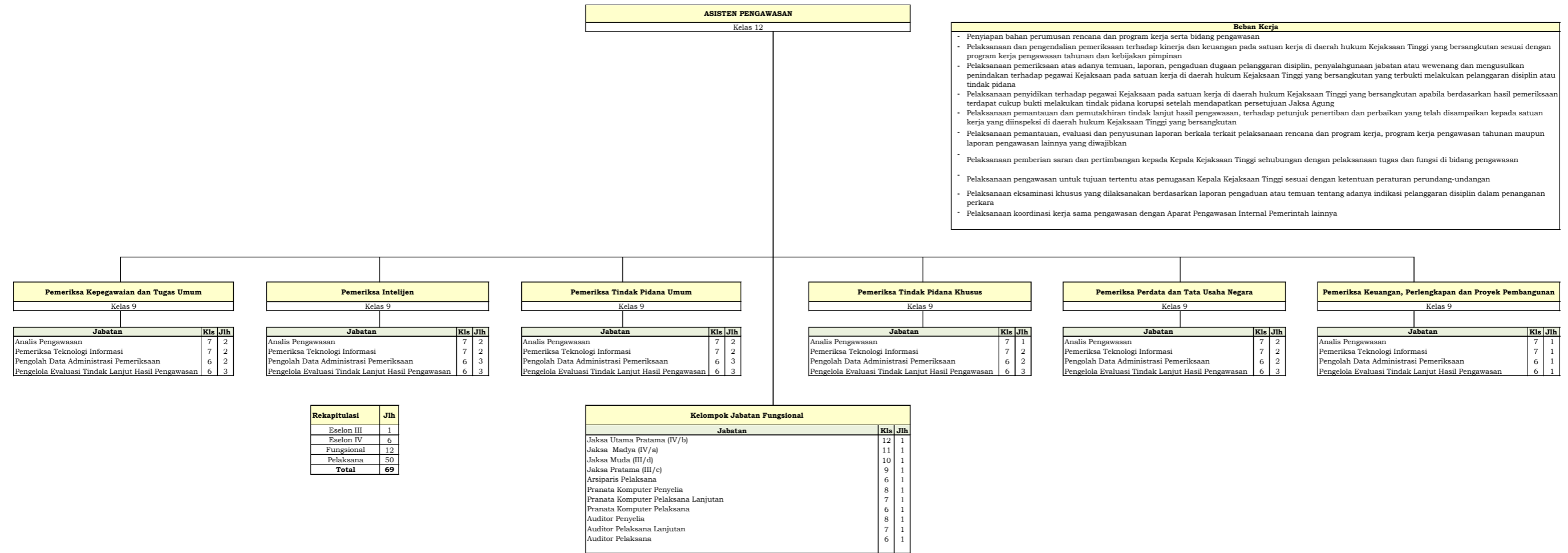


Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	3
Fungsional	8
Pelaksana	20
Total	32

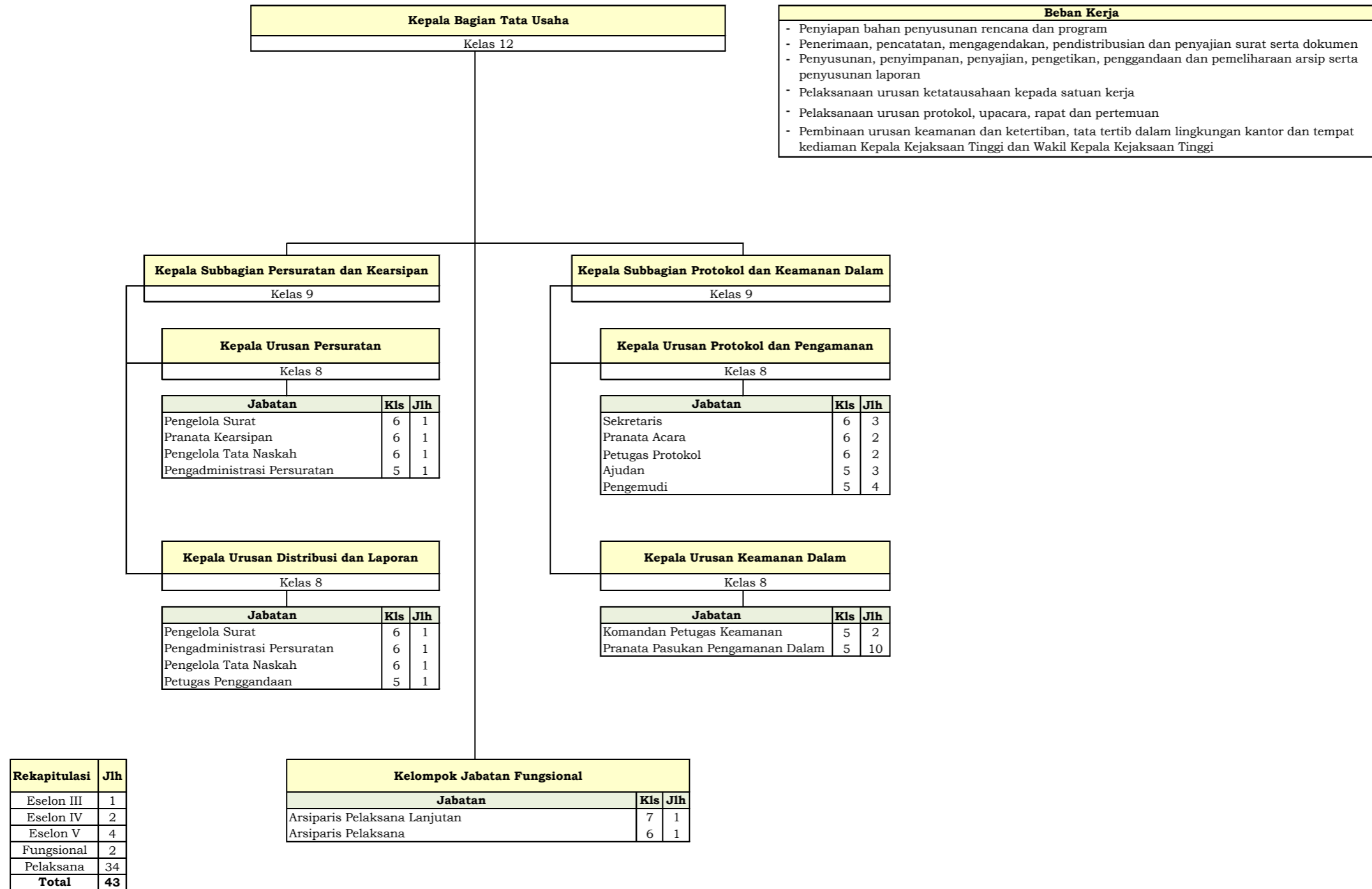
P6. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER KEJAKSAAN TINGGI MALUKU



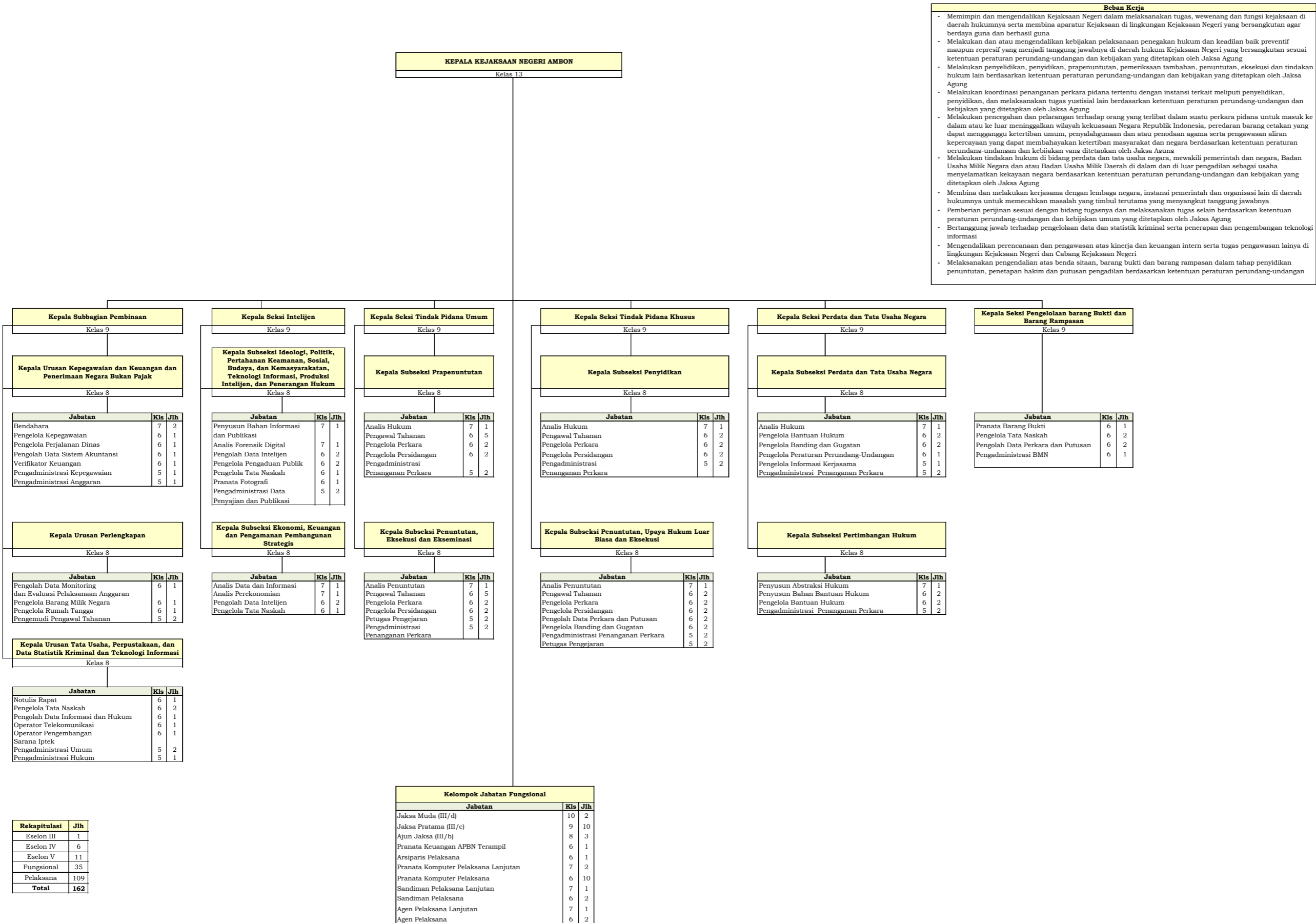
P7. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU



P8. PETA JABATAN PADA BAGIAN TATA USAHA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU

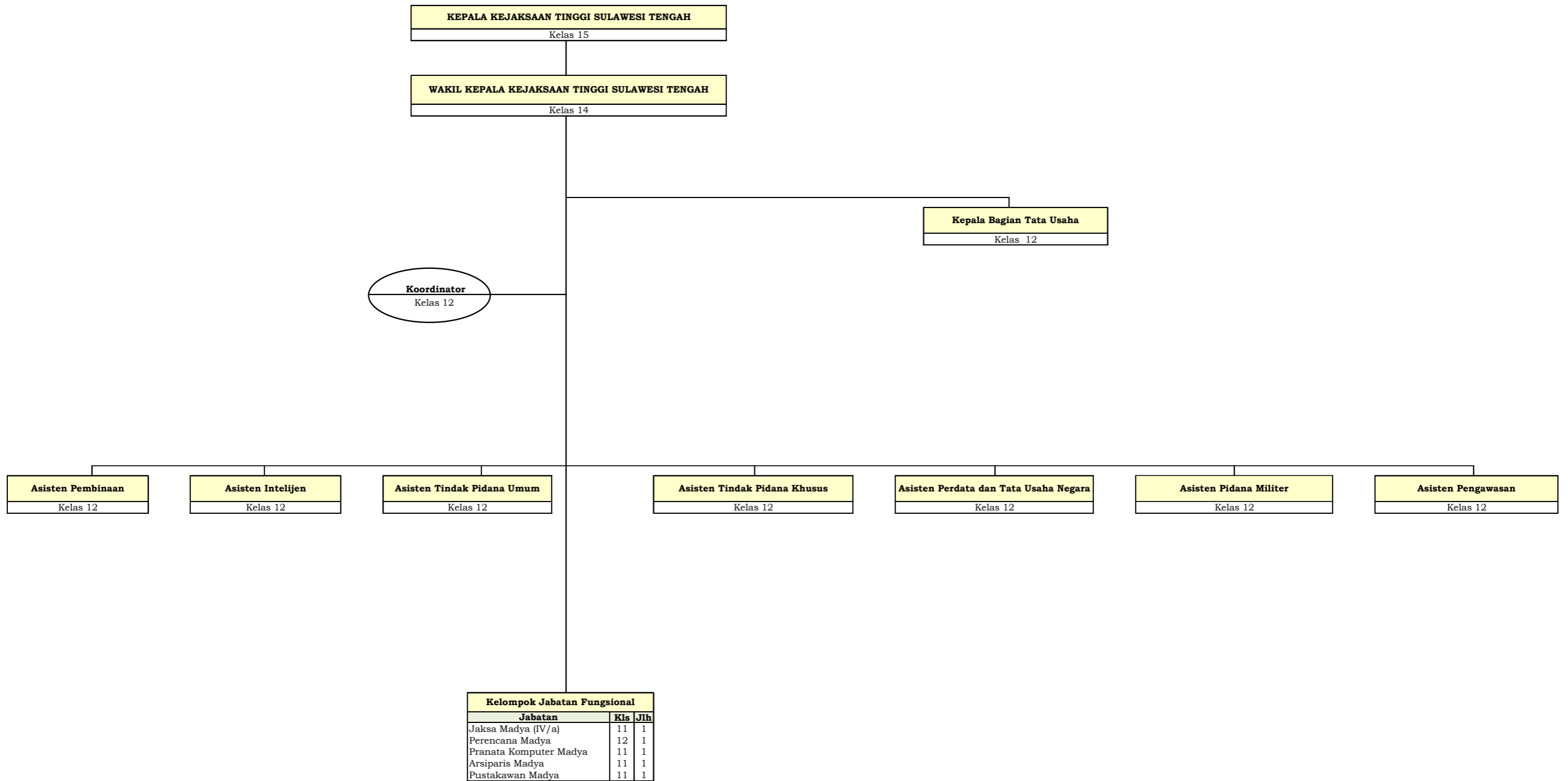


P9. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON

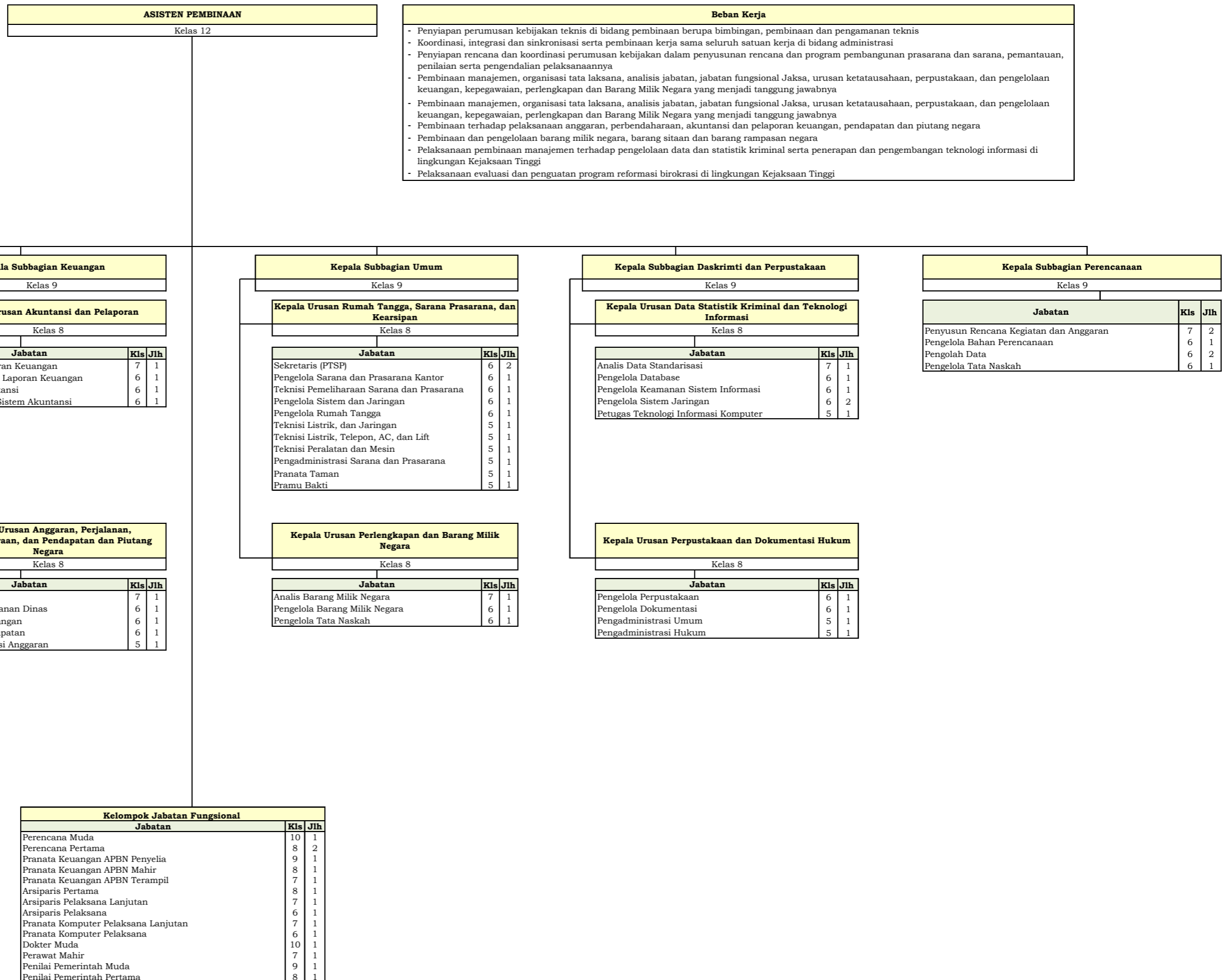


- Beban Kerja**
- Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna
 - Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya
 - Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi
 - Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
 - Melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

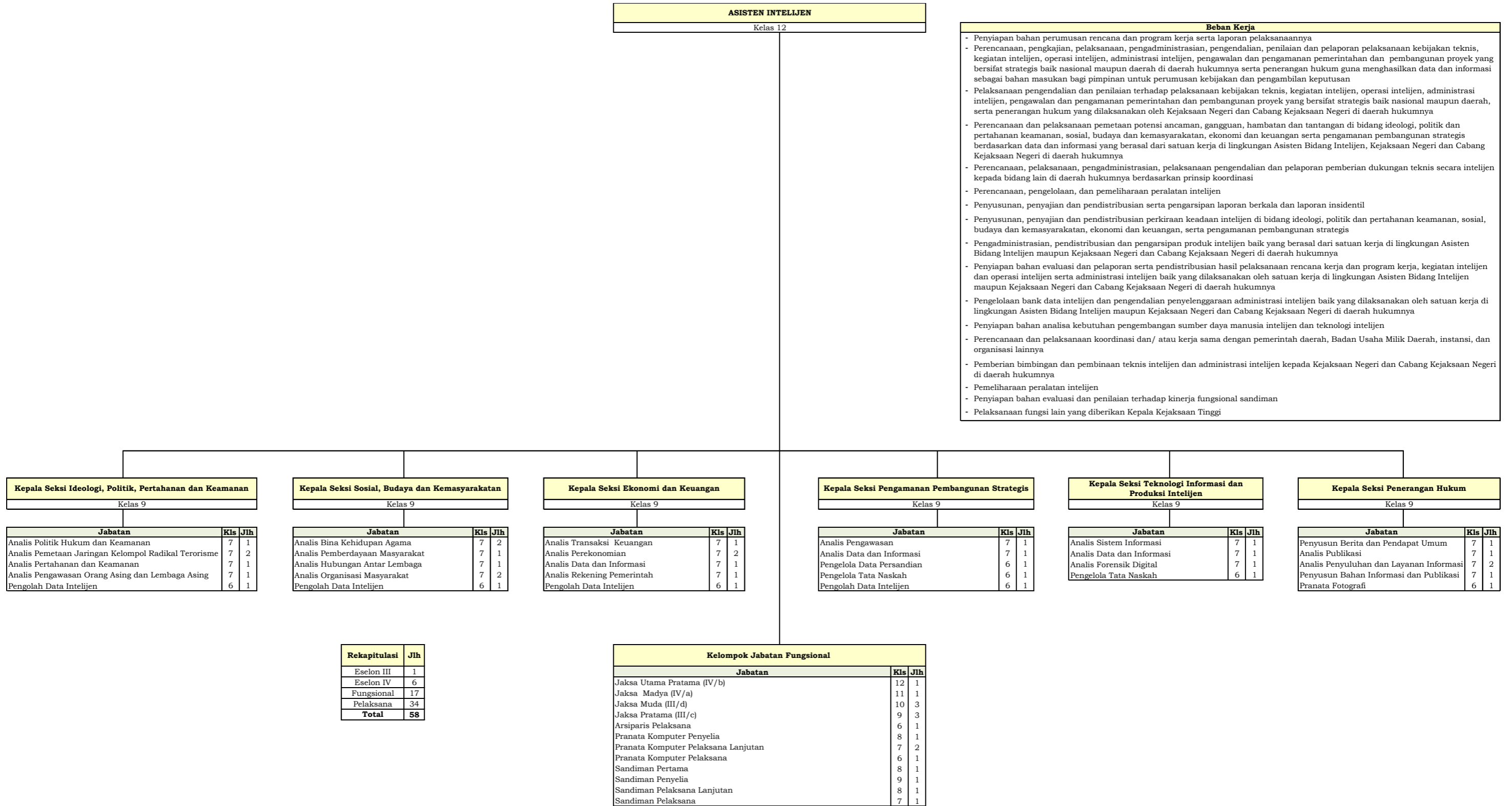
Q. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH



Q1. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH



Q2. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH



Q3. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM
Kelas 12

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja - Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum - Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya - Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum - Pengelolaan dan penyajian data dan informasi - Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda
Kelas 9

Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum Lainnya
Kelas 9

Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya
Kelas 9

Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	2
Analisis Hukum	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	2

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	2
Analisis Hukum	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	2

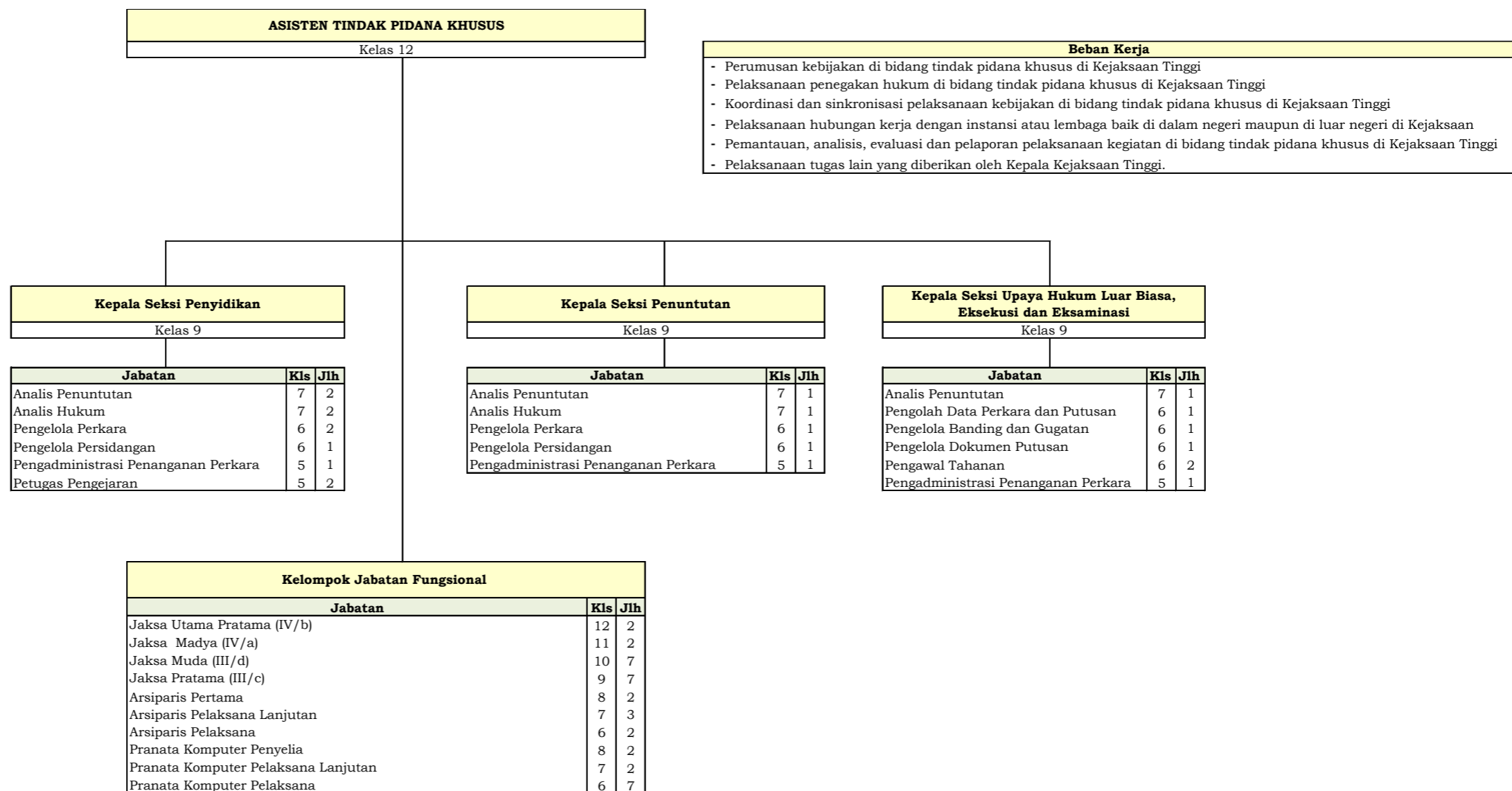
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Hukum	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	2

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	2
Analisis Hukum	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	2

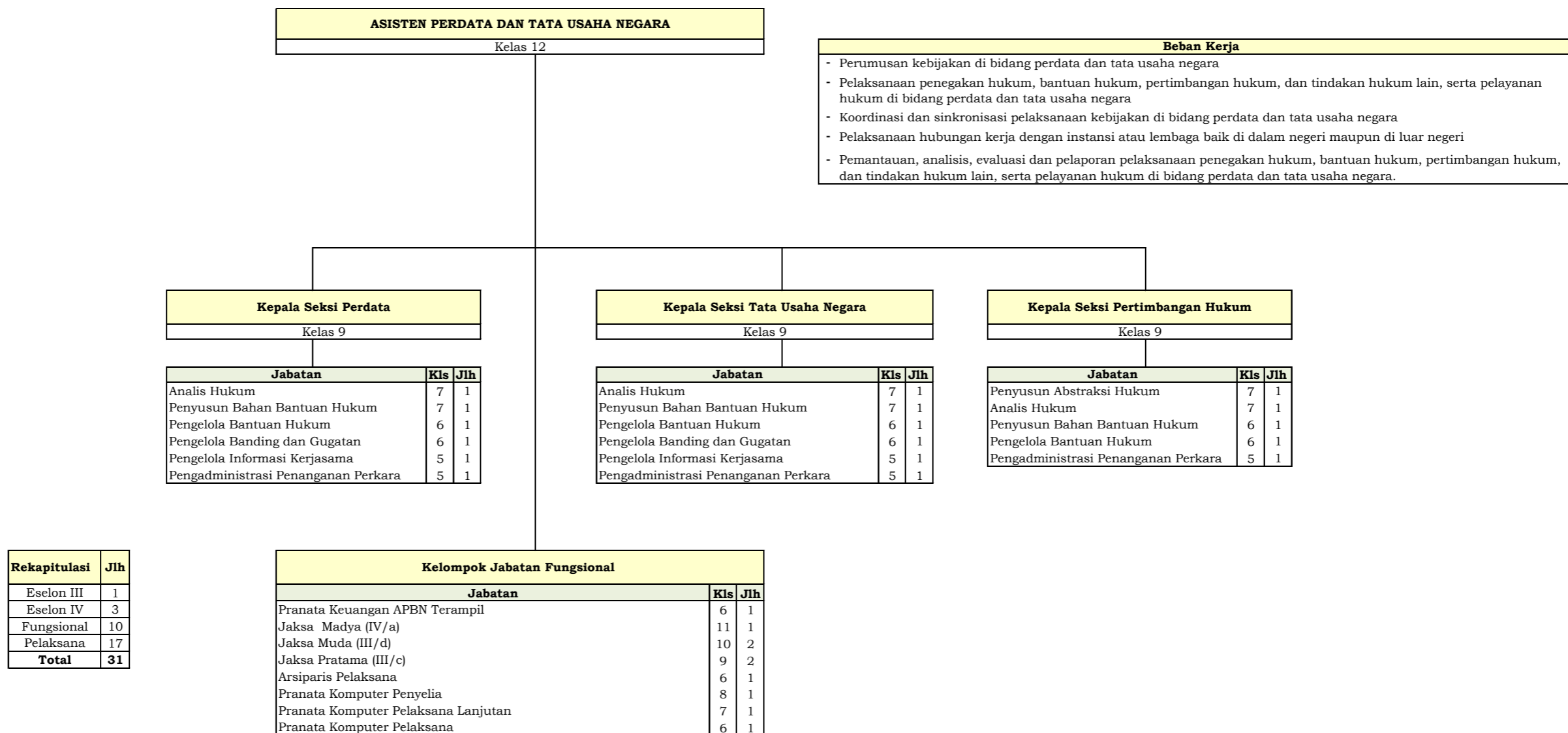
Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	1
Jaksa Muda (III/d)	10	1
Jaksa Pratama (III/c)	9	2
Arsiparis Pelaksana	6	4
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	4

Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	4
Fungsional	16
Pelaksana	27
Total	48

Q4. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH



Q5. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH



Q6. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

ASISTEN PIDANA MILITER
Kelas 12

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi - Pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi - Penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi - Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kejaksaan Tinggi - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi - Koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan pengamanan dan pengawalan tahanan dan terpidana di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

Kepala Seksi Penindakan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Hukum	7	1
Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	1
Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

Kepala Seksi Penuntutan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Hukum	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

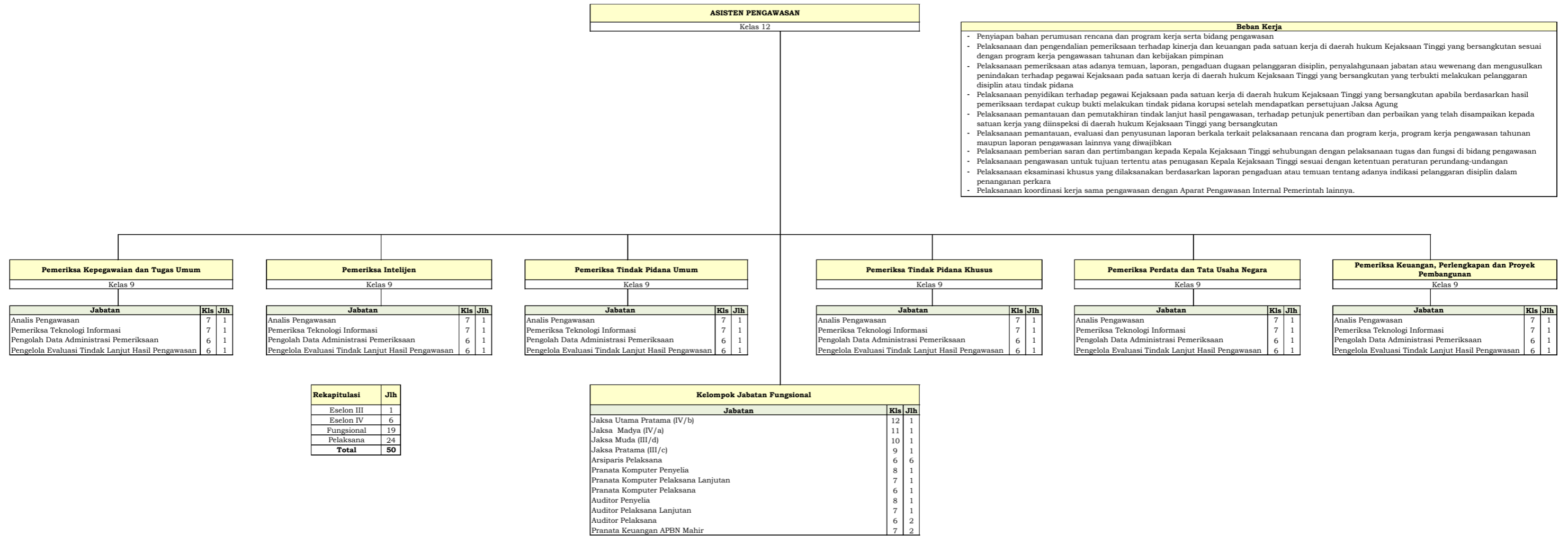
Kepala Seksi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Pengolah Data Perkara dan Putusan	6	1
Pengelola Banding dan Gugatan	6	1
Pengelola Dokumen Putusan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	1

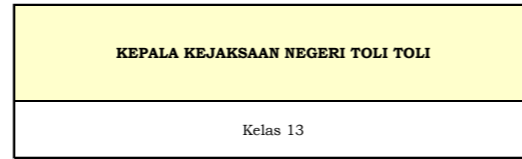
Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	1
Jaksa Muda (III/d)	10	1
Jaksa Pratama (III/c)	9	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1

Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	3
Fungsional	8
Pelaksana	15
Total	27

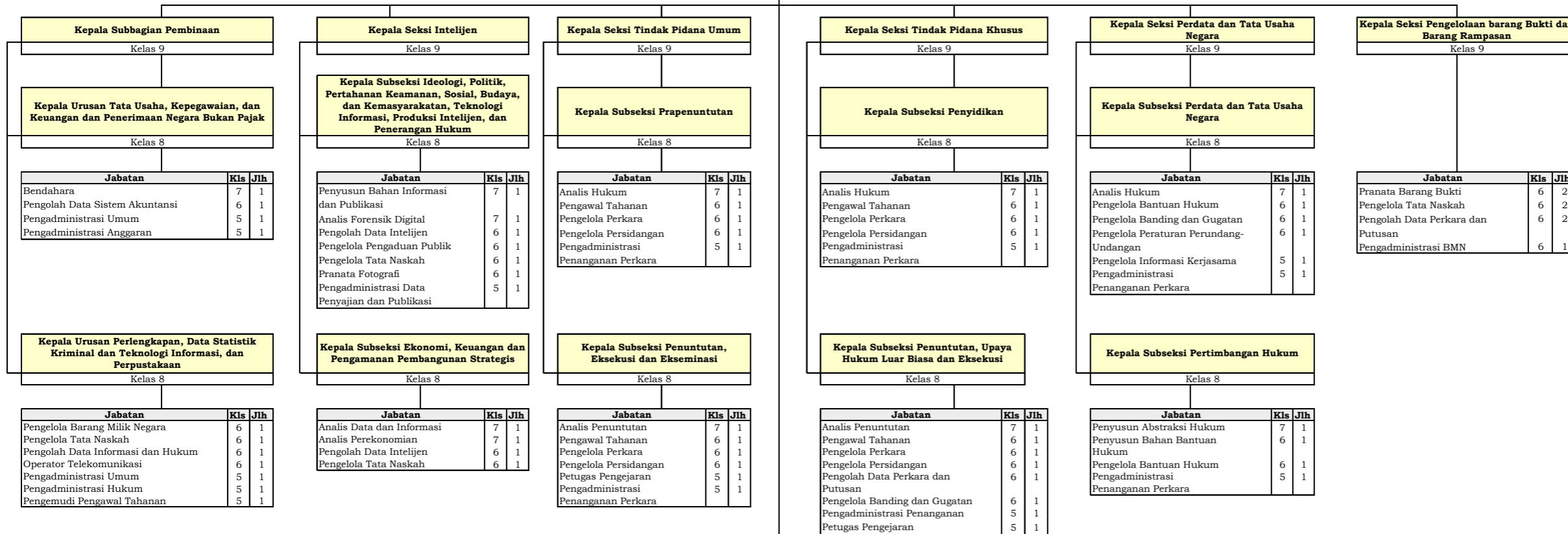
Q7. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH



Q9. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN NEGERI TOLITOLI



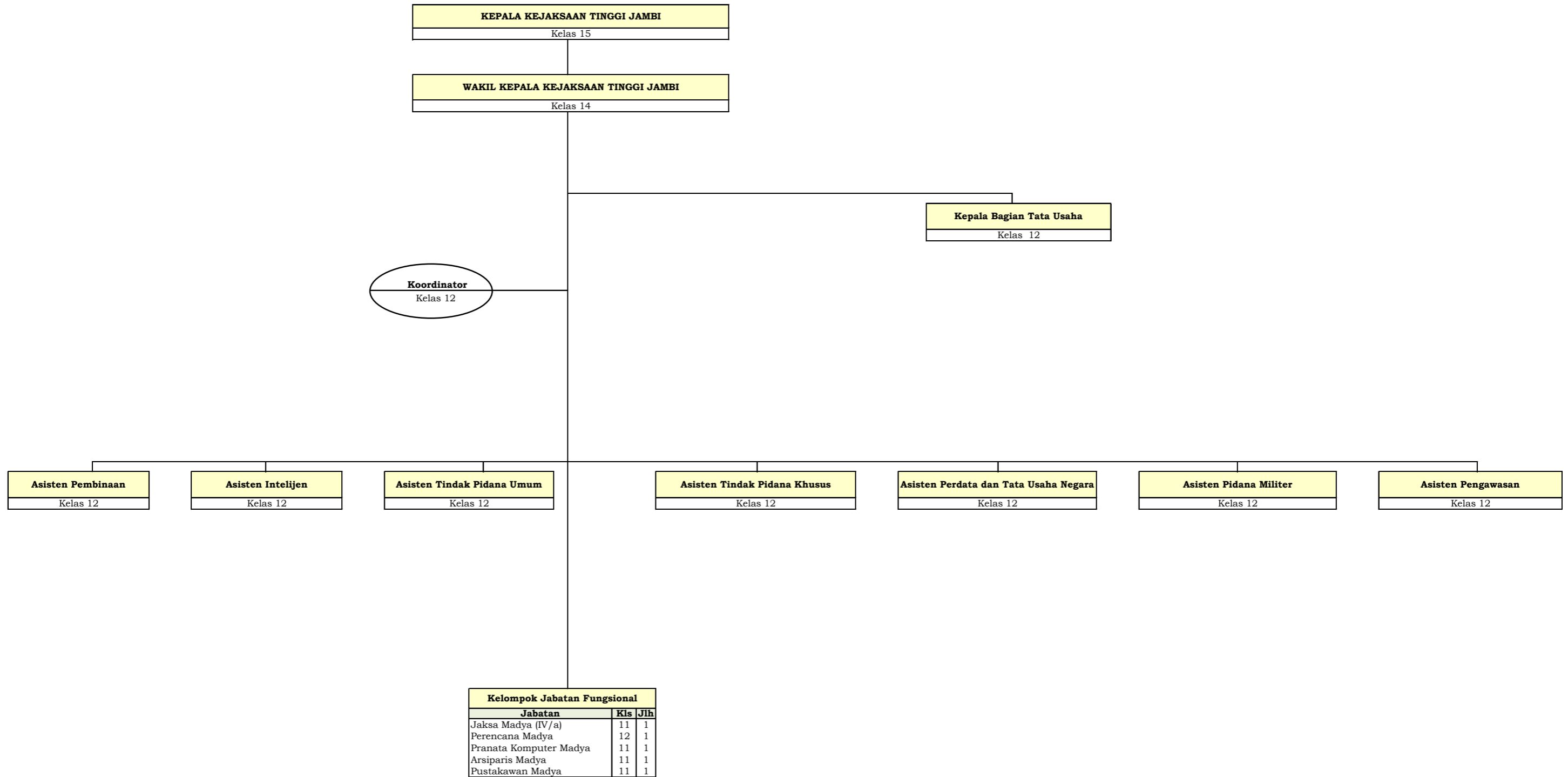
Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna - Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung - Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung - Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung - Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung - Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung - Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya - Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi - Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri - Melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Muda (III/d)	10	2
Jaksa Pratama (III/c)	9	15
Ajun Jaksa (III/b)	8	3
Pranata Keuangan APBN Terampil	6	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	10
Sandiman Pelaksana Lanjutan	7	1
Sandiman Pelaksana	6	2
Agen Pelaksana Lanjutan	7	1
Agen Pelaksana	6	2

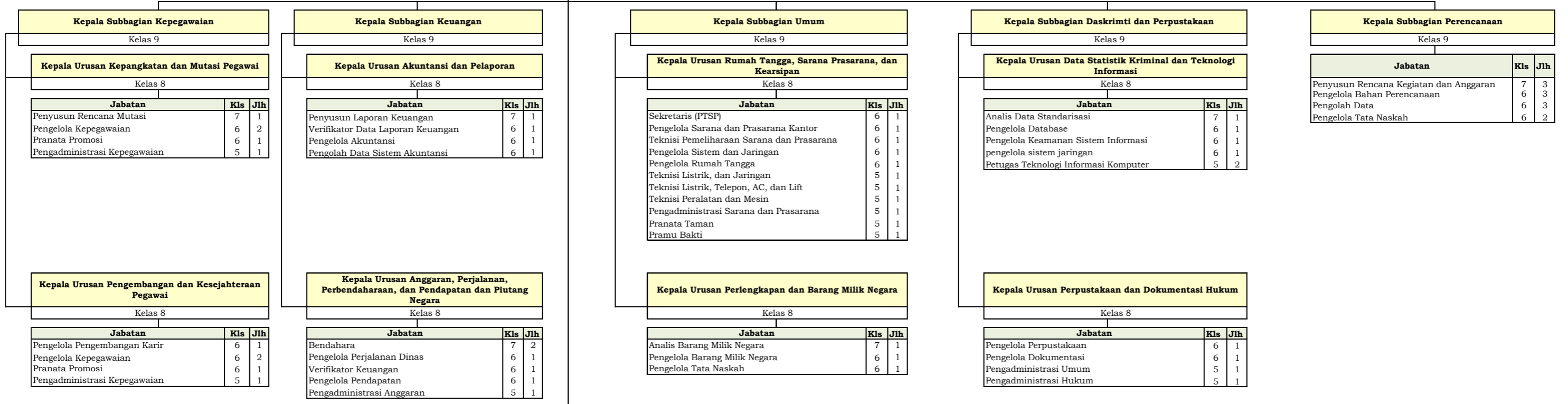
Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Eselon V	10
Fungsional	40
Pelaksana	63
Total	120

R. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI



R1. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

ASISTEN PEMBINAAN	Beban Kerja
Kelas 12	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis - Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerja sama seluruh satuan kerja di bidang administrasi - Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya - Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya - Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya - Pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pendapatan dan piutang negara - Pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, barang sitaan dan barang rampasan negara - Pelaksanaan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi - Pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi



Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	5
Eselon V	8
Fungsional	14
Pelaksana	51
Total	79

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Perencana Muda	10	1
Perencana Pertama	8	1
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	1
Arsiparis Pertama	8	1
Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1
Dokter Muda	10	1
Perawat Mahir	7	1
Penilai Pemerintah Muda	9	1
Penilai Pemerintah Pertama	8	1

R2. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

ASISTEN INTELIJEN
Kelas 12

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya - Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan - Pelaksanaan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi - Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen - Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidentil - Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis - Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen - Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/ atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya - Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Pemeliharaan peralatan intelijen - Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi

Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan		
Kelas 9		
Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Politik Hukum dan Keamanan	7	2
Analisis Pemetaan Jaringan Kelompok Radikal Terorisme	7	2
Analisis Pertahanan dan Keamanan	7	1
Analisis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Sosial, Budaya dan Masyarakat			
Kelas 9			
Jabatan	Kls	Jlh	Kls
Analisis Bina Kehidupan Agama	7	2	
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	1	
Analisis Hubungan Antar Lembaga	7	1	
Analisis Organisasi Masyarakat	7	1	
Pengolah Data Intelijen	6	1	

Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan			
Kelas 9			
Jabatan	Kls	Jlh	Kls
Analisis Transaksi Keuangan	7	2	
Analisis Perencanaan	7	1	
Analisis Data dan Informasi	7	1	
Analisis Rekening Pemerintah	7	1	
Pengolah Data Intelijen	6	1	

Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis			
Kelas 9			
Jabatan	Kls	Jlh	Kls
Analisis Pengawasan	7	1	
Analisis Data dan Informasi	7	2	
Pengelola Data Persandian	6	1	
Pengelola Tata Naskah	6	1	
Pengolah Data Intelijen	6	1	

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen			
Kelas 9			
Jabatan	Kls	Jlh	Kls
Analisis Sistem Informasi	7	1	
Analisis Data dan Informasi	7	1	
Analisis Forensik Digital	7	1	
Pengelola Tata Naskah	6	1	

Kepala Seksi Penerangan Hukum			
Kelas 9			
Jabatan	Kls	Jlh	Kls
Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7	1	
Analisis Publikasi	7	1	
Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7	1	
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1	
Pranata Fotografi	6	1	

Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Fungsional	31
Pelaksana	34
Total	72

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	2
Jaksa Madya (IV/a)	11	1
Jaksa Muda (III/d)	10	2
Jaksa Pratama (III/c)	9	4
Arsiparis Pelaksana	6	5
Pranata Komputer Penyelia	8	2
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2
Pranata Komputer Pelaksana	6	7
Sandiman Pertama	8	1
Sandiman Penyelia	9	1
Sandiman Pelaksana Lanjutan	8	2
Sandiman Pelaksana	7	2

R3. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM
Kelas 12

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja - Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum - Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya - Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum - Pengelolaan dan penyajian data dan informasi - Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum

Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Hukum	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	2

Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Hukum	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	2

Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Hukum	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	2

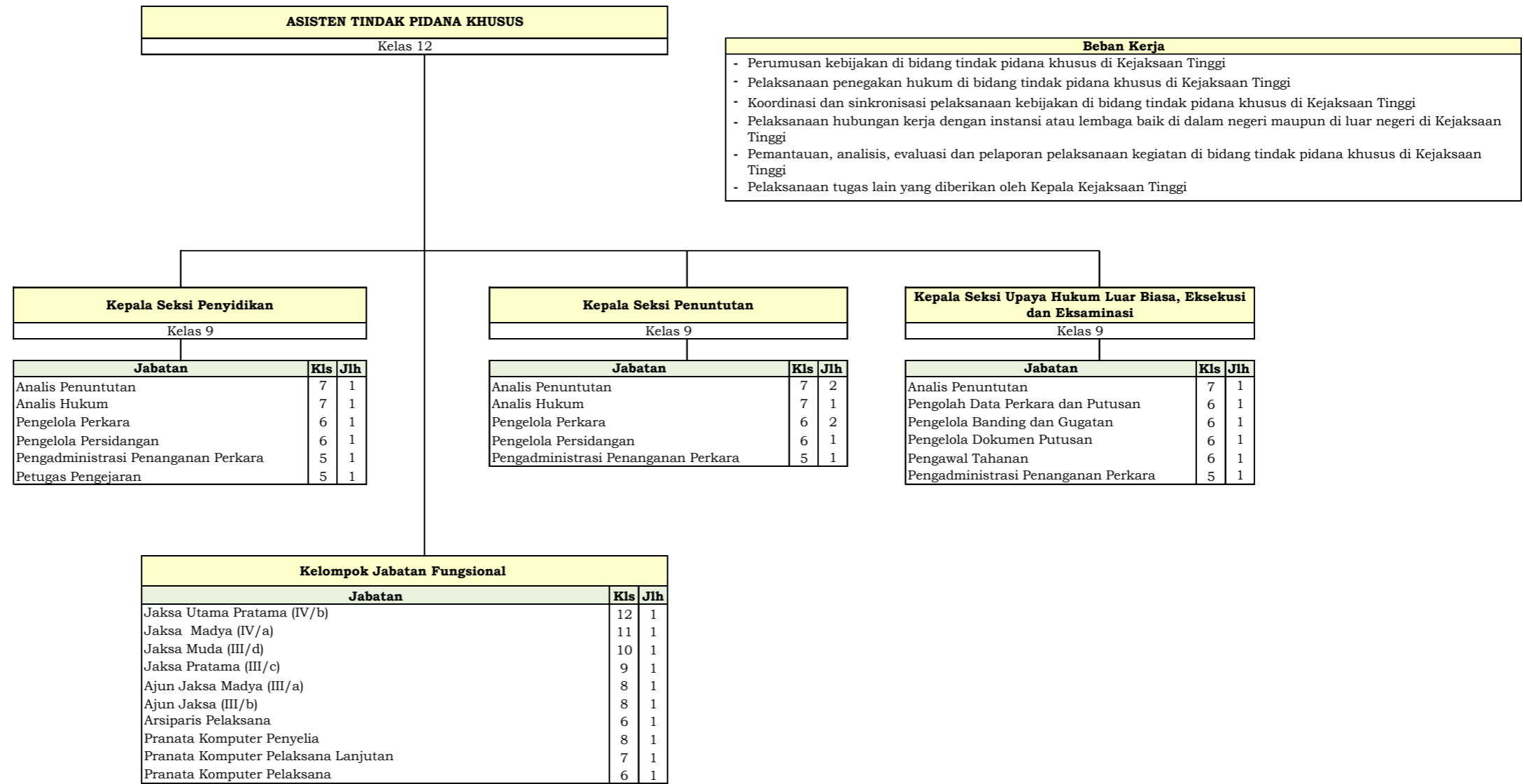
Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Penuntutan	7	1
Analisis Hukum	7	1
Pengelola Perkara	6	1
Pengelola Persidangan	6	1
Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	2

Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	4
Fungsional	15
Pelaksana	24
Total	44

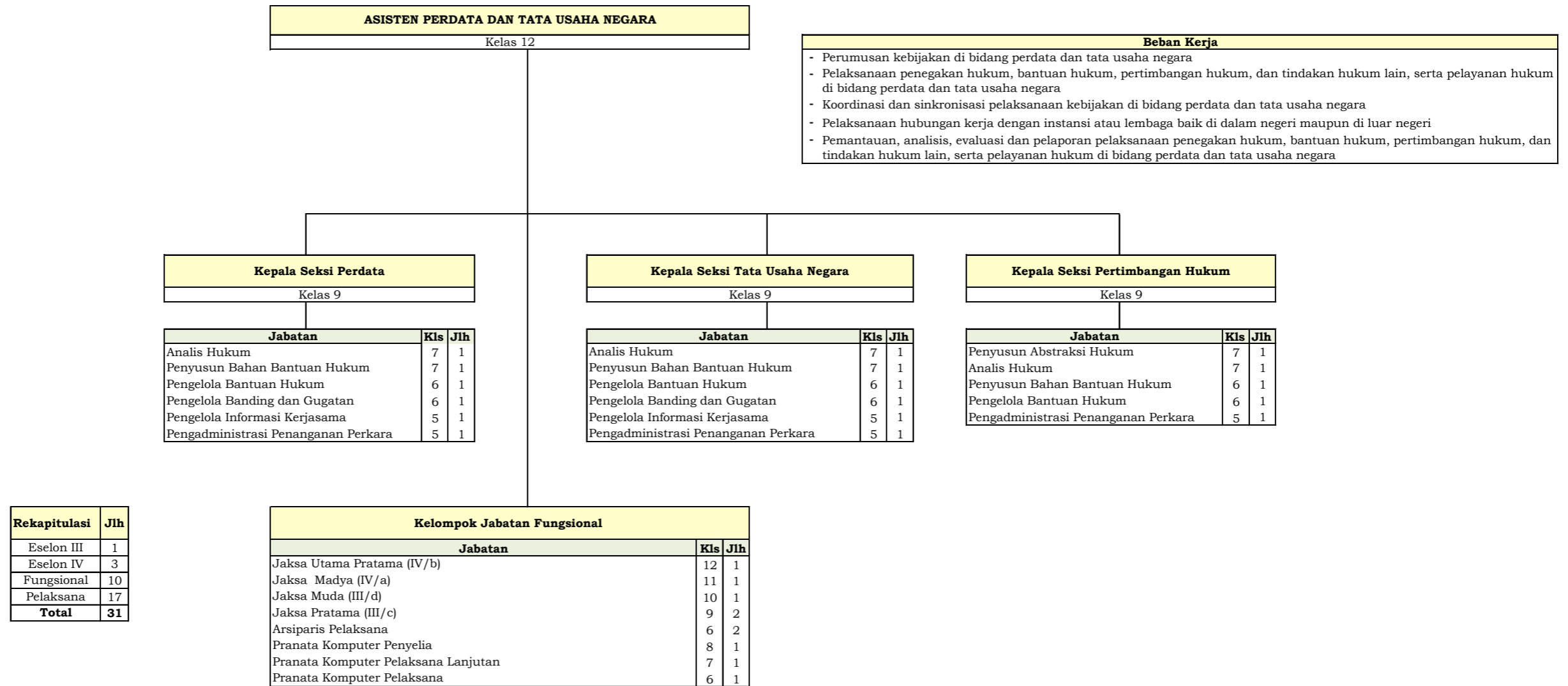
Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	5
Jaksa Muda (III/d)	10	2
Jaksa Pratama (III/c)	9	1
Ajun Jaksa Madya (III/a)	8	1
Ajun Jaksa (III/b)	8	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1

R4. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

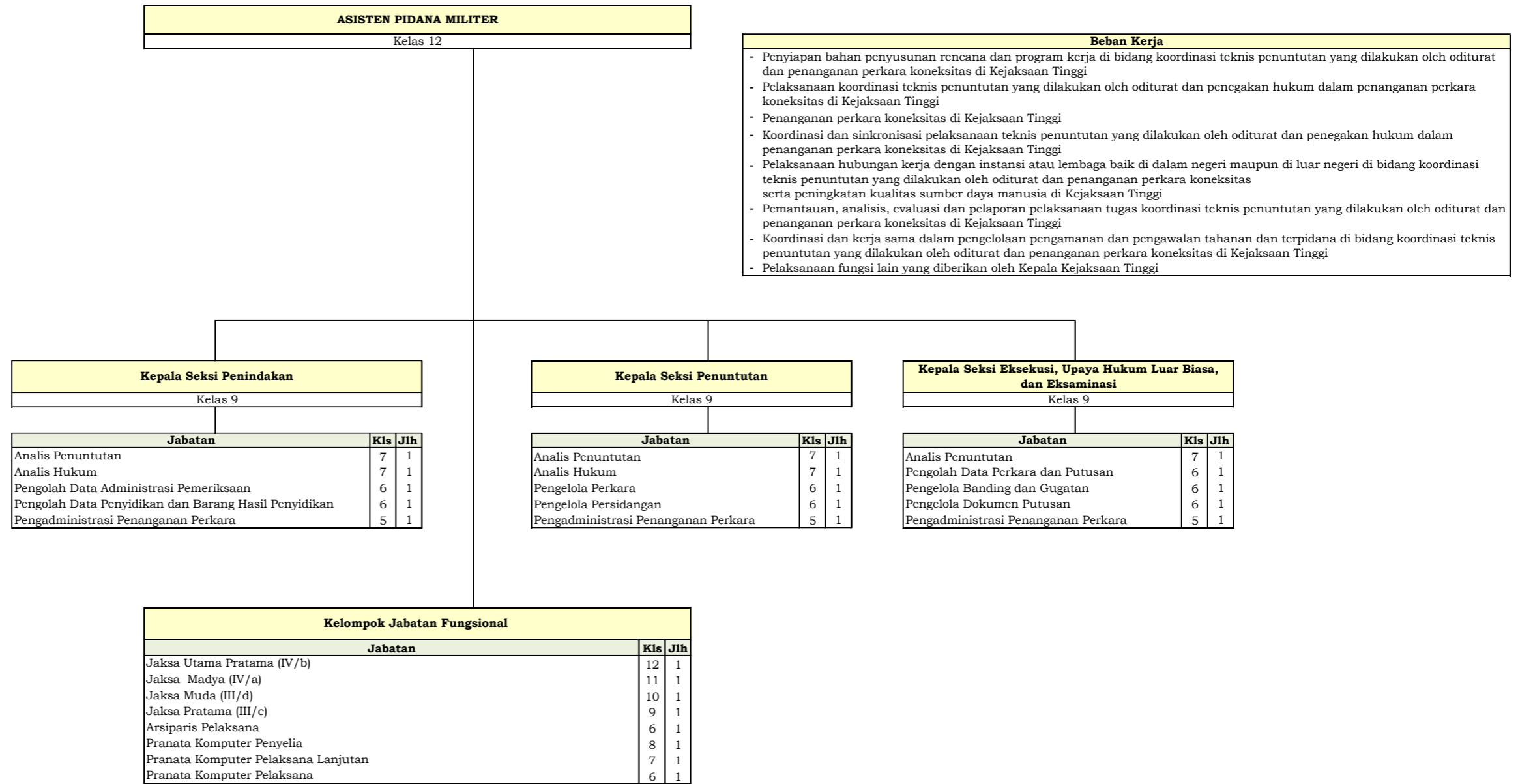


Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	3
Fungsional	10
Pelaksana	19
Total	33

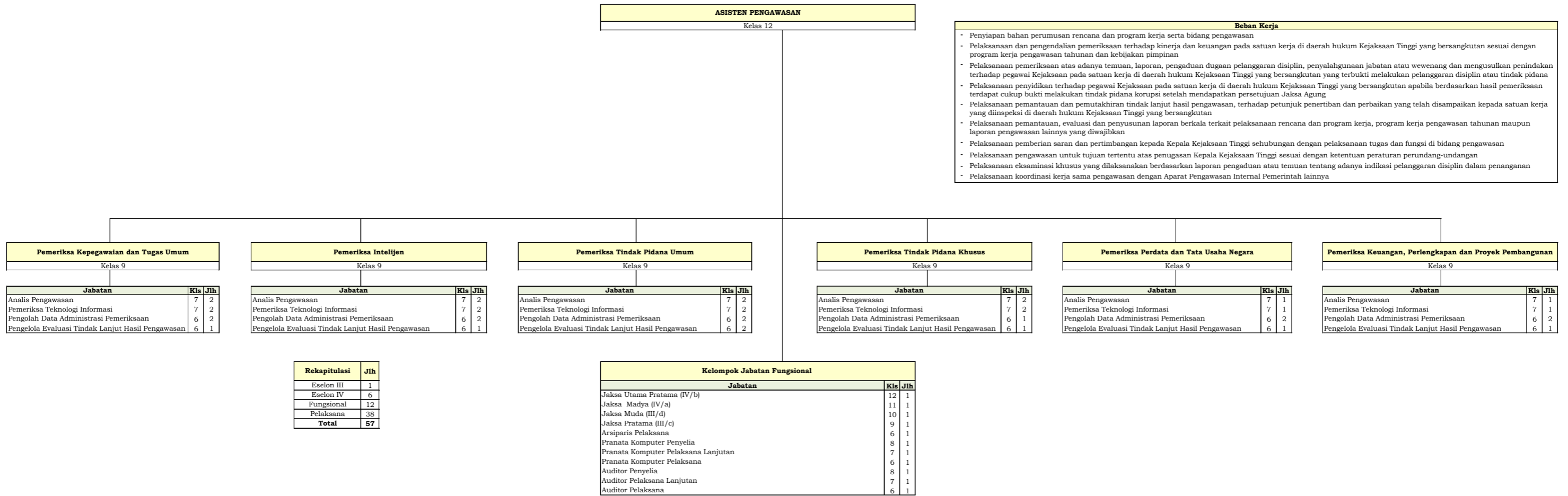
R5. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI



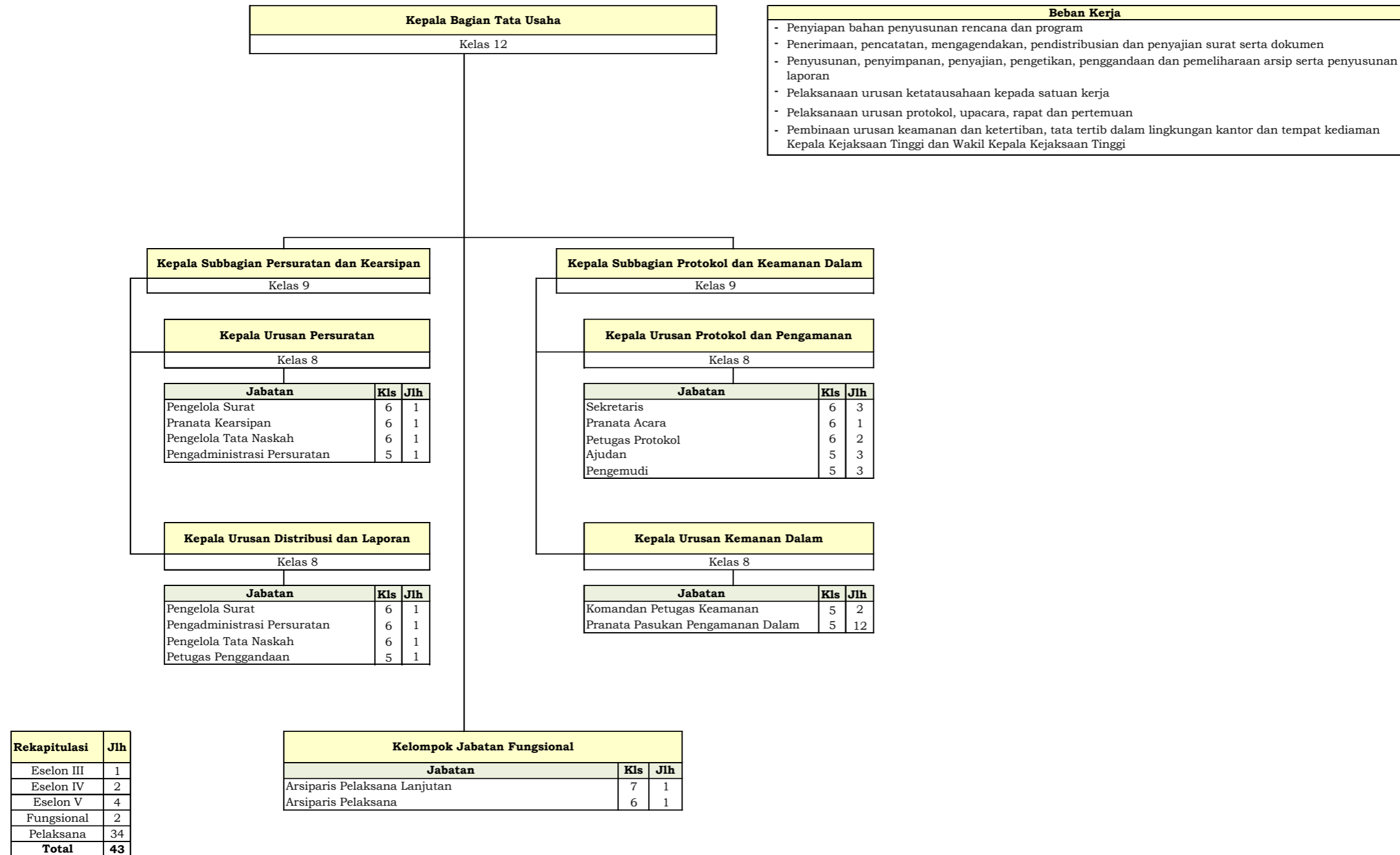
R6. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER KEJAKSAAN TINGGI JAMBI



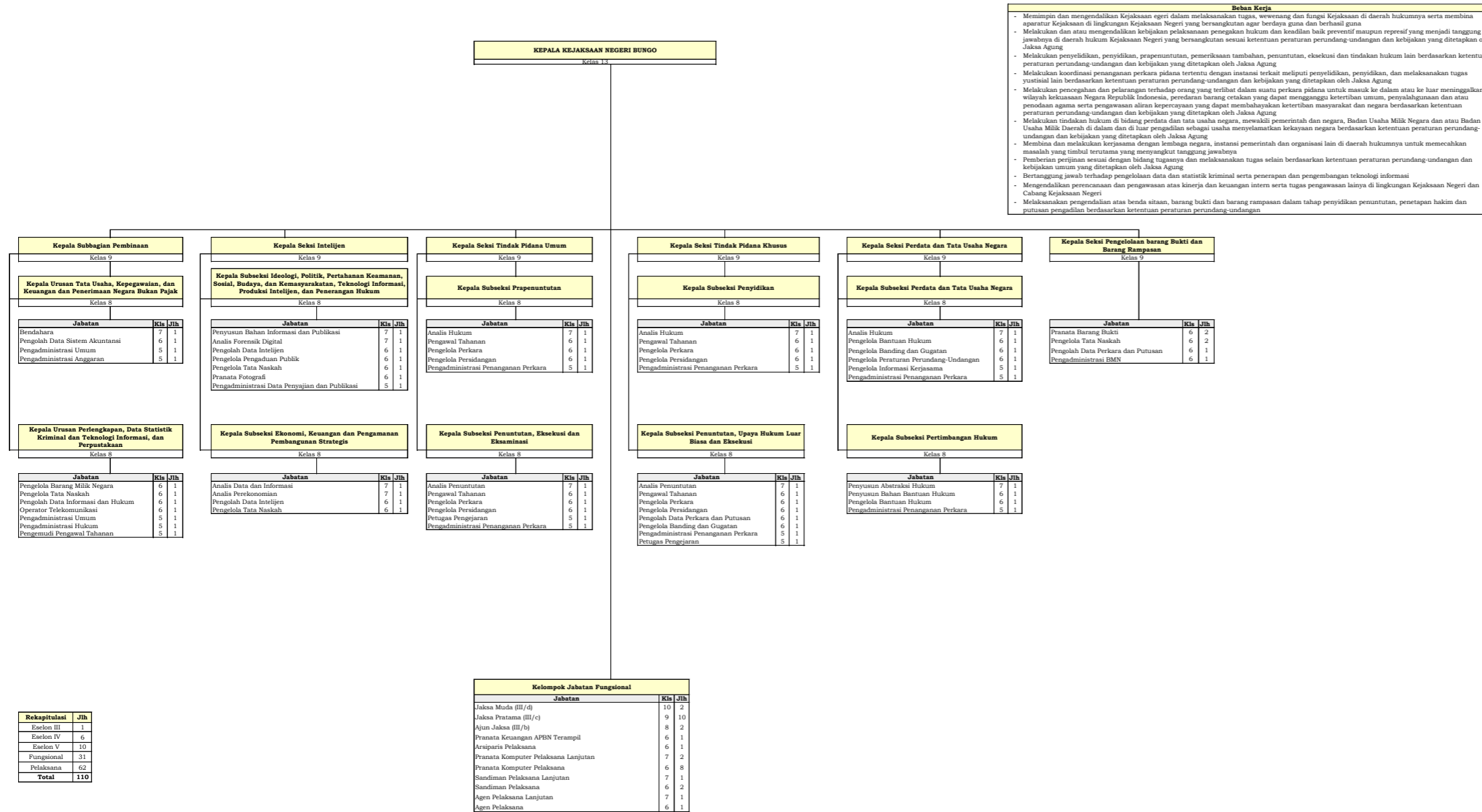
R7. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI JAMBI



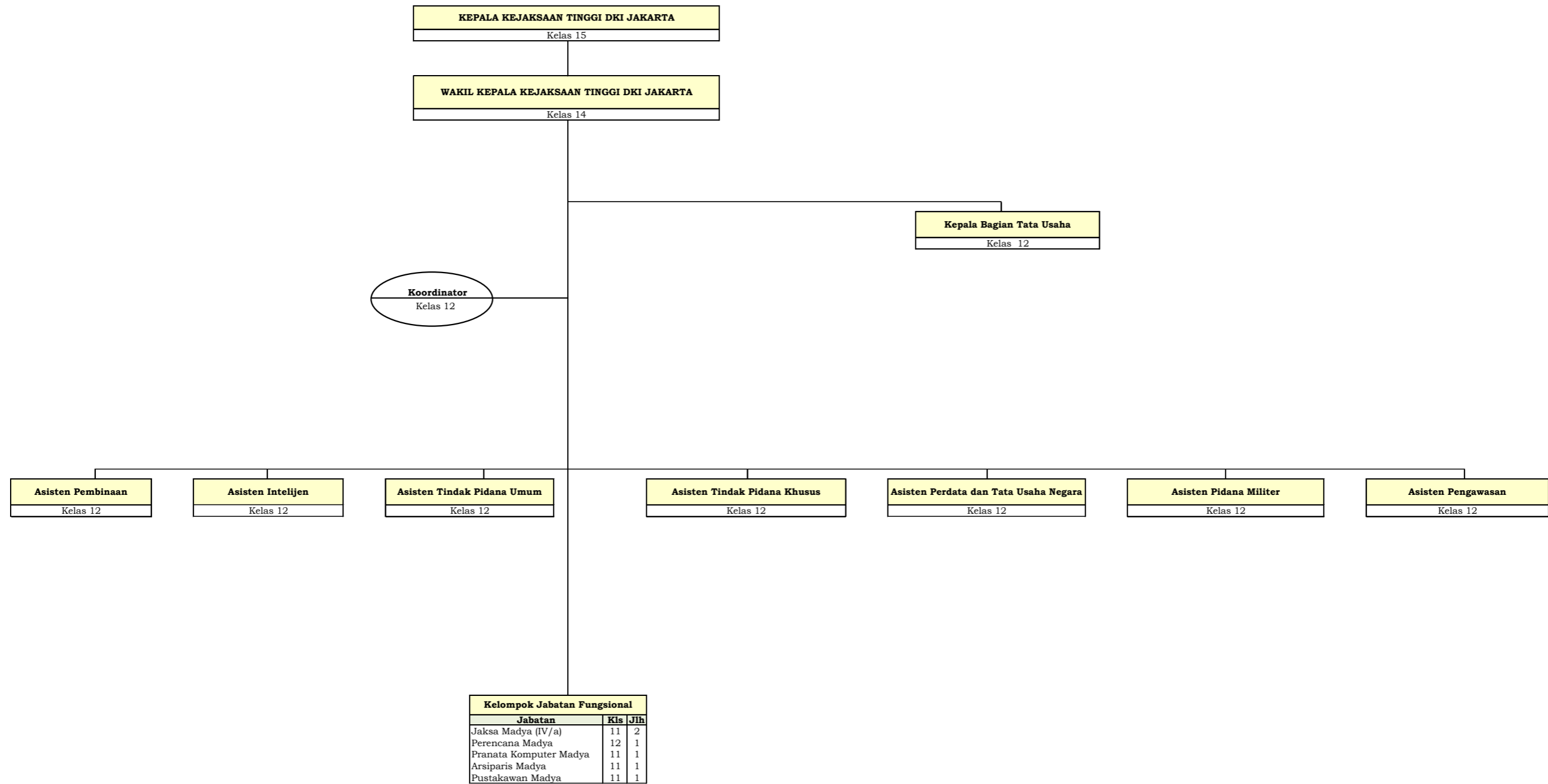
R8. PETA JABATAN PADA BAGIAN TATA USAHA KEJAKSAAN TINGGI



R9. PETA JABATAN PADA KEJAKSAAN NEGERI BUNGO



T. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA



T2. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA

ASISTEN INTELIJEN
Kelas 12

Beban Kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya - Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan - Pelaksanaan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi - Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen - Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidentil - Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis - Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Asisten Bidang Intelijen maupun Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen - Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/ atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya - Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya - Pemeliharaan peralatan intelijen - Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi

Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Politik Hukum dan Keamanan	7	1
Analisis Pemetaan Jaringan Kelompok Radikal Terorisme	7	1
Analisis Pertahanan dan Keamanan	7	1
Analisis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Bina Kehidupan Agama	7	1
Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	1
Analisis Hubungan Antar Lembaga	7	1
Analisis Organisasi Masyarakat	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Transaksi Keuangan	7	1
Analisis Perekonomian	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Analisis Rekening Pemerintah	7	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Pengawasan	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Pengelola Data Persandian	6	1
Pengelola Tata Naskah	6	1
Pengolah Data Intelijen	6	1

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Analisis Sistem Informasi	7	1
Analisis Data dan Informasi	7	1
Analisis Forensik Digital	7	1
Pengelola Tata Naskah	6	1

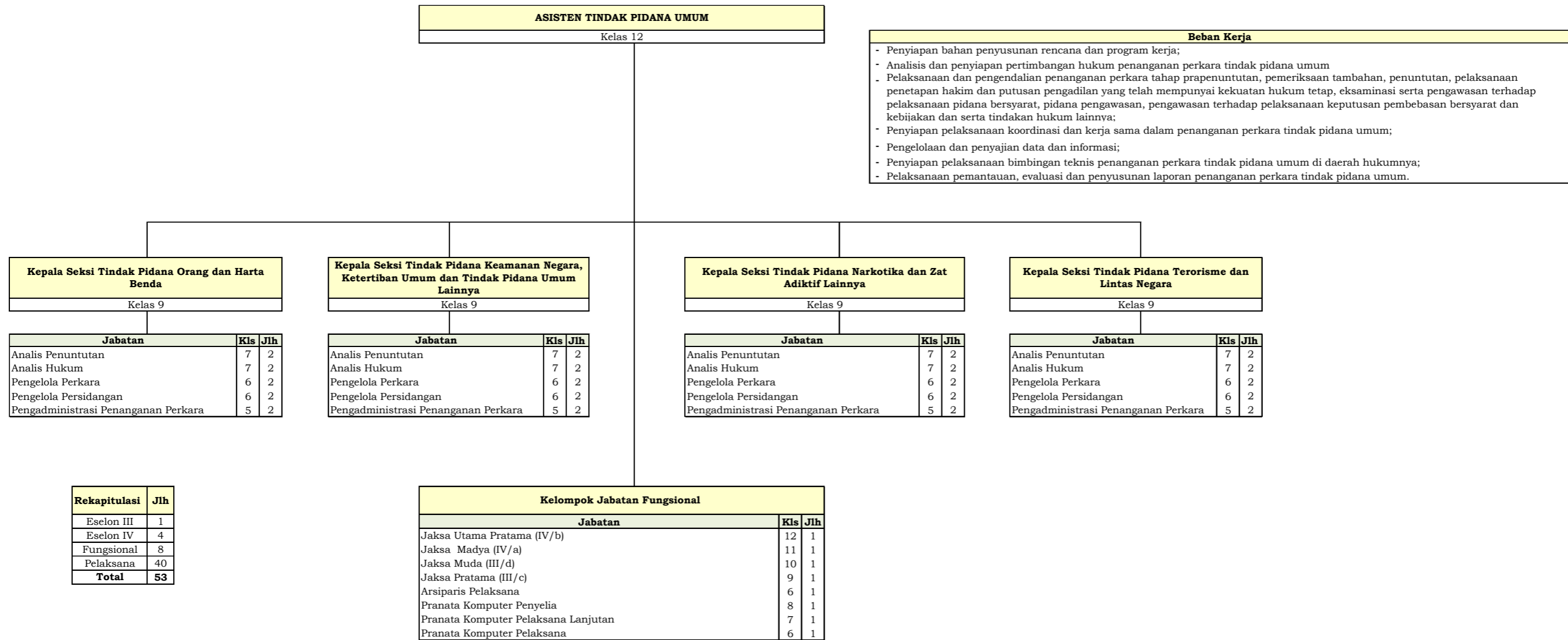
Kepala Seksi Penerangan Hukum
Kelas 9

Jabatan	Kls	Jlh
Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7	1
Analisis Publikasi	7	1
Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7	1
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1
Pranata Fotografi	6	1

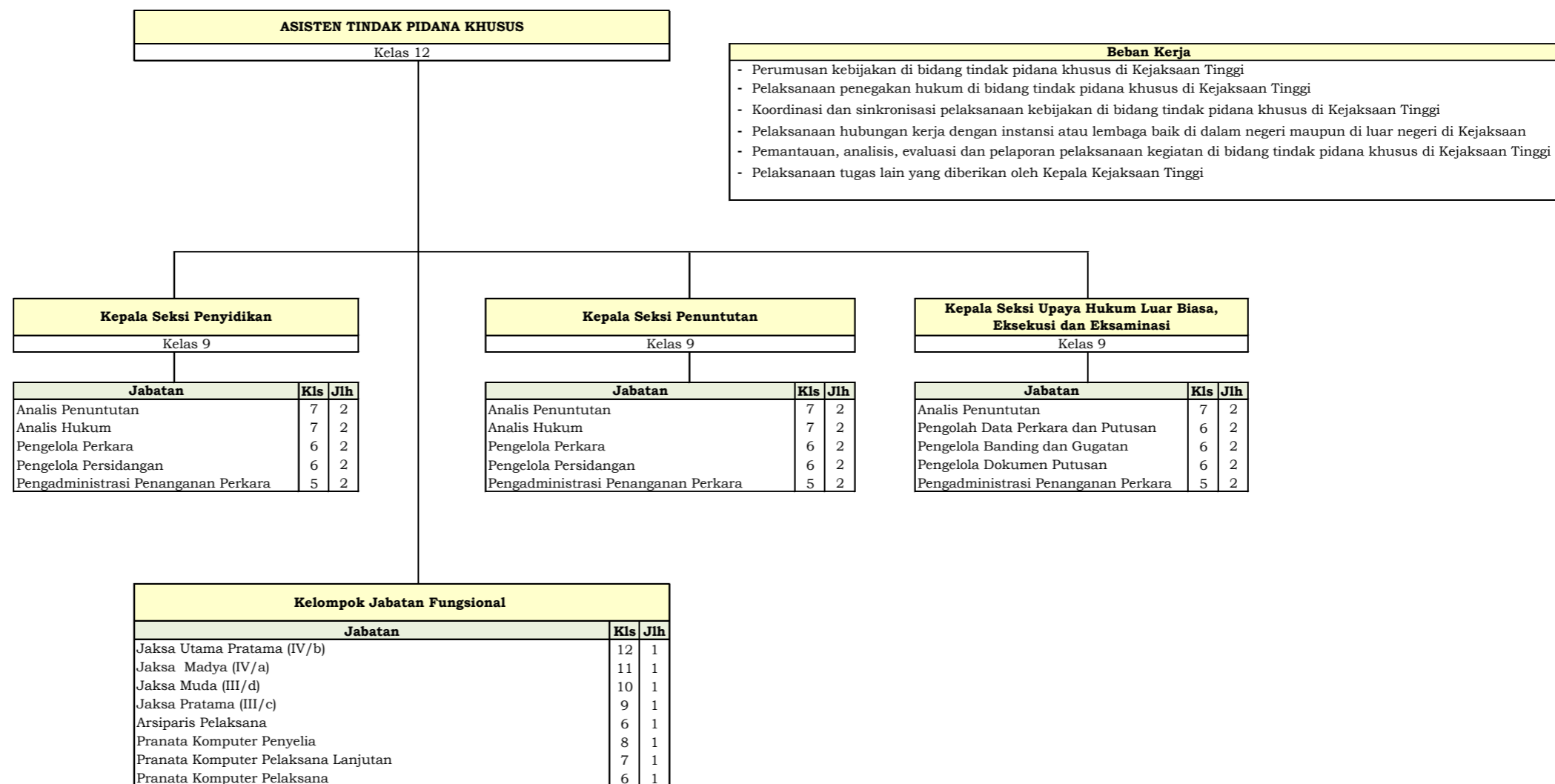
Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	6
Fungsional	12
Pelaksana	29
Total	48

Kelompok Jabatan Fungsional		
Jabatan	Kls	Jlh
Jaksa Utama Pratama (IV/b)	12	1
Jaksa Madya (IV/a)	11	1
Jaksa Muda (III/d)	10	1
Jaksa Pratama (III/c)	9	1
Arsiparis Pelaksana	6	1
Pranata Komputer Penyelia	8	1
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
Pranata Komputer Pelaksana	6	1
Sandiman Pertama	8	1
Sandiman Penyelia	8	1
Sandiman Pelaksana Lanjutan	7	1
Sandiman Pelaksana	6	1

T3. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA

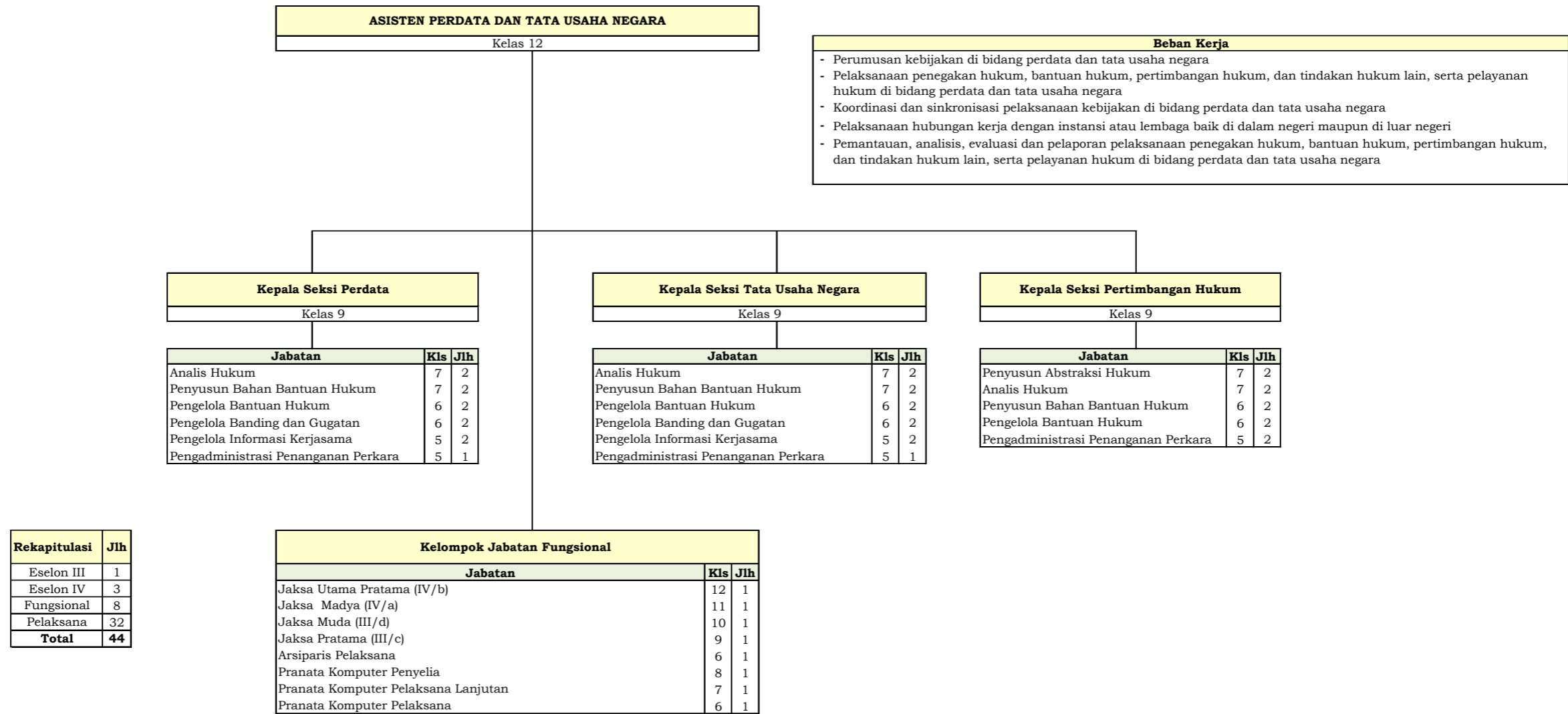


T4. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA

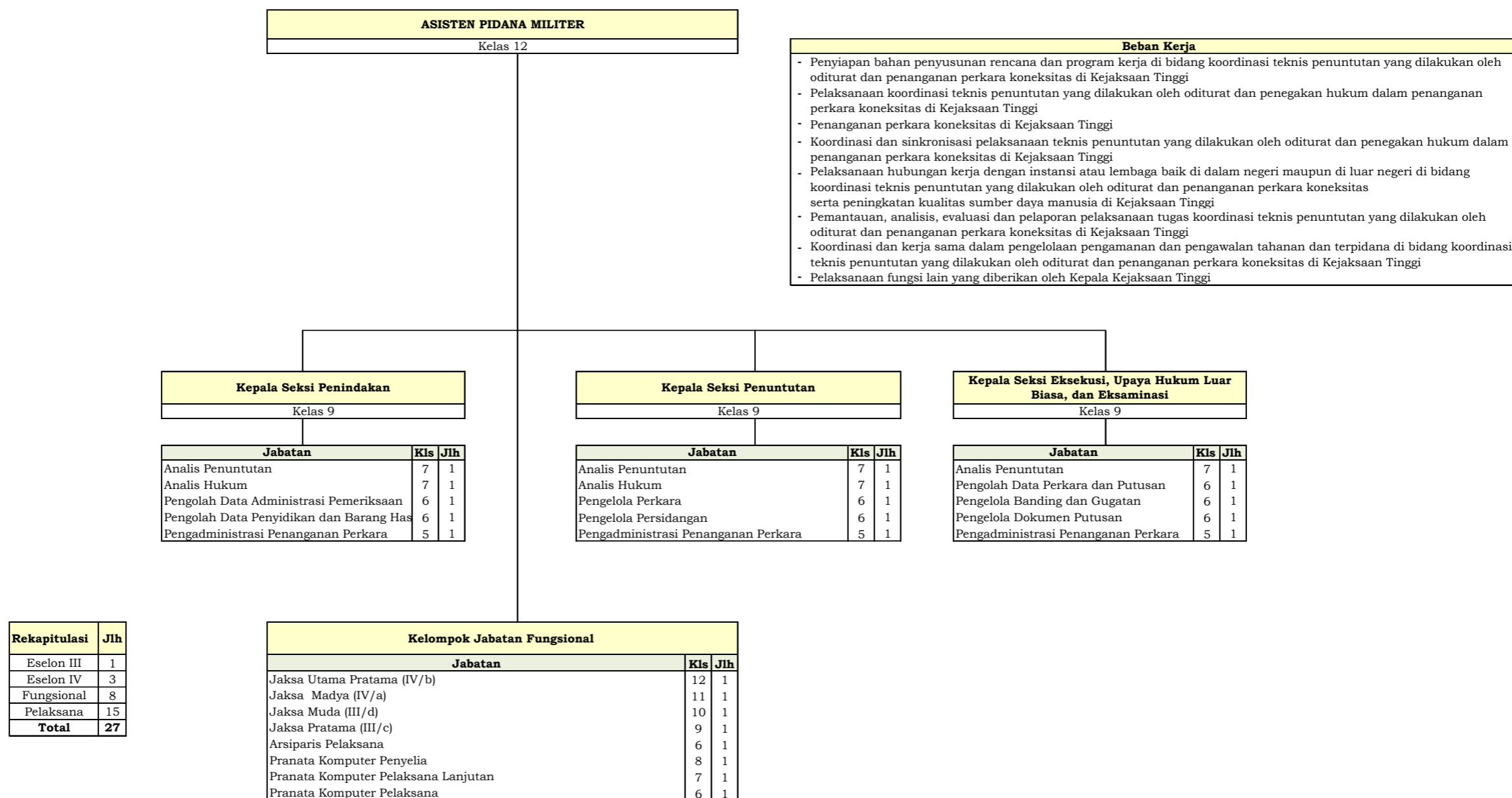


Rekapitulasi	Jlh
Eselon III	1
Eselon IV	3
Fungsional	8
Pelaksana	30
Total	42

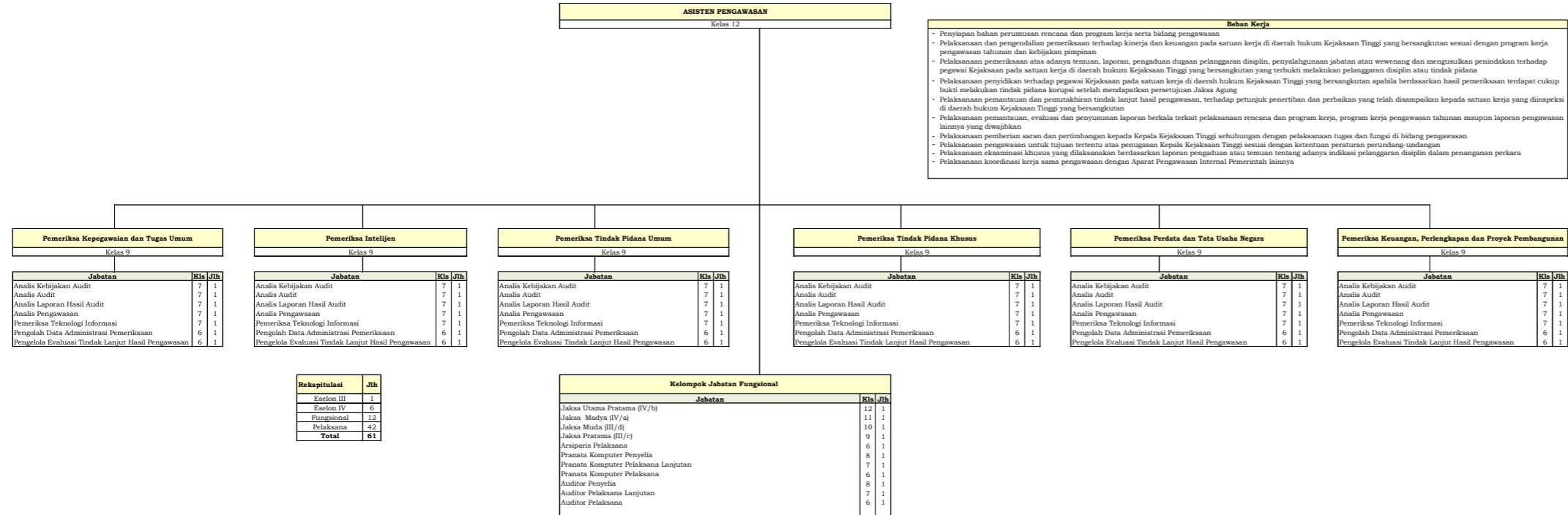
T5. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA



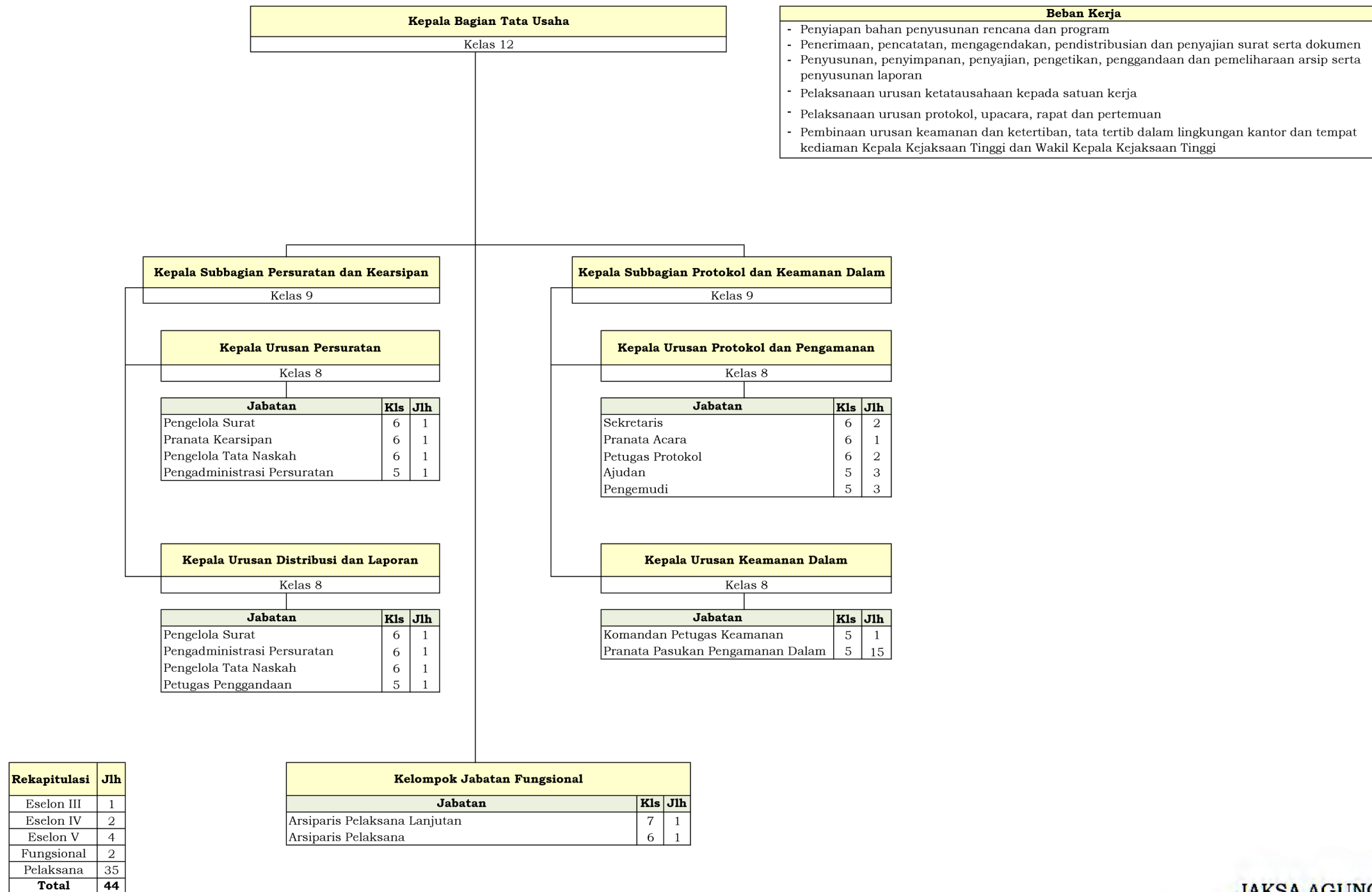
T6. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA



T7. PETA JABATAN PADA ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA



T8. PETA JABATAN PADA BAGIAN TATA USAHA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN